LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ..... **xvii**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **xviii**
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ..... **xx**
NERACA ..... **xxi**
LAPORAN OPERASIONAL ..... **xxiii**
LAPORAN ARUS KAS ..... **xxv**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **xxvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD **7**
2.1 Ekonomi Makro 7
2.1.1 Tingkat Kemiskinan 7
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 8
2.1.3 Indeks Gini *(Gini Ratio)* 9
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 10
2.1.6 Inflasi 11
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Morowali 12
2.2 Kebijakan Keuangan 13
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 13
2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan APBD Penetapan 13
2.2.1.2 Kebijakan Pendapatan APBD Perubahan 13

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 18
2.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah APBD Penetapan 18
2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah APBD Perubahan 20
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 23
2.2.3.1 Kebijakan Pembiayaan APBD Penetapan 23
2.2.3.2 Kebijakan Pembiayaan APBD Perubahan 23
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 23
2.3.1 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Pendapatan Daerah 24
2.3.2 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Belanja Daerah 25
2.3.3 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Pembiayaan Daerah 27
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 28
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 28
3.1.1 Pendapatan Daerah 28
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer 28
3.1.3 Pembiayaan Daerah 28
3.2 Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending* 29
3.3 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 40
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 61
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 61
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 62
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 63
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 64
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset 64
4.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas 64
4.4.1.2 Akuntansi Piutang 65
4.4.1.3 Akuntansi Persediaan 69
4.4.1.4 Akuntansi Investasi 70
4.4.1.5 Akuntansi Dana Bergulir 72
4.4.1.6 Akuntansi Aset Tetap 75

4.4.1.7 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 80
4.4.1.8 Akuntansi Dana Cadangan 83
4.4.1.9 Akuntansi Aset Lainnya 84
4.4.1.10 Akuntansi Properti Investasi 87
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 89
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 94
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 95
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja 96
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer 96
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 98
4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 99
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban 101
4.4.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan 102
4.4.11 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian 104
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 105
5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran 105
5.1.1 Pendapatan Daerah 105
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 107
5.1.1.2 Pendapatan Transfer 114
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 126
5.1.2 Belanja Daerah 127
5.1.2.1 Belanja Operasi 127
5.1.2.2 Belanja Modal 155
5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 160
5.1.2.4 Belanja Transfer 160
5.1.3 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran 162
5.1.4 Pembiayaan 162
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 162
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan 162
5.1.4.3 Pembiayaan Netto 163
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 163

5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 166
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 166
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 166
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan 166
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 167
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 167
5.3 Penjelasan Pos Neraca 170
5.3.1 Aset 170
5.3.1.1 Aset Lancar 170
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 190
5.3.1.3 Aset Tetap 195
5.3.1.4 Aset Lainnya 206
5.3.2 KEWAJIBAN 210
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 210
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 214
5.3.3 EKUITAS 214
5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional 215
5.4.1 Pendapatan - LO 215
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO 216
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO 222
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO 225
5.4.2 Beban 227
5.4.2.1 Beban Pegawai 227
5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa 228
5.4.2.3 Beban Bunga 231
5.4.2.4 Beban Hibah 232
5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial 234
5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang 235
5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 235
5.4.2.8 Beban Bagi Hasil 236
5.4.2.9 Beban Bantuan Keuangan 236

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi 237
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 237
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 238
5.4.6 Pos Luar Biasa 238
5.4.6.1 Beban Luar Biasa- LO 238
5.4.7 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa 238
5.4.8 Surplus/Defisit - LO 238
5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas 239
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 239
5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 240
5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 243
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 243
5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 244
5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 244
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 244
5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 244
5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 244
5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 245
5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 245
5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 246
5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode 246
5.5.6 Saldo Awal Kas 246
5.5.7 Koreksi SILPA 247
5.5.8 Saldo Akhir Kas 247
5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas 249
5.7 Pengungkapan Lainnya atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 251
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN 255
6.1 Kondisi Umum Kabupaten Morowali 255
6.1.1 Aspek Geografis 255
6.1.2 Aspek Demografi 255

6.1.3 Aspek Kesejahteraan 256
6.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 256
6.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 257
6.2 Gambaran Umum Organisasi Kabupaten Morowali 259
6.2.1 Organisasi Perangkat Daerah 259
6.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara 262
BAB VII PENUTUP 263

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali 8
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Morowali 8
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Morowali 8
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali 9
Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Morowali 9
Tabel 2 6 Indeks Pembangunan Manusia 10
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali 11
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali 12
Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 12
Tabel 2.10 Pendapatan APBD Perubahan 14
Tabel 2.11 Pendapatan Pajak Daerah 15
Tabel 2.12 Pendapatan Retribusi Daerah 15
Tabel 2.13 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah 16
Tabel 2.14 Pendapatan Transfer 17
Tabel 3.1 Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 . 28
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2025 29
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2025 33
Tabel 4.1 Kualitas Piutang 69
Tabel 4.2 Nilai Batas Kapitalisasi Per Jenis Aset Tetap 76
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 106
Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah 107
Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah 107
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 109
Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum 109
Tabel 5.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan 109
Tabel 5.7 Retribusi Jasa Usaha 110
Tabel 5.8 Retribusi Perizinan Tertentu 111
Tabel 5.9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 112
Tabel 5.10 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 113

Tabel 5.11 Pendapatan BLUD 113
Tabel 5.12 Pendapatan Transfer 114
Tabel 5.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 115
Tabel 5. 14 Dana Perimbangan 115
Tabel 5.15 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 116
Tabel 5.16 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 116
Tabel 5.17 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik 117
Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik 118
Tabel 5.19 Rincian Dana Bagi Hasil 119
Tabel 5.20 Rincian Dana Alokasi Umum 120
Tabel 5.21 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik 121
Tabel 5.22 Rincian Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik 122
Tabel 5.23 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik 123
Tabel 5.24 Rincian Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik 124
Tabel 5.25 Dana Bagi Hasil Pajak 125
Tabel 5.26 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP 126
Tabel 5.27 Belanja Daerah 127
Tabel 5.28 Belanja Operasi 127
Tabel 5.29 Belanja Pegawai 129
Tabel 5.30 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 130
Tabel 5.31 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 130
Tabel 5.32 Belanja Tambahan Penghasilan ASN per OPD 131
Tabel 5.33 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 132
Tabel 5.34 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 133
Tabel 5.35 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 134
Tabel 5.36 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 135
Tabel 5.37 Belanja Barang dan Jasa 135
Tabel 5.38 Belanja Barang 136
Tabel 5.39 Belanja Barang Pakai Habis 136
Tabel 5.40 Belanja Jasa 138
Tabel 5.41 Belanja Jasa Kantor 139

Tabel 5.42 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 141
Tabel 5.43 Belanja Sewa Tanah 142
Tabel 5.44 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 142
Tabel 5.45 Belanja Sewa Gedung dan Bagunan 143
Tabel 5.46 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 143
Tabel 5.47 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 144
Tabel 5.48 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 145
Tabel 5.49 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 145
Tabel 5.50 Belanja Pemeliharaan 146
Tabel 5.51 Belanja Perjalanan Dinas 147
Tabel 5.52 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per OPD 150
Tabel 5.53 Belanja Hibah 151
Tabel 5.54 Belanja Hibah Per OPD 152
Tabel 5.55 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 153
Tabel 5.56 Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 153
Tabel 5.57 Belanja Bantuan Sosial 154
Tabel 5.58 Belanja Modal 155
Tabel 5.59 Belanja Modal Tanah 155
Tabel 5.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156
Tabel 5.61 Belanja Gedung dan Bangunan 158
Tabel 5.62 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 158
Tabel 5.63 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 159
Tabel 5.64 Belanja Modal Aset Lainnya 160
Tabel 5.65 Belanja Bagi Hasil 161
Tabel 5.66 Pembiayaan 162
Tabel 5.67 Pengeluaran Pembiayaan 163
Tabel 5.68 Pembiayaan Netto 163
Tabel 5.69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 164
Tabel 5.70 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 164

Tabel 5. 71 Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Bebas 164
Tabel 5.72 Saldo Anggaran Lebih Awal 166
Tabel 5.73 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan 166
Tabel 5.74 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 167
Tabel 5.75 Saldo Kas 167
Tabel 5.76 Saldo Anggaran Lebih Akhir 168
Tabel 5.77 Sisa Dana yang dibatasi Penggunaannya 169
Tabel 5.78 Rincian Aset 170
Tabel 5.79 Rincian Aset Lancar 170
Tabel 5.80 Rincian Kas 171
Tabel 5.81 Rincian Kas di Kas Daerah 172
Tabel 5.82 Selisih Saldo Kas di Kas Daerah Akibat Kesalahan Transaksi Bank 173
Tabel 5.83 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 174
Tabel 5.84 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 174
Tabel 5.85 Kas di Bendahara Pengeluaran Per OPD 175
Tabel 5.86 Rincian Kas di BLUD 175
Tabel 5.87 Kas di Bendahara FKTP 176
Tabel 5.88 Rincian Kas Lainnya 177
Tabel 5.89 Kas Lainnya Per OPD 178
Tabel 5.90 Kas Dana BOSP 179
Tabel 5.91 Kas Dana BOK Puskesmas 180
Tabel 5.92 Piutang 180
Tabel 5.93 Piutang Pajak Daerah 181
Tabel 5.94 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 181
Tabel 5.95 Piutang Retribusi Daerah 182
Tabel 5.96 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 182
Tabel 5.97 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 183
Tabel 5.98 Piutang BLUD 184
Tabel 5.99 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 185
Tabel 5.100 Piutang Transfer Antar Daerah 185
Tabel 5.101 Piutang Lainnya 185

Tabel 5.102 Penyisihan Piutang Lainnya 187
Tabel 5.103 Beban dibayar dimuka 187
Tabel 5.104 Persediaan Per OPD 188
Tabel 5.105 Saldo Persediaan Per Belanja 189
Tabel 5.106 Daftar Persediaan Kedaluwarsa 190
Tabel 5.107 Rincian Investasi Jangka Panjang 190
Tabel 5.108 Investasi Non Permanen 191
Tabel 5.109 Investasi Permanen 191
Tabel 5.110 Rincian Penyertaan Modal pada PT BPD Sulawesi Tengah 192
Tabel 5.111 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Morowali 193
Tabel 5.112 Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali 194
Tabel 5.113 Aset Tetap 195
Tabel 5.114 Rekapitulasi Aset Tetap Tanah yang Tidak Dilengkapi Bukti Penguasaan 197
Tabel 5.115 Daftar Aset Tetap Tanah dalam Sengketa 197
Tabel 5.116 Konstruksi Dalam Pengerjaan 205
Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 206
Tabel 5.118 Aset Lainnya 206
Tabel 5.119 Aset Tidak berwujud 207
Tabel 5.120 Aset Lain-lain 208
Tabel 5.121 Kewajiban Jangka Pendek 211
Tabel 5.122 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga 211
Tabel 5.123 Utang PFK Bendahara Pengeluaran Per OPD 212
Tabel 5.124 Pendapatan Diterima dimuka 213
Tabel 5.125 Utang Belanja 213
Tabel 5.126 Rincian Laporan Operasional 215
Tabel 5.127 Rincian Pendapatan – LO 215
Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO 216
Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 216
Tabel 5.130 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA 217
Tabel 5.131 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 218
Tabel 5.132 Retribusi Jasa Umum – LO 219

Tabel 5.133 Retribusi Jasa Usaha – LO 219
Tabel 5.134 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LO 220
Tabel 5.135 Perbandingan Retribusi Daerah – LO dan Retribusi Daerah – LRA 220
Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 220
Tabel 5.137 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA 221
Tabel 5.138 Lain-lain PAD yang Sah – LO 221
Tabel 5.139 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA .. 222
Tabel 5.140 Pendapatan Transfer – LO 223
Tabel 5. 141Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 223
Tabel 5.142 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 223
Tabel 5.143 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO 224
Tabel 5.144 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA 225
Tabel 5.145 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 225
Tabel 5.146 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA 226
Tabel 5.147 Rincian Beban 227
Tabel 5.148 Beban Pegawai 227
Tabel 5.149 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai 228
Tabel 5.150 Rincian Beban Barang dan Jasa 228
Tabel 5.151 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa 230
Tabel 5.152 Beban Bunga 231
Tabel 5.153 Perbandingan Beban Bunga dan Belanja Bunga 231
Tabel 5.154 Beban Hibah 232
Tabel 5.155 Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah 233
Tabel 5.156 Beban Sosial 234
Tabel 5.157 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial 234
Tabel 5.158 Beban Penyisihan Piutang 235
Tabel 5.159 Beban Penyusutan dan Amortisasi 235
Tabel 5.160 Rincian Beban Bagi Hasil 236

Tabel 5.161 Perbandingan Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil 236
Tabel 5.162 Rincian Beban Bantuan Keuangan 236
Tabel 5.163 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan 237
Tabel 5.164 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi 237
Tabel 5.165 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 238
Tabel 5.166 Perbandingan Arus Kas Tahun 2025 dan 2024 239
Tabel 5.167 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 239
Tabel 5.168 Rincian Pajak Daerah 240
Tabel 5.169 Rincian Retribusi Daerah 240
Tabel 5.170 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 241
Tabel 5.171 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 242
Tabel 5.172 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah 242
Tabel 5.173 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 243
Tabel 5.174 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 243
Tabel 5.175 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 244
Tabel 5.176 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 244
Tabel 5.177 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 245
Tabel 5.178 Rekapitulasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 245
Tabel 5.179 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 245
Tabel 5.180 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 246
Tabel 5.181 Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas selama Periode 246
Tabel 5.182 Saldo Awal Kas 246
Tabel 5.183 Koreksi SILPA 247
Tabel 5.184 Saldo Akhir Kas 247
Tabel 5.185 Rekapitulasi Rincian Koreksi Ekuitas 249
Tabel 5.186 Program Tugas Pembantuan 253
Tabel 5.187 Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah s.d Semester I Tahun 2025 253
Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2025 256
Tabel 6.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2021 – 2025 256
Tabel 6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 – 2025 ... 257

Tabel 6.4 Perbandingan Penurunan Persentase Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali 258

Tabel 6.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali Tahun 2023-2025 258

Tabel 6.6 Organisasi Perangkat Daerah 260

Tabel 6.7 Jumlah Aparatur Sipil Negara 262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 106
Gambar 2 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 128
Gambar 3 Koreksi Ekuitas 250

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Alokasi dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Lampiran 2	Daftar Transaksi Kesalahan Bank
Lampiran 3	Daftar Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kas Dana BOS
Lampiran 4	Daftar Piutang Pajak Hotel
Lampiran 5	Daftar Piutang Pajak Restoran
Lampiran 6	Daftar Piutang Pajak Hiburan
Lampiran 7	Daftar Piutang Pajak Reklame
Lampiran 8	Daftar Piutang Pajak Penerangan Jalan
Lampiran 9	Daftar Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran 10	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lampiran 11	Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)
Lampiran 12	Daftar Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lampiran 13	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Lampiran 14	Daftar Piutang Denda Pajak
Lampiran 15	Daftar Piutang BLUD
Lampiran 16	Daftar Piutang Hirkop/Dum Kendaraan
Lampiran 17	Daftar Piutang SKTJM/TPTGR
Lampiran 18	Daftar Piutang Transfer DBH Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran 19	Daftar Saldo Stock Opname Persediaan
Lampiran 20	Daftar Rincian Dana Bergulir
Lampiran 21	Daftar Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah Nilai Aset Tetap
Lampiran 22	Daftar Koreksi Belanja Modal yang tidak menambah Nilai Aset Tetap
Lampiran 23	Daftar Reklasifikasi antara Aset Tetap
Lampiran 24	Daftar Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 25	Daftar Mutasi Hibah Aset Tetap
Lampiran 26	Daftar Mutasi Aset Tetap antara OPD
Lampiran 27	Daftar Amortisasi Aset Tak Berwujud
Lampiran 28	Daftar Register Aset Tetap Tanah Tidak Dilengkapi Bukti Penguasaan
Lampiran 29	Daftar Saldo Utang PFK Dana BOS
Lampiran 30	Daftar Utang Belanja

BUPATI MOROWALI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bungku, 25 Mei 2026

BUPATI MOROWALI

IKSAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	589.684.302.035,00	826.527.304.149,14	140,16	640.450.562.137,34
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	255.864.000.000,00	286.024.019.117,00	111,79	288.907.551.817,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.400.000.000,00	5.048.125.362,00	210,34	4.490.472.491,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	65.860.000.000,00	107.685.958.814,15	163,51	107.017.287.417,07
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)**		**913.808.302.035,00**	**1.225.285.407.442,29**	**134,09**	**1.040.865.873.862,41**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1,a	0,00	0,00	0,00	1.721.030.803.555,00
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1,b	730.422.460.000,00	646.196.884.589,00	88,47	0,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1,c	505.400.139.000,00	508.505.981.719,00	100,61	0,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1,d	208.943.949.000,00	207.912.548.846,00	99,51	0,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.1,e	102.095.808.000,00	101.025.437.648,00	98,95	106.697.472.900,00
15	Insenstif Fiskal	5.1.1.2.1,f	0,00	5.701.860.000,00	0,00	11.818.826.000,00
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s.d. 15)**		**1.546.862.356.000,00**	**1.469.342.712.802,00**	**94,99**	**1.839.547.102.455,00**
17	Pendapatan Transfer antar Daerah	5.1.1.2.2				
18	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2,a	73.319.488.204,00	57.132.664.049,51	77,92	76.825.833.923,00
19	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2,b	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (18 s.d. 19)**		**73.419.488.204,00**	**57.232.664.049,51**	**77,95**	**76.925.833.923,00**
22	**Jumlah Pendapatan Transfer (16+20)**		**1.620.281.844.204,00**	**1.526.575.376.851,51**	**94,22**	**1.916.472.936.378,00**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3				
24	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		11.115.816.759,00	10.484.727.465,00	94,32	9.032.755.284,00
25	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (24)**		**11.115.816.759,00**	**10.484.727.465,00**	**94,32**	**9.032.755.284,00**
26	**JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)**		**2.545.205.962.998,00**	**2.762.345.511.758,80**	**108,53**	**2.966.371.565.524,41**
27	**BELANJA**	5.1.2				
28	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	813.770.813.917,78	664.172.521.021,00	81,62	534.692.045.847,00
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.089.043.917.397,46	859.081.698.144,37	78,88	783.997.356.734,42
31	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	1.664.000.000,00	892.157.393,44	53,62	1.146.186.220,34
32	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	90.678.271.790,00	77.443.769.183,00	85,40	104.231.793.598,00
33	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	39.510.350.890,00	15.775.800.000,00	39,93	45.039.200.000,00
34	**Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 33)**		**2.034.667.353.995,24**	**1.617.365.945.741,81**	**79,49**	**1.469.106.582.399,76**

NO.	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
35	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
36	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	46.997.982.885,00	43.576.372.121,00	92,72	54.200.960.137,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	179.024.912.460,16	153.900.472.699,00	85,97	175.235.443.624,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	460.480.172.396,84	412.972.340.440,43	89,68	236.686.171.253,25
39	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	363.926.992.219,61	236.774.789.690,00	65,06	200.750.115.539,81
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.946.767.940,00	3.918.571.840,00	99,29	2.348.930.604,00
41	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	127.650.000,00	127.510.000,00	99,89	570.310.500,00
42	**Jumlah Belanja Modal (36 s.d. 31)**		**1.054.504.477.901,61**	**851.270.056.790,43**	**80,73**	**669.791.931.658,06**
43	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga		2.000.000.000,00	468.222.000,00	23,41	0,00
45	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (44)**		**2.000.000.000,00**	**468.222.000,00**	**23,41**	**0,00**
46	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4				
47	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	99.554.830.204,00	92.204.508.112,00	92,62	50.096.228.277,00
48	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	212.028.092.000,00	210.100.534.648,00	99,09	214.638.024.613,00
49	**Jumlah Belanja Transfer (47 s.d. 48)**		**311.582.922.204,00**	**302.305.042.760,00**	**97,02**	**264.734.252.890,00**
50	**JUMLAH BELANJA (34+42+45+49)**		**3.402.754.754.100,85**	**2.771.409.267.292,24**	**81,45**	**2.403.632.766.947,82**
51	**SURPLUS/DEFISIT (24-48)**		**(857.548.791.102,85)**	**(9.063.755.533,44)**	**1,06**	**562.738.798.576,59**
52	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
53	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1				
54	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		872.611.409.652,85	872.610.425.254,85	99,99	312.648.749.009,60
55	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54)**		**872.611.409.652,85**	**872.610.425.254,85**	**99,99**	**312.648.749.009,60**
56	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2				
57	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
58	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.2	1.562.618.550,00	1.270.966.733,67	81,34	1.270.966.733,34
59	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (57 s.d. 58)**		**15.062.618.550,00**	**14.770.966.733,67**	**98,06**	**2.770.966.733,34**
60	**PEMBIAYAAN NETTO (55-59)**	5.1.4.3	**857.548.791.102,85**	**857.839.458.521,18**	**100,03**	**309.877.782.276,26**
61	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (51+60)**	5.1.5	**0,00**	**848.775.702.987,74**	**0,00**	**872.616.580.852,85**

BUPATI MOROWALI

IKSAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	872.616.580.852,85	312.890.783.301,60
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	872.610.425.254,85	312.648.749.009,60
3	**Sub Total (1-2)**		**6.155.598,00**	**242.034.292,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	848.775.702.987,74	872.616.580.852,85
5	**Sub Total (3+4)**		**848.781.858.585,74**	**872.858.615.144,85**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(6.155.598,00)	(242.180.943,00)
7	Lain-lain		0,00	146.651,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	5.2.5	**848.775.702.987,74**	**872.616.580.852,85**

BUPATI MOROWALI

IKSAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	**ASET**	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1,a	831.990.885.017,24	856.240.575.225,40
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1,b	48.376.000,00	228.826.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1,c	1.969.699.736,00	2.826.257,56
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.1,d	13.505.843.351,13	15.315.749.934,52
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1,e	214.154.533,00	86.626.607,00
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.1,f	8.415.981.761,00	13.545.601.068,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1,g	70.213.266,08	23.080.702,08
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1,h	1.212.455.992,00	1.551.162.096,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2,a	68.311.618.282,18	62.560.275.429,18
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2,b	447.795.000,00	447.795.000,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2,c	11.196.394.406,84	17.010.608.857,84
14	Piutang Transfer antar Daerah	5.3.1.1.2,d	27.930.289.725,00	18.188.731.822,00
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.2,e	4.022.154.399,00	4.024.654.399,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2,a-e	(23.620.901.827,12)	(22.499.096.801,28)
17	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	75.000.000,00	1.166.454.475,27
18	Persediaan	5.3.1.1.4	29.379.728.580,38	24.691.997.588,12
19	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d. 18)**		**975.169.688.222,73**	**992.585.868.660,69**
20	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.1.2		
21	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
22	Dana Bergulir	5.3.1.2.1	310.000.000,00	310.000.000,00
23	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)
24	**Jumlah Investasi Non Permanen (22 s.d. 23)**		**0,00**	**0,00**
25	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2,a-d	51.398.035.121,95	40.362.843.256,95
27	**Jumlah Investasi Permanen (26)**		**51.398.035.121,95**	**40.362.843.256,95**
28	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24+27)**		**51.398.035.121,95**	**40.362.843.256,95**
29	**ASET TETAP**	5.3.1.3		
30	Tanah	5.3.1.3.1	545.387.700.209,27	344.578.403.455,27
31	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	809.443.344.327,87	665.943.340.066,08
32	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.619.573.039.300,84	1.357.998.675.253,09
33	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.247.568.005.264,29	2.057.483.415.032,13
34	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	27.773.012.183,00	24.961.478.183,00
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	76.894.959.746,20	166.754.939.562,58
36	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.628.894.753.771,03)	(1.417.883.062.752,41)
37	**JUMLAH ASET TETAP (30 s.d. 36)**		**3.697.745.307.260,44**	**3.199.837.188.799,74**
38	**DANA CADANGAN**			
39	Dana Cadangan		0,00	0,00
40	**JUMLAH DANA CADANGAN (39)**		**0,00**	**0,00**
41	**ASET LAINNYA**	5.3.1.4		
42	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.1	4.171.573.114,00	4.044.063.114,00
43	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.2	367.951.822.431,02	190.121.356.477,52
44	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(2.966.230.263,99)	(2.621.446.104,00)
45	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.3	0,00	60.394.436.000,00
46	**JUMLAH ASET LAINNYA (42 s.d. 45)**		**369.157.165.281,03**	**251.938.409.487,52**
47	**JUMLAH ASET (19+28+37+40+46)**		**5.093.470.195.886,15**	**4.484.724.310.204,90**
48	**KEWAJIBAN**	5.3.2		
49	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.2.1		
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	470.968.641,71	1.007.532.570,71
51	Utang Bunga	5.3.2.1.2	106.192.160,89	127.430.593,07
52	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34
53	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	443.202.500,01	568.963.500,01
54	Utang Belanja	5.3.2.1.5	23.303.291.955,65	124.926.871.410,32
55	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	5.659.570.868,45	12.887.528.370,00

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
56	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (50 s.d. 55)**		**31.254.192.860,05**	**140.789.293.177,45**
57	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.2.2		
58	Utang Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	5.083.866.932,93	6.354.833.666,60
59	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (58)**		**5.083.866.932,93**	**6.354.833.666,60**
60	**JUMLAH KEWAJIBAN (56+59)**		**36.338.059.792,98**	**147.144.126.844,05**
61	**EKUITAS**	5.3.3		
62	**JUMLAH EKUITAS**		**5.057.132.136.093,17**	**4.337.580.183.360,85**
63	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (60+62)**		**5.093.470.195.886,15**	**4.484.724.310.204,90**

BUPATI MOROWALI

IKSAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN-LO**	5.4.1				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	5.4.1.1				
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	826.619.076.133,69	686.156.927.796,34	140.462.148.337,35	20,47
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	286.024.019.117,00	288.929.271.817,00	(2.905.252.700,00)	(1,01)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	5.048.125.362,00	4.490.472.491,00	557.652.871,00	12,42
7	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	5.4.1.1.4	98.801.574.183,15	106.988.701.008,73	(8.187.126.825,58)	(7,65)
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD)-LO (4 s.d. 7)**		**1.216.492.794.795,84**	**1.086.565.373.113,07**	**129.927.421.682,77**	**11,96**
9	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	5.4.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1				
11	Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	0,00	1.301.292.958.555,00	(1.301.292.958.555,00)	(100,00)
12	Dana Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.1	585.802.448.590,00	0,00	585.802.448.590,00	100,00
13	Dana Alokasi Umum-LO	5.4.1.2.1	508.505.981.719,00	0,00	508.505.981.719,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus-LO	5.4.1.2.1	207.912.548.846,00	0,00	207.912.548.846,00	100,00
15	Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1	5.701.860.000,00	11.818.826.000,00	(6.116.966.000,00)	(51,76)
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO (11 s.d.15)**		**1.307.922.839.155,00**	**1.313.111.784.555,00**	**(5.188.945.400,00)**	**(0,40)**
17	Pendapatan Transfer antar Daerah-LO	5.4.1.2.2				
18	Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2	66.874.221.952,51	83.910.072.787,00	(17.035.850.834,49)	(20,30)
19	Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah-LO (18 s.d. 19)**		**66.974.221.952,51**	**84.010.072.787,00**	**(17.035.850.834,49)**	**(20,28)**
21	**Jumlah Pendapatan Transfer-LO (16+20)**		**1.374.897.061.107,51**	**1.397.121.857.342,00**	**(22.224.796.234,49)**	**(1,59)**
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	5.4.1.3				
23	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3	21.139.410.934,49	12.804.793.598,98	8.334.617.335,51	65,09
24	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3	10.484.727.465,00	9.032.755.284,00	1.451.972.181,00	16,07
25	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO (23 s.d. 24)**		**31.624.138.399,49**	**21.837.548.882,98**	**9.786.589.516,51**	**44,82**
26	**Jumlah Pendapatan-LO (8+21+25)**		**2.623.013.994.302,84**	**2.505.524.779.338,05**	**117.489.214.964,79**	**4,69**
27	**BEBAN**	5.4.2				
28	**BEBAN OPERASI**					
29	Beban Pegawai	5.4.2.1	664.172.521.021,00	534.692.045.847,00	129.480.475.174,00	24,22
30	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	829.448.219.290,10	797.710.497.014,55	31.737.722.275,55	3,98
31	Beban Bunga	5.4.2.3	870.918.961,26	1.124.276.321,23	(253.357.359,97)	(22,54)
32	Beban Hibah	5.4.2.4	77.203.750.233,00	104.242.361.998,00	(27.038.611.765,00)	(25,94)
33	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	15.985.800.000,00	45.239.200.000,00	(29.253.400.000,00)	(64,66)
34	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	1.121.805.025,84	1.499.717.011,10	(377.911.985,26)	(25,20)
35	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	230.386.891.915,85	278.302.628.415,12	(47.915.736.499,27)	(17,22)
36	**Jumlah Beban Operasi (29 s.d. 35)**		**1.819.189.906.447,05**	**1.762.810.726.607,00**	**56.379.179.840,05**	**3,20**

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
37	**BEBAN TRANSFER**					
38	Beban Bagi Hasil	5.4.2.8	92.204.508.112,00	50.096.228.277,00	42.108.279.835,00	84,05
39	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9	109.075.097.000,00	107.940.551.713,00	1.134.545.287,00	1,05
40	**Jumlah Beban Transfer (38 s.d. 39)**		**201.279.605.112,00**	**158.036.779.990,00**	**43.242.825.122,00**	**27,36**
41	**Jumlah Beban (36+40)**		**2.020.469.511.559,05**	**1.920.847.506.597,00**	**99.622.004.962,05**	**5,19**
42	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (26-41)**	5.4.3	**602.544.482.743,79**	**584.677.272.741,05**	**17.867.210.002,74**	**3,06**
43	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
44	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	17.314.852.595,93	(17.314.852.595,93)	(100,00)
47	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		2.464.808.135,00	1.571.146.043,75	893.662.091,25	56,88
48	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (44+45-47+48)**	5.4.4	**(2.464.808.135,00)**	**(18.885.998.639,68)**	**16.421.190.504,68**	**(86,95)**
49	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (42+48)**	5.4.5	**600.079.674.608,79**	**565.791.274.101,37**	**34.288.400.507,42**	**6,06**
50	**POS LUAR BIASA**	5.4.6				
51	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Luar Biasa	5.4.6.1	468.222.000,00	0,00	468.222.000,00	0,00
53	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (51-52)**	5.4.7	**(468.222.000,00)**	**0,00**	**(468.222.000,00)**	**0,00**
54	**SURPLUS/DEFISIT-LO (49+55)**	5.4.8	**599.611.452.608,79**	**565.791.274.101,37**	**33.820.178.507,42**	**5,98**

BUPATI MOROWALI

H. SAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1,a	826.527.304.149,14	640.450.562.137,34
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1,b	286.024.019.117,00	288.907.551.817,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1,c	5.048.125.362,00	4.490.472.491,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1,d	107.685.958.814,15	104.480.199.917,07
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1,e	1.469.342.712.802,00	1.839.547.102.455,00
8	Penerimaan Transfer antar Daerah	5.5.1.1,f	57.232.664.049,51	76.925.833.923,00
9	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1,g	10.484.727.465,00	9.032.755.284,00
10	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 9)**		**2.762.345.511.758,80**	**2.963.834.478.024,41**
11	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	664.172.521.021,00	534.692.045.847,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	859.081.698.144,37	783.997.356.734,42
14	Pembayaran Bunga	5.5.1.2	892.157.393,44	1.146.186.220,34
15	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	77.443.769.183,00	104.231.793.598,00
16	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	15.775.800.000,00	45.039.200.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	468.222.000,00	0,00
18	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2	92.204.508.112,00	50.096.228.277,00
19	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2	210.100.534.648,00	214.638.024.613,00
20	**Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 19)**		**1.920.139.210.501,81**	**1.733.840.835.289,76**
21	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10-20)**		**842.206.301.256,99**	**1.229.993.642.734,65**
22	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
23	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
24	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
25	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	2.537.087.500,00
26	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
27	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
28	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
29	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
30	**Jumlah Arus Masuk Kas (24 s.d. 29)**		**0,00**	**2.537.087.500,00**
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
32	Perolehan Tanah	5.5.2.2	43.576.372.121,00	54.200.960.137,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	153.900.472.699,00	175.235.443.624,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	412.972.340.440,43	236.686.171.253,25
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	236.774.789.690,00	200.750.115.539,81
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	3.918.571.840,00	2.348.930.604,00
37	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	127.510.000,00	570.310.500,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	13.500.000.000,00	1.500.000.000,00
39	**Jumlah Arus Keluar Kas (32 s.d. 38)**		**864.770.056.790,43**	**671.291.931.658,06**
40	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30-39)**		**(864.770.056.790,43)**	**(668.754.844.158,06)**
41	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
42	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
43	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
44	**Jumlah Arus Masuk Kas (43)**		**0,00**	**0,00**
45	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
46	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		1.270.966.733,67	1.270.966.733,34
47	**Jumlah Arus Keluar Kas (46)**		**1.270.966.733,67**	**1.270.966.733,34**
48	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44-47)**		**(1.270.966.733,67)**	**(1.270.966.733,34)**
49	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
50	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
51	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		176.090.836.356,56	118.486.481.253,76
52	**Jumlah Arus Masuk Kas (51)**		**176.090.836.356,56**	**118.486.481.253,76**
53	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
54	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		176.687.177.418,56	117.950.920.265,76
55	**Jumlah Arus Keluar Kas (54)**		**176.687.177.418,56**	**117.950.920.265,76**
56	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52-55)**		**(596.341.062,00)**	**535.560.988,00**
57	**Kenaikan/Penurunan Kas (21+40+48+56)**	5.5.5	**(24.431.063.329,11)**	**560.503.392.831,25**
58	**Saldo Awal Kas**	5.5.6	**873.448.846.822,56**	**313.187.488.283,31**
59	**Koreksi SILPA**	5.5.5	**(6.155.598,00)**	**(242.034.292,00)**
60	**Saldo Akhir Kas (57+58+59)**		**849.011.627.895,45**	**873.448.846.822,56**
61	**Kas di Kas Daerah**		**831.990.885.017,24**	**856.240.575.225,40**
62	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**48.376.000,00**	**228.826.000,00**
63	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**1.969.699.736,00**	**2.826.257,56**
64	**Kas di BLUD**		**13.505.843.351,13**	**15.315.749.934,52**
65	**Kas Dana BOSP**		**70.213.266,08**	**23.080.702,08**
66	**Kas Dana Kapitasi pada FKTP**		**214.154.533,00**	**86.626.607,00**
67	**Kas Dana BOK Puskesmas**		**1.212.455.992,00**	**1.551.162.096,00**
68	**Saldo Akhir Kas (61+62+63+64+65+66+67)**	5.5.5	**849.011.627.895,45**	**873.448.846.822,56**

BUPATI MOROWALI

IKSAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2025	2024
1	**EKUITAS AWAL**	5.6,a	**4.337.580.183.360,85**	**3.774.160.216.142,61**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6,b	**599.611.452.608,79**	**565.791.274.101,37**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :**	5.6,c		
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-Lain		119.940.500.123,53	(2.371.306.883,13)
7	**EKUITAS AKHIR (1+2+ 4+5+6)**	5.6,e	**5.057.132.136.093,17**	**4.337.580.183.360,85**

BUPATI MOROWALI

IKSAN

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah (*regional government*) sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah diwajibkan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Morowali yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah (*regional competitiveness*). Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tatakelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, untuk itu Pemerintah Kabupaten Morowali bersama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai akuntabilitas terhadap masyarakat dan perbaikan manajemen pemerintahan maka dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang Mewajibkan Gubernur, Walikota, dan Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2025.

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dana Non-APBD Kabupaten Morowali (Dana Tugas Pembantuan).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, dan pembiayaan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian yang mengatur tentang keuangan negara; pada (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);

b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali;

y. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0293);

z. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 07) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0297);

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 15);

cc. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 038);

dd. Peraturan Bupati Morowali Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 037);

ee. Peraturan Bupati Morowali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 039);

ff. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 038);

gg. Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 06); dan

hh. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 040).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan Informasi tentang Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) BAB, yang terdiri:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat Kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

BAB III : Memuat ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen- komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,38%.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,81%.
c. Gini Ratio sebesar 0,268%.
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,7%.
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 10,81%.
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,89%.
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp188.862,05 miliar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kabupaten Morowali (%)	11,55	10,38	(1,17)
2	Provinsi (%)	11,7	10,52	(1,18)
3	Nasional (%)	9,03	8,25	(0,78)
4	Peringkat Provinsi	3	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 sebesar 11,55% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin menjadi 10,38% dan diharapkan pada tahun 2026 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali masih di atas provinsi dan nasional maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Adapun perbandingan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Morowali

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Morowali	1,79	1,07	(0,27)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,72	1,38	(0,34)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,36	1,29	(0,07)
4	Peringkat Provinsi	5	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Selanjutnya perbandingan tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Morowali

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Morowali	0,43	0,21	(0,22)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,41	0,28	(0,13)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,32	0,30	(0,02)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT *(Tingkat Pengangguran Terbuka)* adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebesar 2,81%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,84	2,81	(0,03)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,94	2,92	(0,02)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,74	(0,17)
4	Peringkat Provinsi	7	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,84%, sedangkan TPT pada Tahun 2025 adalah sebesar 2,81% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024.

2.1.3 Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Hal ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebesar 0,268 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Morowali

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Morowali	0,275	0,268	(0,007)
2	Tingkat Provinsi	0,309	0,277	(0,032)
3	Tingkat Nasional	0,381	0,363	(0,018)

Sumber Dokumen: Bappelidbangda Kabupaten Morowali

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Morowali yang diukur dengan *Gini Ratio* sebesar 0,275 poin, sedangkan Tahun 2025 *Gini Ratio* sebesar 0,268 poin

yang dimana jika dibandingkan dengan Pencapaian *Gini Ratio* Provinsi dan *Gini Ratio* Nasional mempunyai poin yang lebih rendah.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life),* pengetahuan *(knowledge),* dan standar hidup layak *(decent standart of living).* Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60 ≤ IPM < 70)
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali realisasi pencapaian IPM Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebesar 74,7 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Kabupaten Morowali	74,36	74,7	0,34
2	Provinsi	72,24	72,82	0,58
3	Indonesia/Nasional	75,02	75,90	0,88
4	Peringkat Provinsi	2	N/A	N/A
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebesar 74,7 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 74,36 poin mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,34 tahun pada Tahun 2025, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,39 tahun dengan harapan lama sekolah 13,40 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp12.527.000,00 atau meningkat Rp246.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.281.000,00 IPM di Kabupaten Morowali pada saat ini berada pada urutan 2 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian

merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali

No	Uraian	Kabupaten Morowali (Miliar Rp)			Provinsi (Miliar Rp)	Nasional (Triliun Rp)
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010)	84.989,24	98.808,77	109.491,44	415.477,22	23.821,1
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	20,34	16,26	10,81	8,47	5,11
3	Peringkat Provinsi	2	2	N/A	N/A	N/A
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Selama kurun waktu Tahun 2023 – 2025, perekonomian Kabupaten Morowali mengalami peningkatan rata-rata 13,54%. Pada periode Tahun 2023 – 2024, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Morowali sebesar 16,26% dan pada kurun waktu Tahun 2024 – 2025, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Morowali sebesar 10,81%. Dalam skala Provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Morowali menempati urutan dua dari laju pertumbuhan Kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan skala Nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menempati urutan dua dari laju pertumbuhan Provinsi/Kab/Kota di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi, terbagi menjadi empat kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebesar 1,89% dengan kategori ringan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(Turun)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,23	1,89	0,66
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,29	3,31	2,02
3	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,57	2,92	1,35

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tingkat inflasi di Kabupaten Morowali Tahun 2025 menurut data BPS Kabupaten Morowali menunjukkan angka sebesar 1,89%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,23% atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Morowali

Struktur perekonomian Kabupaten Morowali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Uraian	Tahun 2023 (jutaan Rp)	Tahun 2024 (jutaan Rp)	Tahun 2025 (jutaan Rp)
1.A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.444,60	2.702,86	2.966,85
1.B	Pertambangan dan Penggalian	28.114,26	29.202,53	32.082,59
1.C	Industri Pengolahan	114.926,06	127.964,17	138.790,07
1.D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,38	2,53	2,78
1.E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang	6,42	7,01	8,03
1.F	Konstruksi	8.490,79	9.094, 18	9.715,61
1.G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.996,08	2.419,03	2.585,50
1.H	Transportasi dan Pergudangan	546,10	763,70	805,04
1.I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,10	54,66	63,87
1.J	Informasi dan Komunikasi	344,03	371,67	397,99
1.K	Jasa Keuangan dan Asuransi	226,35	265,99	313,74
1.L	Real Estat	261,38	321,15	359,04
1.M, 1.N	Jasa Perusahaan	5,05	6,26	6,93
1.O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	293,12	306,96	350,42
1.P	Jasa Pendidikan	134,99	151,56	165,63
1.Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,46	120,82	131,49
1.R, 1.S, 1.T, 1.U	Jasa Lainnya	96,57	109,87	117,46
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (juta Rp)	158.048,73	173,864,99	188.862,05
3	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (juta Rp)	158.048,73	173.762,04	N/A
4	PDRB Provinsi (Miliar Rp)	347.139,17	376.950,32	415.477,22

No	Uraian	Tahun 2023 (jutaan Rp)	Tahun 2024 (jutaan Rp)	Tahun 2025 (jutaan Rp)
5	PDRB Nasional (Triliun Rp)	20.892,4	22.139,0	23.821,1
6	Peringkat Provinsi	1	1	N/A
7	Peringkat Nasional	N/A	N/A	N/A

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan APBD Penetapan

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.

b. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Secara umum Kebijakan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali pada Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

2.2.1.2 Kebijakan Pendapatan APBD Perubahan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Morowali, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Morowali diarahkan sebagai berikut:

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester satu tahun 2025;

b. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya penyesuaian penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, serta Pendapatan BLUD;

c. Penyesuaian Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat;

d. Penyesuaian Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, antara lain terkait dengan penyesuaian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pendapatan Daerah pada perubahan APBD TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.852.491.558,00 atau turun sebesar 2,93%. Penurunan tersebut berasal dari Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp129.417.749.141,00, sedangkan Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp538.153.417.168,85 atau naik sebesar 18,79%. Peningkatan tersebut berasal dari pos Belanja Operasi sebesar Rp172.511.458.420,12, Belanja Modal sebesar Rp351.117.283.947,46 dan Belanja Transfer sebesar Rp23.500.000.000,00. Secara rinci dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Pendapatan APBD Perubahan

Pendapatan Daerah	Anggaran 2025 Sebelum Perubahan	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Rasio
	Rp	Rp	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	**2.622.058.454.556,00**	**2.545.205.962.998,00**	**(76.852.491.558,00)**	**(2,93)**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	863.808.302.035,00	913.808.302.035,00	50.000.000.000,00	5,79
Pendapatan Transfer	1.749.699.593.345,00	1.620.281.844.204,00	(129.417.749.141,00)	(7,40)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.550.559.176,00	11.115.816.759,00	2.565.257.583,00	30,00
BELANJA DAERAH	**2.864.601.336.932,00**	**3.402.754.754.100,85**	**538.153.417.168,85**	**18,79**
Belanja Operasi	1.862.155.895.575,12	2.034.667.353.995,24	172.511.458.420,12	9,26
Belanja Modal	703.387.193.954,15	1.054.504.477.901,61	351.117.283.947,46	49,92
Belanja Tidak Terduga	10.975.325.198,73	2.000.000.000,00	(8.975.325.198,73)	(81,78)
Belanja Transfer	288.082.922.204,00	311.582.922.204,00	23.500.000.000,00	8,16
SURPLUS/(DEFISIT)	**(242.542.882.376,00)**	**(857.548.791.102,85)**	**(615.005.908.726,85)**	**253,57**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp50.000.000.000,00 atau naik 5,79%. Peningkatan tersebut berasal dari Pos Pajak Daerah sebesar Rp40.000.000.000,00 atau naik 160,00%, dan Retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau naik 4,07%, sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tidak mengalami perubahan.

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Perubahan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.000.000.000,00 atau naik sebesar 7,28%. Peningkatan tersebut berasal dari pos Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp40.000.000.000,00, sedangkan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mengalami perubahan. Secara rinci proyeksi perubahan Pendapatan Pajak Daerah yang dipengaruhi oleh salah satu penerimaan pendapatan pajak daerah tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Pendapatan Pajak Daerah

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2025 Sebelum Perubahan	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Rasio
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
4.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	81.814.028.164,00	81.814.028.164,00	0,00	0,00
5.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000,00	65.000.000.000,00	40.000.000.000,00	160,00
6.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	64.391.138.423,00	64.391.138.423,00	0,00	0,00
7.	PBJT-Tenaga Listrik	297.250.639.960,00	297.250.639.960,00	0,00	0,00
8.	PBJT-Jasa Perhotelan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00
9.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.223.507.488,00	6.223.507.488,00	0,00	0,00
11.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.279.988.000,00	17.279.988.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**549.684.302.035,00**	**589.684.302.035,00**	**40.000.000.000,00**	**7,28**

Peningkatan target Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp40.000.000.000,00 didasarkan pada pertimbangan bahwa realisasi Pendapatan BPHTB sebelum dilakukan perubahan APBD telah mencapai 100% dari target APBD Penetapan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pengajuan sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari kawasan industri, dan pembayaran BPHTB yang sangat signifikan oleh masyarakat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam penetapan target pendapatan serta beberapa developer baru yang mulai berinvestasi di Kabupaten Morowali.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Perubahan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau naik sebesar 4,16%. Peningkatan tersebut berasal dari pos Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp10.000.000.000,00, sedangkan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha tidak mengalami perubahan, secara rinci proyeksi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Pendapatan Retribusi Daerah

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2025 Sebelum Perubahan	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Rasio
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Retribusi Jasa Umum	5.090.000.000,00	5.090.000.000,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00	0,00

3.	Retribusi Perizinan Tertentu	240.250.000.000,00	250.250.000.000,00	10.000.000.000,00	4,16
Jumlah		**245.864.000.000,00**	**255.864.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**4,16**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu yang mengalami peningkatan berasal dari pos Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peningkatan target Retribusi RPTKA sebesar Rp10.000.000.000,00 disebabkan oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan industri Kabupaten Morowali dengan melakukan koordinasi terhadap pihak terkait dan verifikasi data tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga potensi penerimaan Retribusi RPTKA dapat diperhitungkan dalam APBD Perubahan TA 2025.

Dalam APBD Penetapan Tahun 2025 anggaran Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.400.000.000,00, tidak mengalami perubahan. jika dibandingkan dengan APBD Perubahan pada Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan Tahun 2025.

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp65.860.000.000,00, secara umum tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan pada APBD Penetapan dan APBD Perubahan pada TA 2025, secara rinci proyeksi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

No	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran 2025 Sebelum Perubahan	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Rasio
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan BLUD	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**65.860.000.000,00**	**65.860.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Secara keseluruhan, anggaran penerimaan dari sektor pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari APBD Penetapan ke APBD Perubahan TA 2025. Berikut penjelasan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jasa Giro pada APBD Penetapan sebesar Rp2.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada APBD Penetapan sebesar Rp3.000.000.000,00, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada APBD Penetapan sebesar Rp360.000.000,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

d. Pendapatan BLUD pada APBD Penetapan sebesar Rp60.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan TA 2025 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp129.417.749.141,00 atau 7,40% dibandingkan dengan APBD Penetapan TA 2025. Secara rinci proyeksi perubahan Pendapatan Transfer tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Pendapatan Transfer

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 Sebelum Perubahan	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Rasio
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Dana Desa	102.095.808.000,00	102.095.808.000,00	0,00	0,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	798.222.945.000,00	730.422.460.000,00	(67.800.485.000,00)	(8,49)
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	546.351.912.000,00	505.400.139.000,00	(40.951.773.000,00)	(7,50)
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	266.932.311.000,00	208.943.949.000,00	(57.988.362.000,00)	(21,72)
5.	Pendapatan Bagi Hasil	36.096.617.345,00	73.319.488.204,00	37.222.870.859,00	103,12
6.	Bantuan Keuangan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Jumlah		**1.749.699.593.345,00**	**1.620.281.844.204,00**	**(129.417.749.141,00)**	**(7,40)**

Penurunan target Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan TA 2025 berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan oleh adanya perubahan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelum kebijakan efisiensi tersebut, terdapat penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025

Peningkatan target Pendapatan Bagi Hasil pada APBD Perubahan TA 2025 yang semula ditargetkan sebesar Rp36.096.617.345,00 kemudian pada perubahan APBD disesuaikan kembali menjadi Rp73.319.488.204,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/27/BAPENDA-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 tentang Penetapan Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024. Penambahan pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Penetapan, berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pada APBD Penetapan TA 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp8.550.559.176,00 dan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp11.115.816.759,00 maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.565.257.583,00 atau 30,00%. Peningkatan tersebut berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp2.565.257.583,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah APBD Penetapan

Penganggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*), dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja daerah disusun dan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2025 terdiri atas 20 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Unsur Pemerintah Pilihan, 10 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawasan, dan 17 Unsur Kewilayahan serta 1 Unsur Pemerintahan Umum. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Belanja Daerah digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026, dengan memperhatikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Secara langsung Belanja Daerah di tahun 2025 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

a. Belanja Operasi terdiri dari :

   1) Belanja Pegawai merupakan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang penganggarannya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025. Gaji ASN telah diproyeksikan meningkat rata-rata 10%, termasuk *accress;*

   2) Belanja Barang dan Jasa merupakan anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025;

3) Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang atau *principal outstanding* berdasarkan perjanjian;

4) Belanja Hibah adalah anggaran yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; dan

5) Belanja Bantuan Sosial merupakan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selektif dalam arti bahwa bantuan diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

b. Belanja Modal Belanja yang direncanakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya oleh OPD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya.

c. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, diberikan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penetapan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025 dilakukan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Belanja Transfer terdiri dari:

1) Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota atau pendapatan Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah belanja Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada desa minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah APBD Perubahan

Kebijakan belanja pada APBD Perubahan Kabupaten Morowali Tahun 2025, diarahkan pada:

a. Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan, antar jenis belanja, dan antar objek belanja, serta antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD, apabila asumsi kebijakan umum anggaran (KUA) tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan yaitu, untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah dan lahan;

b. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank, pemberian hibah serta belanja pegawai;

c. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian lima unsur utama tujuan pembangunan daerah Kabupaten Morowali dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2025;

d. Program kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Adapun penjelasan kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut.

a. Kebijakan Belanja Operasi

Dalam APBD Perubahan TA 2025, belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp172.511.458.420,12 atau 9,26% sehingga total belanja Operasi menjadi Rp2.034.667.353.995,24 yang diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai yang mengalami peningkatan sebesar Rp14.043.919.731,74 atau 1,76% diantaranya Peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp6.150.171.761,74, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.420.326.850,00 dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.120,00;

2) Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp136.494.732.148,38 atau 14,33%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Jasa sebesar Rp100.829.080.878,78, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.835.377.407,31, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp9.802.855.800,00, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp44.412.104.020,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp15.906.189.252,52;

3) Belanja Bunga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp1.664.000.000,00;

4) Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp14.473.438.650,00 atau 18,99%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp15.637.138.650,00, Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp22.500.000,00, dan Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp163.800.000,00;

5) Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan dalam APBD TA 2025 sebesar Rp7.499.367.890,00 atau 23,43%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp7.817.428.250,00.

b. Kebijakan Belanja Modal

Dalam APBD Perubahan TA 2025, Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp351.117.283.947,46 atau 49,92% sehingga total belanja Modal menjadi Rp1.054.504.477.901,61, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp46.997.982.885,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp88.226.129.657,16 atau 97,17%, peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp8.361.414.011,00, Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp34.075.306.977,00, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp198.675.180,00, Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp829.131.600,00, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp10.925.712.216,16, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp5.540.608.836,00, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp15.289.630.662,00, Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp330.992.000,00, Belanja Modal Komputer sebesar Rp5.902.106.604,00, Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp1.362.832.550,00, Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp2.471.465.830,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp3.528.692.509,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp147.260.640.800,52 atau 47,02%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp138.108.342.574,01, Belanja Modal Bangunan Menara sebesar Rp333.000.000,00 dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp8.819.298.226,51;

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp112.147.155.549,78 atau 44,54%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp87.028.087.836,78, Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp1.205.710.116,00, Belanja Modal Instalasi sebesar Rp883.958.648,00 dan Belanja Modal Jaringan sebesar Rp23.029.398.949,00;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.483.357.940,00 atau 751,68%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp195.637.500,00, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp301.922.700,00, Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp30.000.000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp2.955.797.740,00; dan

6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp127.650.000,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Dalam APBD Perubahan TA 2025 Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp8.975.325.198,73 atau 81,78% sehingga total belanja Belanja Tidak Terduga menjadi Rp2.000.000.000,00.

d. Kebijakan Belanja Transfer

Dalam perubahan APBD TA 2025 Belanja Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp23.500.000.000,00 atau 8,16% sehingga total Belanja Transfer menjadi Rp311.582.922.204,00 sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp23.500.000.000,00, peningkatan tersebut disebabkan oleh Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa masing-masing sebesar Rp14.000.000.000,00 dan Rp9.500.000.000,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami peningkatan sebesar Rp212.028.092.000,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2025.

Jumlah Belanja Daerah pada perubahan APBD TA 2025 adalah sebesar Rp3.402.754.754.100,85. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 diarahkan sebagai berikut:

1) Penambahan, Pengurangan, dan Pergeseran program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan program/kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual serta dalam rangka pencapaian Visi Misi, lima unsur utama visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali, serta target-target kinerja pada RPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2025.

2) Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan persentase belanja modal. Pada APBD Perubahan TA 2025 Belanja Modal meningkat sebesar Rp351.117.283.947,46, antara lain belanja modal alat besar, belanja modal alat angkutan, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat pertanian, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal alat laboratorium, belanja modal komputer, belanja modal rambu-rambu, belanja modal peralatan olahraga, dan belanja modal peralatan dan mesin BOSP, belanja modal bangunan gedung, belanja modal bangunan menara, belanja modal tugu titik kontrol/pasti, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air, belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja modal barang koleksi non budaya dan belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

3) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir TA 2025 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kabupaten Morowali TA 2025 mengalami defisit belanja sebesar Rp857.548.791.102,85.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Kebijakan Pembiayaan APBD Penetapan

2.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran.

Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut penerimaan pembiayaan sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada TA 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA).

2.2.3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2025 diperuntukkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sulteng sebesar Rp13.500.000.000,00 dan pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.562.618.550,00.

2.2.3.2 Kebijakan Pembiayaan APBD Perubahan

2.2.3.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Morowali TA 2025 sebesar Rp872.611.409.652,85, mengalami peningkatan sebesar Rp560.980.449.270,85 atau 180,01% dari penerimaan Pembiayaan APBD Perubahan Tahun sebelumnya sebesar Rp311.630.960.382,00.

2.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan TA 2025 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pengeluaran pembiayaan tersebut sebagian diprioritaskan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng sebesar Rp13.500.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.562.618.550,00.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp857.548.791.102,85, surplus pembiayaan ini menutupi defisit belanja daerah sebesar (Rp857.548.791.102,85), sehingga kondisi perubahan APBD TA 2025 adalah anggaran berimbang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program dengan indikator pada tingkat *input, output dan outcome.* Capaian target kinerja APBD dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana transfer dari Pemerintah Pusat serta kinerja atau dampak/manfaat dari dana-dana tersebut bagi masyarakat.

b. Pencapaian program/kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi Prioritas; dan

c. Pencapaian program/kegiatan Pemerintah Daerah terkait dengan pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, *stunting* dan *mandatory spending.*

Dari beberapa faktor diatas terdapat pula penentuan arah kebijakan Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Morowali yang dilandasi dan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

2.3.1 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, secara umum faktor yang melatarbelakangi kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Morowali diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat serta menjaga iklim investasi yang kondusif, mudah diterapkan dan dilaksanakan, tidak merusak lingkungan dan penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Penetapan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan pada kondisi riil yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Dalam upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah sering kali menimbulkan permasalahan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan, dan kecepatan pelayanan;

b. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas SDM pengelola penerimaan daerah;

d. Penataan anggaran berbasis kinerja *(Performance Budget)* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif, dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dan biaya rendah;

e. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan retribusi daerah secara optimal;

f. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Daerah;

g. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Retribusi daerah;

h. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur;

i. Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif;

j. Menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mempertegas peraturan kebijakan agar tidak tumpang tindih, baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;

k. Meningkatkan kapasitas hukum terhadap usaha;

l. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya;

m. Meningkatkan penggunaan aset daerah, optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset, kalau perlu dilaksanakan kerja sama dengan swasta; dan

n. Perlu pembentukan badan usaha baru.

2.3.2 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorintasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan setiap OPD.

Belanja daerah berupa belanja langsung setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Sedangkan Belanja Daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas social, dan fasilitas umum yang layak.

Rumusan prioritas belanja pembangunan daerah pada Tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai kelanjutan dari pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis aktual yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026. Rumusan tujuan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam dokumen RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026 tersebut dikonstruksikan dan disinergikan dari lima misi RPJPD sebagai berikut:

a. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial yang Merata

Misi ini dimaksud untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan jaminan sosial yang merata dan program pengentasan kemiskinan ekstream yang tepat sasaran dan berfokus pada pengurangan jumlah dan presentase kemiskinan di Kabupaten Morowali tiga tahun mendatang dan dalam usaha mendukung mewujudkan prioritas pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen. Ketahanan sosial dan jaminan sosial dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat daya tahan masyarakat dari goncangan krisis multi dimensi.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan daya saing daerah Kabupaten Morowali. Konsep ini mencakup upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor ekonomi yang ada, serta meningkatkan akses masyarakat pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta memastikan tumbuhnya sumber daya manusia di daerah setempat yang ada bebas *stunting*. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali terus memprioritaskan pengembangan sektor unggulan daerah yang tidak hanya bertumpu pada Sektor Pertambangan semata, namun juga mendorong kontribusi Sektor Pariwisata, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, dan sektor non migas lainnya. Hal ini ditempuh untuk meningkatkan produksi dan daya saing produk lokal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif berbasis potensi yang dikelola langsung masyarakat. Peningkatan daya saing daerah dimaksudkan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif serta mampu mengolah potensi sumber daya alam Kabupaten Morowali secara mandiri.

c. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif terhadap digital era, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*inter-networked government*). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas, serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

d. Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas orang dan barang, menyiapkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan investasi. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal infrastruktur fisiknya seperti Kecamatan Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan dan Bungku Selatan. Juga mempercepat peningkatan akses internet penyediaan akses internet yang cepat dan stabil dapat memperkuat konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses informasi serta pengintegrasian teknologi informasi dan

komunikasi dalam tata kelola pemerintahan baik infrastruktur fisik dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

e. Menciptakan Tatanan Kehidupan Wilayah yang Aman, Tentram dan Tertib Serta Jauh dari Risiko Bencana Guna Menunjang Efektifitas Pembangunan Wilayah

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan dunia usaha menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan damai, pemerintah menjamin perlindungan investasi dan rasa aman masyarakat terhadap berbagai gangguan serta menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi, risiko dan intesitas serta cakupan bencana baik alam maupun non alam. Serta terjaganya kehidupan masyarakat yang aman tentram damai dan harmonis ditengah keragaman suku, agama dan pilihan politik masyarakat.

2.3.3 Faktor yang melatarbelakangi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Munculnya pembiayaan daerah dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan pinjaman daerah sehingga besar kecilnya pembiayaan daerah tergantung dari kedua komponen tersebut. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp872.610.425.254,85.

Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 digunakan untuk Penyertaan Pembayaran Pokok Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menunjukkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Target kinerja Pendapatan Daerah TA 2025 mencapai hasil yang optimal. Pendapatan Daerah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp2.545.205.962.998,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2025 tercatat sebesar Rp2.762.345.511.758,80 atau 108,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp2.966.371.565.524,41, maka realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp204.026.053.765,61 atau 6,88%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer TA 2025 ditargetkan sebesar Rp3.402.754.754.100,85. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir TA 2025 sebesar Rp2.771.409.267.292,24 atau 81,45%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.403.632.766.947,82, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2025 naik sebesar Rp367.776.500.344,42 atau 15,30%.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir TA 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp872.610.425.254,85 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp872.611.409.652,85. Sedangkan Realisasi pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir TA 2025 sebesar Rp14.770.966.733,67 atau 98,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.062.618.550,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali pada Pelaksanaan APBD TA 2025 disajikan dalam ringkasan anggaran dan realisasi APBD pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**2.545.205.962.998,00**	**2.762.345.511.758,80**	**108,53**	**2.966.371.565.524,41**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	913.808.302.035,00	1.225.285.407.442,29	134,09	1.040.865.873.862,41
1.2	Pendapatan Transfer	1.620.281.844.204,00	1.526.575.376.851,51	94,22	1.916.472.936.378,00

1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.115.816.759,00	10.484.727.465,00	94,32	9.032.755.284,00
2	**BELANJA**	**3.402.754.754.100,85**	**2.771.409.267.292,24**	**81,45**	**2.403.632.766.947,82**
2.1	Belanja Operasi	2.034.667.353.995,24	1.617.365.945.741,81	79,49	1.469.106.582.399,76
2.2	Belanja Modal	1.054.504.477.901,61	851.270.056.790,43	80,73	669.791.931.658,06
2.3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	468.222.000,00	23,41	0,00
2.4	Belanja Transfer	311.582.922.204,00	302.305.042.760,00	97,02	264.734.252.890,00
Surplus/Defisit		**(857.548.791.102,85)**	**(9.063.755.533,44)**	**1,06**	**562.738.798.576,59**
3	PEMBIAYAAN	857.548.791.102,85	857.839.458.521,18	100,03	309.877.782.276,26
3.1	Penerimaan Pembiayaan	872.611.409.652,85	872.610.425.254,85	99,99	312.648.749.009,60
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.062.618.550,00	14.770.966.733,67	98,06	2.770.966.733,34
SILPA		**0,00**	**848.775.702.987,74**	**0,00**	**872.616.580.852,85**

3.2 Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta *mandatory spending*, sehingga dapat mendorong percepatan pemerataan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi *mandatory spending* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali di Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan serta berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehubungan dengan pelayanan penyelenggaraan pendididikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali menganggarkan sebesar Rp712.611.210.336,51 atau 20,94% dan terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp569.795.840.218,00 atau 20,56% dari yang dianggarkan dengan rincian penganggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2025

NO	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	**Dinas Pendidikan Daerah**	**598.447.598.321,24**	**471.541.858.632,00**
	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	255.985.283.001,00	234.429.064.690,00
	b) Program Pengelolaan Pendidikan	328.899.126.369,74	225.663.024.192,00
	c) Program Pengembangan Kurikulum	681.531.180,00	537.488.560,00
	d) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.635.945.173,50	5.350.376.545,00
	e) Program Pengembangan Kebudayaan	4.345.706.132,00	3.342.209.916,00
	f) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.082.488.403,00	828.048.240,00

NO	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	g) Program Pengelolaan Permuseuman	1.817.518.062,00	1.391.646.489,00
2	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah**	**194.127.996,00**	**133.520.369,00**
	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	8.620.000,00
	b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	114.751.850,00	65.946.819,00
	c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	59.376.146,00	58.953.550,00
3	**Puskesmas Ulunambo**	**17.345.000,00**	**17.030.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.370.000,00	11.055.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.975.000,00	5.975.000,00
4	**Puskesmas Kaleroang**	**19.630.000,00**	**15.825.000,00**
	a) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19.630.000,00	15.825.000,00
5	**Puskesmas Lafeu**	**19.749.000,00**	**19.728.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.320.000,00	10.320.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.429.000,00	9.408.000,00
6	**Puskesmas Bahodopi**	**18.920.000,00**	**18.920.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.600.000,00	11.600.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.320.000,00	7.320.000,00
7	**Puskesmas Bahomotefe**	**12.244.000,00**	**12.244.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.530.000,00	7.530.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.714.000,00	4.714.000,00
8	**Puskesmas Bungku**	**12.305.000,00**	**11.275.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.090.000,00	2.060.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	9.215.000,00	9.215.000,00
9	**Puskesmas Wosu**	**22.578.000,00**	**10.361.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.790.000,00	4.245.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	13.788.000,00	6.116.000,00
10	**Puskesmas Bahonsuai**	**24.056.000,00**	**19.856.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.300.000,00	11.640.000,00

NO	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.756.000,00	8.216.000,00
11	**Puskesmas Laantula Jaya**	**10.018.000,00**	**9.598.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.850.000,00	4.430.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.168.000,00	5.168.000.00
12	**Puskesmas Tanjung Harapan**	**56.827.000,00**	**53.096.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	28.905.000,00	28.905.000,00
	b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	27.922.000,00	24.191.000,00
13	**Puskesmas Fonuasingko**	**17.745.000,00**	**17.745.000,00**
	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.745.000,00	17.745.000,00
14	**Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Daerah**	**28.220.000,00**	**21.585.000,00**
	a) Program Penyelenggaraan Jalan	28.220.000,00	21.585.000,00
15	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**308.456.100,00**	**281.533.935,00**
	a) Program Penanggulangan Bencana	308.456.100,00	281.533.935,00
16	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah**	**3.176.710.370,00**	**2.750.270.317,00**
	a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.597.100.258,00	2.331.506.252,00
	b) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	579.610.112,00	418.764.065,00
17	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**	**495.663.510,00**	**485.491.728,00**
	a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	238.236.410,00	234.854.974,00
	b) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	257.427.100,00	250.636.754,00
18	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah**	**620.197.000,00**	**544.054.300,00**
	a) Program Peningkatan Kualitas Keluarga	54.885.000,00	51.385.000,00
	b) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	385.350.000,00	365.949.300,00
	c) Program Administrasi Pemerintahan Desa	97.553.000,00	95.505.000,00
	d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	82.409.000,00	31.215.000,00
19	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah**	**106.772.506.744,27**	**91.672.980.231,00**
	a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	645.483.000,00	590.132.974,00
	b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	104.395.627.912,27	89.480.264.952,00
	c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.009.941.492,00	966.348.165,00

NO	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	721.454.340,00	636.234.140,00
20	**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**	**577.220.155,00**	**544.369.106,00**
	a) Program Pembinaan Perpustakaan	554.632.155,00	525.684.306,00
	b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	22.588.000,00	18.684.800,00
21	**Dinas Perikanan Daerah**	**127.850.000,00**	**125.869.000,00**
	a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.850.000,00	125.869.000,00
22	**Bagian Organisasi**	**72.480.000,00**	**72.080.000,00**
	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.480.000,00	72.080.000,00
23	**Sekretariat DPRD**	**595.503.520,00**	**563.007.900,00**
	a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	595.503.520,00	563.007.900,00
24	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**874.499.620,00**	**849.341.700,00**
	a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	874.499.620,00	849.341.700,00
25	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**69.300.000,00**	**0,00**
	a) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	69.300.000,00	0,00
26	**Inspektorat Daerah**	**19.460.000,00**	**4.200.000,00**
	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.460.000,00	4.200.000,00
Anggaran Fungsi Pendidikan		**712.611.210.336,51**	**569.795.840.218,00**
Total Belanja Daerah		**3.402.754.754.100,85**	**2.771.409.267.292,24**
Rasio Anggaran Pendidikan		**20,94%**	**20,56%**

b. Dalam rangka pelayanan peningkatan dan penguatan belanja infrastruktur kepada kesejahteraan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja infrastruktur daerah terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum untuk penguatan belanja infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp1.536.660.828.250,17 atau 49,71% dan terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.194.390.180.542,06 atau 48,37% dari yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	**Dinas Pendidikan**	**106.029.460.919,54**	**89.280.130.706,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.382.183.916,80	1.448.271.187,00
	Program Pengelolaan Pendidikan	99.255.167.598,74	84.530.440.824,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.837.530.517,00	1.365.521.466,00
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	737.060.825,00	544.250.740,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	1.817.518.062,00	1.391.646.489,00
2	**Dinas Kesehatan**	**76.131.414.802,73**	**64.065.018.748,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.480.798.945,73	17.165.369.603,00
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	50.504.051.017,00	46.053.518.820,00
	Program Pengendalian Penduduk	80.406.890,00	52.535.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	538.647.300,00	321.929.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	527.510.650,00	471.666.325,00
3	**Puskesmas Ulunambo**	**2.994.324.808,00**	**2.547.709.274,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.994.324.808,00	2.547.709.274,00
4	**Puskesmas Kaleroang**	**2.783.479.203,00**	**2.517.388.209,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.783.479.203,00	2.517.388.209,00
5	**Puskesmas Lafeu**	**2.015.854.143,00**	**1.858.170.645,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.015.854.143,00	1.858.170.645,00
6	**Puskesmas Bahodopi**	**3.944.444.594,00**	**3.621.991.226,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.944.444.594,00	3.621.991.226,00
7	**Puskesmas Bahomotefe**	**2.083.977.495,00**	**1.971.915.009,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.083.977.495,00	1.971.915.009,00
8	**Puskesmas Bungku**	**2.924.581.585,00**	**2.707.526.184,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.924.581.585,00	2.707.526.184,00
9	**Puskesmas Ulunambo**	**2.534.049.736,00**	**2.446.244.648,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.534.049.736,00	2.446.244.648,00
10	**Puskesmas Bahonsuai**	**2.057.294.135,00**	**1.777.567.375,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.057.294.135,00	1.777.567.375,00
11	**Puskesmas Laantula Jaya**	**2.904.758.925,00**	**2.747.824.828,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.904.758.925,00	2.747.824.828,00
12	**Puskesmas Tanjung Harapan**	**2.404.816.010,00**	**2.163.533.658,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.404.816.010,00	2.163.533.658,00
13	**Fonuasingko**	**1.297.874.541,00**	**1.250.590.551,00**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.297.874.541,00	1.250.590.551,00
14	**Dinas Pekerjaan Umum (PU)**	**511.563.894.978,00**	**368.656.842.200,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.845.655.937,00	17.524.482.366,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	36.295.953.526,00	31.868.932.613,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	34.259.021.006,00	30.025.768.676,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.117.715.000,00	17.863.239.414,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.932.993.468,00	23.448.736.043,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	141.885.810.467,00	133.630.432.617,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	229.009.940.574,00	110.459.363.832,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	352.005.000,00	210.780.000,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.864.800.000,00	3.625.106.639,00
15	**Badan Penanggulangan Bencana**	**35.517.616.012,00**	**32.982.311.273,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.915.800.630,00	1.748.437.361,00
	Program Penanggulangan Bencana	33.601.815.382,00	31.233.873.912,00
16	**Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi**	**2.457.022.094,00**	**2.139.449.225,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.710.667.182,00	1.602.552.560,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	77.993.800,00	46.970.600,00
	Program Hubungan Industrial	88.751.000,00	71.162.000,00
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	579.610.112,00	418.764.065,00
17	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD)**	**21.590.492.334,00**	**18.875.985.264,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.518.712.638,00	1.387.733.084,00
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	959.244.000,00	285.941.668,00
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	377.447.500,00	376.296.500,00
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	48.240.000,00	47.675.000,00
	Program Pengelolaan Persampahan	18.686.848.196,00	16.778.339.012,00
18	**Pemerintahan Desa (Pemdes)**	**2.412.776.724,00**	**2.220.893.789,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Perlindungan Perempuan	70.225.000,00	68.670.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	54.885.000,00	51.385.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.127.913.724,00	2.008.238.789,00
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	109.055.000,00	77.400.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	50.698.000,00	15.200.000,00
19	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora)**	**94.351.761.523,27**	**80.011.355.966,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.745.225.477,00	1.672.880.598,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	89.883.237.482,27	75.693.918.789,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	523.274.400,00	517.856.369,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.062.318.964,00	1.988.995.010,00
	Program Pemasaran Pariwisata	57.105.200,00	57.105.200,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80.600.000,00	80.600.000,00
20	**Dinas Perpustakaan Daerah**	**1.356.676.387,00**	**1.270.357.171,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.048.006.132,00	971.230.105,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	308.670.255,00	299.127.066,00
21	**Dinas Perikanan Daerah**	**33.888.870.440,00**	**31.307.811.722,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.007.152.323,00	1.745.281.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.933.956.590,00	23.611.523.692,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.947.761.527,00	5.951.007.030,00
22	**Bagian Organisasi**	**1.245.108.406,00**	**1.222.375.563,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.245.108.406,00	1.222.375.563,00
23	**Sekretariat DPRD**	**16.706.385.567,00**	**15.215.874.638,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.473.579.567,00	14.985.704.097,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	232.806.000,00	230.170.541,00
24	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)**	**11.634.338.516,00**	**10.263.399.666,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.956.606.276,00	5.118.795.108,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.981.395.750,00	1.659.980.300,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.696.336.490,00	3.484.624.258,00
25	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.450.308.596,00**	**1.788.982.086,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.308.596,00	1.490.136.086,00
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	298.846.000,00
26	**Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**	**3.510.379.908,00**	**3.095.419.735,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.478.879.908,00	3.067.227.035,00
	Program Kepegawaian Daerah	31.500.000,00	28.192.700,00
27	**Inspektorat Daerah**	**8.168.741.351,00**	**7.484.781.576,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.168.741.351,00	7.484.781.576,00
28	**RSUD Morowali**	**122.118.628.428,40**	**90.862.016.636,90**
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.315.749.934,52	57.653.957.286,38
	2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.802.878.493,88	33.208.059.350,52
29	**Rumah Sakit Pratama Paku (RS Paku)**	**21.837.966.478,00**	**13.527.862.828,00**
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.132.524.353,00	5.867.314.602,00
	2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.705.442.125,00	7.660.548.226,00
30	**Dinas Perumahan**	**168.034.996.552,84**	**133.257.095.464,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.732.177.225,00	1.363.876.814,00
	Program Pengembangan Perumahan	1.006.946.000,00	915.715.367,00
	Program Kawasan Permukiman	24.584.643.561,00	900.187.428,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	89.578.542.881,84	84.919.601.044,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.811.000,00	7.480.000,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	50.485.591.885,00	45.124.409.811,00
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	11.940.000,00	7.725.000,00
	Program Penatagunaan Tanah	619.344.000,00	18.100.000,00
31	**Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**	**22.967.485.660,00**	**22.701.166.921,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.904.335.660,00	22.638.091.921,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	63.150.000,00	63.075.000,00
32	**Dinas Sosial (Dinsos)**	**1.986.479.748,00**	**1.030.308.294,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.880.223.340,00	944.199.594,00
	Program Penanganan Bencana	64.230.658,00	59.690.000,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	42.025.750,00	26.418.700,00
33	**Dinas Pertanian**	**46.504.704.982,20**	**20.023.463.416,00**
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78.447.090,00	50.529.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.259.926.128,00	1.082.005.832,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.815.433.530,00	12.166.947.774,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.721.896.174,20	4.269.681.600,00
	Program Penyuluhan Pertanian	3.629.002.060,00	2.454.299.210,00
34	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil)**	**2.268.843.506,00**	**1.925.885.108,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.162.413.506,00	1.820.635.108,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	106.430.000,00	105.250.000,00
35	**Dinas Perhubungan**	**28.448.653.406,17**	**25.038.984.816,16**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.915.627.975,00	1.057.620.091,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.604.669.855,00	11.527.607.115,00
	Program Pengelolaan Pelayaran	14.928.355.576,17	12.453.757.610,16
36	**Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)**	**7.897.783.824,00**	**5.535.425.115,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.521.299.109,00	2.230.710.470,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.537.092.675,00	2.633.398.528,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	430.995.350,00	406.271.743,00
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	408.396.690,00	265.044.374,00
37	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi)**	**848.956.482,00**	**803.937.951,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	848.956.482,00	803.937.951,00
38	**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**	**1.711.269.550,00**	**1.594.697.727,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.664.782.550,00	1.548.219.727,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	46.487.000,00	46.478.000,00
39	**Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem)**	**1.328.663.550,00**	**1.203.632.838,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	279.227.550,00	243.852.831,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.049.436.000,00	959.780.007,00
40	**Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**309.538.820,00**	**291.233.236,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	282.502.350,00	266.398.136,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Perekonomian dan Pembangunan	27.036.470,00	24.835.100,00
41	**Bagian Hukum**	**257.938.980,00**	**240.025.230,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	257.938.980,00	240.025.230,00
42	**Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)**	**123.957.570,00**	**106.001.030,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	123.957.570,00	106.001.030,00
43	**Bagian Tata Pemerintahan (Tapem)**	**157.370.710,00**	**142.853.738,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.370.710,00	142.853.738,00
44	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)**	**2.006.504.730,00**	**1.814.724.963,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	170.610.730,00	144.092.759,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.835.894.000,00	1.670.632.204,00
45	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**2.863.893.450,00**	**2.591.431.274,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.863.893.450,00	2.591.431.274,00
46	**Bagian Umum**	**34.606.614.105,00**	**31.885.822.414,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.606.614.105,00	31.885.822.414,00
47	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**	**3.957.796.192,00**	**3.116.261.903,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.034.842.962,00	2.334.015.408,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	922.953.230,00	782.246.495,00
48	**Kecamatan Bahodopi**	**1.479.597.872,00**	**1.364.313.495,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.461.272.872,00	1.350.648.495,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.325.000,00	13.665.000,00
49	**Kecamatan Bumi Raya**	**4.010.389.805,00**	**3.577.445.180,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.921.817.305,00	3.529.895.180,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.572.500,00	47.550.000,00
50	**Kecamatan Bungku Barat**	**3.517.706.800,00**	**1.837.514.364,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.515.446.800,00	1.835.279.364,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.260.000,00	2.235.000,00
51	**Kecamatan Bungku Pesisir**	**1.431.395.615,00**	**1.335.500.765,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.431.395.615,00	1.335.500.765,00
52	**Kecamatan Bungku Selatan**	**7.260.220.446,00**	**7.059.127.263,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.229.150.446,00	7.028.127.263,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.070.000,00	31.000.000,00
53	**Kecamatan Bungku Tengah**	**378.796.465,00**	**145.497.134,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300.235.960,00	111.351.634,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.560.505,00	34.145.500,00
54	**Kecamatan Bungku Timur**	**802.335.106,04**	**374.830.599,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	779.003.106,04	374.830.599,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23.332.000,00	0,00
55	**Kecamatan Menui Kepulauan**	**5.613.762.800,00**	**5.341.679.943,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.596.392.800,00	5.324.309.943,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.370.000,00	17.370.000,00
56	**Kecamatan Witaponda**	**2.088.828.895,20**	**1.992.597.907,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.033.566.395,20	1.944.155.407,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.262.500,00	48.442.500,00
57	**Kecamatan Sombori (Sambori Kepulauan)**	**557.760.536,00**	**515.015.495,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	494.176.786,00	455.815.495,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.583.750,00	59.200.000,00
58	**Kelurahan Bungi**	**118.257.301,00**	**108.934.552,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.257.301,00	108.934.552,00
59	**Kelurahan Lamberea**	**268.130.983,00**	**248.519.611,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	268.130.983,00	248.519.611,00
60	**Kelurahan Matano**	**363.470.670,00**	**357.223.090,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	145.970.702,00	143.277.461,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	217.499.968,00	213.945.629,00
61	**Kelurahan Marsaoleh**	**124.652.262,00**	**122.431.259,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	124.652.262,00	122.431.259,00
62	**Kelurahan Tofoiso**	**291.086.384,00**	**287.777.546,00**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	173.345.584,00	170.036.746,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	117.740.800,00	117.740.800,00
63	**Kelurahan Mendui**	**336.785.316,00**	**331.419.868,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	200.288.392,00	196.208.868,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	136.496.924,00	135.211.000,00
64	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang)**	**214.393.810,50**	**200.767.702,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	214.393.810,50	200.767.702,00
65	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag)**	**80.487.637.986,28**	**55.895.462.168,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.980.237.255,00	1.846.082.160,00
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	36.301.000,00	17.740.000,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	41.461.561.843,98	26.053.224.722,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	443.914.000,00	443.835.938,00
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	36.487.615.887,30	27.459.062.750,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	78.008.000,00	75.516.598,00
66	**Kelurahan Ulunambo**	**116.868.739,00**	**109.840.763,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116.868.739,00	109.840.763,00
Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		**1.536.660.828.250,17**	**1.194.390.180.542,06**
Total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer		**3.091.171.831.896,85**	**2.469.104.224.532,24**
Rasio Anggaran Pendidikan		**49,71%**	**48,37%**

3.3 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a) Secara umum, yang menjadi hambatan dalam pencapaian target pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

(1) Kompetensi pendidik dan kependidikan PAUD yang masih kurang;

(2) Dalam pengelolaan dana BOS yaitu terkait pelaksanaan transaksi non tunai pada penggunaan dana BOS dimana tidak semua penyedia memiliki rekening untuk transaksi belanja; dan

(3) Kebijakan Kementrian Pendidikan terkait Program pelaksanaan Kurikulum yang harus ditindaklanjuti dengan membutuhkan anggaran.

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Mengadakan bimbingan teknis, pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;

(2) Bendahara membuat rekening untuk dilakukan transaksi bagi penyedia yang tidak memiliki rekening Bank BPD; dan

(3) Kegiatan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pada beberapa kegiatan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a) Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, Rumah Sakit Salabangkapaku, dan Puskesmas Se-Kabupaten Morowali terdapat pokok permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Masih terdapat ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama di atas usia kehamilan 3 bulan (K1 akses), sehingga pelayanan K6 tidak tercapai;

(2) Masih terdapat kasus kehamilan akibat *Married By Accident* (MBA);

(3) Dari 3.002 total persalinan, terdapat 74 persalinan yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan;

(4) Inisiasi Menyusui Dini (IMD) belum dilaksanakan secara optimal di rumah sakit;

(5) Pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang anak belum optimal;

(6) Skrining kesehatan masih terbatas pada anak usia pendidikan dasar yang bersekolah dan belum menjangkau anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah;

(7) Pelayanan kesehatan pada usia produktif masih berfokus pada pelayanan dalam gedung (Posyandu/Posbindu);

(8) Aplikasi pelaporan ASIK sering mengalami gangguan (*maintenance*);

(9) Kerja sama lintas program dan lintas sektor belum berjalan optimal;

(10) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut masih terfokus pada kegiatan Posyandu;

(11) Pelayanan kunjungan rumah pada lansia belum terlaksana secara optimal;

(12) Standar pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta SDM kesehatan terkait pelayanan lansia belum terpenuhi;

(13) Penderita hipertensi yang merasa kondisi kesehatannya sudah membaik enggan melakukan kunjungan ulang untuk pemeriksaan;

(14) Kasus hipertensi pada lansia dan pelayanan CKG belum seluruhnya tercatat dalam laporan pencatatan kasus;

(15)Penderita diabetes melitus yang merasa kondisi kesehatannya sudah membaik enggan melakukan kunjungan ulang untuk pemeriksaan;

(16)Kasus diabetes melitus pada lansia dan pelayanan CKG belum seluruhnya tercatat dalam laporan pencatatan kasus;

(17)Masih terdapat pasien ODGJ yang putus obat akibat rumitnya prosedur pengambilan obat;

(18)Kurangnya kepedulian keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien ODGJ;

(19)Kurangnya perhatian dan peran pemerintah setempat dalam pelayanan penanganan ODGJ;

(20)Penemuan dini kasus tuberkulosis pada orang terduga TB melalui skrining dan investigasi kontak belum optimal;

(21)Kurangnya kesadaran pasien TB dalam kepatuhan minum obat;

(22)Pelaksanaan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) belum berjalan optimal;

(23)Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran kelompok berisiko terhadap pentingnya skrining HIV;

(24)Peningkatan kelas rumah sakit menjadi Tipe B belum tercapai karena prasarana pendukung belum terpenuhi sesuai standar, antara lain ketersediaan oksigen sentral dan belum tersedianya layanan hemodialisa (HD);

(25)Angka kematian pasien kurang dari 24 jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih tinggi;

(26)Tenaga pemberi pelayanan gawat darurat yang memiliki sertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS yang masih berlaku belum terpenuhi (indikator 100%, realisasi 50%);

(27)Pertolongan persalinan melalui seksio sesarea masih tinggi (indikator 20%, realisasi 29%);

(28)Pemenuhan perawat ICU minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4 belum terpenuhi (indikator 100%, realisasi 53%);

(29)Karyawan yang memperoleh pelatihan minimal 20 jam per tahun masih rendah (indikator minimal 60%, realisasi 3%);

(30)Jaringan internet yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan SIPD Penatausahaan;

(31)Terjadinya rangkap tugas pada staf fungsional yang juga melaksanakan administrasi keuangan sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok;

(32)Belum adanya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki sertifikat barang dan jasa di Puskesmas;

(33) Masih terdapat keterbatasan penyedia untuk alat kesehatan tertentu pada aplikasi *E-Katalog* sehingga puskesmas mengalami kesulitan dalam pengadaan alat kesehatan;

(34) Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan puskesmas; dan

(35) Pengelola program belum dapat melaksanakan kegiatan secara optimal karena belum seluruh pengelola program memperoleh pelatihan sesuai dengan program yang diampu.

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah:

(1) Melakukan *sweeping* pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang *drop out* KB;

(2) Penyuluhan di masyarakat dan usia sekolah terkait kehamilan dini;

(3) Mempersiapkan rumah tunggu kehamilan dan pelaksanaan Gema Sebumi;

(4) Koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait Inisiasi Menyusui Dini bagi ibu yang bersalin di RS;

(5) Peningkatan kompetensi bidan dan kader terkait Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;

(6) Memaksimalkan pelaksanaan Posyandu Remaja;

(7) Melakukan kunjungan rumah, kantor, sekolah, dan tempat ibadah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia produktif;

(8) Perlu pencadangan data manual berdasarkan nama, alamat, dan NIK serta hasil skrining di masing-masing puskesmas;

(9) Koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor perlu ditingkatkan;

(10) Sosialisasi dan pemberdayaan (kampanye, pembentukan kelompok lansia, kerja sama dengan keluarga lansia);

(11) Meningkatkan akses pelayanan (jadwal dan tempat fleksibel serta optimalisasi kunjungan rumah);

(12) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sesuai standar serta peningkatan SDMK pelaksana pelayanan lansia;

(13) Memberikan penyuluhan edukasi tentang hipertensi agar penderita berkunjung setiap bulan dan memastikan tekanan darah terkontrol <140/90;

(14) Kerja sama dan koordinasi lintas program untuk pencatatan kasus;

(15) Memberikan penyuluhan edukasi tentang diabetes melitus agar penderita berkunjung setiap bulan dan memastikan gula darah terkontrol (GDP <126 dan GDS <200);

(16) Kerja sama dan koordinasi lintas program untuk pencatatan kasus;

(17)Koordinasi dengan BPJS Kesehatan bagi pasien ODGJ agar pengambilan obat dapat diwakili oleh keluarga pasien ODGJ;

(18)Edukasi keluarga terkait kepatuhan minum obat;

(19)Mempertegas tugas masing-masing tim terpadu penanganan ODGJ;

(20)Mengoptimalkan penemuan aktif melalui investigasi kontak dan skrining pada kelompok berisiko tertular TB;

(21)Memaksimalkan tindak lanjut pendampingan pasien oleh kader, penguatan PMO, edukasi pasien, dan pelacakan kasus mangkir minum obat;

(22)Edukasi kepada keluarga pasien tentang pentingnya TPT untuk pencegahan TBC;

(23)Kerja sama lintas sektor untuk melakukan edukasi;

(24)Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar;

(25)Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar;

(26)Renovasi ruang pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);

(27)Peningkatan kualitas SDM petugas IGD melalui pelatihan sesuai kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan;

(28)Peningkatan kualitas SDM petugas ICU melalui pelatihan sesuai kebutuhan pelayanan ICU;

(29)Peningkatan kualitas SDM seluruh karyawan rumah sakit melalui pelatihan minimal 20 jam per tahun dengan target minimal 60% karyawan;

(30)Pengajuan penambahan kuota layanan *Starlink*.

(31)Pengusulan tenaga administrasi keuangan;

(32)Mengusulkan untuk diadakannya Pelatihan Pengadaan Barang dan jasa kepada pegawai Puskesmas;

(33)Melakukan pemantauan berkala terhadap pembaruan penyedia di *E-Katalog* serta berkoordinasi terkait kebutuhan alat dan ketersediaan penyedia;

(34)Mengusulkan tenaga dengan latar belakang akuntansi dalam pengelolaan keuangan puskesmas; dan

(35)Mengusulkan pelatihan/bimbingan teknis bagi pengelola program kepada Dinas Kesehatan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pada tahun 2025, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkala dan terukur sehingga koreksi atas deviasi pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan secara dini;

(2) Keterbatasan waktu pelaksanaan akibat panjangnya proses administrasi (persiapan teknis, perizinan, dan pengadaan);

(3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis; dan

(4) Penyusunan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko lapangan sehingga target sulit dicapai.

b) Dari permasalahan diatas, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang;

(2) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan di akhir tahun;

(3) Peningkatan kompetensi ASN serta penyesuaian penugasan sesuai keahlian; dan

(4) Melakukan perbaikan perencanaan kinerja melalui penetapan target yang realistis, terukur, serta berbasis analisis risiko lapangan dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Optimalisasi SDM yang ada melalui peningkatan kompetensi dengan pelatihan, bimbingan teknis, dan program pengembangan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak berkompeten lainnya.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a) Permasalahan yang dihadapi pada Badan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

(1) Adanya kendala pada server dan aplikasi yang sering mengalami gangguan (*maintenance*);

(2) Lambatnya kemampuan SDM dalam menyesuaikan diri dengan penerapan sistem yang baru;

(3) Jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta personel belum memiliki pelatihan khusus; dan

(4) Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan penanganan kejadian kebakaran.

b) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(1) Meningkatkan optimalisasi aplikasi agar tidak sering mengalami gangguan;

(2) Melakukan perencanaan sistem dan peningkatan kapasitas SDM secara bersamaan;

(3) Melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta penambahan jumlah personel; dan

(4) Peningkatan sarana dan prasarana serta pembentukan pos sektor Pemadam Kebakaran.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a) Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah:

(1) Belum tercapainya target kinerja rehabilitasi sosial melalui pemberian sandang, dengan target 520 orang dan realisasi 340 orang, disebabkan perubahan pola penyaluran barang yang semula satu jenis barang diberikan kepada satu orang, namun pada pelaksanaannya beberapa jenis barang diberikan kepada orang yang sama sehingga jumlah penerima berkurang.

b) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(1) Melakukan evaluasi penyaluran sandang kepada masyarakat agar sesuai dengan target perencanaan.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

a) Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah adalah:

(1) Sebagian penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Lahan Usaha I dan II warga UPT Buleleng SP 1 dan SP 2 sebanyak 363 bidang oleh Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Morowali terhambat, karena lahan tersebut saat ini berada dalam kawasan hutan, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT);

(2) Sebagian penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Lahan Usaha I dan II warga UPT Wosu SP 1 sebanyak 405 bidang dan UPT Kabera sebanyak 350 bidang oleh Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Morowali terhambat, karena lahan tersebut berada dalam kawasan hutan dan/atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB); dan

(3) Kurangnya Pejabat Mediator hubungan Industrial.

b) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(1) Perlu dilakukan penurunan status dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Arel Penggunaan Lainnya (APL) dengan biaya dukungan penurunan status lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Areal Penggunaan Lainnya pada lokasi UPT

Buleleng SP 1 dan SP 2 sebesar Rp200.000.000,- berupa Pekerjaan Pemetaan GIS dan *Mapping Drone*;

(2) Perlu dilakukan penurunan status dari Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB) menjadi Arel Penggunaan Lainnya (APL) dengan biaya dukungan penurunan status lahan BPIIPB/Hutan Primer menjadi Areal Penggunaan Lainnya pada lokasi UPT Wosu SP 1 sebesar Rp150.000.000,- dan UPT Kabera sebesar Rp150.000.000,- berupa Pekerjaan Pemetaan GIS dan *Mapping Drone*; dan

(3) Penambahan Pejabat Mediator Hubungan Industrial.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a) Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten Morowali pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(1) Keterbatasan armada, ketidakefisienan rute pelayanan, serta pertumbuhan timbulan sampah yang lebih cepat dibandingkan kapasitas layanan;

(2) Kelembagaan TPS3R dan Bank Sampah belum optimal, SDM pengelola tidak berkelanjutan, serta insentif yang diberikan masih rendah;

(3) Pemilahan sampah dari sumber belum berjalan serta rendahnya kesadaran masyarakat;

(4) Data penghasil limbah B3 belum lengkap serta keterbatasan pengawasan di lapangan;

(5) Pengelolaan sampah masih dipersepsikan sebagai urusan DLHD semata;

(6) Sistem pelaporan kinerja masih dilakukan secara manual dan belum bersifat *real time*;

(7) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali telah memiliki bangunan laboratorium lingkungan, namun belum didukung oleh ketersediaan peralatan dan SDM yang memadai untuk pelaksanaan pengambilan serta pengujian sampel air laut, sungai, dan udara dalam rangka penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan

(8) Frekuensi dan cakupan pembinaan serta bimbingan teknis terkait kewajiban pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan masih terbatas.

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(1) Penyusunan ulang *service area* dan optimalisasi rute pengangkutan, pengadaan armada berdasarkan kebutuhan wilayah, serta pemetaan zona prioritas pelayanan;

(2) Revitalisasi TPS3R dan Bank Sampah berbasis kinerja, penerapan kontrak pengelolaan, serta pemberian insentif berbasis volume dan kualitas pemilahan sampah;

(3) Melaksanakan program wajib pilah sampah pada kawasan strategis serta integrasi kegiatan edukasi pemilahan sampah dengan sekolah, pasar, dan perkantoran;

(4) Pendataan digital penghasil limbah B3, penerapan kewajiban penggunaan manifest elektronik, serta peningkatan kegiatan inspeksi lapangan;

(5) Pembentukan Tim Pengendalian Sampah dan Limbah B3 Daerah lintas OPD dengan penetapan target kinerja bersama;

(6) Penerapan sistem monitoring digital yang mencakup data timbulan sampah, layanan pengelolaan, TPS3R, serta limbah B3;

(7) Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga laboratorium sesuai dengan kebutuhan operasional;

(8) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi;

(9) Pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium lingkungan sesuai standar; dan

(10) Melaksanakan pembinaan rutin, bimbingan teknis, serta sosialisasi kewajiban pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;

(2) Kurangnya penyebaran informasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

(3) Gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak layak sebagai kantor pelayanan publik.

b) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

(1) Melaksanakan sosialisasi mengenai urgensi kepemilikan dokumen kependudukan;

(2) Pemajangan informasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui baliho, *banner*, dan spanduk; dan

(3) Pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan standar pelayanan publik.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Belum maksimalnya Layanan Hotline PEDULI (Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Morowali);

(2) Beberapa kasus rujukan dari UPTD PPA Provinsi lain tidak mencantumkan data yang dibutuhkan termasuk data pelaku yang akurat, sehingga petugas pendamping kesulitan menangani tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan;

(3) Kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa/Aparat Desa dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Desa karena keluarga korban dan korban tidak melapor ke pemerintah setempat melainkan langsung melapor ke DPMDP3A atau langsung ke Polres Morowali;

(4) Belum tersedia data terpilah gender yang akurat dan lengkap pada Bidang Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data Gender, karena OPD terkait juga minim data (data yang diminta yang sesuai format tidak tersedia);

(5) Terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, karena kepala keluarga terlibat narkoba, adanya wanita idaman lain, penelantaran istri dan anak, perkelahian dalam anggota keluarga terkait perebutan hak warisan (harta benda) dan lain-lain;

(6) Kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap OPD;

(7) Masih kurangnya peran Forum Anak baik ditingkat Kabupaten, Kelurahan dan Desa;

(8) Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA);

(9) Masih terdapat desa/kelurahan yang belum menginput/memperbarui data Profil Desa dan Kelurahan pada aplikasi Prodeskel, serta data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pada aplikasi Epdeskel Kemendagri Ditjen Bina Pemerintah Desa;

(10) Desa masih menganggap Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagai program yang kurang prioritas, sehingga pelaksanaannya belum optimal;

(11) SDM Pengelola BUMDesa masih sangat rendah; dan

(12) Kurangnya partisipasi kepala desa dalam hal Posyantek.

b) Rencana tidak lanjut dari permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengaduan kepada masyarakat adar dapat menggunakan sistem Aplikasi Hotline PEDULI;

(2) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada UPTD yang merujuk kasus terkait kelengkapan data-data yang dibutuhkan;

(3) Melaksanakan sosialisasi PERDA atau PERBUB perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan terhadap perempuan ke Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Morowali;

(4) Membentuk Forum Data di Kabupaten Morowali (Satu Data Indonesia);

(5) Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang bekerjasama dengan BNN, Peningkatan Kualitas Keluarga yang bekerjasama dengan DinkesPPKB dan Sosialisasi Penegakkan KDRT;

(6) Sosialisasi terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada setiap OPD;

(7) Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan terkait pemenuhan hak anak ke dalam APB Desa agar Forum Anak yang telah dibentuk dapat dioptimalkan;

(8) Meningkatkan peran serta Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);

(9) Menyampaikan surat dan laporan kepada desa/kelurahan yang belum menginput dan/atau memperbarui data Profil Desa dan Kelurahan pada aplikasi Prodeskel, serta data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pada aplikasi Epdeskel Kemendagri;

(10) Melaksanakan pembinaan pada desa/kelurahan yang belum melakukan penginputan dan pemutakhiran data Profil Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Prodeskel, serta data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Epdeskel Kemendagri;

(11) Perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa; dan

(12) Perlu dilaksanakan pendampingan Teknologi Tepat Guna.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a) Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Keterbatasan sumber daya manusia pada bidang perencanaan dan program yang memiliki sertifikasi; dan

(2) Adanya keterlambatan dokumen penyerahan lokasi kegiatan.

b) Rencana tidak lanjut dari permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

(1) Mengusulkan pengangkatan pada jabatan yang memerlukan sertifikasi; dan

(2) Melakukan percepatan proses serah terima dokumen lokasi kegiatan kepada pemerintah daerah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a) Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Wilayah dan jumlah pendudukan di Kabupaten Morowali didominasi oleh wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan sehingga menyulitkan akses dan pemerataan penyebaran TIK.

b) Rencana tidak lanjut dari Permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Membangun dan menerapkan secara bertahap sistem berbasis aplikasi dalam pengelolaan pemerintahan.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah:

(1) Belum tertibnya pelaporan koperasi, di mana masih terdapat koperasi yang belum menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan keuangan kepada Dinas secara lengkap dan tepat waktu;

(2) Pelaksanaan pengawasan koperasi belum berjalan secara optimal akibat belum diperbaruinya data keanggotaan, status kesehatan, serta informasi lokasi koperasi secara berkala;

(3) Masih rendahnya kesadaran pengurus dan pengawas koperasi dalam menyampaikan laporan perkembangan usaha koperasi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Masih terdapat pengurus koperasi yang belum mampu menyusun laporan keuangan koperasi sehingga tidak dapat melaporkan perkembangan usaha koperasi, baik melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun laporan bulanan koperasi;

(5) Terbatasnya permodalan koperasi sehingga kegiatan usaha koperasi tidak berjalan dan berkembang secara optimal;

(6) Pelatihan tenaga pendamping kapasitas usaha dan pendata dilaksanakan pada akhir tahun (Triwulan IV), sementara pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Pelatihan) telah berlangsung pada Triwulan III;

(7) Terdapat kendala akses tautan OSS untuk penerbitan kembali Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 9 (sembilan) pelaku usaha yang telah memiliki NIB, namun lupa kata sandi sehingga proses penerbitan kembali NIB tidak berhasil;

(8) Kinerja tenaga pendata dalam melakukan input SIDT belum optimal akibat kesulitan dalam menghubungi pelaku usaha; dan

(9) Sebagian pelaku usaha yang direkrut berusia di atas 50 tahun sehingga mengalami kendala dalam menerima materi pelatihan.

b) Rencana tindak lanjut atau solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Pendampingan kepada pengurus koperasi dalam penyusunan dan penyampaian laporan, serta sosialisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan digital guna mendukung ketertiban administrasi dan keteraturan pelaporan koperasi;

(2) Pembaruan data keanggotaan, status kesehatan, dan alamat lokasi koperasi secara berkala melalui sistem basis data koperasi (ODS Mandiri), disertai pelatihan teknis kepada pengurus koperasi serta verifikasi lapangan guna menjamin akurasi data, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih tertata, tepat sasaran, dan efisien;

(3) Pembinaan secara berkala kepada pengurus dan pengawas koperasi;

(4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara berkala bagi pengurus dan pengawas koperasi;

(5) Pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dari Pemerintah Daerah;

(6) Memfasilitasi akses permodalan melalui pihak ketiga seperti perbankan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB);

(7) Melaksanakan pembekalan bagi tenaga pendamping kapasitas usaha dan tenaga pendata sebelum pelaksanaan kegiatan;

(8) Perlu memiliki akun turunan OSS pada Organisasi Perangkat Daerah terkait;

(9) Menyediakan fasilitas kendaraan operasional bagi tenaga pendamping guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan; dan

(10) Menetapkan batas usia maksimal dalam proses perekrutan pelaku usaha.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

a) Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Lambatnya sosialisasi pemberian insentif dan kemudahan terhadap pelaku usaha serta kurangnya minat PMDN untuk mendapatkan insentif kemudahan berusaha.

b) Hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

(1) Melakukan sosialisasi perda pemberian insentif dan kemudahan berusaha terhadap perusahaan PMDN.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a) Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

(1) Belum optimalnya peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan destinasi secara mandiri;

(2) Kurangnya fasilitas yang memadai di daerah Kawasan wisata;

(3) Pengelolaan kebersihan di kawasan wisata belum dilaksanakan secara optimal, yang ditandai dengan masih ditemukannya sampah di beberapa titik lokasi wisata;

(4) Kegiatan promosi pariwisata masih terbatas dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal;

(5) Sebagian pelaku dan pengelola pariwisata belum memiliki kompetensi yang memadai dalam hal pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata;

(6) Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, baik dari segi jumlah maupun kualitas, masih belum memadai untuk menunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga secara optimal;

(7) Partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga masih relatif rendah, sehingga potensi pemuda belum sepenuhnya dapat dikembangkan;

(8) Program pembinaan atlet usia dini dan atlet muda belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur;

(9) Jumlah serta kompetensi pembina dan pelatih olahraga masih terbatas, sehingga berdampak pada kualitas pembinaan olahraga;

(10) Pelaku ekonomi kreatif, khususnya usaha mikro dan kecil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usaha;

(11) Sebagian produk ekonomi kreatif belum memiliki keunikan, standar kualitas, dan inovasi yang memadai sehingga daya saing masih rendah;

(12) Jangkauan pemasaran produk ekonomi kreatif masih terbatas dan belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital; dan

(13) Pelaku ekonomi kreatif masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.

b) Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah:

(1) Melaksanakan bimbingan teknis sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata dan pengelola destinasi;

(2) Pengalokasian dana pemeliharaan rutin (rehabilitasi ringan) pada titik-titik fasilitas publik yang rusak;

(3) Menyusun sistem pengelolaan kebersihan yang berkelanjutan, termasuk penyediaan fasilitas kebersihan dan peningkatan pengawasan di kawasan wisata;

(4) Melaksanakan promosi terpadu melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, serta menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan pariwisata;

(5) Menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan bagi pelaku pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing destinasi;

(6) Melakukan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas;

(7) Mendorong keterlibatan pemuda melalui penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang bersifat edukatif, kreatif, dan berkelanjutan;

(8) Menyusun dan melaksanakan program pembinaan atlet muda secara terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan prestasi olahraga.

(9) Menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan bagi tenaga pembina dan pelatih olahraga;

(10) Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan, program bantuan pemerintah, dan skema pendanaan lainnya;

(11) Menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan inkubasi usaha guna mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif;

(12) Mengembangkan strategi pemasaran digital, keikutsertaan dalam pameran, serta pemanfaatan digital untuk memperluas pasar; dan

(13) Melaksanakan program peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

10) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

a) Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pelayanan; dan

(2) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang mengakibatkan pelayanan menjadi kurang optimal.

b) Rencana tidak lanjut dari permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM; dan

(2) Peningkatan sarana dan prasarana kantor guna mendukung kelancaran pelayanan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a) Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan pengadaan bibit rumput laut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan musim tanam.

b) Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain:

(1) Penjadwalan pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit rumput laut perlu disesuaikan dengan musim tanam rumput laut.

2) Urusan Pilihan Pertanian dan Ketahanan Pangan

a) Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

(1) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada tingkat dinas menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut :

(1) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam penyusunan perencanaan pengadaan serta rencana penarikan dana (*disbursement plan*).

3) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a) Dalam pelaksanaan urusan ini masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah:

(1) Kurangnya jumlah SDM Bidang Perdagangan;

(2) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melengkapi izin usaha perdagangan dan izin usaha pergudangan;

(3) Masih rendahnya tingkat pemenuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;

(4) Program pengendalian izin usaha industri sangat rendah dimana pada umumnya usaha industri belum memenuhi standar usaha dan standar produk sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya rekomendasi; dan

(5) Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengawasan serta advokasi ke Perusahaan Industri.

b) Rencana tindak lanjut atau solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah:

(1) Memasukan usulan kebutuhan PPPK dan CPNS di Bidang Perdagangan;

(2) Melakukan sosialisasi *door to door* terhadap pelaku usaha perdagangan;

(3) Memasukan usulan kegiatan peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan melalui Dana Alokasi Khusus;

(4) Perlu melakukan advokasi dan pemdampingan pelaku usaha untuk pemenuhan standar usaha tersebut, dan sarana prasarana kegiatan tersebut perlu di perhitungkan; dan

(5) Mengupayakan kendaraan operasional bidang teknis untuk kunjungan langsung ke kawasan industri.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

1) Adapun beberapa hambatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

a) Manajemen pengelolaan kebijakan strategis pada setiap OPD dalam penyampaian usulan Standar Harga Satuan (SHS) serta pelaporan realisasi belanja belum optimal sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan kebijakan daerah.

b) Pengelolaan BUMD dan BLUD belum maksimal;

c) Pendistribusian LPG 3 kg belum merata, khususnya di wilayah kepulauan;

d) Penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya ojek laut, belum teralokasi secara memadai, serta akses bagi nelayan masih terbatas;

e) Data potensi sumber daya alam (SDA) belum tersedia secara lengkap dalam bentuk dokumen, serta permasalahan pengelolaan SDA belum dapat ditindaklanjuti secara optimal akibat keterbatasan data dan informasi dari sektor terkait;

f) Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan kepala daerah wajib dilakukan pengharmonisasian pada kanwil hukum dan HAM membawa dampak proses pembentukan produk hukum yang berbentuk peraturan kepala daerah Panjang prosesnya, hal tersebut belum banyak dipahami oleh perangkat daerah pemrakarsa;

g) Kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan, dengan hanya terdapat 1 (satu) perancang dibagian hukum;

h) Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah Kab. Morowali yang menjadi obyek sengketa tidak relevan;

i) Adanya tranformasi atau perubahan dari *website* lama ke *website* baru yang mengharuskan untuk menginput dan mengupload ulang segala produk hukum Kabupaten Morowali dari Tahun 2015 sampai Tahun 2025;

j) Belum maksimalnya signal dan belum stabilnya listrik yang menjadi kendala bagi operator *Website* JDIH dan proses penginputan produk hukum Kabupaten Morowali;

k) Dalam pelaksanaan pembayaran hibah berupa uang kepada organisasi keagamaan, sarana rumah ibadah, dan pendidikan keagamaan, masih terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman calon penerima hibah terhadap persyaratan dan tata cara penyusunan proposal/permohonan, sehingga proposal yang diajukan perlu dilakukan perbaikan;

l) Keterlambatan respons OPD dalam penyampaian data kepada Tim Pendamping Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

m) Persiapan pelaksanaan pengadaan belum berjalan sesuai rencana akibat belum terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;

n) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas;

o) Masih rendahnya pemahaman penyedia terhadap proses pengadaan barang dan jasa;

p) Keterbatasan jumlah staf, ketidaksesuaian kompetensi, serta tingginya beban kerja pada tim yang ada;

q) Perubahan regulasi di tingkat pusat (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri) menuntut penyesuaian yang cepat di daerah;

2) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Penetapan mekanisme pengumpulan data dan penginputan usulan melalui aplikasi Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Morowali yang lebih jelas dan mengikat;

b) Mendorong optimalisasi pengelolaan BUMD dan BLUD melalui pendampingan dan pembinaan oleh OPD terkait;

c) Melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk pembukaan kuota khusus LPG bagi wilayah kepulauan serta mendorong pendirian SPBE di Kabupaten Morowali;

d) Mendorong penyampaian dan pemutakhiran data ojek laut di seluruh wilayah Morowali serta fasilitasi pendirian SPBN dan subpenyalur BBM;

e) Penyusunan *data base* potensi SDA Kabupaten Morowali, disertai sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pada masing-masing sektor serta penyusunan kajian potensi SDA;

f) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis pemrakarsa rancangan peraturan;

g) Penambahan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Guna mempercepat dan memperlancar proses produk hukum;

h) Setiap OPD harus wajib menyusun Dokumen Administrasi sesuai ketentuan Perundang-undangan;

i) Menyediakan tambahan sumber daya manusia Operator *Website* JDIH;

j) Menjalin Kerjasama Tim Pengembangan pengelolaan *Website* Jdih dengan melibatkan Dinas Kominfo Kabupaten Morowali;

k) Memberikan arahan dan petunjuk teknis secara sistematis terkait penyusunan proposal hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

l) Penguatan koordinasi dan penegasan komitmen kepada OPD dalam penyampaian data secara tepat waktu kepada Tim Pendamping Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP;

m) Pengusulan penambahan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, termasuk pada Pokja Pemilihan;

n) Optimalisasi dan pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

o) Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait proses pengadaan barang dan jasa;

p) Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengusulan penambahan personel, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta penataan pembagian tugas secara lebih efektif dan proporsional;

q) Perlunya waktu untuk memahami regulasi, penyesuaian kebijakan teknis, serta sinkronisasi dengan kondisi dan sumber daya yang ada;

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Adapun beberapa hambatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kegiatan terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan waktu dan kendala administratif;

b) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;

c) Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

d) Terbatasnya fasilitas pendukung dalam pencatatan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;

e) Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penagihan pajak;

f) Penerapan sistem merit belum dilaksanakan secara konsisten, serta hasil *assessment center* belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kepegawaian (mutasi dan promosi).

2) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait serta menyesuaikan mekanisme pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik;

b) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

c) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang ekstensifikasi penerimaan pajak daerah;

d) Melakukan pemasangan alat perekam transaksi pada objek pajak yang memiliki potensi penerimaan besar;

e) Mengembangkan aplikasi pelayanan perpajakan daerah untuk mempermudah wajib pajak termasuk pembayaran secara daring aplikasi, seperti aplikasi Smartgov;

f) Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan;

g) Melakukan penambahan fasilitas pendukung pencatatan serta pengelolaan penerimaan pajak;

h) Meningkatkan kompetensi petugas penagihan pajak melalui pelatihan sesuai kebutuhan;

i) Menambah personel penagihan pajak;

j) Mengembangkan aplikasi yang mempermudah proses pembayaran pajak oleh wajib pajak;

k) Melakukan penguatan pengawasan penerapan sistem merit, peningkatan transparansi manajemen talenta ASN, serta evaluasi kebijakan dan mekanisme pendaftaran seleksi jabatan;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Adapun beberapa hambatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan di Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/monitoring belum sepenuhnya sesuai rencana karena keterbatasan SDM auditor, keterlambatan penyampaian dokumen, dan kendala jangkauan lokasi; dan

b) Penyesuaian dalam proses pengadaan dan kebutuhan operasional yang memerlukan penyelarasan mekanisme pelaksanaan.

2) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Penajaman prioritas berbasis risiko, optimalisasi metode *desk audit/hybrid*, penguatan koordinasi permintaan dokumen, pembagian tim dan supervisi berjenjang, serta monitoring progres penugasan secara periodik; dan

b) Perencanaan pengadaan secara terstruktur, monitoring pelaksanaan secara berkala, serta evaluasi dan konsolidasi kebutuhan operasional.

g. Unsur Kewilayahan

1) Adapun beberapa hambatan pada unsur kewilayahan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

a) Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal karena keterbatasan partisipasi dan waktu;

b) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum terlaksana secara optimal;

c) Belum adanya pembinaan pegawai dalam penyusunan administrasi serta pelaporan keuangan;

d) Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya menguasai sistem elektronik;

e) Masih terdapat kekosongan jabatan Pengelola Keuangan;

f) Gangguan pada sistem internet dan aplikasi penatausahaan yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan; dan

g) Masih rendahnya pemanfaatan aplikasi E-Katalog oleh rekanan (penyedia).

2) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Evaluasi metode pelaksanaan serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa;

b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN;

c) Melaksanakan pembinaan pegawai dalam penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan;

d) Melaksanakan bimbingan teknis kepada pegawai dalam penguasaan sistem elektronik;

e) Mengusulkan pengisian jabatan Pengelola Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

f) Melakukan koordinasi dan perbaikan sistem secara berkala; dan

g) Menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai proses pendaftaran, penayangan produk, dan tata cara pelaksanaan *e-purchasing*.

h. Unsur Pemerintahan Umum

1) Adapun beberapa hambatan pada unsur kewilayahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah sebagai berikut:

a) Potensi menurunnya ikatan sosial di masyarakat, khususnya di kalangan remaja;

b) Masih rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme;

c) Dinamika politik nasional yang berkembang melalui media sosial berpotensi menimbulkan persepsi dan respons yang beragam di masyarakat;

d) Pemahaman politik masyarakat yang belum merata sehingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial;

e) Potensi munculnya konflik sosial dan berbagai bentuk penyakit masyarakat;

f) Keberagaman latar belakang masyarakat yang memerlukan penguatan koordinasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;

g) Masih rendahnya pemahaman pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait status, kedudukan, dan kewajiban pelaporan keberadaan di daerah;

h) Tingkat kesejahteraan masyarakat dan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian berkelanjutan; dan

i) Masih terdapat organisasi keagamaan dan pengurus rumah ibadah yang belum sepenuhnya memahami ketentuan pendirian rumah ibadah sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan ruang-ruang kegiatan yang positif bagi generasi muda;

b) Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan melalui diklat dan seminar terkait wawasan kebangsaan dan nasionalisme;

c) Meningkatkan literasi digital dan pemahaman penggunaan media sosial secara bijak melalui edukasi dan sosialisasi;

d) Melaksanakan kegiatan edukatif dan pencerahan politik serta memperkuat komunikasi publik melalui berbagai media, termasuk kanal digital;

e) Penguatan nilai-nilai budaya dan norma sosial melalui pembinaan serta koordinasi dengan unsur terkait;

f) Meningkatkan kewaspadaan dini dan koordinasi dengan FKDM serta unsur masyarakat lainnya;

g) Melaksanakan sosialisasi regulasi serta memperkuat koordinasi dengan Tim Terpadu Pengawasan Ormas;

h) Melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam pengendalian sosial dan peningkatan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat dan pelajar; dan

i) Melaksanakan sosialisasi regulasi serta memperkuat kemitraan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2022, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pada Pemerintah Kabupaten Morowali yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang termasuk ke dalam Entitas Akuntansi adalah SKPD dan PPKD, sedangkan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Morowali yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) dan evaluasi kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi yang meliputi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, serta sisa lebih/kurang

pelaksanaan anggaran dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), termasuk surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip akuntansi, yaitu: (1) basis akuntansi; (2) prinsip nilai historis; (3) prinsip realisasi; (4) prinsip substansi mengungguli bentuk formal; (5) prinsip periodisasi; (6) prinsip konsistensi; (7) prinsip pengungkapan lengkap; dan (8) prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kedua, penerapan nilai historis (historical cost), aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Ketiga, realisasi (realization), pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (substance over form), informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (periodicity), kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK.

Keenam, konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya: pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali disusun dan diterapkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi. Pemerintah Kabupaten Morowali telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara penuh sejak Tahun Anggaran 2015.

Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Morowali menerapkan kebijakan sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

4.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Morowali atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari:

1) Kas di daerah;
2) Kas di Bendahara Penerimaan;
3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
5) Kas lainnya.

Setara kas terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

a. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.1.2 Akuntansi Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

a. Pengakuan Piutang

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang TP/TGR harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM atau dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan:

1) Surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
2) Putusan Pengadilan Pajak atas wajib pajak yang mengajukan banding; dan
3) Tagihan yang masih dalam proses keberatan atau banding yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

b. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman, piutang inilai sebesar jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah atau nilai wajar barang/jasa yang diberikan. Pada akhir periode diakui pula bunga, denda, atau biaya lain yang telah menjadi hak tetapi belum dibayar;
2) Penjualan, piutang dinilai sebesar nilai yang terutang sesuai perjanjian. Apabila terdapat potongan pembayaran, piutang dicatat sebesar nilai bersihnya;
3) Kemitraan, piutang dinilai sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama; dan
4) Pemberian fasilitas/jasa, piutang dinilai sebesar nilai jasa yang telah diberikan dikurangi pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima; dan
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Kualitas piutang lancar;
2) Kualitas piutang kurang lancar;
3) Kualitas piutang diragukan; dan
4) Kualitas piutang macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak *(self assessment);* dan

2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah *(official assessment)*.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun;
   b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
   c) Wajib Pajak kooperatif;
   d) Wajib Pajak likuid; dan
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
   b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
   c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan
   d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
   a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
   c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan
   d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun;
   b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
   c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
   d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
   b) Wajib Pajak kooperatif;
   c) Wajib Pajak likuid; dan
   d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
   b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan
   c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan
   c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun;
   b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
   c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan
   d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure).*

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1) Kualitas lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/ atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu sejak jatuh tempo sampai 6 (enam) bulan belum dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan; dan

4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu di atas 12 (dua belas) bulan tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

Tabel 4.1 Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Keterangan
a.	Lancar	0,5	(Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
b.	Kurang Lancar	10	
c.	Diragukan	50	
d.	Macet	100	

4.4.1.3 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) Diterima atau hak kepemilikannya/kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD misalnya persediaan barang habis pakai, sedangkan untuk persediaan yang sifatnya untuk operasional di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat misalnya obat dan alat kesehatan menggunakan metode perpetual sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:

1) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
2) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
3) Barang konsumsi;
4) Barang pakai habis;
5) Barang cetakan; dan

6) Perangko dan materai.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.4.1.4 Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

a. Pengakuan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Morowali;
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

b. Pengukuran Investasi

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila tidak terdapat pasar aktif, investasi dapat diukur berdasarkan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Investasi Jangka Pendek
   a) Surat Berharga (saham, obligasi jangka pendek), dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu harga transaksi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya terkait perolehan. Apabila tidak tersedia biaya perolehan, diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan.
   b) Deposito dan investasi non-saham lainnya dicatat sebesar nilai nominal.
2) Investasi Jangka Panjang
   a) Investasi permanen (penyertaan modal) dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.
   b) Investasi Non Permanen, meliputi:
      (1) Obligasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat sebesar nilai perolehan;
      (2) Investasi untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
      (3) Investasi pada proyek pembangunan, diukur sebesar biaya pembangunan sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.
   c) Investasi yang diperoleh melalui pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Morowali diukur sebesar harga perolehan atau nilai wajarnya apabila harga perolehan tidak tersedia.
   d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
   e) Diskonto atau premi atas pembelian investasi diamortisasi sampai dengan jatuh tempo. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

c. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya, yaitu investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil investasi yang diterima diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas, yaitu investasi dinilai sebesar biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sesuai persentase kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba

yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan apabila terdapat perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan, digunakan untuk investasi yang akan dilepas dalam waktu dekat atau bersifat nonpermanen. Investasi dinilai sebesar harga perolehan dikurangi penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Penyisihan dihitung berdasarkan umur jatuh tempo (*aging schedule*) sebagai berikut:

   a) Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun: 25%

   b) Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun: 50%

   c) Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun: 75%

   d) Jatuh tempo pada periode di atas 4 tahun: 100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4) Investasi jangka panjang nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

4.4.1.5 Akuntansi Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Karakteristik utama dana bergulir:

1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;

2) Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;

3) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;

4) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencatatan alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan);
5) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
6) Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir;
7) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok seterusnya (bergulir); dan
8) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir. Rencana pengeluran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat dineraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan tandingannya adalah Kas di Kas Daerah. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dan bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiyaan Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan hasil daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat dineraca mengurangi dana bergulir dan tandingannya Kas di Kas Daerah.

Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

a. Pengakuan Dana Bergulir

Suatu pengeluran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali; dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

Realisasi pengeluran dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

b. Pengukuran Dana Bergulir

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan kemasyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

c. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat derealisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya atau (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan kerugian pada laporan operasional.

d. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih, dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.

e. Metode Penilaian

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

4.4.1.6 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan memiliki nilai yang signifikan dalam penyajian Neraca. Yang termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah:

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, seperti instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2) Hak atas tanah.

Yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;
2) Peralatan dan mesin;
3) Gedung dan bangunan;
4) Jalan, irigasi , dan jaringan;
5) Aset tetap lainnya; dan
6) Konstruksi dalam pengerjaan.

a. Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Nilai Batas Kapitalisasi Per Jenis Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Alat Besar	
	Alat Besar Darat	10.000.000,00
	Alat Besar Apung	10.000.000,00
	Alat Bantu	10.000.000,00
3	Alat Angkutan	
	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00
	Alat Angkutan Apung Bermotor	5.000.000,00
	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.000.000,00
	Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
	Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
	Alat Ukur	300.000,00
5	Alat Pertanian	
	Alat Pengolahan	5.000.000,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat Kantor	300.000,00
	Alat Rumah Tangga	300.000,00
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
7	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
	Alat Studio	300.000,00
	Alat Komunikasi	500.000,00
	Peralatan Pemancar	500.000,00
	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	Alat Kedokteran	300.000,00
	Alat Kesehatan Umum	300.000,00
9	Alat Laboratorium	
	Unit Alat Laboratorium	300.000,00
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya (Rp)
	Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000,00
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	300.000,00
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.000,00
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00
10	Komputer	
	Komputer Unit	300.000,00
	Peralatan Komputer	300.000,00
11	Alat Eksplorasi	
	Alat Eksplorasi Topografi	300.000,00
	Alat Eksplorasi Geofisika	300.000,00
12	Alat Pengeboran	
	Alat Pengeboran Mesin	300.000,00
	Alat Pengeboran Non Mesin	300.000,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
	Sumur	300.000,00
	Produksi	300.000,00
	Pengolahan dan Pemurnian	300.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	
	Alat Bantu Eksplorasi	300.000,00
	Alat Bantu Produksi	300.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	
	Alat Deteksi	300.000,00
	Alat Pelindung	300.000,00
	Alat SAR	300.000,00
	Alat Kerja Penerbangan	300.000,00
16	Alat Peraga	300.000,00
17	Alat Persenjataan/Keamanan	300.000,00
18	Peralatan Proses/Produksi	300.000,00
19	Rambu-Rambu	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	300.000,00
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	300.000,00
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	300.000,00
20	Peralatan Olahraga	300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya (Rp)
21	Bangunan Gedung	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
22	Monumen/Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000,00
23	Bangunan Menara	10.000.000,00
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti/Tanda Batas	10.000.000,00
25	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
26	Buku/Kepustakaan	0,00
27	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00
28	Hewan/Ternak dan Tanaman: Hewan Ternak Tumbuhan Pohon Tumbuhan Tanaman Hias	 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
29	Lainnya (selain yang tersebut dari Nomor 1 s.d. 28 di atas)	300.000,00

b. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan revaluasi, melainkan digunakan sebagai dasar pengukuran awal apabila biaya perolehan tidak tersedia. Revaluasi hanya dilakukan untuk periode pelaporan setelah pengakuan awal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

c. Penilaian Awal

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

d. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset kekondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset kekondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.

f. Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4.1.7 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

a. Pengakuan KDP

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

b. Penyelesaian KDP

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan, antara lain:

1) Apabila aset telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;

2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;

3) Apabila aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan dalam CaLK;

4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;

5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan; dan

6) Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

c. Pengukuran KDP

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

d. Penghentian KDP

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara

permanen atau belum ada kepastian terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi ditahun berikutnya dan/atau masa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang sudah/atau lebih 3 (tiga) tahun, maka saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut harus dikeluarkan dari Neraca.

4.4.1.8 Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

a. Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

b. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan;
2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5) Sumber dana cadangan; dan

6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan-LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.4.1.9 Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Morowali yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1) Tagihan piutang penjualan angsuran, merupakan tagihan atas penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran, seperti penjualan rumah dinas atau kendaraan dinas kepada pegawai;

2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, merupakan tagihan atas kerugian daerah yang dibebankan kepada bendahara (TP) atau pegawai bukan bendahara (TGR) akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas;

3) Kemitraan dengan pihak ketiga, merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset atau hak usaha;

4) Aset tak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Jenis Aset Tak Berwujud adalah *goodwill*, hak paten dan hak cipta, royalti, s*oftware*, lisensi, hasil kajian/penelitian, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

5) Aset lain-lain, digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok di atas. Yang termasuk dalam Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, dan aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

a. Pengakuan Aset Lainnya

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan atas kerugian yang disebabkan oleh Bendahara terdiri dari:

1) Kekurangan kas, surat berharga, atau barang milik daerah diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dan direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya;
2) Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) diakui pada saat diterbitkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK;
3) Apabila terbukti bukan kesalahan bendahara, diakui sebagai Beban Non Operasional.

Pengakuan atas kerugian yang disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara terdiri dari:

1) Kekurangan aset diakui pada saat terbukti dan direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya;
2) Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) diakui pada saat diterbitkan SKTJM atau keputusan pejabat berwenang;
3) Apabila terbukti bukan kesalahan pegawai, diakui sebagai Beban Non Operasional.

Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat terdiri dari:

1) Bagi entitas yang mengalami kerugian:
    a) Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan;
    b) Pengakuan atas kekurangan aset, diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
2) Bagi entitas yang berhak menerima:
    a) Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan;
    b) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di Kas daerah;
    c) Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

b. Pengukuran dan Penilaian

Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Penyerahan/pengembalian aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian dinilai sebesar nilai tercatat pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap atau dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan. Aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
2) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud dikemudian hari; dan
3) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.4.1.10 Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, maupun untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah contoh Properti Investasi:

1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3) Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya adalah sebagai berikut:

1) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan
2) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

a. Pengakuan

Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi tersebut; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi. Pemerintah Kabupaten Morowali tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

b. Pengukuran

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non-pertukaran, maka Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Setelah pengakuan awal, Properti Investasi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan metode garis lurus sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Morowali.

Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas Properti Investasi hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

c. Penyajian

Properti Investasi disajikan sebagai aset non lancar pada Neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas

Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian memanfaatkan properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

d. Alih Guna

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1) Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Aset Tetap;
2) Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;
3) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari Aset Tetap menjadi Properti Investasi; dan
4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Alih guna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Alih guna aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

e. Pelepasan

Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat:

1) Pelepasan; atau
2) Ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
3) Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Morowali.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan sumber dana atau pemberi pinjaman. Sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri akan disajikan dalam kelompok utang luar negeri, dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok utang dalam negeri.

Utang dalam negeri diklasifikasikan dalam:

1) Utang dalam negeri - jangka pendek, antara lain:
   a) Utang kepada Pihak Ketiga;
   b) Utang Bunga;
   c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga;
   d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
   e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah;
   f) Pendapatan Diterima Dimuka; dan
   g) Utang Transfer.
2) Utang dalam negeri - jangka panjang, antara lain:
   a) Utang Dalam Negeri – Non Perbankan; dan
   b) Utang Dalam Negeri – Perbankan.

a. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
2) Transaksi tanpa pertukaran (non exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government related events); dan
4) Kejadian yang diakui pemerintah (government acknowledged events).

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

1) Barang yang dibeli sudah diterima;
2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan

3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang kepada pihak ketiga juga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Utang Beban, diakui pada saat:

1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah; dan
3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang Transfer diakui pada saat terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan, misalnya Alokasi Dana Desa atau Dana Bagi Hasil Desa yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Utang Transfer juga diakui pada saat Pemerintah Kabupaten Morowali menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya dari Pemerintah Pusat/Provinsi.

Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah atau Bendahara Pengeluaran OPD untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang

persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Uang Muka dari Kas Umum Daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima Uang Persediaan (UP) dari Kas Umum Daerah.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Utang Pembelian Cicilan diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Kewajiban Kontigensi diakui apabila kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*), pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.

Restrukturisasi utang diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Utang Kepada Pihak Ketiga dapat diukur sebagai berikut:

1) Pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten morowali menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak; dalam hal perjanjian/kontrak menyebutkan syarat pembayaran (*terms ofpayment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan

sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

2) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten morowali, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan; dan

3) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antara unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintah.

Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan, namun kasnya telah diterima.

Kewajiban pada Pihak Lain diukur sebesar saldo dana kepada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari SPM LS yang belum diserahkan sampai pada akhir tahun kepada yang berhak.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Transfer dinilai sebesar nilai nominal dari selisih antara jumlah yang telah disalurkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai yang telah dianggarkan dan diatur dalam perundang-undangan.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Uang Muka dari Kas Umum Daerah dinilai sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.

Utang dalam negeri-perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/par,ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan Bangun, Serah, Kelola (BSK) sebesar nilai yang belum dibayar.

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak, untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lama ditambah dan/atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah dan/ataupengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang tidak diperjualbelikan (*non traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan dalam tanggal pelaporan.

Untuk utang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan schedule pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas

untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

a. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

b. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Morowali, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan NonPerpajakan-LRA diakui pada saat:

1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3) Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima telah melaporkan/mengesahkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
4) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan Perpajakan-LRA diakui pada saat:

1) Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
2) Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
3) Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
4) Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda. Pengakuan penerimaan denda pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.
5) Dalam hal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Daerah bersangkutan berhak menerima pengembalian pajak daerah dan telah dilakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Daerah tersebut, maka perlu dilakukan koreksi atas pajak daerah yang telah dicatat/diakuntansikan.

b. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs Bank Indonesia.

Pendapatan Nonperpajakan-LRA dan Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sesuai dokumen sumber yang sah. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah. Dalam hal pengurang terhadap Nonperpajakan-LRA dan Pendapatan Perpajakan-LRA bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

a. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
3) Transfer Pemerintah Provinsi;
4) Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
5) Transfer/Bantuan Keuangan.

a. Pengakuan Transfer

Pengakuan atas Pendapatan Transfer-LRA dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Transfer-LRA dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Pengakuan masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO dilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized)*.

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO yang pasti jumlah dan waktunya, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), pengakuannya dilakukan setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pengakuan Pendapatan Transfer-LO dapat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer-LO dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

Pengakuan atas Belanja Transfer-LRA dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran Belanja Transfer. Belanja Transfer untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Koreksi atas pengeluaran belanja transfer (penerimaan kembali belanja transfer) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja transfer dibukukan sebagai pengurang belanja transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja transfer dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

Pengakuan Beban Transfer-LO pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah yaitu pada saat diterbitkannya SP2D, sedangkan pengakuan Beban Transfer-LO pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

b. Pengukuran Transfer

Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

Pendapatan Transfer-LO diukur dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer-LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Belanja Transfer-LRA diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran Belanja Transfer. Apabila terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. Dalam hal terjadi demikian, Belanja Transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

Beban Transfer-LO diukur dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Morowali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Morowali, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

a. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA atau SiKPA.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Morowali yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*).
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
4) Sebagian pendapatan menggunakan *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
5) Sistem atau administrasi piutang (termaksud *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

Pendapatan NonPerpajakan-LO diakui pada saat:

1) Pendapatan perizinan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Apabila terdapat persyaratan pembayaran dalam surat penetapan, pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat tagihan.
2) Pendapatan pemberian layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
3) Pendapatan hasil investasi diakui pada saat hak atas pendapatan diperoleh, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*).
4) Pendapatan dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang timbul berdasarkan perjanjian atau pada saat diterima oleh entitas.
5) Pendapatan nonperpajakan lainnya meliputi antara lain keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang, dengan pengakuan sebagai berikut:

a) Keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima, denda diakui pada saat menjadi hak entitas, bunga/jasa perbankan dan penerimaan kembali belanja diakui pada saat kas diterima.

b) Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya merujuk pada kebijakan akuntansi kerugian negara.

c) Penghapusan utang diakui pada saat terdapat penetapan resmi dari pemberi pinjaman.

Pendapatan Perpajakan-LO diakui pada saat:

1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.

2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

b. Pengukuran Pendapatan -LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs Bank Indonesia.

Pendapatan NonPerpajakan-LO diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pendapatan perizinan diukur sebesar tarif yang dipungut atas izin yang diberikan.

2) Pendapatan pemberian layanan diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna layanan. Dalam hal pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga misalnya BPJS, maka pengukuran didasarkan pada tarif yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

3) Pendapatan hasil investasi dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Bunga obligasi diukur sebesar hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi. Dividen tunai (*cash dividend*) diukur sebesar jumlah yang diumumkan dalam RUPS.

4) Pendapatan sewa dan kerja sama pemanfaatan diukur sebesar hak entitas pada tahun berjalan, dihitung secara proporsional (bulanan).

5) Keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan. Pendapatan denda diukur sebesar nilai penetapan. bunga/jasa perbankan dan pengembalian belanja tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diterima.

6) Pendapatan dari putusan pengadilan diukur sebesar nilai yang ditetapkan dalam putusan. Pendapatan dari penghapusan utang diukur sebesar nilai utang yang secara resmi dihapuskan oleh pemberi pinjaman dan diakui pada tahun terjadinya penghapusan.

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

1) Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk *self assessment*.
2) Nilai aliran masuk yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk *official assessment*.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2) Terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas, apabila kewajiban telah timbul berdasarkan dokumen yang sah walaupun kas belum dibayarkan;
2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara timbulnya kewajiban dan pembayaran; dan
3) Beban diakui setelah pengeluaran kas, apabila pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang/jasa dimanfaatkan. Dalam hal ini pengeluaran dicatat sebagai beban dibayar di muka, aset tetap, atau aset lainnya sampai memenuhi kriteria sebagai beban.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS dan disesuaikan pada akhir periode, sedangkan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban (SPJ) disahkan, juga disesuaikan pada akhir periode.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada tanggal Pelaporan belum dibayar;
2) Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal Pelaporan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
3) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
4) Beban bantuan sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos;
5) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
6) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan; dan
7) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang dan terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Pembetulan tersebut dilakukan pada akun Pendapatan-LRA atau belanja serta pada akun Pendapatan-LO atau beban sesuai dengan jenis kesalahannya.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau belanja maupun pada akun Pendapatan-LO atau beban.

Apabila laporan keuangan periode sebelumnya telah diterbitkan, maka koreksi kesalahan dilakukan sesuai dengan jenis transaksi yang dikoreksi. Koreksi atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penerimaan kembali belanja dan menambah posisi kas dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain LRA. Dalam hal koreksi tersebut mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Koreksi atas perolehan aset selain kas yang menambah atau mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Koreksi atas beban yang tidak berulang yang mengakibatkan pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara material aset selain kas dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain LO, sedangkan apabila mengakibatkan penambahan beban dilakukan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah atau mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan Saldo Anggaran Lebih. Koreksi atas penerimaan Pendapatan-LO dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan ekuitas. Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah atau mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan koreksi atas pencatatan kewajiban yang menambah atau mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos-pos Neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas disajikan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat;

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara interen dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah APBD BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Morowali, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Kabupaten Morowali Per 31 Desember 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

a. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
b. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Penjelasan Pos Neraca
d. Penjelasan Pos Laporan Operasional
e. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
f. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
g. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Morowali yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan Basis Akrual.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Morowali, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Provinsi dan Pusat. Pendapatan dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tersebut di atas dalam TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pendapatan Asli Daerah	913.808.302.035,00	1.225.285.407.442,29	134,09	1.040.865.873.862,41
2.	Pendapatan Transfer	1.620.281.844.204,00	1.526.575.376.851,51	94,22	1.916.472.936.378,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.115.816.759,00	10.484.727.465,00	94,32	9.032.755.284,00
Jumlah		**2.545.205.962.998,00**	**2.762.345.511.758,80**	**108,53**	**2.966.371.565.524,41**

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp2.545.205.962.998,00 terealisasi sebesar Rp2.762.345.511.758,80 atau 108,53%. Dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.966.371.565.524,41, Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp204.026.053.765,61 atau 6,88%.

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

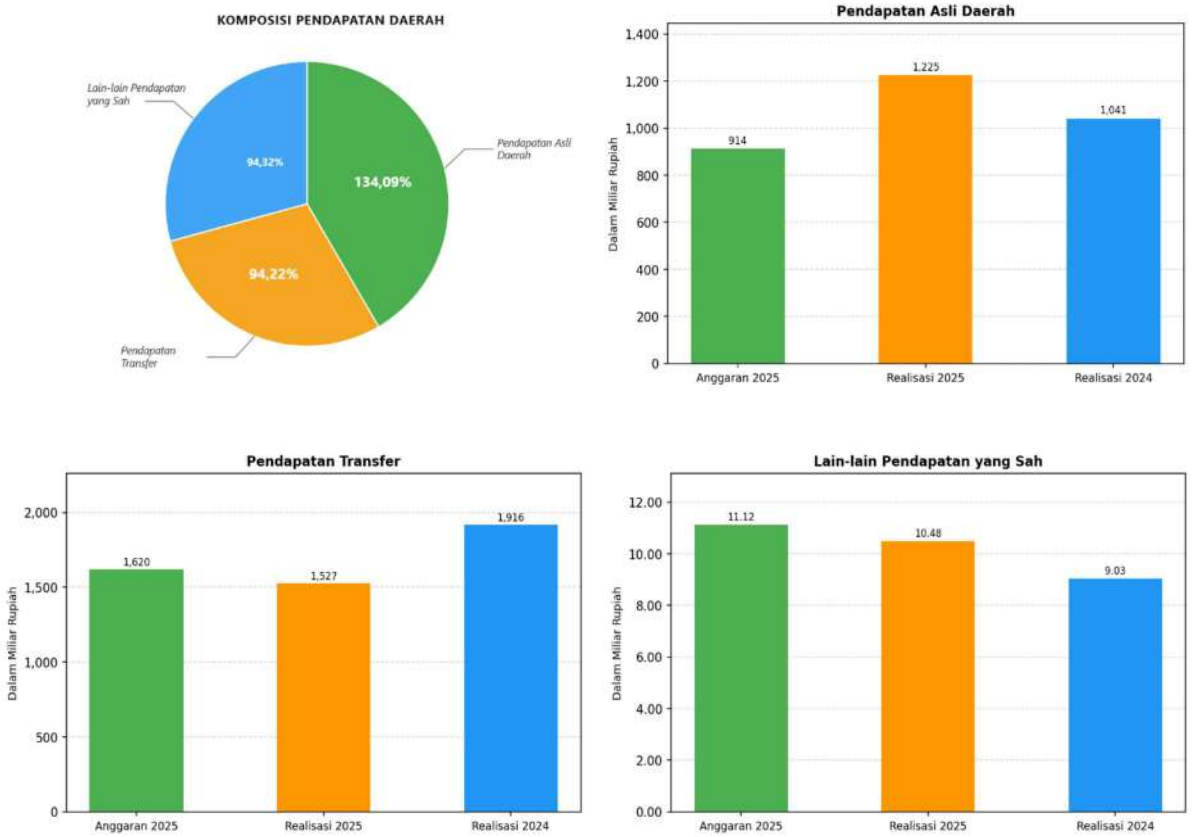

Gambar 1 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025

Realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode TA 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pendapatan Pajak Daerah	589.684.302.035,00	826.527.304.149,14	140,16	640.450.562.137,34
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	255.864.000.000,00	286.024.019.117,00	111,79	288.907.551.817,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	5.048.125.362,00	210,34	4.490.472.491,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	65.860.000.000,00	107.685.958.814,15	163,51	107.017.287.417,07
Jumlah		**913.808.302.035,00**	**1.225.285.407.442,29**	**134,09**	**1.040.865.873.862,41**

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2025 dan 2024 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang. Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Morowali dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp589.684.302.035,00 terealisasi sebesar Rp826.527.304.149,14 atau 140,16%, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.441.952.501,38
2.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	96.999.810.655,00
3.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	56.150.000,00
4.	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	2.305.777.275,92	153,72	2.032.334.461,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	284.118.818.431,00
6.	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	494.793.663,00	164,93	364.894.731,00

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55.000.000.000,00	114.475.175.347,22	208,14	79.377.569.048,64
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	81.814.028.164,00	108.367.902.114,00	132,46	86.262.275.489,92
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.000.000.000,00	107.399.951.815,00	165,23	89.796.756.819,40
10.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	64.391.138.423,00	119.280.734.072,00	185,24	0,00
11.	PBJT-Tenaga Listrik	297.250.639.960,00	340.059.377.295,00	114,40	0,00
12.	PBJT-Jasa Perhotelan	850.000.000,00	1.932.014.544,00	227,30	0,00
13.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	75.000.000,00	56.190.000,00	74,92	0,00
14.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.223.507.488,00	13.785.398.161,00	221,50	0,00
15.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.279.988.000,00	18.369.989.862,00	106,31	0,00
Jumlah		**589.684.302.035,00**	**826.527.304.149,14**	**140,16**	**640.450.562.137,34**

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp186.076.742.011,80 atau 29,05%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp640.450.562.137,34. Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah di atas dipengaruhi oleh komponen Pajak yang mengalami peningkatan signifikan, antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Opsen Pajak Daerah sebagai hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai unit penghasil.

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp255.864.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp286.024.019.117,00 atau 111,79%, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Retribusi Jasa Umum	5.090.000.000,00	8.338.381.413,00	163,82	7.601.265.995,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	524.000.000,00	556.195.000,00	106,14	365.865.400,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	250.250.000.000,00	277.129.442.704,00	110,74	280.940.420.422,00
Jumlah		**255.864.000.000,00**	**286.024.019.117,00**	**111,79**	**288.907.551.817,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.883.532.700,00 atau 1,00%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp288.907.551.817,00. Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah dipengaruhi oleh komponen Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp5.090.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.338.381.413,00 atau 163,81%. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

No	Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.650.000.000,00	7.875.835.813,00	169,37	7.175.900.995,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan	140.000.000,00	219.895.600,00	157,07	105.995.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	300.000.000,00	242.650.000,00	80,88	319.370.000,00
Jumlah		**5.090.000.000,00**	**8.338.381.413,00**	**163,82**	**7.601.265.995,00**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar Rp737.115.418,00 atau 9,70%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.601.265.995,00, terjadinya peningkatan realisasi Retribusi Jasa Umum dipengaruhi oleh Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan yang mengalami kenaikan signifikan.

Adapun Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp7.875.835.813,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
Puskesmas Ulunambo	70.288.930,00	26.330.000,00	166,95
Puskesmas Tanjung Harapan	31.900.409,00	5.855.000,00	444,84

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
Puskesmas Kaleroang	32.971.288,00	7.987.435,00	312,79
Puskesmas Lafeu	298.524.849,00	112.213.500,00	166,03
Puskesmas Bahodopi	1.870.381.089,00	274.170.000,00	582,20
Puskesmas Bahomotefe	795.664.052,00	14.560.000,00	5364,73
Puskesmas Bungku	563.008.809,00	93.880.000,00	499,71
Puskesmas Fonuasingko	62.387.929,00	16.015.000,00	289,56
Puskesmas Wosu	451.233.447,00	21.121.000,00	2036,42
Puskesmas Bahonsuai	755.771.898,00	144.253.240,00	423,92
Puskesmas Lantula Jaya	789.987.713,00	71.852.000,00	999,47
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	115.580.000,00	5.541.073.820,00	(97,91)
RSUD Salabangka Paku	2.038.135.400,00	846.590.000,00	140,75
Jumlah	**7.875.835.813,00**	**7.175.900.995,00**	**9,75**

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian kekayaan atau aset daerah. Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp524.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp556.195.000,00 atau 106,14%. Retribusi Jasa Usaha secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.7 Retribusi Jasa Usaha

No	Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	164.000.000,00	180.645.000,00	110,15	48.350.000,00
2.	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00	31.200.000,00	15,60	82.200.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	37.870.000,00	75,74	30.550.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	50.000.000,00	0,00	0,00	72.835.400,00
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	306.480.000,00	510,80	128.020.000,00
Jumlah		**524.000.000,00**	**556.195.000,00**	**106,14**	**365.865.400,00**

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp190.329.600,00 atau 52,03%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp365.865.400,00. Komponen Retribusi Jasa Usaha yang mengalami kenaikan signifikan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Adapun Retribusi Jasa Usaha yang tidak mencapai target TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Retribusi Terminal disebabkan adanya penghapusan obyek penagihan retribusi pada Jasa Terminal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir disebabkan kurangnya pengguna jasa parkir yang telah disiapkan dan juga wajib retribusi belum taat untuk melakukan pembayaran, sehingga berdampak pada penerimaan retribusi tempat khusus parkir yang hanya mencapai 15,60%. Langkah yang akan dilakukan atas permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Perhubungan akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang digunakan serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Retribusi Rumah Potong Hewan disebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha pemotongan hewan untuk memenuhi kewajibannya dan banyaknya daging impor/ daging beku yang masuk di wilayah Kabupaten Morowali sehingga capaian target retribusi rumah potong hewan hanya mencapai 75,74%. Langka yang akan dilakukan terhadap permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertanian akan melakukan pendatan dan perbaikan Rumah Potong Hewan serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan disebabkan adanya penghapusan obyek penagihan retribusi pada Pelayanan Kepelabuhan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebesar Rp250.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp277.129.442.704,00 atau 110,74%. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah secara rinci di uraikan sebagai berikut.

Tabel 5.8 Retribusi Perizinan Tertentu

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	250.000.000,00	251.280.000,00	100,51	184.890.000,00
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000.000,00	34.933.344.204,00	34,93	95.776.116.322,00
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000.000,00	241.944.818.500,00	161,30	184.979.414.100,00
Jumlah		**250.250.000.000,00**	**277.129.442.704,00**	**110,74**	**280.940.420.422,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan sebesar Rp3.810.977.718,00 atau 1,36%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar

Rp280.940.420.422,00. Kenaikan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu terjadi pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mencapai 161,29%.

Adapun Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak mencapai target adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah pengajuan PBG sebagai dampak persyaratan administrasi dan teknis yang kompleks, adanya perubahan prosedur dari IMB menjadi PBG yang masih memerlukan penyesuaian oleh masyarakat sehingga Retribusi PBG hanya mencapai 34,93%. Langkah yang akan dilakukan atas permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pekerjaan umum akan meningkatkan sosialisasi, pendampingan, serta verifikasi pemenuhan persyaratan teknis guna mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi penerimaan Retribusi PBG.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Penyertaan Modal pada BUMN. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.048.125.362,00 atau 210,33% dari anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp557.652.871,00 atau 12,42% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.490.472.491,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.400.000.000,00	5.048.125.362,00	210,34	4.490.472.491,00
Jumlah		**2.400.000.000,00**	**5.048.125.362,00**	**210,34**	**4.490.472.491,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 seluruhnya merupakan bagian laba (dividen) Pemerintah Kabupaten Morowali atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng). Pendapatan dividen tersebut diakui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 20 Januari 2025 yang memuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT Bank Sulteng Tahun Buku 2024. Dalam RUPS-T tersebut, para pemegang saham menyetujui penggunaan Laba Bersih PT Bank Sulteng Tahun Buku 2024 sebesar Rp242.231.516.003,00 dengan alokasi dividen sebesar 70% yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan saham masing-masing.

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Morowali pada PT Bank Sulteng sebesar Rp14.416.400.000,00 atau 2,93% dari total modal disetor sebesar Rp491.969.800.000,00 sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-388/KO.1601/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bagian dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Morowali dihitung secara proporsional oleh PT Bank Sulteng berdasarkan modal yang telah disetor dan tercatat dalam buku administrasi perseroan per 31 Desember 2024, dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp5.048.125.362,00 pada Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan yang dikelola oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali diantaranya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan realisasi Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan BLUD.

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 sebesar Rp65.860.000.000,00 terealisasi sebesar Rp107.685.958.814,15 atau 163,51% secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.10 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	2.537.087.500,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	453.510.000,00
3.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	18.697.697.195,15	747,91	9.986.504.333,76
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	19.005.607.608,19	633,52	25.107.310.172,03
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	360.000.000,00	1.137.555.889,83	315,99	752.913.246,18
6.	Pendapatan BLUD	60.000.000.000,00	68.845.098.120,98	114,74	68.179.962.165,10
Jumlah		**65.860.000.000,00**	**107.685.958.814,15**	**163,51**	**107.017.287.417,07**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp668.671.397,08 atau 0,62%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp107.017.287.417,07. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melebihi dari target anggaran yaitu Jasa Giro, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan serta Pendapatan BLUD. Adapun rincian Pendapatan BLUD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.11 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
BPJS	47.296.751.034,00	49.148.775.719,00	(3,77)
BPJS Ketenagakerjaan	5.937.727.510,00	4.687.507.530,00	26,67
Pasien Umum	9.729.154.371,00	9.652.076.775,00	0,80
Ambulans	2.628.837.500,00	2.146.602.000,00	22,47
Penerimaan Lainnya	170.072.048,00	193.789.803,00	(12,24)

Pendapatan BLUD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)
Obat Kronis	1.116.641.453,00	760.269.542,00	46,87
COVID-19	181.800.000,00	0,00	100,00
Jasa Raharja	1.524.199.089,00	1.312.868.312,00	16,10
Laboratorium	28.000.000,00	0,00	100,00
Bunga Bank	231.915.115,98	278.072.484,10	(16,60)
Jumlah	**68.845.098.120,98**	**68.179.962.165,10**	**0,98**

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi Pendapatan BLUD untuk periode TA 2025 sebesar Rp68.845.098.120,98. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp68.179.962.165,10, mengalami kenaikan sebesar Rp665.135.955,88 atau 0,98%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah diperuntukkan untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Anggaran Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp1.620.281.844.204,00 dan terealisasi sebesar Rp1.526.575.376.851,51 atau 94,22%, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.12 Pendapatan Transfer

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.862.356.000,00	1.469.342.712.802,00	94,99	1.839.547.102.455,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.419.488.204,00	57.232.664.049,51	77,95	76.925.833.923,00
Jumlah		**1.620.281.844.204,00**	**1.526.575.376.851,51**	**94,22**	**1.916.472.936.378,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp389.897.559.526,49 atau 20,34%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.916.472.936.378,00 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mendukung operasional dan pembangunan Daerah.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD TA 2025 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.546.862.356.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.469.342.712.802,00 atau 94,99%. Secara dirinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.721.030.803.555,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	730.422.460.000,00	646.196.884.589,00	88,47	0,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	505.400.139.000,00	508.505.981.719,00	100,61	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	208.943.949.000,00	207.912.548.846,00	99,51	0,00
5.	Dana Desa	102.095.808.000,00	101.025.437.648,00	98,95	106.697.472.900,00
6.	Insentif Fiskal	0,00	5.701.860.000,00	0,00	11.818.826.000,00
Jumlah		**1.546.862.356.000,00**	**1.469.342.712.802,00**	**94,99**	**1.839.547.102.455,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp370.204.389.653,00 atau 20,12%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.839.547.102.455,00, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

a. Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Dana Perimbangan

No	Dana Perimbangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	1.053.252.471.318,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	523.674.524.729,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00	0,00	0,00	45.355.846.055,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	0,00	0,00	98.747.961.453,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.721.030.803.555,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada TA 2025 Dana Perimbangan tidak terdapat anggaran dan realisasi. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan nomenklatur dan klasifikasi akun pendapatan transfer. Pada TA 2024, komponen Dana Perimbangan masih disajikan pada akun Dana Perimbangan sebagai bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Namun, pada APBD TA 2025 tidak terdapat akun Dana Perimbangan karena telah disesuaikan dengan kode rekening dan klasifikasi pendapatan transfer yang baru. Pendapatan Dana Perimbangan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Pada TA 2025 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil tidak terdapat anggaran dan realisasi. Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil pada TA 2024 sebesar Rp1.053.252.471.318,00. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.15 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	51.342.099.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	58.198.825.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	82.532.000,00
4.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00	7.826.000,00
5.	DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	2.058.420.000,00
6.	DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	12.645.701.000,00
7.	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	516.006.748.618,00
8.	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	400.311.241.000,00
9.	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	368.431.700,00
10.	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	0,00	0,00	4.336.963.000,00
11.	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	7.893.684.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.252.471.318,00**

2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pada TA 2025 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum tidak terdapat anggaran dan realisasi. Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum pada TA 2024 sebesar Rp523.674.524.729,00. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.16 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	361.492.257.000,00

No	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	41.228.041.729,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	64.761.101.000,00
5.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	28.052.579.000,00
6.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	26.740.546.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.674.524.729,00**

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Pada TA 2025 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik tidak terdapat anggaran dan realisasi. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2024 sebesar Rp45.355.846.055,00. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik

No	DAK Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	706.764.000,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	10.866.718.000,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.564.889.000,00
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.820.180.190,00
5.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik	0,00	0,00	0,00	1.853.435.898,00

No	DAK Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
	Dasar Pembangunan Pertanian				
6.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	19.068.721.000,00
7.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.882.910.834,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.592.227.133,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	45.355.846.055,00

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada TA 2025 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik tidak terdapat anggaran dan realisasi. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2024 sebesar Rp98.747.961.453,00. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.18 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	DAK Non Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	26.484.544.000,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.372.500.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	36.379.390.000,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.979.000.000,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	10.892.896.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	5.079.807.250,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.229.290.000,00
8.	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	10.055.887.946,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	4.429.759.011,00
10.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	378.183.700,00
11.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	164.943.520,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	301.760.026,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.747.961.453,00**

b. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil pada LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang berupa DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan, dan DBH Sumber Daya Alam Perikanan serta DBH Sawit. Anggaran Dana Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp730.422.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp646.196.884.589,00 atau 88,47%, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.19 Rincian Dana Bagi Hasil

No	Dana Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	114.239.696.000,00	88.236.592.000,00	77,24	0,00
2.	DBH PPh Pasal 21	147.076.706.000,00	116.520.224.200,00	79,22	0,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	179.704.000,00	141.235.600,00	78,59	0,00
4.	DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	1.173.599.000,00	1.131.451.000,00	96,41	0,00
5.	DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	22.009.825.000,00	16.062.062.000,00	72,98	0,00
6.	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	25.527.628.000,00	15.851.337.000,00	62,09	0,00
7.	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	413.130.504.000,00	401.820.955.389,00	97,26	0,00
8.	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	931.100.000,00	279.329.400,00	30,00	0,00
9.	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	3.162.769.000,00	3.162.769.000,00	100,00	0,00
10.	DBH Sawit	2.990.929.000,00	2.990.929.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**730.422.460.000,00**	**646.196.884.589,00**	**88,47**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 disajikan sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

c. Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat berupa DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ditransfer dan ditampung dalam rekening giro RKUD pada PT Bank Sulteng Cabang Bungku.

Anggaran Dana Alokasi Umum TA 2025 sebesar Rp505.400.139.000,00 dan terealisasi sebesar Rp508.505.981.719,00 atau 100,61%. Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah. Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp402.870.475.000,00 terealisasi sebesar Rp414.944.912.232,00 atau 102,99%. Realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

2) DAU yang Ditentukan Penggunaannya

DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum yang penggunaannya telah diarahkan untuk mendanai program atau kegiatan tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp102.529.664.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.561.069.487,00 atau 91,25%, Realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.20 Rincian Dana Alokasi Umum

No	Dana Alokasi Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	0,00
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27.877.651.000,00	18.909.056.487,00	67,83	0,00
3.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	53.025.406.000,00	53.025.406.000,00	100,00	0,00
4.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	20.226.607.000,00	20.226.607.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**102.529.664.000,00**	**93.561.069.487,00**	**91,25**	**0,00**

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2025 sebesar Rp208.943.949.000,00 dan terealisasi sebesar Rp207.912.548.846,00 atau 99,50%. Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan transfer pusat yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis DAK untuk TA 2025 dan 2024. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 sebesar Rp86.988.340.000,00 terealisasi sebesar Rp82.981.595.467,00 atau 95,39%. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagai berikut.

Tabel 5.21 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik

No	DAK Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	807.430.000,00	800.000.000,00	99,08	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	214.814.000,00	204.073.300,00	95,00	0,00
3.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	408.801.000,00	397.257.900,00	97,18	0,00
4.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	6.532.544.000,00	5.960.624.868,00	91,25	0,00
5.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	6.961.000.000,00	6.141.203.813,00	88,22	0,00
6.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	14.833.326.000,00	14.452.984.664,00	97,44	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	2.230.425.000,00	1.757.500.000,00	78,80	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	30.000.000.000,00	29.028.727.774,00	96,76	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	25.000.000.000,00	24.239.223.148,00	96,96	0,00
Jumlah		**86.988.340.000,00**	**82.981.595.467,00**	**95,39**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 disajikan sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 November 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.22 Rincian Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Dana Alokasi Khusus Fisik	Nilai Kontrak yang Terinput pada Aplikasi OMSPAN	Nilai Transfer s/d 31 Desember 2025	Realisasi Penyerapan s/d 31 Desember 2025	Sisa Dana di RKUD
		Rp	Rp	Rp	Rp
DAK Fisik		**83.230.139.543,00**	**82.981.595.467,00**	**81.523.366.482,00**	**1.458.228.985,00**
Dinas Pendidikan		**1.004.073.300,00**	**1.004.073.300,00**	**0,00**	**1.004.073.300**
Bidang Pendidikan		**1.004.073.300,00**	**1.004.073.300,00**	**0,00**	**1.004.073.300**
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
2.	Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	204.073.300,00	204.073.300,00	0,00	204.073.300,00
Dinas Kesehatan		**397.257.900,00**	**397.257.900,00**	**397.257.900,00**	**0,00**
Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana		**397.257.900,00**	**397.257.900,00**	**397.257.900,00**	**0,00**
4.	Penguatan Sistim dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	397.257.900,00	397.257.900,00	397.257.900,00	0,00
5.	Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum		**28.560.857.421,00**	**28.312.313.345,00**	**27.858.157.660,00**	**454.155.685,00**
Air Minum		**12.101.828.681,00**	**12.101.828.681,00**	**12.101.828.681,00**	**0,00**
6.	Layanan Dasar	5.960.624.868,00	5.960.624.868,00	5.960.624.868,00	0,00
7.	Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	6.141.203.813,00	6.141.203.813,00	6.141.203.813,00	0,00
Sanitasi		**16.459.028.740,00**	**16.210.484.664,00**	**15.756.328.979,00**	**454.155.685,00**
8.	Layanan Dasar	14.701.528.740,00	14.452.984.664,00	14.157.578.429,00	295.406.235,00
9.	Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	1.757.500.000,00	1.757.500.000,00	1.598.750.550,00	158.749.450,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah		**53.267.950.922,00**	**53.267.950.922,00**	**53.267.950.922,00**	**0,00**
10.	Perdagangan	29.028.727.774,00	29.028.727.774,00	29.028.727.774,00	0,00
11.	Industri Kecil dan Menengah	24.239.223.148,00	24.239.223.148,00	24.239.223.148,00	0,00
Jumlah		**83.230.139.543,00**	**82.981.595.467,00**	**81.523.366.482,00**	**1.458.228.985,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik pada RKUD TA 2025 sebesar Rp1.458.228.985,00.

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan transfer pusat yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis DAK untuk TA 2025 dan 2024. Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 sebesar Rp121.955.609.000,00 terealisasi sebesar Rp124.930.953.379,00 atau 102,44%. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.23 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	DAK Non Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.500.000,00	3.225.500.000,00	100,00	0,00
2.	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.453.615.000,00	1.453.615.000,00	100,00	0,00
3.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	28.062.079.000,00	28.061.552.000,00	100,00	0,00
4.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	100,00	0,00
5.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.125.528.000,00	6.041.413.700,00	98,63	0,00
6.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
7.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.295.080.000,00	1.291.445.700,00	99,72	0,00
8.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
9.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.238.021.000,00	3.772.480.652,00	89,02	0,00
10.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.770.823.000,00	8.219.254.108,00	84,12	0,00
11.	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	49.926.006.000,00	53.823.180.400,00	107,81	0,00
12.	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.579.500.000,00	1.511.750.000,00	95,71	0,00
13.	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN	10.637.766.000,00	12.226.353.400,00	114,93	0,00

No	DAK Non Fisik	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
	Daerah-Tunjangan Khusus Guru				
14.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.689.500.000,00	3.352.217.419,00	90,86	0,00
15.	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	83.891.000,00	83.891.000,00	100,00	0,00
16.	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	393.300.000,00	393.300.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**121.955.609.000,00**	**124.930.953.379,00**	**102,44**	**0,00**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 disajikan sebesar Rp0,00, hal ini disebabkan adanya perubahan klasifikasi akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 November 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.24 Rincian Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Saldo Awal Tahun 2025	Alokasi	Nilai Transfer s/d 31 Desember 2025	Realisasi Penyerapan s/d 31 Desember 2025	Sisa Dana di RKUD
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
DAK Non Fisik		**802.268.028,00**	**12.690.527.000,00**	**12.353.244.419,00**	**11.255.899.533,00**	**1.899.612.914,00**
Dinas Kesehatan		**802.268.028,00**	**8.011.412.000,00**	**7.674.129.419,00**	**6.934.241.997,00**	**1.542.155.450,00**
1.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	464.985.447,00	4.321.912.000,00	4.321.912.000,00	3.733.107.113,00	1.053.790.334,00
2.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	337.282.581,00	3.689.500.000,00	3.352.217.419,00	3.201.134.884,00	488.365.116,00
Dinas Koperasi dan UMKM		**0,00**	**1.453.615.000,00**	**1.453.615.000,00**	**1.104.603.460,00**	**349.011.540,00**
3.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,00	1.453.615.000,00	1.453.615.000,00	1.104.603.460,00	349.011.540,00
Dinas Perdagangan		**0,00**	**3.225.500.000,00**	**3.225.500.000,00**	**3.217.054.076,00**	**8.445.924,00**
4.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	3.225.500.000,00	3.225.500.000,00	3.217.054.076,00	8.445.924,00
Jumlah		**802.268.028,00**	**12.690.527.000,00**	**12.353.244.419,00**	**11.255.899.533,00**	**1.899.612.914,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada RKUD TA 2025 sebesar Rp 1.899.612.914,00.

e. Dana Desa

Pendapatan Transfer Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa TA 2025 sebesar Rp102.095.808.000,00 terealisasi sebesar Rp101.025.437.648,00 atau 98,95%. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp106.697.472.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.672.035.252,00 atau 5,31%. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

f. Insentif Fiskal

Pendapatan Transfer Dana Insentif Fiskal adalah berupa Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas Pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah, Pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar dan dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak menganggarkan Pendapatan Transfer Dana Insentif Fiskal pada APBD T.A 2025, namun terdapat realisasi sebesar Rp5.701.860.000,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp11.818.826.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.116.966.000,00 atau 51,76%.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA merupakan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor: 900.1.13.1/451/BAPENDA-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp96.992.989.179,00 dan SK Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor: 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025. Adapun target Anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah TA 2025 sebesar Rp73.419.488.204,00 terealisasi sebesar Rp57.232.664.049,51 atau 77,95%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp76.925.833.923,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.693.169.873,49 atau 25,60%. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN/APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25 Dana Bagi Hasil Pajak

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.699.898.263,00	4.699.898.263,00	100,00	14.888.198.368,00

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.759.680.632,00	4.759.680.632,00	100,00	17.295.722.231,00
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.174.558.292,00	22.852.453.370,47	59,86	22.094.170.067,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.623.302.716,00	13.953.524.983,04	95,42	12.005.260.474,00
5.	Dana Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	11.062.048.301,00	10.867.106.801,00	98,24	10.542.482.783,00
Jumlah		**73.319.488.204,00**	**57.132.664.049,51**	**77,92**	**76.825.833.923,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp57.132.664.049,51 atau 77,92%. Namun berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.14.3/46/BAPENDA-G.ST/2026 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, belum sepenuhnya mentransfer dana tersebut ke kas Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp27.930.289.725,00.

b. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Target Anggaran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi TA 2025 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00, maka realisasi TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Laporan realisasi anggaran TA 2025 terdapat Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang di Anggarkan dalam APBD TA 2025 sebesar Rp11.115.816.759,00 dan terealisasi sebesar Rp10.484.727.465,00 atau 94,32%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.032.755.284,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.451.972.181,00 atau 16,08%.

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan realisasi pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.26 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Ulunambo	643.785.302,00	665.987.582,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kaleroang	805.690.957,00	819.656.679,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Lafeu	600.967.095,00	442.573.983,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bahodopi	1.519.970.642,00	1.162.716.486,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bahomotefe	921.903.436,00	819.154.064,00

Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bungku	1.436.574.055,00	1.330.870.818,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Wosu	1.322.804.870,00	1.112.082.588,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bahonsuai	884.003.765,00	812.156.104,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Lantula Jaya	1.211.357.530,00	1.004.936.372,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Fonuasingko	819.154.760,00	711.728.333,00
Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tanjung Harapan	318.515.053,00	150.892.275,00
Jumlah	**10.484.727.465,00**	**9.032.755.284,00**

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp3.402.754.754.100,85 dan terealisasi sebesar Rp2.771.409.267.292,24 atau 81,45%, secara rinci diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.27 Belanja Daerah

No	Belanja Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Operasi	2.034.667.353.995,24	1.617.365.945.741,81	79,49	1.469.106.582.399,76
2.	Belanja Modal	1.054.504.477.901,61	851.270.056.790,43	80,73	669.791.931.658,06
3.	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	468.222.000,00	23,41	0,00
4.	Belanja Transfer	311.582.922.204,00	302.305.042.760,00	97,02	264.734.252.890,00
Jumlah		**3.402.754.754.100,85**	**2.771.409.267.292,24**	**81,45**	**2.403.632.766.947,82**

Tabel di atas menunjukkan belanja daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp367.776.500.344,42 atau 15,30%, jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp2.403.632.766.947,82. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintahan, Anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp2.034.667.353.995,24 terealisasi sebesar Rp1.617.365.945.741,81 atau 79,49%. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.28 Belanja Operasi

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Pegawai	813.770.813.917,78	664.172.521.021,00	81,62	534.692.045.847,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.089.043.917.397,46	859.081.698.144,37	78,88	783.997.356.734,42
3.	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	892.157.393,44	53,62	1.146.186.220,34
4.	Belanja Hibah	90.678.271.790,00	77.443.769.183,00	85,40	104.231.793.598,00

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
5.	Belanja Bantuan Sosial	39.510.350.890,00	15.775.800.000,00	39,93	45.039.200.000,00
Jumlah		**2.034.667.353.995,24**	**1.617.365.945.741,81**	**79,49**	**1.469.106.582.399,76**

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp148.259.363.342,05 atau 10,09%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.469.106.582.399,76.

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2025 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

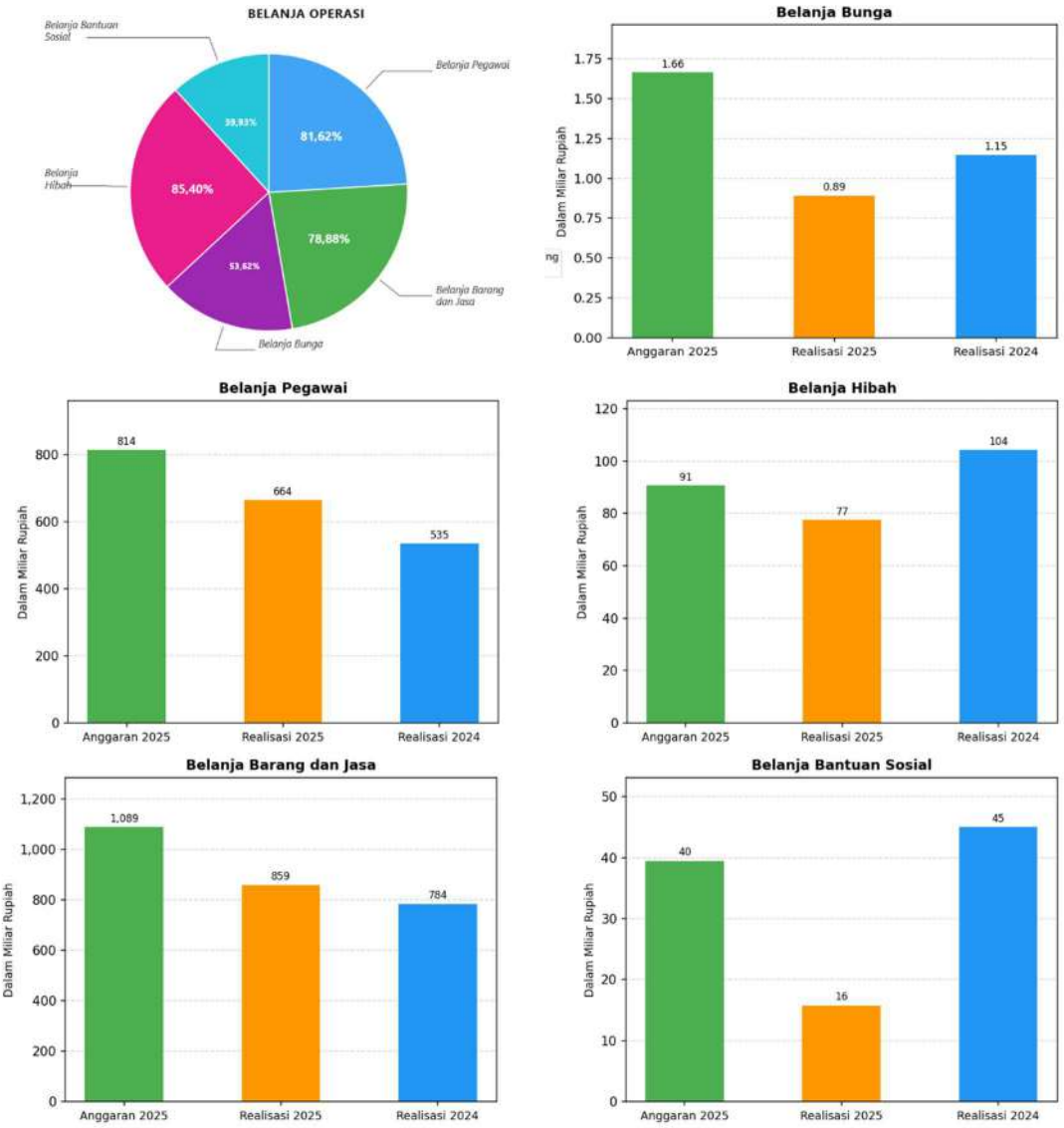

Gambar 2 Realisasi Belanja Operasi TA 2025

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.29 Belanja Pegawai

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	479.121.908.859,78	351.577.481.609,00	73,38	301.105.796.954,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	321.699.758.976,00	299.812.981.477,00	93,20	129.809.139.299,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	92.142.452.399,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.859.535.478,00	11.776.074.262,00	99,30	10.988.217.195,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.130.604,00	133.503.673,00	75,37	0,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	872.480.000,00	95,62	646.440.000,00
Jumlah		**813.770.813.917,78**	**664.172.521.021,00**	**81,62**	**534.692.045.847,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp813.770.813.917,78 terealisasi sebesar Rp664.172.521.021,00 atau 81,62%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp129.480.475.174,00 atau 24,22%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp534.692.045.847,00. Tidak tercapainya target Belanja Pegawai yang secara signifikan terdapat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah, disebabkan oleh pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang dihitung berdasarkan persentase kehadiran. Hal ini mengakibatkan adanya sisa alokasi anggaran. Selain itu, anggaran insentif yang ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenan untuk setiap jenis pajak dan retribusi pendapatan, namun pencairannya wajib memenuhi persyaratan berupa perhitungan 6 kali gaji dan tunjangan yang melekat sesuai amanat yang tertaung dalam PP 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga terdapat sisa alokasi pada pos insentif ASN. Adapun pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru dimulai pada bulan Juni 2025 sementara anggaran telah disediakan sejak Januari 2025, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap periode Januari sampai dengan Mei 2025.

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp351.577.481.609,00, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Gaji Pokok ASN	263.157.636.491,00	231.657.968.955,00	13,60
Tunjangan Keluarga ASN	23.082.300.006,00	20.057.442.218,00	15,08
Tunjangan Jabatan ASN	4.649.935.000,00	4.979.863.130,00	(6,63)
Tunjangan Fungsional ASN	19.147.647.603,00	12.531.164.213,00	52,80
Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.329.353.900,00	5.798.725.710,00	43,64
Tunjangan Beras ASN	14.560.113.795,00	12.228.479.100,00	19,07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.695.239.808,00	1.359.940.159,00	98,19
Pembulatan Gaji ASN	4.259.009,00	3.279.552,00	29,87
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.760.596.123,00	10.639.482.264,00	29,34
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	547.604.053,00	462.364.269,00	18,44
Iuran Jaminan Kematian ASN	1.642.795.821,00	1.387.087.384,00	18,43
Jumlah	**351.577.481.609,00**	**301.105.796.954,00**	**16,76**

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 sebesar Rp351.577.481.609,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.471.684.655,00 atau 16,76%, jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2024 sebesar Rp301.105.796.954,00. Hal ini disebabkan adanya Penambahan Pegawai Honorer menjadi Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di TA 2025.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp299.812.981.477,00 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	109.307.459.139,00	94.652.502.141,40	15,48
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	40.267.478.454,00	3.592.082.762,00	1.021,01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.175.533.939,00	1.927.199.043,00	12,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	37.627.341.061,00	29.637.355.352,60	26,96
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.435.168.884,00	0,00	100
Jumlah	**299.812.981.477,00**	**129.809.139.299,00**	**130,96**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 sebesar Rp299.812.981.477,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.003.842.178,00 atau 130,96%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp129.809.139.299,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah di TA 2025 serta meningkatnya beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Per 31 Desember 2025 sebesar Rp299.812.981.477,00. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Belanja Tambahan Penghasilan ASN per OPD

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.611.945.835,00
Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	38.809.248.378,00
Rumah Sakit Salabangkapaku	6.561.991.735,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51.565.167.499,00
Puskesmas Ulunambo	529.869.431,00
Puskesmas Kaleroang	642.022.069,00
Puskesmas Lafeu	494.941.881,00
Puskesmas Bahodopi	1.144.355.644,00
Puskesmas Bahomotefe	736.719.388,00
Puskesmas Bungku	1.052.236.026,00
Puskesmas Wosu	1.033.658.889,00
Puskesmas Bahonsuai	645.134.650,00
Puskesmas Laantula Jaya	932.157.728,00
Puskesmas Tanjung Harapan	317.493.207,00
Puskesmas Fonuasingko	573.408.333,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.833.725.833,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.261.012.913,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.541.037.977,00
Satuan Polisi Pamongpraja	4.239.101.195,00
Dinas Sosial	1.420.497.672,00
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	1.283.449.595,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	9.268.009.334,00
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	2.153.742.227,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1.918.072.228,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.048.526.245,00
Dinas Perhubungan Daerah	1.676.723.296,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	1.773.530.728,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.369.207.123,00

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.385.189.636,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.385.592.783,00
Dinas Perpustakaan Daerah	1.993.860.844,00
Dinas Perikanan Daerah	3.164.740.805,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.794.227.455,00
Bagian Umum	8.411.436.767,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.803.419.967,00
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	3.767.178.964,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.551.400.736,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.679.783.326,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.253.701.319,00
Inspektorat Daerah	6.201.529.080,00
Kecamatan Bahodopi	1.593.297.409,00
Kecamatan Bumi Raya	1.562.542.242,00
Kecamatan Bungku Barat	1.376.605.245,00
Kecamatan Bungku Pesisir	1.345.737.850,00
Kecamatan Bungku Selatan	1.273.750.966,00
Kecamatan Bungku Tengah	3.920.249.168,00
Kecamatan Bungku Timur	1.124.621.841,00
Kecamatan Menui Kepulauan	2.057.383.792,00
Kecamatan Wita Ponda	1.337.826.263,00
Kecamatan Sombori Kepulauan	587.322.063,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.804.595.897,00
Jumlah	**299.812.981.477,00**

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang tahun sebelumnya dianggarkan pada akun belanja pegawai, namun pada APBD TA 2025 tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dipindahkan ke akun belanja tambahan penghasilan ASN. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	12.046.585.287,00	(100,00)
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	15.866.213.325,00	(100,00)

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	42.143.788.200,00	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	10.114.311.800,00	(100,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	2.579.500.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	8.025.563.787,00	(100,00)
Belanja Honorarium	0,00	559.000.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	192.450.000,00	(100,00)
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	480.540.000,00	(100,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	134.500.000,00	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**92.142.452.399,00**	**(100,00)**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp92.142.452.399,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN di TA 2025.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.776.074.262,00 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	560.805.000,00	0,13
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	44.541.000,00	48.667.500,00	(8,48)
Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.860.560,00	64.815.900,00	(3,02)
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.058.500,00	0,15
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	813.167.250,00	0,13
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.320.900,00	68.345.025,00	24,84
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.221.500,00	9.485.175,00	(13,32)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.087.800.000,00	705.600.000,00	54,17
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	206.365.950,00	206.095.838,00	0,13
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.821.139.352,00	1.395.627.007,00	30,49
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.625.920.000,00	2.457.000.000,00	6,88

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	200.550.000,00	(100,00)
Jumlah	**11.776.074.262,00**	**10.988.217.195,00**	**7,17**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 sebesar Rp11.776.074.262,00 atau naik 7,17%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.988.217.195,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan akun belanja tunjangan reses DPRD di TA 2025.

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp133.503.673,00, namun pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	0,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.306.000,00	0,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	0,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.127.940,00	0,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.085.313,00	0,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.540,00	0,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.488.480,00	0,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00	100,00
Jumlah	**133.503.673,00**	**0,00**	**100,00**

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 terealisasi sebesar Rp133.503.673,00 atau naik 100,00%, jika di bandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH TA 2024 yang tidak terdapat realisasi belanjanya.

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp872.480.000,00 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	286.440.000,00	9,09
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	560.000.000,00	360.000.000,00	55,56
Jumlah	**872.480.000,00**	**646.440.000,00**	**34,97**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp872.480.000,00 atau naik 34,97%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp646.440.000,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH di Tahun 2025.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.37 Belanja Barang dan Jasa

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Barang	365.431.529.769,45	229.463.686.914,00	62,79	222.886.088.451,80
2.	Belanja Jasa	417.788.402.329,78	351.717.178.754,00	84,18	286.244.919.604,00
3.	Belanja Pemeliharaan	29.530.781.788,31	23.357.226.619,00	79,09	46.991.357.584,50
4.	Belanja Perjalanan Dinas	119.471.758.266,40	103.515.483.402,00	86,64	115.044.426.534,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.436.553.500,00	58.283.786.000,00	98,06	26.046.071.700,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	22.298.044.816,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	22.187.988.751,00	22.151.661.751,00	99,84	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	75.196.902.992,52	70.592.674.704,37	93,88	64.486.448.044,12
Jumlah		**1.089.043.917.397,46**	**859.081.698.144,37**	**78,88**	**783.997.356.734,42**

Pada tabel di atas anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp1.089.043.917.397,46 dan direalisasikan sebesar Rp859.081.698.144,37 atau 78,88%. Belanja Barang dan Jasa TA 2025 mengalami peningkatan sebesar peningkatan sebesar Rp75.084.341.409,95 atau 9,58%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp783.997.356.734,42. Tidak tercapainya target Belanja Barang dan Jasa yang secara signifikan terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya pengadaan benih perkebunan dan hortikultura. Setelah dilakukan identifikasi lokasi dan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), ditemukan kendala bahwa lahan yang digarap oleh petani masuk dalam area hutan lindung, sehingga pengadaan bibit tersebut tidak dapat dilaksanakan.

a. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.38 Belanja Barang

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Barang Pakai Habis	228.685.454.414,00	222.798.734.825,80	2,64
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	778.232.500,00	87.353.626,00	790,83
Jumlah	**229.463.686.914,00**	**222.886.088.451,80**	**2,95**

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp229.463.686.914,00. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 sebesar Rp228.685.454.414,00, secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Belanja Barang Pakai Habis

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.230.858.004,00	3.464.814.295,00	195,28
Belanja Bahan-Bahan Kimia	872.999.460,00	459.886.456,00	89,83
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.979.745.426,00	10.577.967.540,00	(5,65)
Belanja Bahan-Bahan Baku	569.286.495,00	51.162.305,00	1.012,71
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	411.145.935,00	575.107.473,00	(28,51)
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.970.000,00	(100,00)
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	357.167.500,00	88.458.000,00	303,78
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.172.818.720,00	13.509.288.948,00	(24,70)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	55.437.200,00	32.580.000,00	70,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.213.662.934,00	4.056.699.945,00	3,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	52.915.520,00	(100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.459.451.968,00	6.918.256.186,00	(6,63)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	277.144.206,00	297.533.700,00	(6,85)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	15.895.000,00	(100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	622.987.802,00	606.800.351,00	2,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	461.565.686,00	379.937.500,00	21,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.432.498.224,00	826.209.097,00	73,38
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	239.863.181,00	112.050.000,00	114,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	298.080.350,00	94.960.750,00	213,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	458.660.698,00	552.116.105,00	(16,93)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.297.524.114,00	3.426.179.697,00	(3,76)
Belanja Obat-Obatan-Obat	955.635.371,00	4.628.530.687,80	(79,35)
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.389.233.156,00	1.444.382.890,00	757,75
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	122.503.587.562,00	135.287.208.595,00	(9,45)
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.349.917.999,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.142.667.541,00	16.828.046.246,00	1,87
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.776.466.780,00	7.063.694.111,00	10,09
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	818.510.000,00	1.074.242.000,00	(23,81)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.709.726.000,00	2.106.768.000,00	28,62
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	29.160.000,00	(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.783.214.678,00	2.578.681.628,00	85,49
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	414.940.000,00	222.828.800,00	86,21
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	201.963.132,00	306.489.000,00	(34,10)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	652.037.420,00	308.997.950,00	111,02
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.377.133.789,00	1.310.695.400,00	5,07
Belanja Pakaian Adat Daerah	430.231.500,00	535.534.750,00	(19,66)
Belanja Pakaian Batik Tradisional	377.675.000,00	653.450.000,00	(42,20)
Belanja Pakaian Olahraga	3.466.189.181,00	1.689.222.800,00	105,19
Belanja Pakaian Paskibraka	845.427.402,00	629.013.100,00	34,41
Belanja Pakaian Jas/Safari	80.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**228.685.454.414,00**	**222.798.734.825,80**	**2,64**

Tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 sebesar Rp228.685.454.414,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.886.719.588,20 atau 2,64%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp222.798.734.825,80. Hal ini disebabkan adanya penambahan belanja barang pakai habis di tahun 2025.

2) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp778.232.500,00. Nilai tersebut merupakan belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp12.193.500,00, belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebesar Rp45.235.921,00 dan belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp720.803.079,00.

b. Belanja Jasa

Belanja Jasa adalah adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024 diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.40 Belanja Jasa

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Kantor	291.040.554.375,00	236.982.805.540,00	22,81
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.172.992.886,00	23.509.229.098,00	15,58
Belanja Sewa Tanah	429.700.000,00	818.000.000,00	(47,47)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.395.270.200,00	2.319.382.630,00	3,27
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.056.318.100,00	1.882.617.500,00	9,23
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.473.349.481,00	13.004.734.778,00	65,13

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.338.244.958,00	145.000.000,00	822,93
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	697.550.000,00	2.632.500.000,00	(73,50)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.983.215.384,00	4.929.050.058,00	1,10
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	3.900.000,00	3.600.000,00	8,33
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	126.083.370,00	18.000.000,00	600,46
Jumlah	**351.717.178.754,00**	**286.244.919.604,00**	**22,87**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp351.717.178.754,00 mengalami peningkatan sebesar Rp65.472.259.150,00 atau 22,87%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp286.244.919.604,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi Belanja Jasa Kantor. Secara rinci dapat diuraikan berikut.

1) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp291.040.554.375,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41 Belanja Jasa Kantor

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	190.850.000,00	0,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.607.017.500,00	2.908.302.500,00	(10,36)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.510.800.000,00	8.223.808.401,00	(20,83)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	185.800.000,00	214.900.000,00	(13,54)
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	328.225.000,00	375.000.000,00	(12,47)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	580.200.000,00	605.000.000,00	(4,10)
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.188.660.000,00	37.816.200.000,00	(88,92)
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.577.166.419,00	3.358.486.423,00	214,94
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	17.340.000,00	131.520.000,00	(86,82)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	81.000.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	48.250.000,00	50.000.000,00	(3,50)
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.724.247.265,00	22.400.469.068,00	(11,95)
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.960.094.813,00	10.529.588.689,00	(24,40)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.675.452.329,00	60.763.029.607,00	11,38
Belanja Jasa Tenaga Ahli	122.080.743.378,00	52.230.653.258,00	133,73
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.999.447.800,00	19.013.756.186,00	42,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.362.444.400,00	993.425.478,00	37,15
Belanja Jasa Tenaga Supir	960.402.000,00	821.114.800,00	16,96
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	598.000.000,00	625.100.000,00	(4,34)
Belanja Jasa Tata Rias	16.100.000,00	18.200.000,00	(11,54)
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	697.650.000,00	822.755.000,00	(15,21)
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	546.693.544,00	125.488.150,00	335,65
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	211.491.850,00	267.266.000,00	(20,87)
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.823.475.000,00	2.689.096.000,00	5,00
Belanja Jasa Kalibrasi	17.940.500,00	8.400.000,00	113,58
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.600.000,00	14.400.000,00	50,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	399.830.400,00	409.256.800,00	(2,30)
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.049.575.500,00	641.344.750,00	219,57
Belanja Tagihan Air	10.320.000,00	8.456.500,00	22,04
Belanja Tagihan Listrik	5.823.432.303,00	4.989.362.568,00	16,72
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	161.400.000,00	199.000.000,00	(18,89)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.425.261.009,00	4.274.963.538,00	(19,88)
Belanja Paket/Pengiriman	125.487.900,00	39.490.000,00	217,77
Belanja Penambahan Daya	42.679.050,00	53.642.000,00	(20,44)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	502.061.917,00	327.829.824,00	53,15
Belanja Lembur	979.255.000,00	752.510.000,00	30,13
Belanja Medical Check Up	56.559.498,00	199.990.000,00	(71,72)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	534.600.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**291.040.554.375,00**	**236.982.805.540,00**	**22,81**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 sebesar Rp291.040.554.375,00 mengalami peningkatan sebesar Rp54.057.748.835,00 atau 22,81%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp236.982.805.540,00.

2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.172.992.886,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.916.557.092,00	1.791.267.048,00	6,99
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.271.505.500,00	14.444.798.000,00	19,56
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.394.408.900,00	1.287.834.900,00	8,27
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.273.429.794,00	3.643.050.734,00	(10,15)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.277.977.600,00	2.342.278.416,00	39,93
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	39.114.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**27.172.992.886,00**	**23.509.229.098,00**	**15,58**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 sebesar Rp27.172.992.886,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.663.763.788,00 atau 15,58%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp23.509.229.098,00.

3) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp429.700.000,00 atau menurun sebesar 47,47%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp818.000.000,00. Adapun Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 merupakan belanja sewa yang diperuntukan untuk biaya transport antar jemput rujukan persalinan dari rumah ke RTK, Puskesmas dan Rumah Sakit, sewa tempat tunggu kelahiran, sewa penginapan Kontingen PORKAB Kecamatan Bungku Barat, sewa penginapan untuk Jambore PKK Kecamatan Bungku Pesisir, serta sewa gedung untuk kegiatan pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah sebesar Rp429.700.000,00 yang masing-masing dikelola oleh lima OPD. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Belanja Sewa Tanah

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.700.000,00
3.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	300.000.000,00
4.	Kecamatan Bungku Barat	19.600.000,00
5.	Kecamatan Bungku Pesisir	43.400.000,00
Jumlah		**429.700.000,00**

4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.395.270.200,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	12.300.000,00	308.244.000,00	(96,01)
Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	1.500.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	808.745.000,00	622.421.100,00	29,94
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	611.463.400,00	483.000.000,00	26,60
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	147.250.000,00	53.550.000,00	174,98
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.100.000,00	89.100.000,00	(97,64)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	287.430.000,00	306.931.400,00	(6,35)
Belanja Sewa Mebel	215.996.000,00	163.475.500,00	32,13
Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	14.275.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	2.150.000,00	2.700.000,00	(20,37)
Belanja Sewa Peralatan Umum	307.835.800,00	257.185.632,00	19,69
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	16.999.998,00	(100,00)
Jumlah	**2.395.270.200,00**	**2.319.382.630,00**	**3,27**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp2.395.270.200,00 atau naik sebesar 3,27%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.319.382.630,00. Adapun belanja sewa Peralatan dan Mesin yang mengalami peningkatan signifikan adalah belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan kegiatan pengangkutan barang/logistik yang masuk ke wilayah Kabupaten Morowali pada TA 2025.

5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.056.318.100,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Belanja Sewa Gedung dan Bagunan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	52.060.000,00	240.260.000,00	(78,33)
Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	95.200.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.389.428.100,00	1.144.747.500,00	21,37
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	438.530.000,00	156.310.000,00	180,55
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	116.300.000,00	186.100.000,00	(37,51)
Jumlah	**2.056.318.100,00**	**1.882.617.500,00**	**9,23**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp2.056.318.100,00 atau naik sebesar 9,23%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.882.617.500,00. Adapun Belanja Sewa Gedung dan Bagunan yang mengalami peningkatan signifikan adalah belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan penyewaan bangunan gedung tempat kerja lainnya di tahun 2025.

6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.473.349.481,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	14.850.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	224.742.921,00	53.277.780,00	321,83
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	4.238.590.176,00	3.900.817.865,00	8,66
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	163.897.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	6.524.838.211,00	1.519.686.293,00	329,35

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	8.189.000,00	1.800.000.000,00	(99,55)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.999.992.300,00	1.650.456.000,00	21,18
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.510.539.062,00	749.779.700,00	101,47
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	198.800.000,00	199.439.250,00	(0,32)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	52.308.750,00	(100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.894.732.114,00	1.445.209.975,00	238,69
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.802.719.697,00	1.195.386.165,00	50,81
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	70.206.000,00	159.726.000,00	(56,05)
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.900.000,00	(100,00)
Jumlah	**21.473.349.481,00**	**13.004.734.778,00**	**65,12**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 sebesar Rp21.473.349.481,00 atau naik sebesar 65,12%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp13.004.734.778,00. Adapun belanja jasa konsultansi konstruksi yang mengalami peningkatan signifikan adalah belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya, belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, dan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja perencanaan arsitektur, jasa desain rekayasa serta pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung pada TA 2025.

7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.338.244.958,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	199.000.000,00	0,00	100,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	145.000.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.139.244.958,00	0,00	100,00
Jumlah	**1.338.244.958,00**	**145.000.000,00**	**819,48**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 sebesar Rp1.338.244.958,00 atau naik sebesar 819,48%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp145.000.000,00.

8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 31 Desember 2025 sebesar Rp697.550.000,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.48 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	81.900.000,00	(100,00)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	438.300.000,00	2.550.600.000,00	(82,82)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	259.250.000,00	0,00	100,00
Jumlah	**697.550.000,00**	**2.632.500.000,00**	**(73,50)**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 sebesar Rp697.550.000,00 atau turun sebesar 73,50%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.632.500.000,00. Hal ini disebabkan tidak terdapat ASN yang melaksanakan Tugas Belajar jenjang S1 serta menurunnya jumlah ASN yang melaksanakan Tugas Belajar jenjang S2 pada tahun 2025.

9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.983.215.384,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Sosialisasi	30.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Bimbingan Teknis	4.937.515.384,00	4.618.065.058,00	6,92

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Diklat Kepemimpinan	13.650.000,00	310.985.000,00	(95,61)
Jumlah	**4.983.215.384,00**	**4.929.050.058,00**	**1,10**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 sebesar Rp4.983.215.384,00 atau naik sebesar 1,10%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.929.050.058,00. Adapun belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang meningkat adalah belanja bimbingan teknis. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara tatap muka pada tahun 2025.

10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.900.000,00. Belanja tersebut dilaksanakan oleh pegawai Non ASN dilingkup Bagian Umum Sekretariat Daerah yang ditugaskan dalam menjaga kebersihan dan keamanan Mess Pemda Morowali di Jakarta.

11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp126.083.370,00. Nilai tersebut merupakan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software dan Belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Daerah.

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut.

Realisasi Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp23.357.226.619,00, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Belanja Pemeliharaan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.909.305.990,00	5.577.525.567,00	5,95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.536.101.544,00	34.081.776.425,50	(69,09)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.874.539.085,00	7.332.055.592,00	(6,24)
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.280.000,00	0,00	100,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Jumlah	**23.357.226.619,00**	**46.991.357.584,50**	**(50,29)**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp23.357.226.619,00 atau turun sebesar 50,29%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp46.991.357.584,50. Adapun belanja pemeliharaan yang menurun secara signifikan adalah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pekerjaan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala (*rehabilitasi*) pada tahun 2025.

d. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan negara atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.515.483.402,00. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51 Belanja Perjalanan Dinas

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	8.676.453.891,00	10.935.075.452,00	(20,65)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	4.465.345.511,00	6.435.528.467,00	(30,61)
Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku	585.835.961,00	531.173.152,00	10,29
Puskesmas Ulunambo	591.928.160,00	548.480.077,00	7,92
Puskesmas Kaleroang	523.653.000,00	742.801.500,00	(29,50)
Puskesmas Lafeu	386.374.000,00	355.285.000,00	8,75
Puskesmas Bahodopi	424.445.000,00	305.190.000,00	39,08
Puskesmas Bahomotefe	299.371.000,00	250.805.000,00	19,36
Puskesmas Bungku	320.595.000,00	353.104.714,00	(9,21)
Puskesmas Wosu	336.349.200,00	263.654.000,00	27,57
Puskesmas Bahonsuai	279.004.000,00	206.165.000,00	35,33
Puskesmas Lantula Jaya	310.905.000,00	278.195.000,00	11,76
Puskesmas Tanjung Harapan	252.777.300,00	152.960.000,00	65,26
Puskesmas Fonuasingko	336.780.000,00	123.225.000,00	173,30
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Daerah	4.020.939.378,00	4.662.273.765,00	(13,76)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	1.973.409.266,00	2.689.629.050,00	(26,63)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	938.110.818,00	1.432.905.573,00	(34,53)

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.680.657.000,00	1.443.652.274,00	16,42
Dinas Sosial Daerah	1.829.184.419,00	2.037.788.432,00	(10,24)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah	977.878.302,00	1.425.496.816,00	(31,40)
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1.451.457.367,00	1.911.380.333,00	(24,06)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	890.360.300,00	1.053.737.000,00	(15,50)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	1.895.952.048,00	3.129.844.206,00	(39,42)
Dinas Perhubungan	1.057.515.295,00	892.275.665,00	18,52
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	815.389.625,00	1.911.752.515,00	(57,35)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	1.624.557.202,00	2.085.721.828,00	(22,11)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	1.093.248.680,00	2.372.530.546,00	(53,92)
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Daerah	2.438.823.913,00	2.338.331.598,00	4,30
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	846.462.026,00	1.225.943.245,00	(30,95)
Dinas Perikanan Daerah	3.452.615.600,00	3.242.071.700,00	6,49
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	1.530.508.011,00	2.402.672.640,00	(36,30)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah	4.917.016.431,00	2.408.121.243,00	104,18
Bagian Umum	622.056.737,00	6.057.178.580,00	(89,73)
Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	419.738.858,00	460.727.518,00	(8,90)
Bagian Hukum	1.113.656.838,00	1.195.659.864,00	(6,86)
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.149.304.229,00	848.424.800,00	35,46
Bagian Organisasi dan Tata Laksana	573.037.863,00	902.642.309,00	(36,52)
Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	799.380.613,00	1.053.032.547,00	(24,09)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	613.319.489,00	1.090.982.500,00	(43,78)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	978.922.742,00	1.041.567.773,00	(6,01)
Bagian Administrasi Pembangunan	5.082.590.571,00	1.038.665.243,00	389,34
Sekretariat DPRD	18.695.721.828,00	14.981.022.592,00	24,80
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.237.074.200,00	4.321.446.600,00	(25,09)

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.914.361.734,00	3.488.232.007,00	12,22
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.135.834.121,00	2.090.454.023,00	2,17
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.618.590.594,00	2.878.412.812,00	(43,77)
Inspektorat Daerah	5.118.963.885,00	5.363.899.893,00	(4,57)
Kecamatan Bahodopi	378.487.499,00	475.500.900,00	(20,40)
Kecamatan Bumi Raya	217.941.000,00	504.890.041,00	(56,83)
Kecamatan Bungku Barat	201.610.486,00	256.832.863,00	(21,50)
Kecamatan Bungku Pesisir	199.796.128,00	379.479.718,00	(47,35)
Kecamatan Bungku Selatan	545.676.130,00	632.264.760,00	(13,69)
Kecamatan Bungku Tengah	219.250.000,00	210.949.068,00	3,94
Kelurahan Bungi	27.630.180,00	33.600.000,00	(17,77)
Kelurahan Lamberea	40.148.000,00	112.150.000,00	(64,20)
Kelurahan Matano	97.535.695,00	82.500.000,00	18,23
Kelurahan Marsaoleh	54.138.100,00	33.020.000,00	63,96
Kelurahan Tofoiso	99.577.200,00	82.290.000,00	21,01
Kelurahan Mendui	71.691.189,00	44.930.000,00	59,56
Kecamatan Bungku Timur	227.168.834,00	196.582.483,00	15,56
Kecamatan Menui Kepulauan	716.737.260,00	613.165.188,00	16,89
Kelurahan Ulunambo	88.585.000,00	97.266.400,00	(8,93)
Kecamatan Wita Ponda	280.259.541,00	232.501.509,00	20,54
Kecamatan Sombori Kepulauan	600.888.895,00	927.021.567,00	(35,18)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.151.905.259,00	3.169.362.185,00	(32,10)
Jumlah	**103.515.483.402,00**	**115.044.426.534,00**	**(10,02)**

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.515.483.402,00 atau turun sebesar 10,02%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp115.044.426.534,00. Adapun belanja perjalanan dinas OPD yang mengalami penurunan signifikan adalah Kelurahan Lamberea. Secara umum hal ini disebabkan adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas pada TA 2025.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.283.786.000,00 atau naik sebesar 123,77%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp26.046.071.700,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja yang bersifat perlombaan, penghargaan atas prestasi, pemberian beasiswa, serta bantuan kepada masyarakat pada TA 2025. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per OPD

Nama OPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	50.318.760.000,00	14.243.670.000,00	253,27
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	48.300.000,00	18.220.000,00	165,09
Dinas Sosial	0,00	47.250.000,00	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	546.300.000,00	482.000.000,00	13,34
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Daerah	256.713.500,00	417.354.500,00	(38,49)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.300.000,00	4.800.000,00	31,25
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	0,00	7.367.377.200,00	(100,00)
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.522.550.000,00	2.421.500.000,00	4,17
Kecamatan Bahodopi	508.500.000,00	67.500.000,00	653,33
Kecamatan Bumi Raya	446.500.000,00	95.500.000,00	367,54
Kecamatan Bungku Barat	484.500.000,00	4.500.000,00	(10.666,67)
Kecamatan Bungku Pesisir	0,00	22.000.000,00	(100,00)
Kecamatan Bungku Selatan	646.000.000,00	152.500.000,00	323,61
Kecamatan Bungku Tengah	577.460.000,00	180.750.000,00	219,48
Kelurahan Lamberea	22.000.000,00	6.750.000,00	225,93
Kelurahan Matano	18.000.000,00	22.500.000,00	(20,00)
Kelurahan Tofoiso	12.000.000,00	24.000.000,00	(50,00)
Kelurahan Mendui	0,00	6.000.000,00	(100,00)
Kecamatan Bungku Timur	342.000.000,00	20.500.000,00	1568,29
Kecamatan Menui Kepulauan	524.250.000,00	189.000.000,00	177,38
Kecamatan Wita Ponda	525.402.500,00	150.000.000,00	250,27
Kecamatan Sombori Kepulauan	478.250.000,00	102.400.000,00	367,04
Jumlah	**58.283.786.000,00**	**26.046.071.700,00**	**123,77**

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS Per 31 Desember 2025 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur, dimana pada Tahun Anggaran 2024 belanja tersebut dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa BOS, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa BOSP. Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tercatat sebesar Rp22.298.044.816,00.

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP Per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp22.151.661.751,00. Namun, pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP karena nomenklatur belanja tersebut baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025.

h. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.592.674.704,37 atau naik 9,47%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp64.486.448.044,12. Hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan layanan pada RSUD Morowali yang dibiayai melalui Belanja Barang dan Jasa BLUD pada TA 2025.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Akun Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan pembayaran biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) berupa *Sub Loan Agreement* (SLA) Nomor: SLA-1241/DSMI/2011 tanggal 12 Mei 2011.

Pada TA 2025 Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp1.664.000.000,00 terealisasi sebesar Rp892.157.393,44 atau 53,61%, tidak tercapainya target Belanja Bunga disebabkan oleh penurunan nilai suku bunga di tahun 2025 sehingga berdampak pada nilai Belanja Bunga yang dibayarkan sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Realisasi TA 2025 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.146.186.220,34 mengalami penurunan sebesar Rp254.028.826,90 atau turun 22,16%.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.53 Belanja Hibah

No	Belanja Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.445.734.853,00	1.500.000.000,00	33,74	17.000.000.000,00
2.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.400.000.000,00
3.	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.134.223.400,00	66.932.892.850,00	86,77	45.501.287.000,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS	714.600.000,00	714.600.000,00	100,00	712.980.000,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	813.105.537,00	813.105.533,00	99,99	648.965.348,00
6.	Belanja Hibah Dana BOSP	7.570.608.000,00	7.483.170.800,00	98,84	4.968.561.250,00
Jumlah		**90.678.271.790,00**	**77.443.769.183,00**	**85,40**	**104.231.793.598,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp106.787.084.560,00 terealisasi sebesar Rp77.443.769.183,00 atau 85,40%. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 menurun sebesar Rp26.788.024.415,00 atau 25,70%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp104.231.793.598,00. Penurunan Realisasi belanja Hibah tersebut disebabkan oleh berkurangnya realisasi hibah kepada pemerintah pusat dan tidak adanya realisasi hibah kepada pemerintah daerah lainnya pada tahun 2025. Tidak tercapainya target Belanja Hibah yang secara signifikan terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan proses pengadaan pembangunan Gedung UDD dan Markas PMI, serta penerapan pembayaran operasional kegiatan secara *real cost* sehingga terdapat sisa alokasi pada masing-masing item belanja. Pengajuan proposal kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dikelola oleh tujuh OPD Teknis diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54 Belanja Hibah Per OPD

No.	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.180.683.300,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	655.000.000,00
3.	Dinas Sosial	6.912.000.000,00
4.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Daerah	12.023.902.750,00
5.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	500.000.000,00
6.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	35.859.077.600,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.313.105.533,00
Jumlah		**77.443.769.183,00**

Dari tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp77.443.769.183,00 terdapat Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, Belanja hibah dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Belanja Hibah Dana BOSP dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan pembayaran atas belanja hibah rehab gedung sekretariat forum kerukunan umat beragama dan kebutuhan Mobiler Loka/ Balai Rehabilitasi BNN Kab. Morowali Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali yang pembayarannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.

b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember TA 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi. Namun, pada TA 2024 terdapat realisasi sebesar Rp35.400.000.000,00.

c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember TA 2024 sebesar Rp77.134.223.400,00 dan terealisasi sebesar Rp66.932.892.850,00 atau 86,77%. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.55 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.137.912.500,00
2.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.935.902.750,00
3.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.859.077.600,00
Jumlah		**66.932.892.850,00**

d. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS per 31 Desember TA 2025 terealisasi sebesar Rp714.600.000,00 merupakan Belanja Hibah Dana BOS kepada SD dan SMP swasta di wilayah Kabupaten Morowali pada TA 2025.

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik merupakan bantuan kepada partai politik yang diberikan kepada sepuluh partai politik sesuai jumlah suara sebanyak 98.239 dengan rumusan berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu:

$$\frac{\text{Pagu}}{\text{Suara Sah Pemilu}} \times \text{suara sah diperoleh partai}$$

OPD pengelola bantuan keuangan tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, sedangkan Partai Politik penerima Belanja Bantuan Keuangan TA 2025, dapat dirinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56 Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Partai Politik	Pagu Anggaran (Rp)	Suara Sah Pemilu	Suara yang diperoleh Parpol	Jumlah yang diterima Parpol (Rp)
1.	Partai PKB	648.965.360	98.239	6.112	50.587.862,72
2.	Partai Gerindra	648.965.360	98.239	16.380	135.574.147,80
3.	Partai PDI Perjuangan	648.965.360	98.239	5.928	49.064.929,68
4.	Partai Golkar	648.965.360	98.239	12.148	100.546.687,88

No	Partai Politik	Pagu Anggaran (Rp)	Suara Sah Pemilu	Suara yang diperoleh Parpol	Jumlah yang diterima Parpol (Rp)
5.	Partai Nasdem	648.965.360	98.239	20.683	171.189.261,23
6.	Partai PKS	648.965.360	98.239	3.224	26.684.435,44
7.	Partai Hanura	648.965.360	98.239	3.768	31.187.020,08
8.	Partai PBB	648.965.360	98.239	5.307	43.925.030,67
9.	Partai Demokrat	648.965.360	98.239	13.900	115.047.657,00
10.	Partai Perindo	648.965.360	98.239	10.789	89.298.500,50
Jumlah				**98.239**	**813.105.533,00**

f. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp7.483.170.800,00, merupakan Belanja Hibah Dana BOP untuk PAUD Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Morowali TA 2025.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.57 Belanja Bantuan Sosial

No	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.703.411.250,00	14.525.800.000,00	98,79	6.439.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	24.806.939.640,00	1.250.000.000,00	5,03	38.600.000.000,00
Jumlah		**39.510.350.890,00**	**15.775.800.000,00**	**39,92**	**45.039.200.000,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp39.510.350.890,00 dan terealisasi sebesar Rp15.775.800.000,00 atau 39,92%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 menurun sebesar Rp29.263.400.000,00 atau 64,97% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp45.039.200.000,00. Belanja Bantuan Sosial TA 2025 terdiri dari pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang dikelola oleh Dinas Sosial Daerah sebesar Rp14.525.800.000,00, dan Pembayaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.250.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya bantuan sosial berupa uang untuk jaminan hidup kepada janda miskin, lansia dan penyandang disabilitas dan pembangunan baru/rusak berat rumah swadaya untuk masyarakat yang kurang mampu. Tidak tercapainya target Belanja Bantuan Sosial yang secara signifikan terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan nilai bantuan per unit dari Rp65.000.000,- menjadi Rp120.000.000,00 dan memerlukan penyesuaian Peraturan Bupati terkait Bantuan Rumah Layak

Huni. Peraturan yang dimaksud belum ditetapkan pada saat pelaksanaan anggaran, sehingga dari target Pembangunan Baru (PB) sebanyak 363 unit hanya terealisasi 10 unit.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

Anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp1.054.504.477.901,61 dan terealisasi sebesar Rp851.270.056.790,43 atau 80,73%. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.58 Belanja Modal

No	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Tanah	46.997.982.885,00	43.576.372.121,00	92,72	54.200.960.137,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	179.024.912.460,16	153.900.472.699,00	85,97	175.235.443.624,00
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	460.480.172.396,84	412.972.340.440,43	89,68	236.686.171.253,25
4.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	363.926.992.219,61	236.774.789.690,00	65,06	200.750.115.539,81
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.946.767.940,00	3.918.571.840,00	99,29	2.348.930.604,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	127.650.000,00	127.510.000,00	99,89	570.310.500,00
Jumlah		**1.054.504.477.901,61**	**851.270.056.790,43**	**80,73**	**669.791.931.658,06**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp181.478.125.132,37 atau 27,09%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp669.791.931.658,06, secara rincin diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.576.372.121,00 atau 92,72% dari anggaran sebesar Rp46.997.982.885,00. Belanja Modal Tanah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.624.588.016,00 atau 19,60%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp54.200.960.137,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Modal Tanah Persil	46.997.982.885,00	43.576.372.121,00	92,72	54.200.960.137,00
Jumlah		**46.997.982.885,00**	**43.576.372.121,00**	**92,72**	**54.200.960.137,00**

Dari nilai tersebut, terdapat pemberian ganti kerugian tanah untuk Pembuatan Sungai Alternatif Bandara sebesar Rp2.124.400.000,00 yang diberikan bukan kepada pemilik tanah terdampak sebagaimana dalam dokumen sertifikat kepemilikan, melainkan kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik asli tanah tersebut. Selain itu, terdapat pemberian ganti kerugian tanah untuk Pembangunan Jalan Anjungan - Kantor Lurah Matano sebesar Rp1.312.523.100,00 yang terindikasi tumpang tindih dengan tanah hasil reklamasi Pantai Matano.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 sebesar Rp153.900.472.699,00 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**			
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	18.491.788.567,00	4.719.800.000,00	291,79
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	584.499.360,00	0,00	100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.794.288.349,00	3.765.068.167,00	(52,34)
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**			
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	43.838.385.010,00	60.727.924.000,00	(27,81)
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.864.594.980,00	2.366.871.442,00	105,53
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**			
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	30.800.000,00	8.022.000,00	283,94
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.588.527,00	96.068.000,00	(98,35)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	226.262.470,00	57.163.800,00	295,81
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**			
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	829.404.876,00	138.501.300,00	498,84
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.832.336.095,00	18.301.723.264,00	(13,49)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.457.982.542,00	16.897.099.777,00	(26,27)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	672.216.930,00	362.583.575,00	85,40
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**			
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.227.257.429,00	1.573.560.700,00	(22,01)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	285.352.000,00	1.698.470.000,00	(83,20)
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**			
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.396.638.635,00	5.522.223.612,00	(2,27)
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	22.906.020.263,00	34.103.861.115,00	(32,83)
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**			
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	957.119.987,00	620.220.000,00	54,32

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	593.383.550,00	280.926.000,00	111,22
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**			
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.663.537.383,00	14.073.299.035,00	(10,02)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.326.946.697,00	2.256.100.925,00	3,14
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**			
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	37.500.000,00	(100,00)
5.2.02.18	**Belanja Modal Rambu-Rambu**			
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.965.918.440,00	1.320.300.000,00	48,90
5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	299.700.000,00	33.600.000,00	791,96
5.2.02.19	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**			
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.063.428.100,00	1.068.411.400,00	93,13
5.2.02.88	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**			
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	3.724.811.810,00	(100,00)
5.2.02.89	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**			
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.528.692.509,00	0,00	100,00
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**			
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	62.330.000,00	1.481.333.702,00	(95,79)
Jumlah		**153.900.472.699,00**	**175.235.443.624,00**	**(12,18)**

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2025 sebesar Rp153.900.472.699,00 atau turun sebesar 12,18%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp175.235.443.624,00. Tidak tercapainya target Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang secara signifikan terdapat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah, disebabkan oleh tidak terlaksananya pengadaan videotron karena anggaran baru tersedia pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sehingga waktu efektif pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas. Atas pertimbangan risiko teknis, hukum, dan kualitas hasil pekerjaan, kegiatan pengadaan dimaksud tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp412.972.340.440,43 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Belanja Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**			
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	391.532.227.397,88	223.084.044.420,25	75,51
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.455.793.469,55	1.477.182.130,00	201,64
5.2.03.03	**Belanja Modal Bangunan Menara**			
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	332.944.500,00	0,00	100,00
5.2.03.04	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**			
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	16.651.375.073,00	12.124.944.703,00	37,33
Jumlah		**412.972.340.440,43**	**236.686.171.253,25**	**74,48**

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2025 sebesar Rp412.972.340.440,43 atau naik sebesar 74,48%, jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2024 sebesar Rp236.686.171.253,25. Tidak tercapainya target Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang secara signifikan terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Salabangka Paku, disebabkan oleh waktu pelaksanaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai terlalu singkat setelah dokumen perencanaan selesai disusun sehingga proses konstruksi dipandang tidak akan tuntas dalam tahun anggaran berjalan dan akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp236.774.789.690,00, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.62 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**			
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	102.469.958.267,00	66.174.833.701,00	54,85
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.061.568.652,00	18.392.329.636,00	(72,48)
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**			
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	698.258.401,00	4.482.683.140,00	(84,42)
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.008.721.243,00	36.490.117.081,00	(1,32)
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25.988.091.962,00	5.023.205.806,00	417,36
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	25.145.122.554,00	18.032.127.998,81	39,45
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**			

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.477.417.770,00	0,00	100,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.470.275.000,00	0,00	100,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	122.650.000,00	1.234.500.000,00	(90,06)
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**			
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	249.413.498,00	199.805.994,00	24,83
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	36.083.312.343,00	50.585.549.183,00	(28,67)
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	134.963.000,00	(100,00)
Jumlah		**236.774.789.690,00**	**200.750.115.539,81**	**17,95**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp236.774.789.690,00 atau naik sebesar 17,95%, jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2024 sebesar Rp200.750.115.539,81. Tidak tercapainya target Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang secara signifikan terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan pada kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik SIKIM. Kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena telah memasuki akhir tahun anggaran, di mana rincian uraian belanja yang terfragmentasi menyulitkan penentuan besaran biaya riil pada setiap item yang dibutuhkan, sehingga proses pengadaannya tidak dapat terpenuhi.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.918.571.840,00, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.05.01	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**			
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	476.702.500,00	499.973.490,00	(4,65)
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**			
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	338.620.000,00	13.908.840,00	2.334,57
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	117.451.600,00	16.025.000,00	632,93
5.2.05.06	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**			
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	30.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**			
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	1.819.023.274,00	(100,00)

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
5.2.05.89	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP**			
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.955.797.740,00	0,00	100,00
Jumlah		**3.918.571.840,00**	**2.348.930.604,00**	**66,82**

Tabel di atas menunjukkan realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2025 sebesar Rp3.918.571.840,00 atau naik sebesar 66,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.348.930.604,00. Adapun belanja modal aset tetap lainnya yang mengalami peningkatan signifikan adalah belanja modal barang bercorak kesenian dan belanja modal barang bercorak kebudayaan.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.510.000,00, merupakan belanja modal aset tidak berwujud-software yang dikelola dan diperuntukkan oleh dua OPD yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Belanja Modal Aset Lainnya

No.	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.550.000,00
2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	39.960.000,00
Jumlah		**127.510.000,00**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD TA 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tak Terduga terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Pada TA 2025 Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp468.222.000. Hal ini disebabkan adanya kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembebasan lahan lokasi pembangunan perumahan nelayan di desa Topogaro.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan Keuangan termasuk kepada Partai Politik.

Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp311.582.922.204,00 dan terealisasi sampai dengan akhir TA 2025 sebesar Rp302.305.042.760,00 atau 97,02%, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran Belanja Bagi Hasil pada TA 2025 sebesar Rp72.816.399.999,00 dan terealisasi sebesar Rp92.204.508.112,00 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.65 Belanja Bagi Hasil

No	Belanja Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	68.968.430.204,00	63.917.336.173,00	92,67	31.070.891.850,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	30.586.400.000,00	28.287.171.939,00	92,48	19.025.336.427,00
Jumlah		**99.554.830.204,00**	**92.204.508.112,00**	**92,61**	**50.096.228.277,00**

Total realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp92.204.508.112,00 atau 92,61% dari anggaran sebesar Rp99.554.830.204,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.108.279.835,00 atau 84,05% yang merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sejumlah 126 Desa di Kabupaten Morowali pada TA 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 100.3.3.2/KEP.0302/BPPD/2025 tentang Penetapan Besaran Bagian Desa Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Realisasi Tahun 2024 tanggal 4 September 2025.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Desa atau Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp210.100.534.648,00 atau 99,09% dari anggaran sebesar Rp212.028.092.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.537.489.965,00 atau 2,11% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp214.638.024.613,00. Hal ini disebabkan adanya penundaan penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa pada 8 desa akibat belum terpenuhinya persyaratan teknis di Kabupaten Morowali pada TA 2025.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tersebut terbagi dua sumber pendanaan yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang masing-masing terealisasi sebesar Rp101.025.437.648,00 untuk Dana Desa TA 2025 dan Alokasi Dana Desa TA 2025 sebesar Rp109.075.097.000,00.

Daftar Rekapitulasi Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1

Terhadap Pengelolaan Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat akan melaksanakan Pemeriksaan pada bulan Mei Tahun 2026 sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali.

5.1.3 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.762.345.511.758,80 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.771.409.267.292,24 dihasilkan Defisit sebesar Rp9.063.755.533,44 yang mengalami penurunan sebesar Rp571.802.554.110,03 atau 101,61% jika dibandingkan dengan Surplus pada TA 2024 sebesar Rp562.738.798.576,59.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Morowali meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp857.548.791.102,85 dan terealisasi sebesar Rp857.839.458.521,18 atau 100,03%, secara rinci diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.66 Pembiayaan

No	Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Penerimaan Pembiayaan	872.611.409.652,85	872.610.425.254,85	99,99	312.648.749.009,60
2.	Pengeluaran Pembiayaan	(15.062.618.550,00)	(14.770.966.733,67)	98,06	(2.770.966.733,34)
Pembiayaan Netto		**857.548.791.102,85**	**857.839.458.521,18**	**100,03**	**309.877.782.276,26**

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp547.961.676.244,92 atau 176,83%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp309.877.782.276,26. Adapun realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah diuraikan sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Adapun anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp872.611.409.652,85 dan terealisasi sebesar Rp872.610.425.254,85 atau 99,99%. Nilai ini meningkat sebesar Rp559.961.676.245,25 atau 179,10% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp312.648.749.009,60.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk Penyertaan Modal Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali TA 2025 dan TA 2024 anggaran dan realisasi dirinci diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.67 Pengeluaran Pembiayaan

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.270.966.733,67	81,34	1.270.966.733,34
Jumlah		**15.062.618.550,00**	**14.770.966.733,67**	**98,06**	**2.770.966.733,34**

Tabel di atas menunjukkan target anggaran sebesar Rp15.062.618.550,00 dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp14.770.966.733,67, nilai ini meningkat sebesar Rp12.000.000.000,33 atau 433,06%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.770.966.733,34 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.500.000.000,00 merupakan Pembayaran Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sulteng TA 2025.

5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp1.562.618.550,00 dengan realisasi sebesar Rp1.270.966.733,67 merupakan Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Pembiayaan Netto

No	Pembiayaan Netto	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Rasio	Realisasi 2024
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Penerimaan Pembiayaan	872.611.409.652,85	872.610.425.254,85	99,99	312.648.749.009,60
2.	Pengeluaran Pembiayaan	(15.062.618.550,00)	(14.770.966.733,67)	98,06	(2.770.966.733,34)
Pembiayaan Netto		**857.548.791.102,85**	**857.839.458.521,18**	**100,03**	**309.877.782.276,26**

Tabel di atas menunjukkan realisasi dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp872.610.425.254,85 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp14.770.966.733,67 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp857.839.458.521,18 nilai ini meningkat sebesar Rp547.961.676.244,92 atau 176,83%, jika dibandingkan dengan Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp309.877.782.276,26.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA adalah selisih lebih antara Realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan Penerimaan Pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam

laporan realisasi anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp848.775.702.987,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	SILPA	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.762.345.511.758,80	2.966.371.565.524,41
2.	Belanja Daerah	2.771.409.267.292,24	2.403.632.766.947,82
3.	Surplus/ (Defisit)	(9.063.755.533,44)	562.738.798.576,59
4.	Pembiayaan Netto	857.839.458.521,18	309.877.782.276,26
SILPA		**848.775.702.987,74**	**872.616.580.852,85**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 sebesar Rp848.775.702.987,74 mengalami penurunan sebesar Rp23.840.877.865,11 atau 2,73% dari SILPA TA 2024 sebesar Rp872.616.580.852,85, secara dirinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	SILPA	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Rasio
		Rp	Rp	%
1.	Kas di Kas Daerah	831.754.960.109,53	855.408.309.255,69	(2,76)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	48.376.000,00	228.826.000,00	(79,38)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.969.699.736,00	2.826.257,56	9.787,82
4.	Kas di BLUD	13.505.843.351,13	15.315.749.934,52	(11,82)
5.	Kas Dana BOS	0,00	23.080.702,08	(100,00)
6.	Kas Dana BOSP	70.213.266,08	0,00	100,00
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	214.154.533,00	86.626.607,00	147,21
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00	1.551.162.096,00	(21,93)
Jumlah		**848.775.702.987,74**	**872.616.580.852,85**	**(2,74)**

Adapun nilai SILPA terikat dan SILPA bebas TA 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian SiLPA Terikat dan SiLPA Bebas

No		Uraian	Saldo 31 Desember 2025
			Rp
A.		**SiLPA Terikat**	
	1.	DAK Fisik	10.182.603.296,00
	2.	DAK Non Fisik	1.899.612.914,00
	3.	DAU Bidang Kesehatan	796.091.622,00
	4.	DAU Bidang Pendidikan	2.576.616.135,00
	5.	DAU Kelurahan	49.492.882,00
	6.	Insentif Fiskal	3.108.512.579,00
	7.	DBH Sawit	7.502.145.320,00

No		Uraian	Saldo 31 Desember 2025
			Rp
	8.	Kas di BLUD	13.505.843.351,13
	9.	Kas Dana BOSP	70.213.266,08
	10.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	214.154.533,00
	11.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00
		Jumlah SiLPA Terikat	**41.117.741.890,21**
B.		**SiLPA Bebas**	**807.657.961.097,53**
Jumlah SiLPA			**848.775.702.987,74**

Saldo SILPA TA 2025 sebesar Rp848.775.702.987,74 yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Poin 5.2.5 dan terdapat selisih dengan Saldo Kas Akhir dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp235.924.907,71. Selisih ini merupakan saldo PFK BUD yang tidak termasuk bagian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 namun tercatat sebagai kas daerah per 31 Desember 2025.

5.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL TA 2025 sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 sebesar Rp872.616.580.852,85 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 *(Audited)*.

Rincian komposisi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.72 Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2025
		Rp
1.	Kas di Kas Daerah	855.408.309.255,69
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	228.826.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.826.257,56
4.	Kas di BLUD	15.315.749.934,52
5.	Kas Dana BOS	23.080.702,08
6.	Kas Dana BOSP	0,00
7.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	86.626.607,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.551.162.096,00
Jumlah		**872.616.580.852,85**

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2025. Penggunaan SAL TA 2025 sebesar Rp872.610.425.254,85 meningkat sebesar Rp559.961.676.245,25 atau 179,10%, jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp312.648.749.009,60.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan realisasi anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2025 sebesar Rp848.715.594.035,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.762.345.511.758,80	2.966.371.565.524,41

2.	Belanja Daerah	2.771.409.267.292,24	2.403.632.766.947,82
3.	Surplus/ (Defisit)	(9.063.755.533,44)	562.738.798.576,59
4.	Pembiayaan Netto	857.839.458.521,18	309.877.782.276,26
SILPA		**848.775.702.987,74**	**872.616.580.852,85**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Penyesuaian pembukuan merupakan koreksi tahun berjalan yang dilakukan oleh BUD yang terkait dengan koreksi SILPA tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Koreksi SILPA terhadap SAL yang dilakukan oleh BUD disajikan sebagai koreksi pembukaan tahun sebelumnya. Penyesuaian pembukaan SAL sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp6.155.598,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi atas kesalahan double kredit pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada CV. Morowali Baru di TA 2024	(3.890.018,00)
2.	Koreksi atas double kredit lebih bayar SP2D pada CV. Aneka Jasa Morowali di TA 2024	(2.000.000,00)
3.	Koreksi atas pengembalian kelebihan bayar pajak reklame pada PT. BCA Finance di TA 2024	(265.580,00)
Jumlah		**(6.155.598,00)**

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 sebesar Rp848.775.702.987,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Saldo Kas

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	831.754.960.109,53
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	48.376.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.969.699.736,00
4.	Kas di BLUD	13.505.843.351,13
5.	Kas Dana BOSP	70.213.266,08
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	214.154.533,00
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00
Jumlah		**848.775.702.987,74**

Saldo Kas di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Morowali. Atas Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 sebesar Rp1.969.699.736,00 terdiri atas Sisa UP sebesar Rp269.251,00, Sisa TU sebesar Rp16.836.040,00, Sisa Saldo Rekening/Transaksi KNT Bendahara Pengeluaran sebesar Rp262.349.960,00, sisa honor guru kontrak dan insentif guru kontrak sebesar Rp851.230.000,00, sisa kegiatan pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifial (KKA) sebesar Rp64.097.000,00, dan sisa honorarium jasa tenaga

administrasi sebesar Rp2.346.952,00 serta sisa honor pengurus rumah ibadah dan honor guru keagamaan sebesar Rp772.570.533,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 sebesar Rp848.775.702.987,74, yang salah satu rinciannya terdapat Kas di Kas Daerah sebesar Rp831.754.960.109,53 namun jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali per 31 Desember 2025 sebesar Rp831.990.885.017,24 terdapat selisih sebesar Rp235.924.907,71.

Selisih nilai Kas di Kas Daerah tersebut di atas merupakan saldo PFK BUD yang tidak termasuk bagian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat pada rekening PAD TK II Morowali dan rekening penampungan PPh atas gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Morowali.

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 adalah sebesar Rp848.775.702.987,74 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.225.285.407.442,29	1.040.865.873.862,41	17,72
Pendapatan Transfer	1.526.575.376.851,51	1.916.472.936.378,00	(20,34)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.484.727.465,00	9.032.755.284,00	16,07
Jumlah	**2.762.345.511.758,80**	**2.966.371.565.524,41**	**(6,88)**
Belanja Operasi	1.617.365.945.741,81	1.469.106.582.399,76	10,09
Belanja Modal	851.270.056.790,43	669.791.931.658,06	27,09
Belanja Tak Terduga	468.222.000,00	0,00	100,00
Belanja Transfer	302.305.042.760,00	264.734.252.890,00	14,19
Jumlah	**2.771.409.267.292,24**	**2.403.632.766.947,82**	**15,30**
Penerimaan Pembiayaan	872.610.425.254,85	312.648.749.009,60	179,10
Pengeluaran Pembiayaan	14.770.966.733,67	2.770.966.733,34	433,06
Jumlah	**857.839.458.521,18**	**309.877.782.276,26**	**176,83**
SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	872.616.580.852,85	312.890.783.301,59	178,89
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	872.610.425.254,85	312.648.749.009,59	179,10
Pembiayaan Tahun Berjalan			
Pendapatan	2.762.345.511.758,80	2.966.371.565.524,41	(6,88)
Belanja	2.771.409.267.292,24	2.403.632.766.947,82	15,30
Penerimaan Pembiayaan	872.610.425.254,85	312.648.749.009,60	179,10
Pengeluaran Pembiayaan	14.770.966.733,67	2.770.966.733,34	433,06
Jumlah	**848.775.702.987,74**	**872.616.580.852,85**	**(2,74)**

Pada tabel di atas terdapat sisa dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp26.115.074.748,00 yang masih terdapat di RKUD, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Sisa Dana yang dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Realisasi Transfer (Rp)	Realisasi Pembayaran (Rp)	Sisa (Rp)
1.	DAK Fisik	8.724.374.311,00	82.981.595.467,00	81.523.366.482,00	10.182.603.296,00
2.	DAK Non Fisik	802.268.028,00	12.746.544.419,00	11.649.199.533,00	1.899.612.914,00
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian P3K	0,00	18.909.056.487,00	18.909.056.487,00	0,00
4.	DAU Bidang Kesehatan	323.524.000,00	20.226.607.000,00	19.754.039.378,00	796.091.622,00
5.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	2.172.939.677,00	0,00	2.172.939.677,00	0,00
6.	DAU Bidang Pendidikan	2.161.290.965,00	53.025.406.000,00	52.610.080.830,00	2.576.616.135,00
7.	DAU Kelurahan	50.691.644,00	1.400.000.000,00	1.401.198.762,00	49.492.882,00
8.	Insentif Fiskal	3.108.512.579,00	5.701.860.000,00	5.701.860.000,00	3.108.512.579,00
9.	DBH Sawit	12.364.411.102,00	2.990.929.000,00	7.853.194.782,00	7.502.145.320,00
Total		**29.708.012.306,00**	**197.981.998.373,00**	**201.574.935.931,00**	**26.115.074.748,00**

5.3 Penjelasan Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan secara rinci dalam laporan keuangan ini. Dalam pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Total Aset Pemerintah Kabupaten Morowali per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.093.470.195.886,15 atau meningkat sebesar Rp608.745.885.681,25 atau 13,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.484.724.310.204,90, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78 Rincian Aset

No	Aset	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Aset Lancar	975.169.688.222,73	992.585.868.660,69	(17.416.180.437,96)
2.	Investasi Jangka Panjang	51.398.035.121,95	40.362.843.256,95	11.035.191.865,00
3.	Aset Tetap	3.697.745.307.260,44	3.199.837.188.799,74	497.908.118.460,70
4.	Aset Lainnya	369.157.165.281,03	251.938.409.487,52	117.218.755.793,51
Jumlah		**5.093.470.195.886,15**	**4.484.724.310.204,90**	**608.745.885.681,25**

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar atau Aktiva Lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk segera dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar umumnya terdiri dari Kas, Sekuritas, Piutang, Persediaan, Pembayaran di muka, dan Pendapatan. Laporan posisi keuangan atau Neraca selalu menyajikan informasi tentang Aset Lancar dan komponen-komponennya. Secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Rincian Aset Lancar

No	Aset Lancar	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Kas di Kas Daerah	831.782.460.109,53	856.240.575.225,40	(24.458.115.115,87)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	48.376.000,00	228.826.000,00	(180.450.000,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.969.699.736,00	2.826.257,56	1.966.873.478,44
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	13.505.843.351,13	15.315.749.934,52	(1.809.906.583,39)
5.	Kas di Bendahara FKTP	214.154.533,00	86.626.607,00	127.527.926,00
6.	Kas Lainnya	8.624.406.668,71	13.545.601.068,00	(4.921.194.399,29)
7.	Kas Dana BOSP	70.213.266,08	23.080.702,08	47.132.564,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00	1.551.162.096,00	(338.706.104,00)

No	Aset Lancar	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
9.	Piutang Pajak Daerah	68.311.618.282,18	62.560.275.429,18	5.751.342.853,00
10.	Piutang Retribusi	447.795.000,00	447.795.000,00	0,00
11.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.196.394.406,84	17.010.608.857,84	(5.814.214.451,00)
12.	Piutang Transfer Antar Daerah	27.930.289.725,00	18.188.731.822,00	9.741.557.903,00
13.	Piutang Lainnya	4.022.154.399,00	4.024.654.399,00	(2.500.000,00)
14.	Penyisihan Piutang	(23.620.901.827,12)	(22.499.096.801,28)	(1.121.805.025,84)
15.	Beban Dibayar Dimuka	75.000.000,00	1.166.454.475,27	(1.091.454.475,27)
16.	Persediaan	29.379.728.580,38	24.691.997.588,12	4.687.730.992,26
Jumlah		**975.169.688.222,73**	**992.585.868.660,69**	**(17.416.180.437,96)**

5.3.1.1.1 Kas

Kas merupakan pos Neraca yang paling *likuid.* Pos ini menunjukkan saldo Kas per 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, BLUD RSUD Morowali, serta Bendahara pada OPD baik berupa uang tunai dan rekening giro bank yang seluruhnya merupakan Bagian dari Kas Pemerintah Daerah, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.80 Rincian Kas

No	Kas	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Kas di Kas Daerah	831.990.885.017,24	856.240.575.225,40	(24.249.690.208,16)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	48.376.000,00	228.826.000,00	(180.450.000,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.969.699.736,00	2.826.257,56	1.966.873.478,44
4.	Kas di BLUD	13.505.843.351,13	15.315.749.934,52	(1.809.906.583,39)
5.	Kas di Bendahara FKTP	214.154.533,00	86.626.607,00	127.527.926,00
6.	Kas Lainnya	8.415.981.761,00	13.545.601.068,00	(5.129.619.307,00)
7.	Kas Dana BOSP	70.213.266,08	23.080.702,08	47.132.564,00
8.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00	1.551.162.096,00	(338.706.104,00)
Jumlah		**857.427.609.656,45**	**886.994.447.890,56**	**(29.566.838.234,11)**

Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp857.427.609.656,45 atau turun sebesar Rp29.566.838.234,11 atau 3,3% jika dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp886.994.447.890,56 dengan diuraikan sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp831.990.885.017,24, jika dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp856.240.575.225,40 mengalami penurunan sebesar Rp24.249.690.208,16 atau 2,83%. Saldo Kas di Kas Daerah per

31 Desember 2025 tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo pembukuan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan saldo rekening pada masing-masing bank.

Kas di Kas Daerah Kabupaten Morowali disimpan pada PT Bank Sulteng Cabang Bungku, Bank Rakyat Indonesia KCP Morowali, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri berupa dana di rekening giro bank dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.81 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Kas di Kas Daerah	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	PT Bank Sulteng RKUD (Rek. No.005.01.03.00002-8)	833.205.459.356,66	842.629.506.118,07	(9.424.046.761,41)
2.	PT Bank Sulteng PAD (Rek. No.005.01.03.00001-6)	1.028.753.335,00	9.874.779.143,92	(8.846.025.808,92)
3.	Bank BRI Rek Giro Pemkab Morowali (Rek. No. 0000.2025-01-000114-30-0)	24.717.993.138,99	1.541.865.400,99	23.176.127.738,00
4.	Bank BNI Rek. Giro HIT Bunga BB Pemerintah (Rek. No.0799935558)	960.722.651,49	943.715.741,49	17.006.910,00
5.	Bank Syariah Mandiri Giro Wadiah Institusi (Rek. No. 7133270951)	12.792.819,79	10.823.368,49	1.969.451,30
6.	Bank Mandiri Giro Rupiah IDR-Gov (Rek.No.151-00-2244224-5)	84.753.740,80	53.304.733,73	31.449.007,07
7.	PT Bank Sulteng Pajak Khusus Gaji Pemda (Rek. No.0050103000286)	0,00	804.765.969,71	(804.765.969,71)
Jumlah		**860.010.475.042,73**	**855.858.760.476,40**	**4.151.714.566,33**

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan 2024, dijelaskan sebagai berikut.

1) Rekening Giro RKUD Nomor 005.01.03.000028 pada PT Bank Sulteng Cabang Bungku merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Kas Daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, Pengembalian Perjalanan Dinas, serta Bagi Hasil dari Provinsi.

2) Rekening Giro PAD Nomor 005.01.03.000016 pada PT Bank Sulteng Cabang Bungku merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Kas Daerah yang meliputi Penerimaan PAD berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3) Rekening Giro Pemkab Morowali Nomor 2025-01-000114-30-0 pada Bank Rakyat Indonesia KCP Morowali merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Rekening Giro Pemkab Morowali Nomor 0799935558 pada Bank Negara Indonesia KCP Morowali Bungku merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5) Rekening Giro Pemkab Morowali Nomor 7133270951 pada Bank Syariah Mandiri Morowali merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

6) Rekening Giro Pemkab Morowali Nomor 151-00-2244224-5 pada Bank Mandiri KCP Morowali Bungku merupakan Rekening Kas yang digunakan untuk menampung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7) Rekening Giro Pajak Khusus Gaji Pemda Nomor 0050103000286 pada PT Bank Sulteng Cabang Bungku Merupakan Rekening Penampungan PPh atas gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Morowali.

Nilai Kas di Kas Daerah TA 2025 terdapat selisih antara saldo Kas di Kas Daerah dengan saldo pada Rekening Kas Umum Daerah sesuai hasil rekonsiliasi dengan Bank sebesar Rp28.228.014.933,20 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.82 Selisih Saldo Kas di Kas Daerah Akibat Kesalahan Transaksi Bank

No	Kesalahan Transaksi Bank	31-Des-2025	31-Des-2024
		Rp	Rp
1.	Kesalahan Bank Kurang Debet pada Rek. PT Bank Sulteng	(109.679.480,00)	(117.000,00)
2.	Kesalahan Bank Lebih Debet pada Rek. PT Bank Sulteng	127.652.837,00	1.004.000,00
3.	Kesalahan Bank Salah Debet pada Rek. PT Bank Sulteng	7.730.638,00	0,00
4.	Outstanding SP2D	(28.217.714.238,20)	(110.608.500,00)
5.	Kesalahan Debet (Debet Tidak Melalui SP2D)	567.000,00	0,00
6.	Kesalahan Bank (Pengenaan Pajak dan Biaya Abodemen) pada Rek. BRI	(1.000.000,00)	51.385.249,00
7.	Pembayaran Ganda atas SP2D	0,00	440.176.000,00
8.	Kesalahan Bank (Doublel/Lebih Kredit) pada Rek. PT Bank Sulteng	(31.467.690,00)	(25.000,00)
9.	Kesalahan Bank (Doublel Kredit) pada Rek. Bank Mandiri	(4.104.000,00)	0,00
Jumlah		**(28.228.014.933,20)**	**381.814.749,00**

Adapun rincian atas Transaksi kesalahan bank pada tabel diatas dapat dilihat pada lampiran 2

Nilai Kas di Kas Daerah sebesar Rp831.990.885.017,24 terdapat dana sebesar Rp26.115.074.748,00 yang merupakan sisa dana transfer dari Pemerintah Pusat yang dibatasi penggunaannya sesuai peruntukan masing-masing dan belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian dana yang dibatasi penggunaannya tersebut telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada Poin 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp831.990.885.017,24 merupakan bagian dari Saldo Akhir Kas dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp849.011.627.895,45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas pada Poin 5.5.8.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp48.376.000,00 atau turun sebesar Rp180.450.000,00 atau 78,86% dari saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp228.826.000,00. Kas Bendahara penerimaan akhir tahun tersebut masih berada pada Bendahara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	47.176.000,00	5.171.200,00	42.004.800,00
Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku	1.200.000,00	223.654.800,00	(222.454.800,00)
Jumlah	**48.376.000,00**	**228.826.000,00**	**(180.450.000,00)**

Kas di Bendahara Penerimaan pada Bendahara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB merupakan setoran jasa sarana 40% sebesar Rp47.176.000,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku sebesar Rp1.200.000,00 merupakan setoran pasien umum pada bulan Desember Tahun 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp48.376.000,00 yang masih tersisa per 31 Desember 2025 tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada Tahun Anggaran 2026.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan saldo Kas Sisa UP/GU, Sisa TU dan sisa saldo rekening/transaksi KNT per 31 Desember 2025 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.969.699.736,00 atau naik sebesar Rp1.966.873.478,44 atau 69.592,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.826.257,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Sisa UP/GU di Bendahara Pengeluaran	269.251,00	599.408,00	(330.157,00)
Sisa TU di Bendahara Pengeluaran	16.836.040,00	125.000,00	16.711.040,00
Sisa Saldo Transaksi KNT Bendahara Pengeluaran	262.349.960,00	1.984.822,56	260.365.137,44
Sisa kas atas belanja yang tidak dipertanggungjawabkan di Bendahara Pengeluaran	1.690.244.485,00	0,00	1.690.244.485,00
Jasa Giro yang Belum disetor tahun 2024	0,00	117.027,00	(117.027,00)
Jumlah	**1.969.699.736,00**	**2.826.257,56**	**1.966.873.478,44**

Nilai Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.969.699.736,00 merupakan Kas Bank dan Kas Tunai dengan rincian per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.85 Kas di Bendahara Pengeluaran Per OPD

No	OPD	Sisa Saldo Transaksi KNT 2025 (Rp)	Sisa TU 2025	Sisa UP/GU 2025 (Rp)	Sisa Kas/ Belanja yang tidak dipertanggung jawabkan	2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.772.503,00	0,00	0,00	917.673.952,00	578.828,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.577.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Puskesmas Bahonsuai	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	16.836.040,00	269.250,00	0,00	0,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	709.292,00
9.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	772.570.533,00	0,00
10.	Kecamatan Bungku Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	900.002,56
11.	Kecamatan Bungku Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00
12.	Kecamatan Bahodopi	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kecamatan Sombori Kepulauan	0,00	0,00	0,00	0,00	117.125,00
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	496.604,00
Jumlah		**262.349.960,00**	**16.836.040,00**	**269.251,00**	**1.690.244.485,00**	**2.826.257,56**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.969.699.736,00 yang masih tersisa per 31 Desember 2025 tersebut seluruhnya telah disetor ke kas daerah pada Tahun Anggaran 2026.

d. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD Morowali sebesar Rp13.505.843.351,13 merupakan kas pada rekening RSUD Morowali per 31 Desember 2025 yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan jasa giro atas rekening koran penerimaan, dan penempatan dan pencairan dana BLUD RSUD, serta kas tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Morowali, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Kas di BLUD

Kas di BLUD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Morowali	0,00	11.325.000,00	(11.325.000,00)

Kas di BLUD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Kas Tunai Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Morowali	152.143.403,00	43.080.382,00	109.063.021,00
Kas Bank BNI BLUD di RSUD Morowali No.Rek. 6222441112	1.199.081.404,00	649.006.695,00	550.074.709,00
Kas Bank Mandiri BLUD di RSUD Morowali No.Rek. 151-00-1226327-0	5.122.354.797,37	802.469.062,36	4.319.885.735,01
Kas Bank BTN BLUD di RSUD Morowali No.Rek. 00001167-01-30-00000-32	7.032.263.746,76	13.809.868.774,16	(6.777.605.027,40)
Jumlah	**13.505.843.351,13**	**15.315.749.913,52**	**(1.809.906.562,39)**

Adapun rincian mutasi Kas di BLUD dapat dilihat sebagai berikut.

-	Saldo 31 Desember 2024	Rp	15.315.749.934,52
-	Pendapatan BLUD	Rp	68.613.183.005,00
-	Jasa Giro BLUD	Rp	231.915.115,98
-	Belanja BLUD	Rp	(70.655.004.704,37)
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**13.505.843.351,13**

Laporan keuangan BLUD RSUD Morowali Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Cahyadi dan Adhi berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00025/2.1518/AU.5/11/1162-3/1/IV/2026 tanggal 16 April 2026, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

e. Kas di Bendahara FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang besaran pembayaran berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp214.154.533,00 merupakan saldo pada sebelas Puskesmas. Dana Kapitasi FKTP dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Adapun rincian Kas FKTP pada sebelas Puskesmas yang terdiri atas dana kapitasi yang berada dalam penguasaan bendahara JKN Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Kas di Bendahara FKTP

No	Kas di Bendahara FKTP	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Puskesmas Ulunambo	8.735.643,00	240.979,00	8.494.664,00
2.	Puskesmas Kaleroang	103.279,00	16.183.414,00	(16.080.135,00)
3.	Puskesmas Tanjung Harapan	3.264.262,00	8.482.547,00	(5.218.285,00)
4.	Puskesmas Lafeu	45.925.870,00	46.085.967,00	(160.097,00)
5.	Puskesmas Bahodopi	1.173.350,00	3.222.796,00	(2.049.446,00)

No	Kas di Bendahara FKTP	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
6.	Puskesmas Bahomotefe	11.006.230,00	5.280.352,00	5.725.878,00
7.	Puskesmas Bungku	56.042.807,00	250.805,00	55.792.002,00
8.	Puskesmas Fonuasingko	31.445.658,00	2.758.044,00	28.687.614,00
9.	Puskesmas Wosu	50.338.706,00	3.892.811,00	46.445.895,00
10.	Puskesmas Bahonsuai	269.776,00	191.040,00	78.736,00
11.	Puskesmas Laantula Jaya	5.848.952,00	37.852,00	5.811.100,00
Jumlah		**214.154.533,00**	**86.626.607,00**	**127.527.926,00**

Kas FKTP diperoleh dengan melakukan rekonsiliasi antara mutasi debet dan kredit yang terdapat pada Rekening Koran di sebelas Puskesmas se-Kabupaten Morowali yang disajikan pada Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. SP3B merupakan realisasi pendapatan dan belanja yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah dan selanjutnya diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja oleh BUD.

f. Kas Lainnya

Kas lainnya di bendahara terdiri dari pajak yang belum disetor bendahara pengeluaran ke kas negara serta saldo kas rekening bank dan kas tunai yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran yang merupakan belanja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan, namun bendahara pengeluaran belum melakukan pembayaran kepada yang berhak sampai dengan tanggal neraca.

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.415.981.761,00 terdiri atas Saldo Kas Perhitungan Fihak Ketiga pada Bendahara Pengeluaran OPD sebesar Rp135.222.540,00, Bendahara BOSP sebesar Rp85.405.151,00, Bendahara Kapitasi sebesar Rp14.416.043,00, yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2025, dan Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.908.131.930,00 yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025, serta masih terdapat saldo pada rekening Bank atas Penerimaan Dana CSR sebesar Rp272.806.097,00, adapun rincian kas lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Kas Lainnya

No	Kas Lainnya	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	PFK di Bendahara Pengeluaran OPD	135.222.540,00	756.460,00	134.466.080,00
2.	PFK di Bendahara BOS	0,00	52.832.790,00	(52.832.790,00)
3.	PFK di Bendahara BOK	0,00	1.367.010,00	(1.367.010,00)
4.	PFK di Bendahara BOP	0,00	8.154.767,00	(8.154.767,00)
5.	PFK di Bendahara BOSP	85.405.151,00	0,00	85.405.151,00
6.	PFK Kapitasi	14.416.043,00	112.155.574,00	(97.739.531,00)
7.	Saldo Kas Rekening CSR	272.806.097,00	482.806.097,00	(210.000.000,00)

No	Kas Lainnya	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
8.	Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran	7.908.131.930,00	12.887.528.370,00	(4.979.396.440,00)
Jumlah		**8.415.981.761,00**	**13.545.601.068,00**	**(5.129.619.307,00)**

Tabel diatas menunjukkan Nilai Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.415.981.761,00, dengan rincian per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.89 Kas Lainnya Per OPD

No	Kas Lainnya per OPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.593.826.221,00	1.211.252.748,00	382.573.473,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.178.819.642,00	11.629.034.359,00	(8.450.214.717,00)
3	Puskesmas Kaleroang	14.140.817,00	41.116.671,00	(26.975.854,00)
4	Puskesmas Wosu	343.547.633,00	16.057.251,00	327.490.382,00
5	Puskesmas Bahodopi	1.385.014.413,00	83.639.475,00	1.301.374.938,00
6	Puskesmas Bahomotefe	480.485.647,00	0,00	480.485.647,00
7	Puskesmas Ulunambo	42.623.521,00	225.000,00	42.398.521,00
8	Puskesmas Tanjung Harapan	0,00	3.429,00	(3.429,00)
9	Puskesmas Lafeu	260.080.687,00	0,00	260.080.687,00
10	Puskesmas Fonuasingko	11.723,00	397.758,00	(386.035,00)
11	Puskesmas Bungku	0,00	4.000,00	(4.000,00)
12	Puskesmas Bahonsuai	516.958.920,00	0,00	516.958.920,00
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat	18.565.000	0,00	18.565.000,00
14	Bagian Hukum	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
15	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	0,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)
16	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
17	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	438.803,00	0,00	438.803,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.768.170,00	0,00	8.768.170,00
19	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	79.867.000,00	0,00	79.867.000,00
20	Sekretariat DPRD	18.154.900,00	0,00	18.154.900,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	272.806.097,00	482.806.097,00	(210.000.000,00)
22	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.835.985,00	(2.835.985,00)
23	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah	0,00	24.200,00	(24.200,00)

No	Kas Lainnya per OPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21.127.000,00	238.560,00	20.888.440,00
25	Kecamatan Bungku Timur	30.960,00	0,00	30.960,00
26	Kecamatan Bungku Bahodopi	158.005.882,00	0,00	158.005.882,00
27	Kecamatan Wita Ponda	18.828.725,00	0,00	18.828.725,00
28	Kelurahan Tofoiso	0,00	5.190.000,00	(5.190.000,00)
29	Kecamatan Bungku Pesisir	0,00	67.475.535,00	(67.475.535,00)
Jumlah		**8.415.981.761,00**	**13.545.601.068,00**	**(5.129.619.307,00)**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.415.981.761,00 yang terdiri dari saldo PFK, saldo Dana CSR, serta saldo kas lainnya, untuk saldo PFK sebagian besar telah disetor ke Kas Negara, sedangkan saldo kas lainnya pada bendahara pengeluaran semuanya telah dibayarkan kepada pihak ketiga selaku penerima pembayaran di Tahun Anggaran 2026.

g. Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan saldo akhir per 31 Desember 2025 yang berada pada Sekolah Negeri SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan se-Kabupaten Morowali sebesar Rp70.213.266,08, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.90 Kas Dana BOSP

No	Uraian	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Saldo Awal	23.080.702,08	690.523.919,08	(667.443.217,00)
2.	Penerimaan Dana	30.084.470.600,00	28.474.307.500,00	1.610.163.100,00
3.	Penerimaan Lainnya	12.060.000,00	24.201.000,00	(12.141.000,00)
4.	Jasa Giro/Bunga Bank	19.760.033,00	21.575.189,00	(1.815.156,00)
5.	Belanja Dana BOSP	30.048.982.000,00	29.165.877.400,00	883.104.600,00
6.	Setoran Jasa Giro 2025	19.701.713,00	0,00	19.701.713,00
7.	Setoran Jasa Giro 2024	151.030,00	21.649.506,00	(21.498.476,00)
8.	Pengembalian Sisa Dana	323.326,00	0,00	323.326,00
	Saldo Kas	**70.213.266,08**	**23.080.702,08**	**47.132.564,00**

Metode yang digunakan untuk memperoleh Kas Dana BOSP yaitu dengan mencatat realisasi pendapatan dan belanja yang termuat di SP2B yang telah disampaikan kepada BUD.

Daftar Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja serta Kas Dana BOSP Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3

h. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo akhir per 31 Desember 2025 yang digunakan untuk membiayai operasional pada puskesmas se-Kabupaten Morowali sebesar Rp1.212.455.992,00, secara rinci diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91 Kas Dana BOK Puskesmas

No	Kas Dana BOK Puskesmas	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Puskesmas Ulunambo	55.951.016,00	128.261.361,00	(72.310.345,00)
2.	Puskesmas Kaleroang	198.773.163,00	366.469.553,00	(167.696.390,00)
3.	Puskesmas Lafeu	201.645.622,00	128.777.514,00	72.868.108,00
4.	Puskesmas Bahodopi	37.445.249,00	126.317.002,00	(88.871.753,00)
5.	Puskesmas Bahomotefe	53.292.180,00	108.252.241,00	(54.960.061,00)
6.	Puskesmas Bungku	91.639.345,00	130.235.588,00	(38.596.243,00)
7.	Puskesmas Wosu	210.189.887,00	14.688.500,00	195.501.387,00
8.	Puskesmas Bahonsuai	169.169.082,00	212.640.815,00	(43.471.733,00)
10	Puskesmas Laantula Jaya	85.902.891,00	43.566.843,00	42.336.048,00
11.	Puskesmas Tanjung Harapan	73.359.707,00	122.324.981,00	(48.965.274,00)
10.	Puskesmas Fonuasingko	35.087.850,00	169.627.698,00	(134.539.848,00)
Jumlah		**1.212.455.992,00**	**1.551.162.096,00**	**(338.706.104,00)**

Kas Dana BOK Puskesmas diperoleh dengan melakukan rekonsiliasi antara mutasi debet dan kredit yang terdapat pada Rekening Koran di sebelas Puskesmas se-Kabupaten Morowali yang disajikan pada Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. SP3B merupakan realisasi pendapatan dan belanja yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah dan selanjutnya diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja oleh BUD.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Morowali yang berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.92 Piutang

No	Jenis Piutang	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Piutang Pajak Daerah	68.311.618.282,18	62.560.275.429,18	5.751.342.853,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	447.795.000,00	447.795.000,00	0,00
3.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.196.394.406,84	17.010.608.857,84	(5.814.214.451,00)
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	27.930.289.725,00	18.188.731.822,00	9.741.557.903,00
5.	Piutang Lainnya	4.022.154.399,00	4.024.654.399,00	(2.500.000,00)

No	Jenis Piutang	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
Jumlah		**111.908.251.813,02**	**102.232.065.508,02**	**9.676.186.305,00**

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah.

Saldo Piutang Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp68.311.618.282,18 mengalami kenaikan sebesar Rp5.751.342.853,00 atau 9,19% dari piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp62.560.275.429,18 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Piutang Pajak Hotel	1.323.016.892,34	1.236.169.792,34	86.847.100,00
Piutang Pajak Restoran	1.848.471.830,00	1.002.696.573,00	845.775.257,00
Piutang Pajak Hiburan	136.015.000,00	102.265.000,00	33.750.000,00
Piutang Pajak Reklame	663.354.033,80	572.898.206,80	90.455.827,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	40.910.144.527,00	3.350.001.630,00	37.560.142.897,00
Piutang Pajak Air Tanah	430.473.713,00	610.442.103,00	(179.968.390,00)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.862.628.756,26	46.688.673.114,26	(33.826.044.358,00)
Piutang PBBP2	9.032.032.022,33	7.868.597.602,33	1.163.434.420,00
Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	1.105.481.507,45	1.128.531.407,45	(23.049.900,00)
Jumlah	**68.311.618.282,18**	**62.560.275.429,18**	**5.751.342.853,00**

Daftar Piutang Pajak secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.868.349.419,99, sehingga piutang pajak netto adalah sebesar Rp53.443.268.862,23, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.94 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Piutang Pajak Daerah	Jumlah		
		Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1.	Piutang Pajak Hotel	1.323.016.892,34	(1.156.456.100,80)	166.560.791,54
2.	Piutang Pajak Restoran	1.848.471.830,00	(494.064.628,73)	1.354.407.201,28

No	Piutang Pajak Daerah	Jumlah		
		Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
3.	Piutang Pajak Hiburan	136.015.000,00	(69.534.850,00)	66.480.150,00
4.	Piutang Pajak Reklame	663.354.033,80	(424.404.530,03)	238.949.503,78
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	40.910.144.527,00	(478.238.841,79)	40.431.905.685,22
6.	Piutang Pajak Air Tanah	430.473.713,00	(49.797.078,07)	380.676.634,93
7.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.862.628.756,26	(8.188.662.741,52)	4.673.966.014,75
8.	Piutang PBBP2	9.032.032.022,33	(2.918.070.364,14)	6.113.961.658,19
9.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	1.105.481.507,45	(1.089.120.284,91)	16.361.222,54
Jumlah		**68.311.618.282,18**	**(14.868.349.419,99)**	**53.443.268.862,23**

b. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan penerimaan terhadap pendapatan retribusi. Piutang Retribusi disebabkan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2025 sebesar Rp447.795.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Retribusi Pelayanan Pasar	447.795.000,00	447.795.000,00	0,00
Jumlah	**447.795.000,00**	**447.795.000,00**	**0,00**

Daftar Piutang Retribusi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 13

1) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp447.795.000,00, sehingga piutang retribusi netto adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Jumlah		
	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar	447.795.000,00	(447.795.000,00)	0,00
Jumlah	**447.795.000,00**	**(447.795.000,00)**	**0,00**

c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan hak Pemerintah Daerah dikarenakan adanya beberapa kejadian yang mengakibatkan timbulnya piutang yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Hirkop/DUM Kendaraan Dinas PEMDA	325.857.250,00	325.857.250,00	0,00
Penerimaan sewa *guest house* Bagian Umum Tahun 2008	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Piutang TP/TGR atas SKTJM	3.620.744.283,70	4.029.701.363,70	(408.957.080,00)
Denda Pajak	6.048.018,14	6.048.018,14	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Belanja	37.345.160,00	37.345.160,00	0,00
Piutang BLUD	7.166.399.695,00	12.571.657.066,00	(5.405.257.371,00)
Jumlah	**11.196.394.406,84**	**17.010.608.857,84**	**(5.814.214.451,00)**

Daftar Piutang Denda Pajak dan Daftar Piutang BLUD secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 14 dan 15

Piutang Hirkop Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah merupakan piutang yang timbul dari hasil penjualan kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat sesuai dengan SK. Bupati Nomor: 188.4.45/KEP.0220/Perl./2015 Tanggal 25 Agustus 2015. Pada tahun 2023 piutang hirkop kendaraan dinas Pemerintah Daerah sebesar Rp325.857.250,00 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sehingga saldo piutang hirkop kendaraan dinas untuk tahun pelaporan 2025 masih tetap sebesar Rp325.857.250,00.

Daftar Piutang Hirkop/DUM Kendaraan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 16

Piutang penerimaan sewa *guest house* bagian umum tahun 2008 sebesar Rp40.000.000,00 merupakan piutang yang timbul dari penyewaan Hotel Panorama di Kolonodale yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

Piutang SKTJM/TP-TGR merupakan piutang yang timbul dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah kepada yang terperiksa. Piutang SKTJM/TP-TGR tahun pelaporan 2021 sebesar Rp4.527.374.198,70 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp79.781.096,00, selanjutnya Piutang SKTJM/TP-TGR tahun pelaporan 2022 sebesar Rp4.510.382.226,70 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp492.669.333,00 berikutnya Piutang SKTJM/TP-TGR tahun pelaporan 2023 sebesar Rp4.021.170.693,70 telah di setor ke Kas Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp7.095.626,00 selanjutnya Piutang SKTJM/TP-TGR tahun pelaporan 2024 sebesar Rp4.029.701.363,70 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp408.957.080,00 dan di tahun pelaporan 2025 tidak terdapat Piutang SKTJM/TP-TGR yang baru sehingga total piutang SKTJM/TP-TGR per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.620.744.283,70.

Daftar Piutang SKTJM/TP-TGR secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 17

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja merupakan piutang yang timbul adanya pekerjaan fisik belanja modal Jalan irigasi jaringan yang realisasi pembayarannya 100%, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan fisik di lapangan sampai dengan 31 Desember 2023 progres fisik pekerjaan tidak mencapai 100% dan tidak selesai. Selanjutnya pada tahun 2024 temuan atas kekurangan volume pekerjaan fisik belanja modal Jalan irigasi jaringan tersebut pihak perusahaan telah mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp2.008.707.840,00 yang diantaranya CV. Putra Tombelala sebesar Rp1.762.654.840,00 dan CV. Sari Nugraha sebesar Rp246.053.000,00, dan di Tahun 2025 tidak terdapat pengembalian kelebihan belanja sehingga sisa saldo piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja tahun pelaporan 2025 sebesar Rp37.345.160,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD sebesar Rp7.166.399.695,00 merupakan piutang yang timbul karena pihak BPJS, PT Jasa Raharja, PT Tamacho Graha Krida, PT Sulawesi Mining Invesmen, PT Indonesia Guang CNS Industri, PT Indonesia Ruipu Nickel dan Crome, PT Bintang Delapan Mineral, Pasien Umum dan Obat Kronis, Rujukan Ambulance, Sewa Parkiran dan Piutang Obat Return serta Piutang Kanti sampai dengan 31 Desember 2025 belum melunasi kewajibannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Piutang BLUD

Piutang BLUD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
BPJS Pelayanan	5.566.396.500	10.465.642.600,00	(4.899.246.100)
BPJS Kesehatan-Covid-19	0,00	181.800.000,00	(181.800.000)
BPJS Ketenagakerjaan	131.440.071,00	825.028.605,00	(693.588.534)
PT Jasa Raharja	173.079.643,00	352.612.751,00	(179.533.108)
Pasien Umum	198.315.673	217.355.346,00	(19.039.673)
PT Tamacho Graha Krida	469.510,00	469.510,00	0,00
Piutang Perusahaan	14.246.294,00	14.246.294,00	0,00
Piutang Obat Kronis	119.159.888	228.823.149,00	(109.663.261)
Rujukan Ambulance	926.161.400	257.709.600,00	668.451.800
Sewa Parkiran	13.080.155,00	4.368.650,00	8.711.505
Piutang Obat Return	23.600.561,00	23.600.561,00	0,00
Piutang Kantin	450.000	0,00	450.000
Jumlah	**7.166.399.695,00**	**12.571.657.066,00**	**(5.405.257.371)**

1) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.282.603.008,13, sehingga piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto adalah sebesar Rp6.913.791.398,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Jumlah		
		Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1.	Hirkop/DUM Kendaraan Dinas PEMDA	325.857.250,00	(325.857.250,00)	0,00
2.	Penerimaan sewa *guest house* Bagian Umum Tahun 2008	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
3.	Piutang TP/TGR atas SKTJM	3.620.744.283,70	(3.620.744.283,70)	0,00
4.	Denda Pajak	6.048.018,14	(6.048.018,14)	0,00
5.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Belanja	37.345.160,00	(18.672.580,00)	18.672.580,00
6.	Piutang BLUD	7.166.399.695,00	(271.280.876,29)	6.895.118.818,71
Jumlah		**11.196.394.406,84**	**(4.282.603.008,13)**	**6.913.791.398,71**

d. Piutang Transfer antar Daerah

Piutang Transfer antar Daerah sebesar Rp27.930.289.725,00 merupakan penerimaan DBH Provinsi khususnya Bagi Hasil Pajak. Piutang tersebut disebabkan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900.1.14.3/46/BAPENDA-G.ST/2026 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2025, Tanggal 10 Februari 2026 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	4.552.508.902,00	(4.552.508.902,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	0,00	4.403.903.373,00	(4.403.903.373,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	8.188.731.822,00	6.449.761.831,00	1.738.969.991,00
Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air – Permukaan (PABT – PAP)	19.741.557.903,00	2.782.557.716,00	16.959.000.187,00
Jumlah	**27.930.289.725,00**	**18.188.731.822,00**	**9.741.557.903,00**

Secara rinci Piutang Transfer antar Daerah dapat dilihat pada Lampiran 18

e. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan Piutang yang timbul karena adanya kerugian terhadap Pemerintah Daerah, dimana kerugian tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp

Piutang Kepada Pihak Ke III	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
UUDP Tahun 2005 (Pekerjaan Umum)	19.679.399,00	19.679.399,00	0,00
UUDP Tahun 2005 (Inspektorat)	2.475.000,00	4.975.000,00	(2.500.000,00)
Jumlah	**4.022.154.399,00**	**4.024.654.399,00**	**(2.500.000,00)**

1) Piutang Kepada Pihak Ke III

Piutang Kepada Pihak Ke III merupakan Dana Pemerintah Kabupaten Morowali yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dalam bentuk pinjaman modal kerja sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tahun 2007 dengan SP2D Nomor: 112/LS/Setkab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dan sesuai surat pengakuan utang oleh Direktur Umum Perusahaan Daerah Morowali Atas Nama NURDIN LAWIRA, SE dengan Nomor: 03/dir-PDM/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, atas penyertaan modal tersebut hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI tahun 1962 Nomor 10.TLNRI Nomor 2387) pasal 4 ayat (3) bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini. Atas perbuatan melawan hukum ini, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhi vonis kepada 3 (tiga) orang tersangka yaitu Saudara Datlin Tamalagi dengan Putusan nomor 24/Pid Sus/2013/PN PI, tanggal 24 Januari 2014, H. Khoironi F. Cadda dengan Putusan Nomor 33/Pid Sus-TPK/2013/PN PI, tanggal 24 Januari 2014, serta Syahrir Ishak dengan Putusan Nomor 29/Pid Sus-TPK/2013/PN PI, tanggal 23 Desember 2013. Selain itu, pada Putusan Nomor 33/PidSus-TPK/2013/PN PI, tanggal 24 Januari 2014 dengan terdakwa H. Khoironi F. Cadda juga dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal cepat KM. Sinar Tobaku yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU Diesel-838 830 PK dengan panjang 28,90, meter, lebar 5,80 meter, tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 no. 951/Da, genset Mitsubishi 6 D 14x50 KVA marulli, kapasitas penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Condisioner (AC) dan konstruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam Sheet dirampas untuk Negara Cq. Kabupaten Morowali.

2) Piutang UUDP

Piutang UUDP sebesar Rp33.509.399,00 merupakan saldo UUDP tahun 2005. Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00, sehingga sisa piutang UUDP Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp19.679.399,00. Selanjutnya sisa piutang UUDP Inspektorat Daerah di Tahun 2021 sebesar Rp12.830.000,00 terdapat penyetoran piutang di tahun 2011 dan di tahun 2012 sebesar Rp7.355.000,00, dan penyetoran di tahun 2022 sebesar Rp500.000,00, sementara pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak terdapat penyetoran Piutang UUDP, kemudian pada tahun 2025 terdapat peneyetoran piutang UUDP sebesar Rp2.500.000, sehingga sisa Piutang UUDP Inspektorat Daerah per 31 desember 2025 sebesar Rp2.475.000,00.

3) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.022.154.399,00, sehingga Piutang Lainnya netto adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Penyisihan Piutang Lainnya

No	Piutang Lainnya	J u m l a h		
		Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1.	Piutang Kepada Pihak Ke III	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	0,00
2.	UUDP Tahun 2005 (Pekerjaan Umum)	19.679.399,00	(19.679.399,00)	0,00
3.	UUDP Tahun 2005 (Inspektorat)	2.475.000,00	(2.475.000,00)	0,00
Jumlah		**4.022.154.399,00**	**(4.022.154.399,00)**	**0,00**

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Adapun per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terdapat beban dibayar dimuka sebesar Rp75.000.000,00 atas pekerjaan fisik/pengadaan barang yang telah dibayarkan 100%, namun progres pekerjaan belum mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Beban dibayar dimuka

No	Beban dibayar dimuka	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Paket Rahab Berat jamban SMP 1 Witaponda	0,00	53.829.339,00	(53.829.339,00
2.	Pembangunan Ruang Guru SDN 1 Lamontoli	0,00	79.924.725,00	(79.924.725,00
3.	Pembangunan Mes Pegawai Kejaksaan	0,00	122.186.302,60	(122.186.302,60
4.	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan	0,00	341.377.511,94	(341.377.511,94
5.	Pembangunan Aula Pemerintahan Morowali	0,00	194.136.596,73	(194.136.596,73
6.	Biaya Sewa Mess Pemda Morowali di Jakarta	75.000.000,00	375.000.000,00	(300.000.000,00)
Jumlah		**75.000.000,00**	**1.166.454.475,27**	**(1.091.454.475,27)**

5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.379.728.580,38 mengalami peningkatan sebesar Rp4.687.730.992,26 atau 18,98% dari Tahun 2024 sebesar Rp24.691.997.588,12. Persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang

dilakukan oleh masing-masing OPD pada akhir Tahun Anggaran 2025 dan didokumentasikan dalam Berita Acara Stock Opname masing-masing OPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Persediaan Per OPD

No	Persediaan Per OPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	195.303.635,00	204.578.858,00	(9.275.223,00)
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.337.327.507,09	11.832.612.909,65	(1.495.285.402,56)
3.	Puskesmas Ulunambo	420.495.229,05	360.297.870,94	60.197.358,11
4.	Puskesmas Kaleroang	299.686.790,15	196.419.327,02	103.267.463,13
5.	Puskesmas Lafeu	515.545.699,89	447.146.562,71	68.399.137,18
6.	Puskesmas Bahodopi	847.926.767,84	579.893.181,75	268.033.586,09
7.	Puskesmas Bahomotefe	535.508.686,95	448.946.432,80	86.562.254,15
8.	Puskesmas Bungku	455.343.009,20	472.119.001,38	(16.775.992,18)
9.	Puskesmas Wosu	634.379.613,64	542.509.329,08	91.870.284,56
10.	Puskesmas Bahonsuai	507.937.268,97	412.537.441,99	95.399.826,98
11.	Puskesmas Laantula Jaya	786.152.750,65	619.583.152,70	166.569.597,95
12.	Puskesmas Tanjung Harapan	547.953.447,54	293.144.515,07	254.808.932,47
13.	Puskesmas Fonuasingko	364.837.410,27	400.477.810,58	(35.640.400,31)
14.	Rumah Sakit Pratama Paku	1.269.638.495,00	1.438.390.711,72	(168.752.216,72)
15.	RSUD Morowali	5.100.663.936,96	5.114.779.481,73	(14.115.544,77)
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	2.784.448.214,00	0,00	2.784.448.214,00
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	919.866.756,00	0,00	919.866.756,00
18.	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah	6.642.450,00	7.039.940,00	(397.490,00)
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	912.008.698,00	598.308.765,00	313.699.933,00
20.	Dinas Perhubungan	599.600,00	1.090.950,00	(491.350,00)
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.704.000,00	0,00	25.704.000,00
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.428.463.207,18	494.565.096,00	933.898.111,18
23.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	252.901.845,00	0,00	252.901.845,00
24.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	5.105.400,00	0,00	5.105.400,00
25.	Sekertariat DPRD	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
26.	Kecamatan Bahodopi	1.190.000,00	5.285.000,00	(4.095.000,00)
27.	Kecamatan Bungku Timur	542.342,00	566.700,00	(24.358,00)
28.	Kecamatan Bungku Barat	875.070,00	727.300,00	147.770,00
29.	Kecamatan Sombori Kepulauan	1.439.000,00	0,00	1.439.000,00
30.	Inspektorat Daerah	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
31.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.905.000,00	1.776.950,00	128.050,00

No	Persediaan Per OPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
32.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	191.779.350,00	211.669.700,00	(19.890.350,00)
33.	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah	20.073.400,00	5.728.000,00	14.345.400,00
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.884.000,00	1.802.600,00	1.081.400,00
Jumlah		**29.379.728.580,38**	**24.691.997.588,12**	**4.687.730.992,26**

Rincian Persediaan per Belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.105 Saldo Persediaan Per Belanja

No	Persediaan Per Belanja	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Obat-obatan	7.470.489.342,94	8.152.288.053,81	(681.798.710,87)
2.	Bahan Medis Habis Pakai	14.680.910.235,82	14.797.317.711,11	(116.407.475,29)
3.	Barang Cetak	947.182.596,00	933.611.865,00	13.570.731,00
4.	Alat Tulis Kantor	831.704.522,64	237.934.835,00	593.769.687,64
5.	Bahan Makanan	985.800.347,19	32.144.168,20	953.656.178,99
6.	BBM	21.548.491,00	9.532.891,00	12.015.600,00
7.	Bahan Kimia	140.573.067,16	15.860.000,00	124.713.067,16
8.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.656.580,00	5.277.018,00	5.379.562,00
9.	Alat Listrik	2.076.000,00	2.378.000,00	(302.000,00)
10.	Alat/Bahan Kantor Lainnya	135.000,00	1.095.000,00	(960.000,00)
11.	Bahan Lainnya	102.403.879,80	1.424.000,00	100.979.879,80
12.	Alat Kebersihan	18.292.100,00	8.568.950,00	9.723.150,00
13.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	916.645.256,00	0,00	916.645.256,00
14.	Persediaan Isi Tabung Gas	800.000,00	0,00	800.000,00
15.	Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.511.161,83	494.565.096,00	2.755.946.065,83
Jumlah		**29.379.728.580,38**	**24.691.997.588,12**	**4.687.730.992,26**

Daftar Nilai Stock Opname Persediaan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 19

Terdapat persediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam kondisi kedaluwarsa (*expired*) pada beberapa OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp529.702.099,18. Persediaan kedaluwarsa tersebut tidak termasuk dalam saldo persediaan yang disajikan di Neraca karena telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan sesuai dengan hasil *stock opname*. Rincian persediaan kedaluwarsa per OPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.106 Daftar Persediaan Kedaluwarsa

No	OPD	Jenis Persediaan		Nilai
		Obat-obatan	BMHP	
		Rp	Rp	Rp
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	126.784.940,54	77.302.456,75	204.087.397,29
2.	Puskesmas Ulunambo	10.056.010,00	0,00	10.056.010,00
3.	Puskesmas Kaleroang	9.002.867,08	1.303.578,00	10.306.445,08
4.	Puskesmas Lafeu	18.186.808,84	0,00	18.186.808,84
5.	Puskesmas Bahodopi	40.026.319,89	0,00	40.026.319,89
6.	Puskesmas Bahomotefe	44.390.770,00	0,00	44.390.770,00
7.	Puskesmas Bungku	15.121.148,10	10.366.528,20	25.487.676,30
8.	Puskesmas Wosu	6.377.798,29	0,00	6.377.798,29
9.	Puskesmas Bahonsuai	19.231.326,20	0,00	19.231.326,20
10.	Puskesmas Laantula Jaya	1.771.450,00	0,00	1.771.450,00
11.	Puskesmas Tanjung Harapan	22.465.210,79	4.967.406,00	27.432.616,79
12.	Puskesmas Fonuasingko	36.638.457,60	0,00	36.638.457,60
13.	Rumah Sakit Pratama Paku	48.466.293,40	0,00	48.466.293,40
14.	RSUD Morowali	37.242.729,50	0,00	37.242.729,50
Jumlah		**435.762.130,23**	**93.939.968,95**	**529.702.099,18**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali bahwa metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan. Sedangkan untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat misalnya persediaan obat-obatan dan alat Kesehatan menggunakan metode perpetual sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang ini merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan sebesar Rp11.035.191.865,00, pada Investasi Pemerintah Daerah/Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Jumlah investasi jangka panjang tahun pelaporan 2025 sebesar Rp51.398.035.121,95, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	51.398.035.121,95	40.362.843.256,95	11.035.191.865,00

Jumlah	**51.398.035.121,95**	**40.362.843.256,95**	**11.035.191.865,00**

Investasi tersebut per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali berupa Dana Bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali semenjak tahun 2008 dan sampai saat ini mengalami kemacetan.

Investasi Non Permanen saldo per 31 Desember 2025 telah disisihkan 100% sehingga saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.108 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	%
Dana Bergulir	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Dana bergulir yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam upaya untuk menyajikan nilai Dana Investasi Non Permanen yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Daftar rincian Dana Bergulir secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 20

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali berupa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah, PDAM, serta pada PT BPD Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, akun ini per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.362.843.256,95, mengalami peningkatan sebesar Rp11.035.191.865,00, sehingga per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp51.398.035.121,95, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.109 Investasi Permanen

Investasi Permanen	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
PT BPD Sulawesi Tengah	34.028.189.971,95	20.528.189.971,95	13.500.000.000,00
PDAM	17.368.961.215,00	19.833.769.350,00	(2.464.808.135,00)
Perusahaan Daerah	883.935,00	883.935,00	0,00
Jumlah	**51.398.035.121,95**	**40.362.843.256,95**	**11.035.191.865,00**

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melakukan penyertaan modal pada PT BPD Sulawesi Tengah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada PT BPD Bank Sulteng Tahun Anggaran 2020-2022. Penyertaan modal pada PT BPD Sulawesi Tengah dicatat dengan metode biaya.

Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada PT BPD Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp34.028.189.971,95, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Penyertaan Modal pada PT BPD Sulawesi Tengah

No	Tahun Penyertaan	Nilai Nominal	Saldo
		Rp	Rp
1.	Penyertaan Modal Tahun 2005	150.000.000,00	150.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2006	2.450.000.000,00	2.600.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2007	2.768.923.503,29	5.368.923.503,29
4.	Penyertaan Modal Tahun 2008	382.671.540,00	5.751.595.043,29
5.	Penyertaan Modal Tahun 2009	776.594.928,66	6.528.189.971,95
6.	Penyertaan Modal Tahun 2015	2.000.000.000,00	8.528.189.971,95
7.	Penyertaan Modal Tahun 2017	3.500.000.000,00	12.028.189.971,95
8.	Penyertaan Modal Tahun 2021	3.500.000.000,00	15.528.189.971,95
9.	Penyertaan Modal Tahun 2022	3.500.000.000,00	19.028.189.971,95
10.	Penyertaan Modal Tahun 2024	1.500.000.000,00	20.528.189.971,95
11.	Penyertaan Modal Tahun 2025	13.500.000.000,00	34.028.189.971,95

Jumlah Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PT BPD Sulawesi Tengah Cabang Bungku tahun 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor: 8838/SP2D-LS/BPKAD/2022 Tanggal 29 November 2022. Selanjunya pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak memberikan Penyertaan Modal kepada PT BPD Sulawesi Tengah Cabang Bungku. Selanjutnya pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memberikan Penyertaan Modal kepada PT BPD Sulawesi Tengah Cabang Bungku sebesar Rp1.500.000.000,00, kemudian pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memberikan Penyertaan Modal kepada PT BPD Sulawesi Tengah Cabang Bungku sebesar Rp13.500.000.000,00, sesuai SP2D Nomor: 72.06/04.0/000001/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 Tanggal 31 Januari 2025, sehingga saldo Penyertaan Modal kepada PT BPD Sulawesi Tengah Cabang Bungku per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.028.189.971,95.

b. Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Morowali

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali dan dimuat Lembaran Daerah Nomor 46 Tahun 2003.

Rincian penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Morowali

No	Tahun Penyertaan	Nilai Nominal	Saldo
		Rp	Rp
1.	Penyertaan Modal Tahun 2009	980.000.000,00	980.000.000,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2020	3.260.000.000,00	4.240.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2021	6.500.000.000,00	10.740.000.000,00
4.	Penyertaan Modal Tahun 2022	10.000.000.000,00	20.740.000.000,00
5.	Penyertaan Modal Tahun 2023	1.500.000.000,00	22.240.000.000,00

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memiliki seluruh modal PDAM Kabupaten Morowali sehingga metode pencatatan yang diterapkan untuk Penyertaan Modal pada PDAM adalah metode ekuitas. Metode pencatatan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Morowali Tahun 2025 diketahui posisi Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.368.961.215,00. Adapun rincian mutasi Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut.

-	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	Rp	19.666.771.305,00
-	Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp	63.129.000,00
-	Penyertaan Modal Tahun 2023	Rp	1.500.000.000,00
-	Kerugian Tahun 2023	Rp	(251.001.619,00)
-	Kerugian Tahun 2024	Rp	(1.145.129.336,00)
-	Kerugian Tahun berjalan	Rp	(2.464.808.135,00)
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**17.368.961.215,00**

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Morowali berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada PDAM Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020-2025. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PDAM Kabupaten Morowali pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor: 3112/SP2D-LS/BPKAD/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp1.816.660.500,00, dan SP2D Nomor: 3708/SP2D-LS/BPKAD/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp4.683.339.500,00. Selanjutnya pada Tahun 2022 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PDAM Kabupaten Morowali sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor: 5298/SP2D-LS/BPKAD/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan SP2D Nomor: 6966/SP2D-LS/BPKAD/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp4.180.000.000,00 serta SP2D Nomor: 10199/SP2D-LS/BPKAD/2022 Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp2.820.000.000,00. Selanjutnya pada Tahun 2023 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada PDAM Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor: 18.06./04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000 /P.03/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah

Kabupaten Morowali tidak melanjutkan pemberian Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Morowali namun di tahun berjalan PDAM mendapat kerugian sebesar Rp2.464.808.135,00, sehingga saldo per 31 desember 2025 sebesar Rp17.368.961.215,00.

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Perusahaan Daerah Morowali. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dicatat dengan metode ekuitas.

Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Morowali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.112 Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali

No	Tahun Penyertaan	Nilai Nominal	Saldo
		Rp	Rp
1.	Penyertaan Modal Tahun 2012	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	Modal Sendiri Tahun 2012	1.000.000,00	2.001.000.000,00

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali memiliki seluruh modal Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sehingga metode pencatatan yang diterapkan untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah adalah metode ekuitas. Metode pencatatan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 terdapat koreksi laba di tahan sebesar Rp855.274.473,00. Terhadap Saldo Laporan Keuangan Perusahan Daerah yang kami sajikan merujuk pada saldo akhir Tahun 2023, dan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sudah tidak melakukan aktifitas sejak tahun 2023 sampai saat ini, sehingga posisi Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp883.935,00. Adapun rincian mutasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dapat dilihat sebagai berikut.

-	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	Rp	(802.977.935,00)
-	Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp	(298.731,00)
-	Kerugian Tahun berjalan	Rp	(51.113.872,00)
-	Koreksi Laba di tahan	Rp	855.274.473,00
-	**Saldo per 31 Desember 2025**	**Rp**	**883.935,00**

d. Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali

PT. Nusantara Morowali (Perseroda) didirikan ditahun 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Nusantara Morowali. Pendirian Perseroda tersebut melakukan kegiatan usaha dalam ruang lingkup bidang usaha Ekstraktif, Agraris, Industri, Perdagangan dan Jasa, namun sejak awal pendirian PT. Nusantara Morowali belum melakukan kegiatan usaha atau beroperasi sesuai dengan lingkup bidang usahanya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali belum memberikan Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan Aset Tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.697.745.307.260,44 mengalami kenaikan sebesar Rp497.908.118.460,70 atau 15,56% dari tahun 2024 sebesar Rp3.199.837.188.799,74 dengan komposisi disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.113 Aset Tetap

Aset Tetap	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Trend
	Rp	Rp	Rp	%
Tanah	545.387.700.209,27	344.578.403.455,27	200.809.296.754,00	58,28
Peralatan dan Mesin	809.443.344.327,87	665.943.340.066,08	143.500.004.261,79	21,55
Gedung dan Bangunan	1.619.573.039.300,84	1.357.998.675.253,09	261.574.364.047,75	19,26
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.247.568.005.264,29	2.057.483.415.032,13	190.084.590.232,16	9,24
Aset Tetap Lainnya	27.773.012.183,00	24.961.478.183,00	2.811.534.000,00	11,26
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.894.959.746,20	166.754.939.562,58	(89.859.979.816,38)	(53,89)
Akumulasi Penyusutan	(1.628.894.753.771,03)	(1.417.883.062.752,41)	(211.011.691.018,62)	(14,88)
Jumlah	**3.697.745.307.260,44**	**3.199.837.188.799,74**	**497.908.118.460,70**	**15,56**

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp545.387.700.209,27 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp200.809.296.754,00 atau 58,28%, dari tahun 2024 sebesar Rp344.578.403.455,27.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Per 31 Desember 2024	**Rp**	**344.578.403.455,27**
Penambahan:		
Koreksi Saldo Awal	Rp	7.874.706.340,00
Realisasi Belanja Modal Tanah 2025	Rp	43.576.372.121,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.213.637.800,00
Reklasifikasi Masuk antara Aset Tetap	Rp	18.791.725.755,00
Hibah dari Pemerintah Desa, masyarakat dan Yayasan	Rp	9.439.466.473,00
Penilaian Tanah	Rp	120.385.704.977,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**202.281.613.466,00**
Pengurangan:		

Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	(216.500.200,00)
Reklasifikasi Keluar Antar Aset Tetap	Rp	(806.712.512,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp	(449.104.000,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(1.472.316.712,00)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**200.809.296.754,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**545.387.700.209,27**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan sebagai berikut:

Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp200.809.296.754,00 merupakan koreksi saldo awal, realisasi belanja modal tanah, Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa, reklasifikasi masuk antara aset tetap, hibah dari Pemerintah Desa, masyarakat dan Yayasan, serta penilaian tanah.

a. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap Tanah terdiri dari.

1) Koreksi saldo awal merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan aset tetap tanah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.874.706.340,00;
2) Realisasi Belanja Modal Tanah atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp43.576.372.121,00;
3) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa merupakan aset Tanah yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang dan Jasa atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.213.637.800,00;
4) Reklasifikasi masuk antara aset tetap merupakan aset tetap tanah yang terealisasi pada belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.287.778.833,00, belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.494.144.722,00 dan belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.802.200,00;
5) Hibah dari Pemerintah Desa, masyarakat dan Yayasan merupakan aset Tetap Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Desa, masyarakat dan Yayasan sebesar Rp9.439.466.473,00; dan
6) Penilaian tanah merupakan penentuan nilai wajar aset tetap tanah yang sebelumnya bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 menjadi sebesar Rp120.385.704.977,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap Tanah sebesar Rp1.472.316.712,00, terdiri dari.

1) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Tanah yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah tercatat di Tahun Anggaran 2024 namun baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp216.500.200,00;
2) Reklasifikasi keluar antara aset tetap merupakan aset tetap Tanah yang terealisasi pada belanja modal aset tetap Tanah berupa aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp806.712.512,00; dan

3) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain merupakan aset tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain sebesar Rp449.104.000,00.

Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21, 23 dan 25

Berdasarkan hasil identifikasi pencatatan Aset Tetap Tanah pada SIMDA BMD, terdapat Aset Tetap Tanah yang tidak dilengkapi dengan informasi Sertifikat dan/atau Bukti Penguasaan yang menjadi Dasar Pencatatan atas tanah, tanah yang tercatat masih menggunakan dokumen SKPT dan/atau realisasi Belanja Modal sebagai dasar pencatatan yang tidak dapat diakui sebagai alas hak pencatatan atas tanah, sebanyak 91 Register yang teridentifikasi atas pencatatan Aset Tetap Tanah tersebut dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rekapitulasi Aset Tetap Tanah yang Tidak Dilengkapi Bukti Penguasaan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Total Perolehan
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	532,000,000.40
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	29	6,890,907,401.00
3	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	149,279,000.00
4	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	2	279,191,000.00
5	Dinas Pendidikan Daerah	16	5,451,466,424.00
6	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	4	652,474,683.00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	8	496,419,000.00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	22	15,314,238,996.00
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	1	706,665,000.00
10	Kecamatan Bahodopi	1	264,512,500.00
11	Kecamatan Bumi Raya	1	14,910,000.00
12	Kecamatan Bungku Selatan	1	3,090,000.00
13	Kecamatan Menui Kepulauan	1	34,889,000.00
14	RSUD Morowali	1	1,786,543,000.00
Jumlah		**91**	**32,576,586,004.40**

Daftar Aset Tetap Tanah yang Tidak Dilengkapi Bukti Penguasaan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 28

Terdapat pencatatan Aset Tetap Tanah yang masuk dalam sengketa/proses peradilan yang telah dibangun gedung di atasnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115 Daftar Aset Tetap Tanah dalam Sengketa

No	OPD	Uraian Aset	No Reg	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas (m^2)	Ket
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1	2024	6.781.011.201,00	Desa Beringin Jaya	43.369,00	Tanah Rumah Sakit Pepakulia

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 (satu) Register Aset Tetap Tanah yang sedang dalam sengketa/proses peradilan, yaitu Tanah Bangunan Rumah Sakit Pepakulia yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Kabupaten Morowali, berlokasi di Desa Beringin Jaya dengan luas 43.369 m², diperoleh pada Tahun 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp6.781.011.201,00 dan sertifikat dengan Nomor 592.21/016/SPT/BR/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A sebagai Aset Tetap Tanah.

Tanah tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui hibah dari masyarakat dan di atasnya telah dibangun gedung Rumah Sakit Pepakulia. Saat ini tanah tersebut sedang dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Poso terkait klaim kepemilikan oleh pihak lain. Perkara masih dalam tahap pembuktian dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Aset Tetap Tanah tersebut tetap dicatat dalam Neraca sebesar Rp6.781.011.201,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp809.443.344.327,87 nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp143.500.004.261,79 atau 21,55% dari tahun 2024 sebesar Rp665.943.340.066,08.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**665.943.340.066,08**
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2025	Rp	153.900.472.699,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.815.581.472,00
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	1.516.800.000,00
Kapitalisasi Belanja Hibah BOP	Rp	225.910.200,00
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	Rp	5.872.279.254,00
Hibah dari Bank BTN	Rp	139.620.000,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**169.470.663.625,00**
Pengurangan:		
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	(3.171.567.000,00)
Koreksi Nilai Utang	Rp	(40.000,00)
Reklasifikasi Keluar antara Aset Tetap	Rp	(5.195.696.100,00)
Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(2.480.860.206,00)
Reklasifikasi Aset tetap ke aset *extracomptable*	Rp	(230.568.670,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	(14.876.047.387,21)
Hibah ke Sekolah Swasta dan Instansi Vertikal	Rp	(15.880.000,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(25.970.659.363,21)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**143.500.004.261,79**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**809.443.344.327,87**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp169.470.663.625,00 terdiri dari:

1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp153.900.472.699,00;
2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.815.581.472,00;
3) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah terealisasi di TA 2025 namun belum di bayarkan sampai per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.516.800.000,00;
4) Kapitalisasi belanja hibah BOP merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari realisasi belanja Hibah dana BOP PAUD/TK Negeri sebesar Rp225.910.200,00;
5) Reklasifikasi masuk antara aset tetap merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang terealisasi pada belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp207.499.838,00, belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.172.202.726,00, dan belanja Modal aset tetap Lainnya sebesar Rp25.961.600,00;
6) Hibah peralatan dan mesin merupakan aset Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari hibah Bank BTN sebesar Rp139.620.000,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.970.659.363,21, terdiri dari:

1) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah tercatat di TA 2024 namun baru dibayarkan pada TA 2025 sebesar Rp3.171.567.000,00;
2) Koreksi Nilai Utang merupakan nilai utang yang sebelumnya sudah tercatat namun realisasi pembayarannya tidak sesuai sehingga adanya pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.000,00;
3) Reklasifikasi keluar antara aset tetap merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang terealisasi pada belanja modal aset tetap Peralatan dan Mesin berupa aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp367.359.838,00, aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.172.202.726,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp332.716.790,00;
4) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap merupakan belanja modal Peralatan dan Mesin yang direalisasikan untuk belanja barang namun tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp2.480.860.206,00;
5) Reklasifikasi Aset tetap ke aset *extracomptable* merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp230.568.670,00;

6) Reklasifikasi ke aset Lain-lain merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang kondisinya rusak berat sebesar Rp11.082.749.887,21 dan digunakan pihak lain sebesar Rp3.793.297.500,00, sehingga direklas ke aset Lain-lain;

7) Hibah ke Sekolah Swasta dan Instansi Vertikal merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperuntukkan kepada Sekolah Swasta dan Instansi Vertikal sebesar Rp15.880.000,00.

Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21, 22, 23, 25 dan 26

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.619.573.039.300,84 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp261.574.364.047,75 atau 19,26% dari tahun 2024 sebesar Rp1.357.998.675.253,09.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**1.357.998.675.253,09**
Penambahan:		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2025	Rp	412.972.340.440,43
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	10.275.241.456,00
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	754.722.172,45
Kapitalisasi beban dibayar di muka	Rp	737.625.136,27
Kapitalisasi belanja hibah BOP	Rp	11.530.000,00
Reklasifikasi masuk antar Aset Tetap	Rp	139.430.601.753,21
Hibah dari Yayasan	Rp	1,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**564.182.060.959,36**
Pengurangan:		
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	(24.150.173.214,57)
Koreksi Nilai Utang	Rp	(0,05)
Reklasifikasi Keluar antara aset tetap	Rp	(96.512.327.313,99)
Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(2.196.776.914,00)
Reklasifikasi Aset tetap ke Aset *Extracomptable*	Rp	(139.257.001,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	(174.946.326.468,00)
Hibah ke Sekolah Swasta	Rp	(4.662.836.000,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(302.607.696.911,61)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**261.574.364.047,75**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**1.619.573.039.300,84**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp564.182.060.959,36, terdiri dari.

1) Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp412.972.340.440,43;
2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp10.275.241.456,00;
3) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah terealisasi di TA 2025 namun belum di bayarkan sampai per 31 Desember 2025 sebesar Rp754.722.172,45;
4) Kapitalisasi beban dibayar di muka merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang pada Tahun Anggaran 2025 progres fisiknya telah mencapai 100,00% dan sesuai dengan realisasi belanjanya, dimana pada tahun sebelumnya diakui sebagai beban dibayar di muka karena realisasi belanjanya melebihi progres fisiknya sebesar Rp737.625.136,27;
5) Kapitalisasi belanja hibah BOP merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari realisasi belanja Hibah dana BOP PAUD/TK Negeri sebesar Rp11.530.000,00;
6) Reklasifikasi masuk antara aset tetap merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang terealisasi pada belanja Modal Tanah sebesar Rp806.712.512,00, belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.538.032.000,00, belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp237.352.000,00, belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.460.000,00 dan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp133.831.045.241,21; dan
7) Hibah dari Yayasan merupakan aset Tetap Tanah yang diperoleh dari Yayasan namun belum memiliki nilai aset tetap sebesar Rp1,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp302.607.696.911,61, terdiri dari.

1) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah tercatat di TA 2024 namun baru dibayarkan pada TA 2025 sebesar Rp24.150.173.214,57;
2) Koreksi Nilai Utang merupakan nilai utang yang sebelumnya sudah tercatat namun realisasi pembayarannya tidak sesuai sehingga adanya pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar 0,05;
3) Reklasifikasi keluar antara aset tetap merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang terealisasi pada belanja modal aset tetap Gedung dan Bangunan berupa aset tetap Tanah sebesar Rp15.287.778.833,00, aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp367.359.838,00 dan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp13.338.880.417,16 serta Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp67.518.308.225,83;
4) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap merupakan belanja modal Gedung dan Bangunan yang direalisasikan untuk belanja barang namun tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp2.196.776.914,00;

5) Reklasifikasi Aset tetap ke aset *extracomptable* merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp139.257.001,00;

6) Reklasifikasi ke aset Lain-lain merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang kondisinya rusak berat sebesar Rp16.712.946.428,00 dan digunakan pihak lain sebesar Rp158.233.380.040,00, sehingga direklas ke aset Lain-lain; dan

7) Hibah ke Sekolah Swasta merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperuntukkan kepada Sekolah Swasta sebesar Rp4.662.836.000,00.

Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21, 22, 23, 24 dan 26

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.247.568.005.264,29 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp190.084.590.232,16 atau 9,24% dari tahun 2024 sebesar Rp2.057.483.415.032,13.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**2.057.483.415.032,13**
Penambahan:		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2025	Rp	236.774.789.690,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.412.401.686,00
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	1.261.074.614,00
Reklasifikasi Masuk antara Aset Tetap	Rp	59.964.842.375,16
Jumlah Penambahan	**Rp**	**299.413.108.365,16**
Pengurangan:		
Kapitalisasi Pembiayaan	Rp	(58.896.837.715,00)
Reklasifikasi Keluar antara Aset Tetap	Rp	(22.009.231.957,00)
Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(17.524.977.295,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp	(10.897.471.166,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(109.328.518.133,00)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**190.084.590.232,16**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**2.247.568.005.264,29**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp299.413.108.365,16, terdiri dari.

1) Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp236.774.789.690,00;

2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diperoleh dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.412.401.686,00;

3) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah tercatat di TA 2024 namun baru dibayarkan pada TA 2025 sebesar Rp1.261.074.614,00; dan

4) Reklasifikasi masuk antara aset tetap merupakan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terealisasi pada belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp650.164.900,00 belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.338.880.417,16, belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.000.000,00 dan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp45.967.797.058,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp109.328.518.133,00, terdiri dari.

1) Kapitalisasi pembiayaan merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang pengadaan/pekerjaan fisik yang sudah tercatat di TA 2024 namun baru dibayarkan pada TA 2025 sebesar Rp58.896.837.715,00;

2) Reklasifikasi keluar antara aset tetap merupakan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terealisasi pada belanja modal aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa aset tetap Tanah sebesar Rp3.494.144.722,00, aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.172.202.726,00, aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp237.352.000,00, dan Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp13.105.532.509,00;

3) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap merupakan belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang direalisasikan untuk belanja barang namun tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp17.524.977.295,00; dan

4) Reklasifikasi ke aset Lain-lain merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang digunakan pihak lain sebesar Rp10.897.471.166,00, sehingga direklas ke aset Lain-lain.

Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat di lihat pada Lampiran 21, 22, 23, 24, 25 dan 26

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.773.012.183,00 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.811.534.000,00 atau 11,26% dari tahun 2024 sebesar Rp24.961.478.183,00.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**24.961.478.183,00**
Penambahan:		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025	Rp	3.918.571.840,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.213.800,00
Reklasifikasi Masuk antara Aset Tetap	Rp	7.499.200,00

Jumlah Penambahan	**Rp**	**3.933.284.840,00**
Pengurangan:		
Reklasifikasi keluar antara Aset Tetap	Rp	(367.978.890,00)
Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(461.965.850,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Rusak Berat)	Rp	(257.190.100,00)
Hibah ke Sekolah Swasta	Rp	(34.616.000,00)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(1.121.750.840,00)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**2.811.534.000,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**27.773.012.183,00**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp3.933.284.840,00, terdiri dari.

1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp3.918.571.840,00;
2) Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.213.800,00; dan
3) Reklasifikasi masuk antara aset tetap merupakan Aset Tetap Lainnya yang terealisasi pada belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.499.200,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.121.750.840,00, terdiri dari.

1) Reklasifikasi keluar antar aset tetap merupakan aset tetap yang terealisasi pada belanja modal Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap Tanah sebesar Rp9.802.200,00, aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp332.716.690,00, aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.460.000,00 dan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.000.000,00
2) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap merupakan belanja modal Aset Tetap Lainnya yang direalisasikan untuk belanja barang namun tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp461.965.850,00; dan
3) Reklasifikasi ke aset lain-lain merupakan Aset Tetap Lainnya yang kondisinya rusak berat sebesar Rp257.190.100,00, sehingga direklas ke aset Lain-lain; dan
4) Hibah ke Sekolah Swasta merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang diperuntukkan kepada Sekolah Swasta sebesar Rp34.616.000,00.

Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21, 22 dan 23

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp76.894.959.746,20 nilai ini mengalami penurunan nilai sebesar Rp89.859.979.816,38 atau 53,89% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp166.754.939.562,58, disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.116 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Gedung dan Bangunan	63.264.662.294,20	118.726.766.861,58	(55.462.104.567,38)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.345.651.401,00	48.028.172.701,00	(34.682.521.300,00)
Aset Tetap Lainnya	284.646.051,00	0,00	284.646.051,00
Jumlah	**76.894.959.746,20**	**166.754.939.562,58**	**(89.859.979.816,38)**

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**166.754.939.562,58**
Penambahan:		
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.261.192.409,00
Reklasifikasi masuk antar aset tetap	Rp	80.623.840.734,83
Kapitalisasi Beban dibayar di muka	Rp	53.829.339,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**89.938.862.482,83**
Pengurangan:		
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp	(179.798.842.299,21)
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(179.798.842.299,21)**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**(89.859.979.816,38)**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**76.894.959.746,20**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp89.938.862.482,83, terdiri dari:

1) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa merupakan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang terealisasi pada belanja barang dan jasa sebesar Rp9.261.192.409,00, namun progres fisiknya belum mencapai 100% per 31 Desember 2025;
2) Reklasifikasi masuk antar aset tetap merupakan aset tetap yang progres fisiknya belum mencapai 100% per 31 Desember 2025 sebesar Rp80.623.840.734,83; dan
3) Kapitalisasi beban dibayar di muka merupakan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang pada Tahun Anggaran 2025 progres fisiknya telah mencapai 100,00% dan sesuai dengan

realisasi belanjanya, dimana pada tahun sebelumnya diakui sebagai beban dibayar di muka karena realisasi belanjanya melebihi progres fisiknya sebesar Rp53.829.339,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp179.798.842.299,21, terdiri dari:

1) Reklasifikasi keluar antar aset tetap merupakan aset tetap yang progres fisiknya telah mencapai 100% per 31 Desember 2025 sebesar Rp179.798.842.299,21.

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 21, 23 dan 24

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain tanah dan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.628.894.753.771,03. Akumulasi penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp211.011.691.018,62 atau 14,88% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.417.883.062.752,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Peralatan dan Mesin	(430.000.003.658,27)	(354.603.790.321,33)	(75.396.213.336,94)
Gedung dan Bangunan	(217.110.434.756,00)	(196.312.598.475,00)	(20.797.836.281,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(981.784.315.356,76)	(866.966.673.956,08)	(114.817.641.400,68)
Jumlah	**(1.628.894.753.771,03)**	**(1.417.883.062.752,41)**	**(211.011.691.018,62)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang tidak masuk dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp369.157.165.281,03 nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp117.218.755.793,51 atau 46,53% dari tahun 2024 sebesar Rp251.938.409.487,52 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Aset Tidak Berwujud	4.171.573.114,00	4.044.063.114,00	127.510.000,00
Aset Lain-lain	576.968.651.419,21	380.042.512.298,00	196.926.139.121,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.966.230.263,99)	(2.621.446.104,00)	(344.784.159,99)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(209.016.828.988,19)	(189.921.155.820,48)	(19.095.673.167,71)

Aset Lainnya	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	60.394.436.000,00	(60.394.436.000,00)
Jumlah	**369.157.165.281,03**	**251.938.409.487,52**	**117.218.755.793,51**

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.4.1 Aset Tidak berwujud

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.171.573.114,00 dan Rp4.044.063.114,00. Nilai buku Aset Tidak berwujud pada tanggal pelaporan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.119 Aset Tidak berwujud

Aset Tidak berwujud	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Lisensi dan Frenchise	120.300.000,00	120.300.000,00	(0,00)
Software	1.085.042.850,00	1.302.317.010,00	(217.274.160,00)
Jumlah	**1.205.342.850,01**	**1.422.617.010,00**	**(217.274.159,99)**

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**4.044.063.114,00**
Penambahan:		
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	127.510.000,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**127.510.000,00**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**127.510.000,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**4.171.573.114,00**
Akumulasi Penyusutan	**Rp**	**(2.966.230.263,99)**
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**1.205.342.850,01**

Penambahan Aset Tidak berwujud sebesar Rp127.510.000,00, yang terdiri dari:

1) Realisasi belanja modal aset Lainnya atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp127.510.000,00.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp367.951.822.431,02 dan Rp190.121.356.477,52. Nilai buku Aset lain-lain pada tanggal pelaporan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Aset Tetap Rusak Berat/Usang	373.957.475.112,21	345.904.588.697,00	28.052.886.415,21
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	203.011.176.307,00	34.137.923.601,00	168.873.252.706,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain – Aset Tetap Rusak Berat/Usang	(182.162.876.629,19)	(167.904.908.137,48)	(14.257.968.491,71)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(26.853.952.359,00)	(22.016.247.633,00)	(4.837.704.726,00)
Jumlah	**367.951.822.431,02**	**190.121.356.527,52**	**177.830.465.903,50**

Penjelasan mengenai rincian mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut.

a. Aset Tetap Rusak Berat

Nilai aset lain-lain dari aset tetap rusak berat diperoleh dari aset tetap yang rusak atau hilang dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai barang milik daerah.

Nilai buku Aset rusak berat pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp177.999.680.559,52. Nilai buku aset rusak berat diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan.

Nilai buku Aset rusak berat pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp191.794.598.483,02. Nilai buku aset rusak berat diperoleh dengan mengurangan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp182.162.876.629,19.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset tetap rusak berat per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**345.904.588.697,00**
Penambahan:		
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat	Rp	11.082.749.887,21
Reklasifikasi dari Gedung dan Bagunan yang Rusak Berat	Rp	16.712.946.428,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya yang Rusak Berat	Rp	257.190.100,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**28.052.886.415,21**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**28.052.886.415,21**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**373.957.475.112,21**
Akumulasi Penyusutan	**Rp**	**(182.162.876.629,19)**
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**191.794.598.483,02**

Penambahan mutasi aset tetap rusak berat sebesar Rp28.052.886.415,21 dengan rincian sebagai berikut.

1) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang rusak berat sebesar Rp11.082.749.887,21;

2) Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bagunan merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang rusak berat sebesar Rp16.712.946.428,00; dan

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap Aset Tetap Lainnya yang rusak berat sebesar Rp257.190.100,00.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah merupakan nilai aset tetap yang akan dihibahkan ke Pemerintah Provinsi, namun di TA 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali belum menghibahkan atas aset tetap tersebut dan terdapat aset tetap yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Adapun rincian perhitungan penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**34.137.923.601,00**
Reklasifikasi dari Tanah yang digunakan pihak lain	Rp	449.104.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin yang digunakan pihak lain	Rp	3.793.297.500,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bagunan yang digunakan pihak lain	Rp	158.233.380.040,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan pihak lain	Rp	10.897.471.166,00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**173.373.252.706,00**
Pengurangan:		
Koreksi atas pengembalian ke Kas Daerah	Rp	4.500.000.000,00
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**4.500.000.000,00**
Penambahan/(Pengurangan)	**Rp**	**168.873.252.706,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**Rp**	**203.011.176.307,00**
Akumulasi Penyusutan	**Rp**	**(26.853.952.359,00)**
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**Rp**	**176.157.223.948,00**

Penjelasan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp173.373.252.706,00, terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset tetap Tanah merupakan aset tetap Tanah yang digunakan pihak lain sebesar Rp449.104.000,00;

2) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang digunakan pihak lain sebesar Rp3.793.297.500,00;

3) Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bagunan merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan pihak lain sebesar Rp158.233.380.040,00; dan

4) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan pihak lain sebesar Rp10.897.471.166,00.

b. Mutasi Kurang

Pengurangan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp4.500.000.000,00 merupakan Koreksi atas pengembalian ke Kas Daerah atas penyetoran ganti kerugian daerah di tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2025 sebesar Rp3.500.000.000,00 untuk pengadaan aset tetap Tanah Mess Pemda Morowali di Palu sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024.

Atas Tanah Mess Pemda Morowali di Palu tersebut masih terdapat sisa nilai sebesar Rp4.500.000.000,00 yang dicatat sebagai Aset Lain-Lain dengan penjelasan bahwa penyetoran penanggung jawab kerugian ke Rekening Titipan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2025 dan Rp2.275.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2025 yang masih menunggu keputusan pengadilan terkait tindak lanjut pengembalian dana tersebut ke RKUD. Adapun sisanya sebesar Rp225.000.000,00 (Rp4.500.000.000,00 - Rp2.000.000.000,00 - Rp2.275.000.000,00) merupakan nilai PPN yang telah disetorkan ke rekening kas negara pada saat pencairan SP2D yang belum dilakukan penyesuaian karena menunggu putusan pengadilan terkait perlakuan akuntansinya.

5.3.1.4.3 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah secara nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Dana TDF Pemerintah Kabupaten Morowali ditempatkan pada rekening Rek Lain BI TDF TKD Kab Morowali dengan Nomor Rekening 519000491980.

Saldo Dana TDF Pemerintah Kabupaten Morowali per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan 100,00% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp60.394.436.000,00. Saldo TDF sebesar Rp60.394.436.000,00 telah dicairkan/dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.7/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah elemen Neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan, jika dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Kewajiban menunjukkan sebagian sumber dana dari aset badan usaha.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek menunjukkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp31.254.192.860,05, mengalami penurunan sebesar Rp109.535.100.317,40 atau 77,80% dari tahun 2024 sebesar Rp140.789.293.177,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	470.968.641,71	1.007.532.570,71	(536.563.929,00)
Utang Bunga	106.192.160,89	127.430.593,07	(21.238.432,18)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.270.966.733,34	1.270.966.733,34	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	443.202.500,01	568.963.500,01	(125.761.000,00)
Utang Belanja	23.303.291.955,65	124.926.871.410,32	(101.623.579.454,67)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.659.570.868,45	12.887.528.370,00	(7.227.957.501,55)
Jumlah	**31.254.192.860,05**	**140.789.293.177,45**	**(109.535.100.317,40)**

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2025 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan kepada kas negara.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp470.968.641,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	Utang PFK	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1	Utang PFK BUD	235.924.907,71	832.265.969,71	(596.341.062,00)
2	Utang PFK Bendahara Pengeluaran	235.043.734,00	175.266.601,00	59.777.133,00
Jumlah		**470.968.641,71**	**1.007.532.570,71**	**(536.563.929,00)**

Penjelasan rincian utang PFK dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Utang PFK BUD

Utang PFK BUD TA 2025 sebesar Rp235.924.907,71 berasal dari pungutan PPh oleh BUD atas pembayaran gaji PNS yang belum disetor ke kas negara, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih berada pada rekening Pajak Khusus Gaji Pemda Kabupaten Morowali sebesar Rp208.424.907,71 dan kompensasi PPh tahun 2017 yang masih terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp27.500.000,00.

b. Utang PFK Bendahara Pengeluaran

Utang PFK Bendahara Pengeluaran TA 2025 sebesar Rp235.043.734,00 berasal dari pungutan PPN/PPh oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara namun sampai dengan tanggal pelaporan masih berada pada kas bank dan tunai pada Bendahara Pengeluaran baik Bendahara Pengeluaran OPD, bendahara kapitasi dan bendahara dana BOSP, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Utang PFK Bendahara Pengeluaran Per OPD

No	Utang PFK Bendahara Pengeluaran per OPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	109.500,00	(109.500,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dana BOSP)	85.405.151,00	60.987.557,00	24.417.594,00
3	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	113.522.584,00	(113.522.584,00)
4	Puskesmas Kaleroang	14.140.817,00	0,00	14.140.817,00
5	Puskesmas Wosu	263.503,00	0,00	263.503,00
6	Puskesmas Fonuasingko	11.723,00	0,00	11.723,00
7	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	438.803,00	0,00	438.803,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.768.170,00	0,00	8.768.170,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	384.200,00	(384.200,00)
10	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah	0,00	24.200,00	(24.200,00)
11	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Daerah	0,00	238.560,00	(238.560,00)
12	Kecamatan Bungku Timur	30.960,00	0,00	30.960,00
13	Kecamatan Bahodopi	107.155.882,00	0,00	107.155.882,00
14	Kecamatan Wita Ponda	18.828.725,00	0,00	18.828.725,00
Jumlah		**235.043.734,00**	**175.266.601,00**	**59.777.133,00**

Adapun Utang Perhitungan Fihak Ketiga Dana BOSP secara rinci terdapat pada Lampiran 29

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp106.192.160,89 merupakan utang bunga periode 16 November s.d 31 Desember 2025 atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor: SLA-1241/DSMI/2011 tanggal 12 Mei 2011 pada IBRD Bank Dunia.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.270.966.733,34 merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran, atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor: SLA-1241/DSMI/2011 tanggal 12 Mei 2011 pada IBRD Bank Dunia.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan hasil dari pemanfaatan barang milik daerah yang pembayarannya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp443.202.500,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Pendapatan Diterima dimuka

No	Pendapatan Diterima dimuka	Nilai
1.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah Bangunan oleh PT PLN (Persero)	248.702.333,34
2.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja oleh PT Bank Sulteng, BRI Cabang Morowali dan PT Tower Bersama	186.561.333,34
3.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah untuk Jalan oleh PT Vale Indonesia Tbk	7.938.833,33
Jumlah		**443.202.500,01**

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.303.291.955,65 merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dibayarkan, namun sudah timbul Kewajiban maka dicatat sebagai Utang Belanja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Utang Belanja

No	Utang Belanja	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)
		Rp	Rp	Rp
1.	Utang Belanja Pegawai	3.022.852.318,00	0,00	3.022.852.318,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	16.542.238.618,20	35.997.853.888,20	(19.455.615.270,00)
3.	Utang Belanja Modal	3.738.201.019,45	88.929.017.522,12	(85.190.816.502,67)
Jumlah		**23.303.291.955,65**	**124.926.871.410,32**	**(101.623.579.454,67)**

Dalam hal terdapatnya Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.303.291.955,65 telah mengalami penurunan sangat signifikan sebesar Rp101.623.579.454,67 atau 81,35%, jika dibandingkan dengan utang belanja TA 2024 sebesar Rp124.926.871.410,32. Hal ini disebabkan sebagian besar pengadaan barang dan jasa dan kegiatan pekerjaan fisik yang telah mencapai 100% dapat diproses tagihan atas pembayaran dari pihak penyedia barang dan jasa tanpa melewati batas waktu yang telah di tetapkan oleh PPKAD selaku BUD.

Penjelasan rincian utang belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 berupa Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp2.982.000,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp3.019.870.318,00.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.542.238.618,20 dengan rincian sebagai berikut.

1) Utang Belanja Barang Rp 1.004.772.779,00
2) Utang Belanja Jasa Rp 3.103.898.580,00
3) Utang Belanja Pemeliharaan Rp 197.330.468,00

4)	Utang Belanja Perjalanan Dinas	Rp	2.801.684.851,00
5)	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	35.700.000,00
6)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	9.398.851.940,20

c. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.738.201.019,45 dengan rincian sebagai berikut.

1)	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	1.516.800.000,00
2)	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp	950.426.405,45
3)	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	9.900.000,00
4)	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	Rp	9.959.500,00
5)	Utang Belanja Modal Bangunan Air	Rp	1.251.115.114,00

Adapun Utang Belanja secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 30

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.659.570.868,45 merupakan pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di TA 2025, namun sampai dengan 31 Desember 2025 pembayaran opsen tersebut belum dibayarkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi utang Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

5.3.2.2.1 Utang Pemerintah Pusat

Jumlah Utang Pemerintah Pusat sebesar Rp5.083.866.932,93 merupakan penerusan pinjaman dari Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SLA-1241/DSMI/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan tujuan pinjaman pembiayaan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Bungku. *Plavondloan* sebesar Rp19.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.064.501.000,00.

Atas utang pemerintah pusat tersebut di atas telah dilakukan rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA:BA-05/WPB.27/2026 tanggal 13 Januari 2026.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas menunjukkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Morowali pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.057.132.136.093,17 nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp719.551.952.732,32 atau 16,59% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.337.580.183.360,85. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca sebesar Rp5.057.132.136.093,17 telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas pada Poin 5.6.

5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit operasional dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO. Rincian Laporan Operasional adalah sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Laporan Operasional

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pendapatan– LO	2.623.013.994.302,84	2.505.524.779.338,05	117.489.214.964,79	4,69
2.	Beban-LO	2.020.469.511.559,05	1.920.847.506.597,00	99.622.004.962,05	5,19
3.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	602.544.482.743,79	584.677.272.741,05	17.867.210.002,74	3,06
4.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	(2.464.808.135,00)	(18.885.998.639,68)	16.421.190.504,68	(86,95)
5.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	600.079.674.608,79	565.791.274.101,37	34.288.400.507,42	6,06
6	Pos Luar Biasa	(468.222.000)	0,00	(468.222.000)	100,00
7.	Surplus/Defisit-LO	599.611.452.608,79	565.791.274.101,37	33.820.178.507,42	5,98

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Morowali dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2025 dan TA 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Pendapatan – LO

No	Pendapatan –LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.216.492.794.795,84	1.086.565.373.113,07	129.927.421.682,77	11,96
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.374.897.061.107,51	1.397.121.857.342,00	(22.224.796.234,49)	(1,59)
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	31.624.138.399,49	21.837.548.882,98	9.786.589.516,51	44,82
Jumlah		**2.623.013.994.302,84**	**2.505.524.779.338,05**	**117.489.214.964,79**	**4,69**

Realisasi Pendapatan - LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.623.013.994.302,84 dan mengalami kenaikan sebesar Rp117.489.214.964,79 atau 4,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.505.524.779.338,05.

Masing-masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2025 dan TA 2024. Pendapatan Asli Daerah pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.216.492.794.795,84 dan mengalami peningkatan sebesar Rp129.927.421.682,77 atau 11,96%, dibandingkan dengan TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.086.565.373.113,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Pendapatan Asli Daerah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pajak Daerah – LO	826.619.076.133,69	686.156.927.796,34	140.462.148.337,35	20,47
2.	Retribusi Daerah - LO	286.024.019.117,00	288.929.271.817,00	(2.905.252.700,00)	(1,01)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.048.125.362,00	4.490.472.491,00	557.652.871,00	12,42
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	98.801.574.183,15	106.988.701.008,73	(8.187.126.825,58)	(7,65)
Jumlah		**1.216.492.794.795,84**	**1.086.565.373.113,07**	**129.927.421.682,77**	**11,96**

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada TA 2025 ditambah dengan beberapa penerimaan pajak tanpa ketetapan TA 2025.

Pendapatan Pajak Daerah – LO pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp826.619.076.133,69 dan mengalami peningkatan sebesar Rp140.462.148.337,35 atau 20,47%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp686.156.927.796,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pajak Hotel - LO	0,00	1.502.377.531,42	(1.502.377.531,42)	(100,00)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	97.412.169.032,00	(97.412.169.032,00)	(100,00)
Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	74.670.000,00	(74.670.000,00)	(100,00)
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	2.396.233.102,92	2.057.678.780,00	338.554.322,92	16,45
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	287.468.820.061,00	(287.468.820.061,00)	(100,00)

Pajak Daerah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pajak Air Tanah-LO	314.825.273,00	964.148.901,00	(649.323.628,00)	(67,35)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	74.989.560.120,77	116.423.797.489,00	(41.434.237.368,23)	(35,59)
PBBP2-LO	109.531.336.534,00	90.418.742.316,92	19.112.594.217,08	21,14
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	107.376.901.915,00	89.834.523.685,00	17.542.378.230,00	19,53
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	120.126.509.329,00	0,00	120.126.509.329,00	100,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	377.619.520.192,00	0,00	377.619.520.192,00	100,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	2.018.861.644,00	0,00	2.018.861.644,00	100,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	89.940.000,00	0,00	89.940.000,00	100,00
Opsen PKB-LO	13.785.398.161,00	0,00	13.785.398.161,00	100,00
Opsen BBNKB-LO	18.369.989.862,00	0,00	18.369.989.862,00	100,00
Jumlah	**826.619.076.133,69**	**686.156.927.796,34**	**140.462.148.337,35**	**20,47**

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pajak - LO dan Pendapatan Pajak – LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.130 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Hotel - LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron-LO	2.396.233.102,92	2.305.777.275,92	90.455.827,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah-LO	314.825.273,00	494.793.663,00	(179.968.390,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	74.989.560.120,77	114.475.175.347,22	(39.485.615.226,45)
PBBP2-LO	109.531.336.534,00	108.367.902.114,00	1.163.434.420,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	107.376.901.915,00	107.399.951.815,00	(23.049.900,00)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	120.126.509.329,00	119.280.734.072,00	845.775.257,00
PBJT-Tenaga Listrik-LO	377.619.520.192,00	340.059.377.295,00	37.560.142.897,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	2.018.861.644,00	1.932.014.544,00	86.847.100,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	89.940.000,00	56.190.000,00	33.750.000,00
Opsen PKB-LO	13.785.398.161,00	13.785.398.161,00	0,00
Opsen BBNKB-LO	18.369.989.862,00	18.369.989.862,00	0,00
Jumlah	**826.619.076.133,69**	**826.527.304.149,14**	**91.771.984,55**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA			**Rp826.527.304.149,14**
Penambahan :			
1.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron TA 2025 belum dibayarkan WP	Rp	146.643.025,00
2.	Piutang Pajak Air Tanah TA 2025 belum dibayar Wajib Pajak	Rp	8.503.154,00
3.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2025 belum dibayar Wajib Pajak	Rp	3.349.159.447,00
4.	Piutang PBBP2 TA 2025 belum dibayar wajib Pajak	Rp	3.964.916.002,00
5.	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak TA 2025 belum dibayar WP	Rp	9.500,00
6.	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2025 belum dibayarkan WP	Rp	928.277.165,00
7.	Piutang PBJT-Tenaga Listrik-LO TA 2025	Rp	38.029.216.957,00
8.	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-LO TA 2025 belum dibayarkan wajib pajak	Rp	106.917.100,00
9.	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO TA 2025 belum dibayarkan WP	Rp	41.570.000,00
	Jumlah Penambahan		**Rp 46.575.212.350,00**
Pengurangan :			
1.	Pembayaran Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron TA 2024	Rp	56.187.198,00
2.	Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah TA 2024.	Rp	188.471.544,00
3.	Pembayaran Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2024	Rp	37.175.203.805,00
4.	Pembayaran Piutang PBBP2 TA 2024	Rp	2.801.481.582,00
5.	Pembayaran Piutang BPHTB-Pemindahan Hak TA 2024	Rp	23.059.400,00
6.	Pembayaran Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2024	Rp	82.501.908,00
7.	Pembayaran Piutang PBJT-Tenaga Listrik-LO TA 2024	Rp	469.074.060,00
8.	Pembayaran Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-LO TA 2024	Rp	20.070.000,00
9.	Pembayaran Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO TA 2024	Rp	7.820.000,00
10.	Pengakuan Utang Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2025	Rp	5.659.570.868,45
	Jumlah Pengurangan		**Rp 46.483.440.365,45**
Total Tambah/(Kurang)			**Rp 91.771.984,55**
Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO			**Rp 826.619.076.133,69**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kabupaten Morowali dipungut dan dikelola oleh 12 OPD. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Morowali didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp286.024.019.117,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.905.252.700,00 atau 1,01%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp288.929.271.817,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	8.338.381.413,00	7.622.985.995,00	715.395.418,00	9,38

No	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	556.195.000,00	365.865.400,00	190.329.600,00	52,02
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	277.129.442.704,00	280.940.420.422,00	(3.810.977.718,00)	(1,36)
Jumlah		**286.024.019.117,00**	**288.929.271.817,00**	**(2.905.252.700,00)**	**(1,01)**

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO pada TA 2025 adalah sebesar Rp8.338.381.413,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp715.395.418,00 atau 9,38%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.622.985.995,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132 Retribusi Jasa Umum – LO

Retribusi Jasa Umum – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan –LO	7.875.835.813,00	7.175.900.995,00	699.934.818,00	9,75
Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	219.895.600,00	105.995.000,00	113.900.600,00	107,46
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	242.650.000,00	341.090.000,00	(98.440.000,00)	(28,86)
Jumlah	**8.338.381.413,00**	**7.622.985.995,00**	**715.395.418,00**	**9,38**

b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp556.195.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp190.329.600,00 atau 52,02% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp365.865.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133 Retribusi Jasa Usaha – LO

Retribusi Jasa Usaha – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	180.645.000,00	48.350.000,00	132.295.000,00	52,02
Retribusi Terminal – LO	0,00	3.910.000,00	(3.910.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	31.200.000,00	82.200.000,00	(51.000.000,00)	(2,04)
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	37.870.000,00	30.550.000,00	7.320.000,00	23,96
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan– LO	0,00	72.835.400,00	(72.835.400,0)0	(100,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	306.480.000,00	128.020.000,00	178.460.000,00	139,40
Jumlah	**556.195.000,00**	**365.865.400,00**	**190.329.600,00**	**52,02**

c. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp277.129.442.704,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.810.977.718,00 atau 1,36% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp280.940.420.422,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi Perizinan Tertentu – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	251.280.000,00	184.890.000,00	66.390.000,00	35,91
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	34.933.344.204,00	95.776.116.322,00	(60.842.772.118,00)	(63,53)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	241.944.818.500,00	184.979.414.100,00	56.965.404.400,00	30,80
Jumlah	**277.129.442.704,00**	**280.940.420.422,00**	**(3.810.977.718,00)**	**(1,36)**

Adapun perbandingan antara saldo Retribusi Daerah - LO dan Retribusi Daerah -LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.135 Perbandingan Retribusi Daerah – LO dan Retribusi Daerah – LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Retribusi Jasa Umum-LO	8.338.381.413,00	8.338.381.413,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	556.195.000,00	556.195.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	277.129.442.704,00	277.129.442.704,00	0,00
Jumlah	**286.024.019.117,00**	**286.024.019.117,00**	**0,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari Pembagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPKAD Kabupaten Morowali dengan realisasi pada TA 2025 sebesar Rp5.048.125.362,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp557.652.871,00 atau 12,42% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.490.472.491,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.048.125.362,00	4.490.472.491,00	557.652.871,00	12,42
Jumlah	**5.048.125.362,00**	**4.490.472.491,00**	**557.652.871,00**	**12,42**

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.137 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.048.125.362,00	5.048.125.362,00	0,00
Jumlah	**5.048.125.362,00**	**5.048.125.362,00**	**0,00**

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode TA 2025 sebesar Rp98.801.574.183,15 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.187.126.825,58 atau 7,65% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp106.988.701.008,73. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.138 Lain-lain PAD yang Sah – LO

No	Lain-Lain PAD yang Sah – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	2.537.087.500,00	(2.537.087.500,00)	(100,00)
2.	Hasil Sewa BMD-LO	125.761.000,00	48.155.166,66	77.605.833,34	161,16
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	18.695.773.985,15	9.984.403.843,76	8.711.370.141,39	87,25
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	150.280,00	(150.280,00)	(100,00)
5.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	58.320,00	236.447,00	(178.127,00)	(75,33)
6.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	362.202,00	1.747.016,00	(1.384.814,00)	(79,27)
7.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	1.502.688,00	0,00	1.502.688,00	100,00
8.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	15.128.621.608,19	23.092.006.706,03	(7.963.385.097,84)	(34,49)
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.137.555.889,83	752.913.246,18	384.642.643,65	51,09
10.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	63.480.023.374,00	70.293.928.319,00	(6.813.904.945,00)	(9,69)
11.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	231.915.115,98	278.072.484,10	(46.157.368,12)	(16,60)
Jumlah		**98.801.574.183,15**	**106.988.701.008,73**	**(8.187.126.825,58)**	**(7,65)**

Adapun perbandingan antara saldo Lain-Lain PAD yang Sah – LO dan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.139 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Hasil Sewa BMD-LO	125.761.000,00	0,00	125.761.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	18.695.773.985,15	18.695.773.985,15	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	58.320,00	58.320,00	0,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	362.202,00	362.202,00	0,00
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	1.502.688,00	1.502.688,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	15.128.621.608,19	19.005.607.608,19	(3.876.986.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.137.555.889,83	1.137.555.889,83	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	63.480.023.374,00	68.613.183.005,00	(5.133.159.631,00)
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	231.915.115,98	231.915.115,98	0,00
Jumlah	**98.801.574.183,15**	**107.685.958.814,15**	**(8.884.384.631,00)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Lain-Lain PAD yang Sah – LRA		**Rp**	**107.685.958.814,15**
Penambahan:			
1.	Piutang BLUD Tahun 2025	Rp	6.929.767.657,00
2.	Pendapatan atas Penerimaan yang di terima dimuka pada TA 2024 dan 2025	Rp	125.761.000,00
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**7.055.528.657,00**
Pengurangan:			
1.	Pembayaran Piutang TP/TGR atas SKTJM Tahun 2024	Rp	374.486.000,00
2.	Pembayaran Piutang BLUD Tahun 2024	Rp	12.062.927.288,00
3.	Pembayaran Piutang UUDP	Rp	2.500.000,00
4.	Pengembalian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Pengadaan Mess Pemda Kab. Morowali di Palu	Rp	3.500.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	**Rp**	**15.939.913.288,00**
Total Tambah/(Kurang)		**(Rp**	**8.884.384.631,00)**
Saldo Lain-Lain PAD yang Sah – LO		**Rp**	**98.801.574.183,15**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2025 sebesar Rp1.374.897.061.107,51, dan mengalami penurunan sebesar Rp22.224.796.234,49 atau 1,59%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.397.121.857.342,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.140 Pendapatan Transfer – LO

No	Transfer – LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.301.292.958.555,00	(1.301.292.958.555,00)	(100,00)
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	585.802.448.590,00	0,00	585.802.448.590,00	100,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	508.505.981.719,00	0,00	508.505.981.719,00	100,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	207.912.548.846,00	0,00	207.912.548.846,00	100,00
5.	Insentif Fiskal-LO	5.701.860.000,00	11.818.826.000,00	(6.116.966.000,00)	(51,76)
6.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	66.874.221.952,51	83.910.072.787,00	(17.035.850.834,49)	(20,30)
7.	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.374.897.061.107,51**	**1.397.121.857.342,00**	**(22.224.796.234,49)**	**(1,59)**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Morowali untuk periode TA 2025 secara total terealisasi sebesar Rp1.307.922.839.155,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.188.945.400,00 atau 0,40%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.313.111.784.555,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.141 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Dana Perimbangan - LO	0,00	1.301.292.958.555,00	(1.301.292.958.555,00)	(100,00)
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	585.802.448.590,00	0,00	585.802.448.590,00	100,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	508.505.981.719,00	0,00	508.505.981.719,00	100,00
4.	DAK-LO	207.912.548.846,00	0,00	207.912.548.846,00	100,00
5.	Insentif Fiskal-LO	5.701.860.000,00	11.818.826.000,00	(6.116.966.000,00)	(51,76)
Jumlah		**1.307.922.839.155,00**	**1.313.111.784.555,00**	**(5.188.945.400,00)**	**(0,40)**

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.142 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	585.802.448.590,00	646.196.884.589,00	(60.394.435.999,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	508.505.981.719,00	508.505.981.719,00	0,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
DAK Fisik-LO	82.981.595.467,00	82.981.595.467,00	0,00
DAK Non Fisik-LO	124.930.953.379,00	124.930.953.379,00	0,00
Dana Desa	0,00	101.025.437.648,00	(101.025.437.648,00)
Insentif Fiskal-LO	5.701.860.000,00	5.701.860.000,00	0,00
Jumlah	**1.307.922.839.155,00**	**1.469.342.712.802,00**	**(161.419.873.647,00)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	**Rp**	**1.469.342.712.802,00**
Pengurangan:		
1. Pengeluran atas Saldo TDF Tahun 2024	Rp	60.394.436.000,00
2. Pembayaran Penerimaan Dana Desa yang tidak tercatat pada-LO	Rp	101.025.437.647,00
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**161.419.873.647,00**
Total Tambah/(Kurang)	**(Rp**	**161.419.873.647,00)**
Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	**Rp**	**1.307.922.839.155,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah - LO untuk periode TA 2025 sebesar Rp66.974.221.952,51 dan mengalami penurunan sebesar Rp17.035.850.834,49 atau 20,28% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp84.010.072.787,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.143 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	147.389.361,00	16.036.960.181,00	(15.889.570.820,00)	(99,08)
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	355.777.259,00	18.811.098.955,00	(18.455.321.696,00)	(98,11)
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	24.591.423.361,47	25.580.230.976,00	(988.807.614,53)	(3,87)
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah – LO	30.912.525.170,04	12.939.299.892,00	17.973.225.278,04	138,9
5.	Pajak Rokok – LO	10.867.106.801,00	10.542.482.783,00	324.624.018,00	3,08
6.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**66.974.221.952,51**	**84.010.072.787,00**	**(17.035.850.834,49)**	**(20,28)**

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.144 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	147.389.361,00	4.699.898.263,00	(4.552.508.902,00)
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	355.777.259,00	4.759.680.632,00	(4.403.903.373,00)
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	24.591.423.361,47	22.852.453.370,47	1.738.969.991,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	30.912.525.170,04	13.953.524.983,04	16.959.000.187,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.867.106.801,00	10.867.106.801,00	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah	**66.974.221.952,51**	**57.232.664.049,51**	**9.741.557.903,00**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA		**Rp**	**57.232.664.049,51**
Penambahan:			
1.	Piutang Dana Bagi Hasil PBB-KB Tahun 2025	Rp	2.782.557.716,00
2.	Piutang Dana Bagi Hasil PABT-PAP Tahun 2025	Rp	16.959.000.187,00
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**19.741.557.903,00**
Pengurangan:			
1.	Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil PKB Tahun 2024	Rp	4.552.508.902,00
2.	Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil BBN-KB Tahun 2024	Rp	4.403.903.373,00
3.	Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil PBB-KB Tahun 2024	Rp	1.043.587.725,00
	Jumlah Pengurangan	**Rp**	**10.000.000.000,00**
Total Tambah/(Kurang)		**Rp**	**9.741.557.903,00**
Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO		**Rp**	**66.974.221.952,51**

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp31.624.138.399,49 dan mengalami peningkatan sebesar Rp9.786.589.516,51 atau 44,82% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp21.837.548.882,98 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.145 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	85.379.954,00	6.787.942.958,00	(6.702.563.004,00)	(98,74)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	16.326.716.979,49	5.230.850.638,98	11.095.866.340,51	212,12

No	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	4.587.694.000,00	2,00	4.587.693.998,00	229.384.699.900,00
4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	139.620.001,00	786.000.000,00	(646.379.999,00)	(82,24)
5.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.484.727.465,00	9.032.755.284,00	1.451.972.181,00	16,07
Jumlah		**31.624.138.399,49**	**21.837.548.882,98**	**9.786.589.516,51**	**44,82**

Adapun perbandingan antara saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.146 Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	85.379.954,00	0,00	85.379.954,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	16.326.716.979,49	0,00	16.326.716.979,49
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	4.587.694.000,00	0,00	4.587.694.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	139.620.001,00	0,00	139.620.001,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.484.727.465,00	10.484.727.465,00	0,00
Jumlah	**31.624.138.399,49**	**10.484.727.465,00**	**21.139.410.934,49**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA		**Rp 10.484.727.465,00**
Penambahan:		
1.	Hibah dari Pemerintah Kementerian Kesehatan	Rp 85.379.954,00
2.	Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Desa	Rp 11.842.529.460,00
3.	Hibah Aset Tetap dari Masyarakat	Rp 4.587.694.000,00
4.	Hibah Aset Tetap dari Bank BTN	Rp 139.620.000,00
5.	Hibah Aset Tetap dari yayasan IMIP Peduli	Rp 1,00
6.	Hibah Barang Persediaan Droping dari Pemerintah Provinsi	Rp 4.484.187.519,49
	Jumlah Penambahan	**Rp 21.139.410.934,49**
Total Tambah/(Kurang)		**Rp 21.139.410.934,49**
Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO		**Rp 31.624.138.399,49**

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Secara rinci dapat di uraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.147 Rincian Beban

No	Beban	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Pegawai	664.172.521.021,00	534.692.045.847,00	129.480.475.174,00	24,22
2.	Beban Barang dan Jasa	829.448.219.290,10	797.710.497.014,55	31.737.722.275,55	3,98
3.	Beban Bunga	870.918.961,26	1.124.276.321,23	(253.357.359,97)	(22,54)
4.	Beban Hibah	77.203.750.233,00	104.242.361.998,00	(27.038.611.765,00)	(25,94)
5.	Beban Bantuan Sosial	15.985.800.000,00	45.239.200.000,00	(29.253.400.000,00)	(64,66)
6.	Beban Penyisihan Piutang	1.121.805.025,84	1.499.717.011,10	(377.911.985,26)	(25,20)
7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	230.386.891.915,85	278.302.628.415,12	(47.915.736.499,27)	(17,22)
8.	Beban Transfer	201.279.605.112,00	158.036.779.990,00	43.242.825.122,00	27,36
9.	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**2.020.469.511.559,05**	**1.920.847.506.597,00**	**99.622.004.962,05**	**5,19**

Masing-masing realisasi Beban TA 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2025 yang diperhitungkan dengan utang belanja Pegawai.

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp664.172.521.021,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp129.480.475.174,00 atau 24,22% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp534.692.045.847,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.148 Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	351.577.481.609,00	301.105.796.954,00	50.471.684.655,00	16,76
2.	Beban Tambahan Penghasilan ANS	299.812.981.477,00	129.809.139.299,00	170.003.842.178,00	130,96
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	92.142.452.399,00	(92.142.452.399,00)	(100,00)

No	Beban Pegawai	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.776.074.262,00	10.988.217.195,00	787.857.067,00	7,17
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	133.503.673,00	0,00	133.503.673,00	100,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	872.480.000,00	646.440.000,00	226.040.000,00	34,97
Jumlah		**664.172.521.021,00**	**534.692.045.847,00**	**129.480.475.174,00**	**24,22**

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada TA 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Belanja Pegawai pada LRA Belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.149 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	351.577.481.609,00	351.577.481.609,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ANS	299.812.981.477,00	299.812.981.477,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.776.074.262,00	11.776.074.262,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	133.503.673,00	133.503.673,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	872.480.000,00	872.480.000,00	0,00
Jumlah	**664.172.521.021,00**	**664.172.521.021,00**	**0,00**

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja barang jasa lainnya.

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp829.448.219.290,10 dan mengalami peningkatan sebesar Rp31.737.722.275,55 atau 3,98%, jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp797.710.497.014,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.150 Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	228.668.389.178,46	237.772.675.728,69	(9.104.286.550,23)	(3,83)

No	Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
2.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	427.255.092,00	660.564.436,00	(233.309.344,00)	(35,32)
3.	Beban Jasa Kantor	277.641.206.243,00	240.805.295.088,00	36.835.911.155,00	15,30
4.	Beban Jaminan/Asuransi	27.172.992.886,00	23.509.229.098,00	3.663.763.788,00	15,58
5.	Beban Sewa Tanah	729.700.000,00	443.000.000,00	286.700.000,00	64,72
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.414.400.200,00	2.019.256.530,00	395.143.670,00	19,57
7.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.058.318.100,00	1.888.117.500,00	170.200.600,00	9,01
8.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
9.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	126.083.370,00	18.000.000,00	108.083.370,00	600,46
10.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	13.420.761.621,00	13.041.679.163,00	379.082.458,00	2,91
11.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.338.244.958,00	242.291.500,00	1.095.953.458,00	452,33
12.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	697.550.000,00	2.632.500.000,00	(1.934.950.000,00)	(73,50)
13.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.983.215.384,00	4.929.050.058,00	54.165.326,00	1,10
14.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	8,33
15.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.838.812.990,00	5.609.365.567,00	229.447.423,00	4,09
16.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.595.843.796,50	23.620.419.856,50	(17.024.576.060,00)	(72,08)
17.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.309.580.488,00	11.941.837.607,00	(4.632.257.119,00)	(38,79)
18.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.280.000,00	0,00	37.280.000,00	100,00
19.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.579.319.482,00	115.083.966.534,00	(11.504.647.052,00)	(10,00)
20.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.313.186.000,00	18.678.694.500,00	39.634.491.500,00	212,19
21.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	7.367.377.200,00	(7.367.377.200,00)	(100,00)
22.	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	22.790.696.268,00	(22.790.696.268,00)	(100,00)
23.	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.823.575.133,00	0,00	21.823.575.133,00	100,00

No	Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
24.	Beban Barang dan Jasa BLUD	66.250.604.368,14	64.652.880.380,36	1.597.723.987,78	2,47
Jumlah		**829.448.219.290,10**	**797.710.497.014,55**	**31.737.722.275,55**	**3,98**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.151 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	228.668.389.178,46	228.685.454.414,00	(17.065.235,54)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	427.255.092,00	778.232.500,00	(350.977.408,00)
Beban Jasa Kantor	277.641.206.243,00	291.040.554.375,00	(13.399.348.132,00)
Beban Jaminan/Asuransi	27.172.992.886,00	27.172.992.886,00	0,00
Beban Sewa Tanah	729.700.000,00	429.700.000,00	300.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.414.400.200,00	2.395.270.200,00	19.130.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.058.318.100,00	2.056.318.100,00	2.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	126.083.370,00	126.083.370,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	13.420.761.621,00	21.473.349.481,00	(8.052.587.860,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.338.244.958,00	1.338.244.958,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	697.550.000,00	697.550.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.983.215.384,00	4.983.215.384,00	0,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.838.812.990,00	5.909.305.990,00	(70.493.000,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.595.843.796,50	10.536.101.544,00	(3.940.257.747,50)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.309.580.488,00	6.874.539.085,00	435.041.403,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.579.319.482,00	103.515.483.402,00	63.836.080,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.313.186.000,00	58.283.786.000,00	29.400.000,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.823.575.133,00	22.151.661.751,00	(328.086.618,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	66.250.604.368,14	70.592.674.704,37	(4.342.070.336,23)
Jumlah	**829.448.219.290,10**	**859.081.698.144,37**	**(29.633.478.854,27)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Belanja Barang dan Jasa		**Rp**	**859.081.698.144,37**
Penambahan:			
1.	Hibah/Dropping Persediaan dari Pemerintah Provinsi	Rp	4.484.187.519,49
2.	Hibah/Dropping Persediaan dari Pemerintah Pusat (KEMENKES)	Rp	85.379.954,00
3.	Persediaan TA 2024	Rp	24.687.965.588,12
4.	Koreksi Belanja Modal	Rp	27.377.912.265,00
5.	Utang TA. 2025	Rp	10.405.854.817,00
6.	Aset Ekstrakomptabel	Rp	369.825.671,00
7.	Beban dibayar di muka atas sewa Mess Pemda Kab. Morowali di jakarta	Rp	300.000.000,00
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**67.711.125.814,61**
Pengurangan:			
1.	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp	30.995.135.423,00
2.	Persediaan TA. 2025	Rp	29.373.117.830,38
3.	Utang TA. 2024	Rp	36.976.351.415,50
	Jumlah Pengurangan	**Rp**	**97.344.604.668,88**
Total Tambah/(Kurang)		**(Rp**	**29.633.478.854,27)**
Saldo Beban Barang dan Jasa		**Rp**	**829.448.219.290,10**

5.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga merupakan Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang.

Saldo Beban Bunga pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 atas bunga utang pinjaman sesuai Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor: SLA-1241/DSMI/2011 tanggal 12 Mei 2011 pada IBRD Bank Dunia sebesar Rp870.918.961,26 dan mengalami penurunan sebesar Rp253.357.359,97 atau 22,54% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.124.276.321,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.152 Beban Bunga

Beban Bunga	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Selisih Anggaran dan Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	870.918.961,26	1.124.276.321,23	(253.357.359,97)	(22,54)
Jumlah	**870.918.961,26**	**1.124.276.321,23**	**(253.357.359,97)**	**(22,54)**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Bunga dan Belanja Bunga Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.153 Perbandingan Beban Bunga dan Belanja Bunga

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-	870.918.961,26	892.157.393,44	(21.238.432,18)

Jangka Panjang			
Jumlah	**870.918.961,26**	**892.157.393,44**	**(21.238.432,18)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Belanja Bunga		**Rp**	**892.157.393,44**
Penambahan:			
1. Utang Bunga Tahun 2025		Rp	106.192.160,89
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**106.192.160,89**
Pengurangan:			
1. Utang Bunga Tahun 2024		Rp	127.430.593,07
	Jumlah Pengurangan	**Rp**	**127.430.593,07**
Total Tambah/(Kurang)		**(Rp**	**21.238.432,18)**
Saldo Beban Bunga		**Rp**	**870.918.961,26**

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidakmengikat.

Beban Hibah terjadi pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp77.203.750.233,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp27.038.611.765,00 atau 25,94, jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp104.242.361.998,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.154 Beban Hibah

No	Beban Hibah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	17.000.000.000,00	(15.500.000.000,00)	(91,18)
2.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.107.565.900,00	(1.107.565.900,00)	(100,00)
3.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	35.400.000.000,00	(35.400.000.000,00)	(100,00)
4.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.137.912.500,00	13.730.090.000,00	(1.592.177.500,00)	(11,60)
5.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.935.902.750,00	6.290.000.000,00	12.645.902.750,00	201,05
6.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.859.077.600,00	25.481.197.000,00	10.377.880.600,00	40,73

No	Beban Hibah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
7.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	692.100.000,00	712.980.000,00	(20.880.000,00)	(2,93)
8.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
9.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	813.105.533,00	648.965.348,00	164.140.185,00	25,29
10.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.906.706.150,00	3.871.563.750,00	2.035.142.400,00	52,57
11.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.336.445.700,00	0,00	1.336.445.700,00	100,00
Jumlah		**77.203.750.233,00**	**104.242.361.998,00**	**(27.038.611.765,00)**	**(25,94)**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.155 Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.137.912.500,00	12.137.912.500,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.935.902.750,00	18.935.902.750,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.859.077.600,00	35.859.077.600,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	692.100.000,00	692.100.000,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	813.105.533,00	813.105.533,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.906.706.150,00	6.146.725.100,00	(240.018.950,00)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.336.445.700,00	1.336.445.700,00	0,00
Jumlah	**77.203.750.233,00**	**77.443.769.183,00**	**(240.018.950,00)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Belanja Hibah	**Rp**	**77.443.769.183,00**
Penambahan:		

1. Saldo Stok Opname Persediaan yang bersumber dari Dana BOP PAUD TA 2024		Rp	4.032.000,00
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**4.032.000,00**
Pengurangan:			
1. Saldo Stok Opname Persediaan yang bersumber dari Dana BOP PAUD		Rp	6.610.750,00
2. Kapitalisasi Belanja Hibah BOP PAUD ke Aset Tetap		Rp	237.440.200,00
	Jumlah Pengurangan	**Rp**	**244.050.950,00**
Total Tambah/(Kurang)		**(Rp**	**240.018.950,00)**
Saldo Beban Hibah		**Rp**	**77.203.750.233,00**

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial beban yang terjadi pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp15.985.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.156 Beban Sosial

No	Beban Sosial	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.735.800.000,00	6.639.200.000,00	8.096.600.000,00	121,95
2.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.250.000.000,00	38.600.000.000,00	(37.350.000.000,00)	(96,76)
Jumlah		**15.985.800.000,00**	**45.239.200.000,00**	**(29.253.400.000,00)**	**(64,66)**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Sosial dan Belanja bantuan Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 5.157 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.735.800.000,00	14.525.800.000,00	210.000.000,00
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
Jumlah	**15.985.800.000,00**	**15.775.800.000,00**	**210.000.000,00**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Belanja Bantuan Sosial		**Rp**	**15.775.800.000,00**
Penambahan			
1. Beban Bantuan Sosial Uang CSR		Rp	210.000.000,00
	Jumlah Penambahan	**Rp**	**210.000.000,00**

Saldo Belanja Bantuan Sosial	**Rp**	**15.775.800.000,00**
Total Tambah/(Kurang)	**Rp**	**210.000.000,00**
Saldo Beban Bantuan Sosial	**Rp**	**15.985.800.000,00**

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan estimasi kerugian yang diperkirakan akan terjadi akibat piutang yang tidak dapat ditagih.

Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.121.805.025,84 dan mengalami penurunan sebesar Rp377.911.985,26 atau 25,20% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.499.717.011,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.158 Beban Penyisihan Piutang

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.020.938.090,01	1.478.305.006,58	542.633.083,43	36,71
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	21.611.400,00	108.600,00	21.502.800,00	19.800,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(918.244.464,17)	21.303.404,52	(939.547.868,69)	(4.410,32)
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(2.500.000,00)	0,00	(2.500.000,00)	0,00
Jumlah		**1.121.805.025,84**	**1.499.717.011,10**	**(377.911.985,26)**	**(25,20)**

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban yang berasal dari belanja modal perolehan tahun anggaran 2025, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp230.386.891.915,85 dan mengalami penurunan sebesar Rp47.915.736.499,27 atau 17,22% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp278.302.628.415,12 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.159 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	86.699.586.381,65	68.350.289.766,39	18.349.296.615,26	26,85
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.322.306.867,00	22.580.949.391,00	5.741.357.476,00	25,43
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.020.214.507,20	187.059.559.217,74	(72.039.344.710,54)	(38,51)
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	344.784.160,00	311.830.039,99	32.954.120,01	10,57

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
Jumlah		**230.386.891.915,85**	**278.302.628.415,12**	**(47.915.736.499,27)**	**(17,22)**

5.4.2.8 Beban Bagi Hasil

Beban bagi hasil ini merupakan bagian dari pendapatan bank dan merupakan imbalan atas pembiayaan. Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp92.204.508.112,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.160 Rincian Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	63.917.336.173,00	31.070.891.850,00	32.846.444.323,00	105,71
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	28.287.171.939,00	19.025.336.427,00	9.261.835.512,00	48,68
Jumlah	**92.204.508.112,00**	**50.096.228.277,00**	**42.108.279.835,00**	**84,05**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.161 Perbandingan Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	63.917.336.173,00	63.917.336.173,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	28.287.171.939,00	28.287.171.939,00	0,00
Jumlah	**92.204.508.112,00**	**92.204.508.112,00**	**0,00**

5.4.2.9 Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks akuntansi dan keuangan, merujuk pada pengeluaran atau biaya yang timbul akibat pemberian bantuan atau pinjaman.

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp109.075.097.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.134.545.287,00 atau 1,05%, jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp107.940.551.713,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.162 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	109.075.097.000,00	107.940.551.713,00	1.134.545.287,00	1,05
Jumlah	**109.075.097.000,00**	**107.940.551.713,00**	**1.134.545.287,00**	**1,05**

Adapun perbandingan antara saldo Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.163 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	109.075.097.000,00	210.100.534.648,00	(101.025.437.648,00)
Jumlah	**109.075.097.000,00**	**210.100.534.648,00**	**(101.025.437.648,00)**

Perhitungan selisih nilai pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Belanja Bantuan Keuangan	**Rp**	**210.100.534.648,00**
Pengurangan		
1. Dana Desa	Rp	101.025.437.648,00
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**101.025.437.648,00**
Total Tambah/(Kurang)	**(Rp**	**101.025.437.648,00)**
Saldo Beban Bantuan Keuangan	**Rp**	**109.075.097.000,00**

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp602.544.482.743,79 dan mengalami peningkatan sebesar Rp17.867.210.002,74 atau 3,06%, jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp584.677.272.741,05, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.164 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Pendapatan – LO	2.623.013.994.302,84	2.505.524.779.338,05	117.489.214.964,79	4,69
2.	Beban – LO	2.020.469.511.559,05	1.920.847.506.597,00	99.622.004.962,05	5,19
Jumlah		**602.544.482.743,79**	**584.677.272.741,05**	**17.867.210.002,74**	**3,06**

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 sebesar Rp2.464.808.135,00, merupakan penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional atas Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.165 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	%
Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO					
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	5.546.982.885,00	(5.546.982.885,00)	(100,00)
2	DefisitPenghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	11.767.869.710,93	(11.767.869.710,93)	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO					
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.464.808.135,00	1.571.146.043,75	893.662.091,25	56,88
Jumlah		**(2.464.808.135,00)**	**(18.885.998.639,68)**	**16.421.190.504,68**	**(86,95)**

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Realisasi Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2025 sebesar Rp600.079.674.608,79.

5.4.6 Pos Luar Biasa

5.4.6.1 Beban Luar Biasa- LO

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Kabupaten Morowali. Realisasi Beban Luar Biasa-LO pada tahun 2025 sebesar Rp468.222.000,00.

5.4.7 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Realisasi Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada tahun 2025 sebesar (Rp468.222.000,00).

5.4.8 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 surplus sebesar Rp599.611.452.608,79.

5.5 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Saldo awal kas ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas yang berada dan dikuasai oleh BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Bendahara BOS, dan Bendahara FKTP. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Bendahara BOS, dan Bendahara FKTP. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.166 Perbandingan Arus Kas Tahun 2025 dan 2024

No	Arus Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	842.206.301.256,99	1.229.993.642.734,65
2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(864.770.056.790,43)	(668.754.844.158,06)
3.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(1.270.966.733,67)	(1.270.966.733,34)
4.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(804.765.969,71)	535.560.988,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas		**(24.639.488.236,82)**	**560.503.392.831,25**

Tabel di atas menunjukkan Kenaikan/(Penurunan) Kas tahun 2025 sebesar (Rp24.639.488.236,82) atau turun sebesar Rp585.142.881.068,07, jika dibandingkan dengan saldo akhir Kas tahun 2024 yaitu sebesar Rp560.503.392.831,25. Penjelasan Arus kas diuraikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.167 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.762.345.511.758,80	2.963.834.478.024,41
2.	Arus Masuk Keluar dari Aktivitas Operasi	1.920.139.210.501,81	1.733.840.835.289,76
Jumlah		**842.206.301.256,99**	**1.229.993.642.734,65**

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp842.206.301.256,99 mengalami penurunan sebesar Rp387.787.341.477,66 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.229.993.642.734,65. Realisasi Arus Kas Aktivitas Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan jumlah kas yang mengalir masuk yang dipakai untuk menunjukkan besaran uang tunai yang didapatkan maupun digunakan pada satu periode tertentu.

Arus Masuk Kas sejumlah Rp2.762.345.511.758,80 merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp826.527.304.149,14 adalah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian berikut.

Tabel 5.168 Rincian Pajak Daerah

No	Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Pajak Hotel	0,00	1.441.952.501,38
2.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	96.999.810.655,00
3.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	56.150.000,00
4.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.305.777.275,92	2.032.334.461,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	284.118.818.431,00
6.	Pajak Air Tanah	494.793.663,00	364.894.731,00
7.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	114.475.175.347,22	79.377.569.048,64
8.	PBBP2	108.367.902.114,00	86.262.275.489,92
9.	BPHTB-Pemindahan Hak	107.399.951.815,00	89.796.756.819,40
10.	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	119.280.734.072,00	0,00
11.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	340.059.377.295,00	0,00
12.	PBJT-Hotel	1.932.014.544,00	0,00
13.	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	56.190.000,00	0,00
14.	Opsen PKB	13.785.398.161,00	0,00
15.	Opsen BBNKB	18.369.989.862,00	0,00
Jumlah		**826.527.304.149,14**	**640.450.562.137,34**

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sejumlah Rp286.024.019.117,00 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.169 Rincian Retribusi Daerah

No	Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.875.835.813,00	7.175.900.995,00

No	Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	219.895.600,00	105.995.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	242.650.000,00	319.370.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	180.645.000,00	48.350.000,00
5.	Retribusi Terminal	0,00	3.910.000,00
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	31.200.000,00	82.200.000,00
7.	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.870.000,00	30.550.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	72.835.400,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	306.480.000,00	128.020.000,00
11.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	251.280.000,00	184.890.000,00
12.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	34.933.344.204,00	95.776.116.322,00
13.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	241.944.818.500,00	184.979.414.100,00
Jumlah		**286.024.019.117,00**	**288.907.551.817,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus Kas Masuk pada Pendapatan Bagian Laba BUMD tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp5.048.125.362,00 dan Rp4.490.472.491,00 merupakan deviden atau Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Morowali untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp107.685.958.814,15 dan Rp107.017.287.417,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.170 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No	Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Hasil Sewa BMD	0,00	453.510.000,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah	18.695.773.985,15	9.984.403.843,76
3.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	117.027,00
4.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	58.320,00	236.447,00
5.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	362.202,00	1.747.016,00
6.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	1.502.688,00	0,00
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	19.005.607.608,19	25.107.310.172,03
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.137.555.889,83	752.913.246,18
9.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	68.613.183.005,00	67.901.889.681,00

No	Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
10.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	231.915.115,98	278.072.484,10
Jumlah		**107.685.958.814,15**	**104.480.199.917,07**

e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.469.342.712.802,00 merupakan Arus Masuk Kas dari penerimaan Transfer Dari pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus Dana Desa serta Insentif Fiskal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.171 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0,00	1.053.252.471.318,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	523.674.524.729,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00	45.355.846.055,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	98.747.961.453,00
5.	Dana Bagi Hasil (DBH)	646.196.884.589,00	0,00
6.	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.505.981.719,00	0,00
7.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	82.981.595.467,00	0,00
8.	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	124.930.953.379,00	0,00
9.	Dana Desa	101.025.437.648,00	106.697.472.900,00
10.	Insentif Fiskal	5.701.860.000,00	11.818.826.000,00
Jumlah		**1.469.342.712.802,00**	**1.839.547.102.455,00**

f. Pendapatan Transfer antar Daerah

Pendapatan Dana Transfer antar Daerah Kabupaten Morowali yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp57.132.664.049,51, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp76.925.833.923,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.172 Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah

No	Pendapatan Transfer antar Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.132.664.049,51	76.825.833.923,00
2,	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah		**57.232.664.049,51**	**76.925.833.923,00**

g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Lain-lain adalah penerimaan yang berasal dari sumber kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan lain-lain tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP periode Tahun Anggaran 2025 yang terealisasi sejumlah Rp10.484.727.465,00.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar Kas dari Aktivitas Operasi biasanya meliputi pembayaran untuk memperoleh Aset Tetap, Investasi, dan Aset Tak Berwujud. Arus kas dari kegiatan investasi disajikan di laporan arus kas dengan menyebutkan arus kas masuk terlebih dahulu.

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sejumlah Rp1.920.139.210.501,81 merupakan saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.173 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai	664.172.521.021,00	534.692.045.847,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	859.081.698.144,37	783.997.356.734,42
3.	Belanja Bunga	892.157.393,44	1.146.186.220,34
4.	Belanja Hibah	77.443.769.183,00	104.231.793.598,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	15.775.800.000,00	45.039.200.000,00
6.	Belanja Tak Terduga	468.222.000,00	0,00
7.	Transfer Bagi Hasil	92.204.508.112,00	50.096.228.277,00
8.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	210.100.534.648,00	214.638.024.613,00
Jumlah		**1.920.139.210.501,81**	**1.733.840.835.289,76**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 terjadi Defisit sebesar (Rp864.770.056.790,43) dan (Rp668.754.844.158,06).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 5.174 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	2.537.087.500,00
2.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	864.770.056.790,43	671.291.931.658,06
Jumlah		**(864.770.056.790,43)**	**(668.754.844.158,06)**

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2025 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp864.770.056.790,43 digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.175 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Perolehan Tanah	43.576.372.121,00	54.200.960.137,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	153.900.472.699,00	175.235.443.624,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	412.972.340.440,43	236.686.171.253,25
4.	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	236.774.789.690,00	200.750.115.539,81
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.918.571.840,00	2.348.930.604,00
6.	Perolehan Aset Lainnya	127.510.000,00	570.310.500,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah		**864.770.056.790,43**	**671.291.931.658,06**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 5.176 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	1.270.966.733,67	1.270.966.733,34
Jumlah		**(1.270.966.733,67)**	**(1.270.966.733,34)**

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025 adalah defisit sebesar (Rp1.270.966.733,67) yang diuraikan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2025 tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2025 dimanfaatkan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.177 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp	Rp
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.270.966.733,67	1.270.966.733,34
Jumlah	**1.270.966.733,67**	**1.270.966.733,34**

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.178 Rekapitulasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	176.090.836.356,56	118.486.481.253,76
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	176.687.177.418,56	117.950.920.265,76
Jumlah		**(596.341.062,00)**	**535.560.988,00**

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk Kas ini merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga oleh BUD yang harus disetorkan ke kas Negara. Adapaun Penerimaan Perhitungan Fihak ketiga dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp176.090.836.356,56, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.179 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp	Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
1.	BPJS	0,00	1.295.187.624,00
2.	Jaminan Kecelakaan Kerja	547.720.717,00	474.840.635,00
3.	Jaminan Kematian	1.643.053.555,00	1.441.366.203,00
4.	Jaminan Kesehatan	22.886.652.986,00	14.352.814.808,00
5.	Iuran Wajib Pegawai	13.338.426.354,00	9.928.580.842,00
6.	Taspen	5.987.144.089,00	7.083.976.771,00
7.	Pajak Penghasilan	39.518.748.506,56	35.576.750.136,90
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	92.169.090.149,00	48.270.067.083,86
9.	Lainnya	0,00	62.897.150,00
Jumlah		**176.090.836.356,56**	**118.486.481.253,76**

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar ini merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang telah disetorkan oleh BUD. Adapun Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp176.687.177.418,56 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.180 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

No	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		Rp	Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
1.	BPJS	0,00	1.295.187.624,00
2.	Jaminan Kecelakaan Kerja	547.720.717,00	474.840.635,00
3.	Jaminan Kematian	1.643.053.555,00	1.441.366.203,00
4.	Jaminan Kesehatan	22.886.652.986,00	14.352.814.808,00
5.	Iuran Wajib Pegawai	13.338.426.354,00	9.928.580.842,00
6.	Taspen	5.987.144.089,00	7.083.976.771,00
7.	Pajak Penghasilan	40.115.089.568,56	35.576.750.136,90
8.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	92.169.090.149,00	47.734.506.095,86
9.	Lainnya	0,00	62.897.150,00
Jumlah		**176.687.177.418,56**	**117.950.920.265,76**

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan aktivitas arus kas pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2025. Penurunan bersih kas selama periode tahun 2025 adalah sebesar (Rp24.431.063.329,11), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.181 Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas selama Periode

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp	Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	842.206.301.256,99	1.229.993.642.734,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(864.770.056.790,43)	(668.754.844.158,06)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.270.966.733,67)	(1.270.966.733,34)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(596.341.062,00)	535.560.988,00
Jumlah Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	**(24.431.063.329,11)**	**560.503.392.831,25**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan 2024 yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.182 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	856.240.575.225,40	296.088.424.076,24

Saldo Awal Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Penerimaan	228.826.000,00	1.053.586.144,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.826.257,56	266.324.946,45
Kas di BLUD	15.315.749.934,52	13.103.569.515,54
Kas Dana BOSP	23.080.702,08	690.377.565,08
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	86.626.607,00	1.985.206.036,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.551.162.096,00	0,00
Jumlah	**873.448.846.822,56**	**313.187.488.283,31**

5.5.7 Koreksi SILPA

Koreksi SiLPA merupakan koreksi atas aliran keluar kas atas SiLPA yang berasal dari Koreksi atas kesalahan *double* kredit pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada CV. Morowali Baru di TA 2024 sebesar Rp3.890.018,00, Koreksi atas double kredit lebih bayar SP2D pada CV. Aneka Jasa Morowali di TA 2024 sebesar Rp2.000.000 dan Koreksi atas pengembalian kelebihan bayar pajak reklame pada PT. BCA Finance di TA 2024 sebesar Rp265.580,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.183 Koreksi SILPA

No	Koreksi SILPA	Tahun 2025
		Rp
1.	Koreksi atas kesalahan double kredit pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada CV. Morowali Baru di TA 2024	(3.890.018,00)
2.	Koreksi atas double kredit lebih bayar SP2D pada CV. Aneka Jasa Morowali di TA 2024	(2.000.000,00)
3.	Koreksi atas pengembalian kelebihan bayar pajak reklame pada PT. BCA Finance di TA 2024	(265.580,00)
Jumlah		**(6.155.598,00)**

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar Rp849.011.627.895,45 merupakan jumlah keseluruhan kas dan Koreksi SILPA per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan sebesar Rp24.437.218.927,11 dari saldo kas tahun 2024 sebesar Rp873.448.846.822,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.184 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp	Rp
Kas di Kas Daerah	831.990.885.017,24	856.240.575.225,40
Kas di Bendahara Penerimaan	48.376.000,00	228.826.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.969.699.736,00	2.826.257,56
Kas di BLUD	13.505.843.351,13	15.315.749.934,52
Kas Dana BOSP	70.213.266,08	23.080.702,08
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	214.154.533,00	86.626.607,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.212.455.992,00	1.551.162.096,00
Jumlah	**849.011.627.895,45**	**873.448.846.822,56**

Nilai Kas dan Setara Kas pada akhir periode dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp849.011.627.895,45 jika dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp857.427.609.656,45, terdapat selisih sebesar Rp8.415.981.761,00.

Selisih nilai Kas dan Setara Kas tersebut di atas merupakan saldo Kas Lainnya yang tidak termasuk bagian dari komponen Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas karena merupakan kas yang bukan berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terdiri dari Saldo Kas Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2025, dan Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025, serta masih terdapat saldo pada rekening Bank atas Penerimaan Dana CSR sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan pos Kas Lainnya pada Poin 5.3.1.1.1,f.

5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan, serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

a. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.337.580.183.360,85 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

b. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit - LO Pemerintah Kabupaten Morowali tahun anggaran 2025 sebesar Rp599.611.452.608,79 yang merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada laporan perubahan ekuitas terdapat selisih yang menambah dan mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya koreksi yang disebabkan oleh kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Koreksi lainnya merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2025 serta penyesuaian atas pembukuan periode akuntansi sebelumnya yang menambah dan mengurangi nilai ekuitas yang dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.185 Rekapitulasi Rincian Koreksi Ekuitas

No	Uraian Koreksi Ekuitas	Nilai (Rp)
I	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
II	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00
III	LAIN-LAIN	119.940.500.123,53
	Koreksi ekuitas - Kas	(6.155.598,00)
	Koreksi ekuitas - Piutang	(306.568.820,00)
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap Tanah	121.269.654.330,00
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(40.000,00)
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor	(0,05)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(762,00)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(359.483,00)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(64.896.185,48)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,01
	Koreksi ekuitas - Aset Lain-Lain	(1.000.000.001,00)
	Koreksi ekuitas - Kewajiban	48.866.643,05
Jumlah		**119.940.500.123,53**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2025 digambarkan dalam diagram di bawah ini.

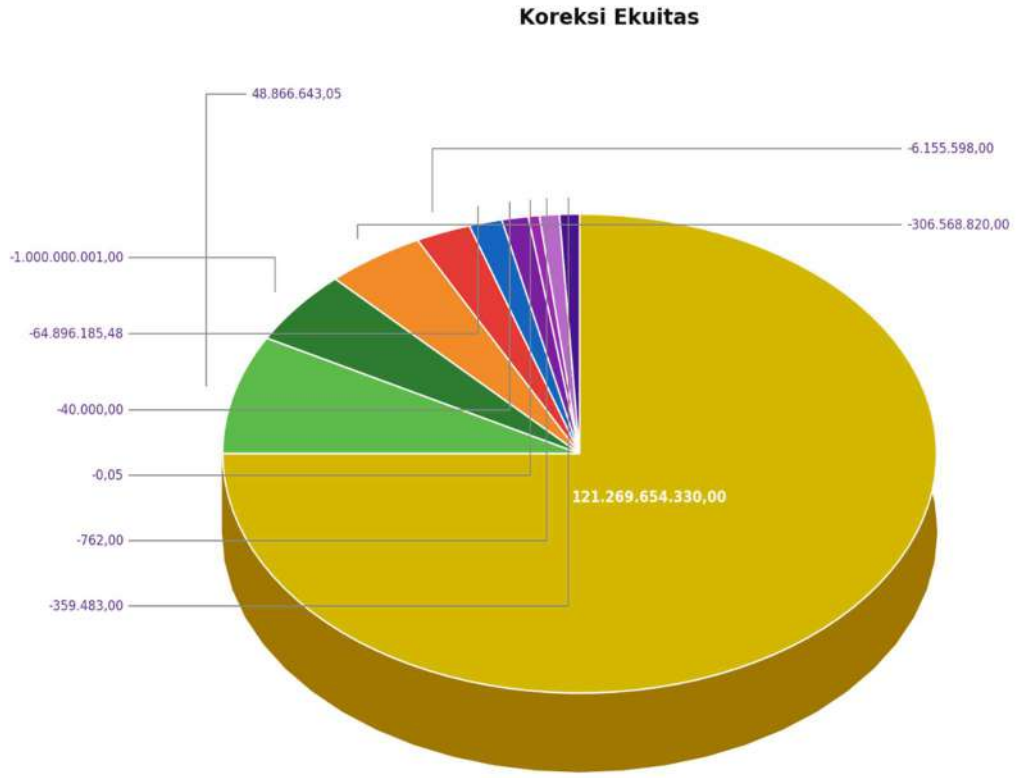

Gambar 3 Koreksi Ekuitas

d. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp719.551.952.732,32 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp563.419.967.218,24. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/(Defisit)-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas.

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.057.132.136.093,17 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.337.580.183.360,85, Nilai Ekuitas Akhir 31 Desember 2025 diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp4.337.580.183.360,85 ditambah kenaikan Ekuitas sebesar Rp719.551.952.732,32.

5.7 Pengungkapan Lainnya atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025

Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, serta dalam rangka memenuhi prinsip pengungkapan yang memadai (*full disclosure*), Pemerintah Daerah mengungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, sebagai berikut:

a. Penjelasan Rekening Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan Tambang Tahun 2025

Pada Tanggal 27 Januari 2010 dilakukan Pembukaan Rekening Pada Bank BRI KCP Morowali atas nama Rekening Jaminan Kelestarian dan Jaminan Kesungguhan. Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat Saldo Akhir pada Rekening Jaminan Kelestarian sebesar Rp2.717.521.594,00 dan Rekening Jaminan Kesungguhan sebesar Rp198.081.801,00. Sehingga pada akhir tahun 2025, pada kedua rekening tersebut terdapat saldo akhir sebesar Rp2.915.603.395,00 yang belum dilakukan pemindahbukuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan minerba.

b. Penjelasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD TA 2015 sesuai Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penetapan Retribusi IMB Kurang Bayar sebesar Rp44.075.840.723,00

Berdasarkan LHP BPK-RI terhadap LKPD TA 2015 Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, terdapat temuan Penetapan Retribusi IMB kurang bayar sebesar Rp44.075.840.723,00 terjadinya kurang bayar tersebut karena adanya kesalahan perhitungan koefisien retribusi IMB pada lima Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1) PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) sebesar Rp2.809.255.511,50;
2) PT ASI sebesar Rp705.631.500,00;
3) PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) sebesar Rp33.790.070.712,50;
4) PT Sulawesi Mining Investment (SMI) sebesar Rp3.137.510.249,00; dan
5) PT Decent Stainless Steel (DSS) sebesar Rp3.633.372.750,00.

Atas temuan tersebut telah dilakukan penagihan kepada PT GCNS, PT ASI, PT ITSS, PT SMI dan PT DSS melalui Surat Inspektorat Nomor: 700/60/ITDAKAB/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Surat Sekretariat Daerah Nomor: 700/64/ITDAKAB/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017.

Atas penagihan tersebut, perusahaan yang bersangkutan menanggapi dengan mengeluarkan surat keberatan atas temuan Retribusi IMB Kurang Bayar sebesar Rp44.075.840.723,00, dengan rincian surat sebagai berikut :

1) PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) Nomor: 219/LEG-GCNS/MWL/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal Jawaban Atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Morowali yang menyatakan keberatan dan tidak

mampu untuk melakukan pembayaran selisih perhitungan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Morowali dan Surat PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) Nomor: 257/LEG-GCNS/MWL/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Jawaban atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur Daerah Kabupaten Morowali yang menyatakan keberatan dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran selisih perhitungan IMB.

2) PT Sulawesi Mining Investment (SMI) Nomor: 218/LEG-SMI/MWL/IV/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Jawaban Atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Morowali yang menyatakan keberatan dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran selisih perhitungan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Morowali dan Surat PT Sulawesi Mining Investment (SMI) Nomor: 258/LEG-SMI/MWL/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Jawaban atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur Daerah Kabupaten Morowali yang menyatakan keberatan dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran selisih perhitungan IMB.

3) PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Nomor: 259/LEG-ITSS/MWL/IV/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Jawaban atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur Daerah Kabupaten Morowali yang menyatakan keberatan dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran selisih perhitungan IMB.

c. Penjelasan atas Dana Non APBD Kabupaten Morowali Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Morowali melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari dana non APBD yang terdiri dari Dana Tugas Pembantuan. Pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kabupaten dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Dana Tugas Pembantuan tahun 2025 yang dilaksanakan dan dialokasikan pada Kabupaten Morowali berada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Anggaran Dana Tugas Pembantuan tahun 2025 sebesar Rp295.266.500,00 dan realisasi sebesar Rp275.470.216,00 atau 93,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp19.796.284,00. Dana Tugas Pembantuan digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

Tabel 5.186 Program Tugas Pembantuan

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	102.230.000,00	102.230.000,00	0,00	100,00
2.	Program Dukungan Manajemen	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	100,00
3.	Operasional Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rayat	80.659.500,00	60.976.716,00	19.682.784,00	75,60
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) Kab. Morowali	75.417.000,00	75.303.500,00	113.500,00	99,85
Jumlah		**295.266.500,00**	**275.470.216,00**	**19.796.284,00**	**93,30**

d. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Berdasarkan hasil Laporan Pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah Kabupaten Morowali semester satu tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai LHP Nomor: 11/LP/XIX.PLU/07/2025 tanggal 02 Juli 2025 sebesar Rp136.388.653.442,97 dengan nilai sisa kerugian daerah sebesar Rp76.055.145.432,50. Rincian perkembangan penyelesaian kerugian daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.187 Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah s.d Semester I Tahun 2025

No.	Jenis Proses	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Lunas (Rp)	Sisa (Rp)
I	**Kasus yang Telah Ditetapkan**				
1	Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lainnya	4.898.444.232,13	934.113.426,00	1.909.538.547,00	2.054.792.259,13
3	Pihak Ketiga	3.007.621.462,22	10.648.500,00	0,00	2.996.972.962,22
	Sub Jumlah I	**7.906.065.694,35**	**944.761.926,00**	**1.909.538.547,00**	**5.051.765.221,35**
II	**Kasus yang Sedang dalam Proses Penetapan**				
1	Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Jenis Proses	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Lunas (Rp)	Sisa (Rp)
3	Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengelola BUMN/BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengelola Lembaga Atau Badan Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah II		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Kasus yang Masih Berupa Informasi**				
1	HP BPK	106.810.186.110,84	41.159.792.231,92	14.899.120.283,61	50.751.273.595,31
2	HP APIP	21.672.401.637,78	945.601.775,26	474.693.246,68	20.252.106.615,84
	Sub Jumlah II	**128.482.587.748,62**	**42.105.394.007,18**	**15.373.813.530,29**	**71.003.380.211,15**
JUMLAH		**136.388.653.442,97**	**43.050.155.933,18**	**17.283.352.077,29**	**76.055.145.432,50**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Kabupaten Morowali

6.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk bersama dengan dua kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara 01º 31´12″ Lintang Selatan dan 03º46´48″ Lintang selatan serta antara 121º02´24″ Bujur timur dan 123º15´36″ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Morowali membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, Sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi, dan sebagian kecil terdapat wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil.

Luas wilayah daratan Kabupaten Morowali diperkirakan kurang lebih 5.472,00 km^2 atau sekitar 8,85 persen dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.080,98 km^2, sementara wilayah kecamatan yang memiliki luas daratan terkecil adalah kecamatan Menui Kepulauan dengan luas 126,65 km^2 atau 2,33 persen dari luas daratan Kabupaten Morowali.

Jika ditinjau dari posisi geografis, Kabupaten Morowali memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara :Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Morowali Utara;
b. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;
c. Sebelah Timur :Berbatasan dengan wilayah Perairan Teluk Tolo;
d. Sebelah Barat :Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

6.1.2 Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali adalah 203.860 jiwa. Berdasarkan jumlah luas wilayah 5.472 Km^2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Morowali sekitar 37 jiwa/Km^2. Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Morowali, dapat dikatakan cukup berimbang dimana jumlah laki-laki sebanyak 108.665 jiwa (53,30%) dan perempuan sebanyak 95.195 jiwa (46,70%) dengan *sex ratio* 114 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 114 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Morowali tersebar di sepuluh kecamatan pada tahun 2025 di wilayah kecamatan. Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sombori Kepulauan	2.747	2.641	5.388
2	Menui Kepulauan	5.318	5.401	10.719
3	Bungku Selatan	8.057	7.597	15.654
4	Bahodopi	26.520	20.640	47.160
5	Bungku Pesisir	4.635	4.198	8.833
6	Bungku Tengah	19.486	17.742	37.228
7	Bungku Timur	8.340	7.568	15.908
8	Bungku Barat	11.807	9.523	21.330
9	Bumi Raya	9.338	8.501	17.839
10	Wita Ponda	12.417	11.384	23.801
Total		**108.665**	**95.195**	**203.860**

Sumber Dokumen: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komposisi penduduk Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Kabupaten Morowali tercatat sebesar 203.860 jiwa. Ditinjau dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk pada saat sensus menunjukkan penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan yaitu masing-masing sebesar 108.665 dan 95.195 jiwa.

6.1.3 Aspek Kesejahteraan

6.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, walaupun tidak dapat langsung menunjukkan kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat atau penduduk. PDRB Kabupaten Morowali diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2021 – 2025

No	Sektor	2021 (Jutaan Rp)	2022 (Jutaan Rp)	2023 (Jutaan Rp)	2024 (Jutaan Rp)	2025 (Jutaan Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.147,50	2.346,57	2.444,60	2.702,86	2.966,85
2	Pertambangan dan Penggalian	18.404,88	25.349,78	28.114,26	29.202,53	32.082,59
3	Industri Pengolahan	70.356,85	107.299,77	114.926,06	127.964,17	138.790,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,90	2,13	2,38	2,53	2,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	6,17	6,42	7,01	8,03
6	Konstruksi	5.543,21	7.880,45	8.490,79	9.094, 18	9.715,61

No	Sektor	2021 (Jutaan Rp)	2022 (Jutaan Rp)	2023 (Jutaan Rp)	2024 (Jutaan Rp)	2025 (Jutaan Rp)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.065,44	1.832,17	1.996,08	2.419,03	2.585,50
8	Transportasi dan Pergudangan	183,05	496,71	546,10	763,70	805,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,75	39,19	47,10	54,66	63,87
10	Informasi dan Komunikasi	260,05	322,97	344,03	371,67	397,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	191,63	222,62	226,35	265,99	313,74
12	Real Estate	151,95	201,46	261,38	321,15	359,04
13	Jasa Perusahaan	3,82	4,40	5,05	6,26	6,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278,72	277,91	293,12	306,96	350,42
15	Jasa Pendidikan	121,85	127,42	134,99	151,56	165,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,66	100,19	111,46	120,82	131,49
17	Jasa lainnya	79,73	89,43	96,57	109,87	117,46
PDRB		**98.916,81**	**146.599,34**	**158.046,74**	**164.770,77**	**188.863,04**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Morowali pada tahun 2025 menurut Lapangan Usaha sebesar Rp188.863,04 atau naik sebesar 2,0 kali dari tahun 2021. Hal itu berarti bahwa potensi sumber daya ekonomi Kabupaten Morowali yang direalisasikan telah meningkatkan uang sebesar 2,0 kali dari tahun 2021. Pada tabel di atas diketahui terdapat empat sektor yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Morowali yaitu; 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Konstruksi. Dari keempat sektor tersebut, sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang paling tinggi memberikan kontribusi setiap tahunnya.

6.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

6.1.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 – 2025

Kabupaten/Kota		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu Rp)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Bangkep	67,54	67,83	13,11	13,12	8,70	8,88	8,375	8,723
2	Banggai	72,26	72,52	13,35	13,43	8,81	8,94	10,772	11,000
3	Morowali	71,09	71,34	13,39	13,40	9,38	9,39	12,281	12,527

4	Poso	73,02	73,34	13,75	13,76	9,54	9,84	9,948	10,314
5	Donggala	70,74	71,03	12,62	12,75	8,00	8,01	9,117	9,337
6	Toli-toli	71,31	71,62	13,17	13,18	8,91	9,00	8,918	9,295
7	Buol	71,30	71,62	13,68	13,19	9,20	9,21	9,051	9,410
8	Parigi Moutong	68,72	69,09	12,52	12,53	8,05	8,07	10,846	11,194
9	Tojo Una-una	71,05	71,30	12,43	12,62	8,56	8,58	8,863	9,200
10	Sigi	71,33	71,63	13,13	13,30	9,04	9,05	9,254	9,659
11	Banggai Laut	71,04	71,45	13,04	13,17	8,65	8,66	8,776	9,184
12	Morowali Utara	72,35	72,61	12,44	12,60	9,13	9,14	10,032	10,258
13	Palu	73,91	74,25	16,52	16,53	11,75	11,76	15,941	16,269
SULAWESI TENGAH		**70,84**	**71,10**	**13,34**	**13,35**	**9,04**	**9,10**	**10,536**	**10,934**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tabel di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali meningkat setiap tahunnya bahkan menjadikan Kabupaten Morowali Peringkat kedua se-Sulawesi Tengah dengan capaian 74,7. Hal ini disebabkan karena adanya program kegiatan pada sektor pendidikan yang semakin baik pelaksanaannya sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

6.1.3.2.2 Penanggulangan Kemiskinan

Capaian Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4 Perbandingan Penurunan Persentase Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali

Tingkat Penanggulangan Kemiskinan	2024 (%)	2025 (%)	Naik/Turun
Nasional	9,03	8,25	(0,78)
Provinsi Sulawesi Tengah	11,7	10,52	(1,18)
Kabupaten Morowali	11,55	10,38	(1,17)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tabel di atas menunjukkan di atas angka kemiskinan Kabupaten Morowali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Tetapi jika dilihat dari persentase penurunannya, penurunan Kabupaten Morowali lebih tinggi jika dibandingan dengan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki kontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan Nasional.

6.1.3.2.3 Pengangguran

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali Tahun 2023-2025

Uraian	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58,52	61,49	65,87

Pencari Kerja yang Ditempatkan	N/A	N/A	N/A
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	N/A	N/A	N/A
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,84	2,84	2,81

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Morowali

Tahun 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Morowali tercatat sebesar 65,87 persen. Ini berarti bahwa setiap 1.000 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali, terdapat sebanyak 659 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Sedangkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali pada tahun 2025 mencapai 2,81 persen, atau sama dibandingkan dengan tahun 2024.

6.2 Gambaran Umum Organisasi Kabupaten Morowali

6.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Penataan Kelembagaan organisasi perangkat daerah merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan. Dalam artian, bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro pemerintah. Penataan Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem Pemerintahan Daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itu, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, maka penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut. Elemen-elemen lain, seperti: penataan Sumber Daya Manusia (SDM), Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing,* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah *(reinventing government)* dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik *(good local government).* Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kondisi *eksisting* Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan yang baik *(good governance).* Tujuan pengkajian ini adalah mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali, dan menganalisis desain kelembagaan berbasis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Secara teoritis, pengelompokan perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu: Kepala Daerah *(strategic apex);* Sekretaris Daerah *(middle line);* dinas daerah *(operating core);*

badan sebagai fungsi penunjang *(technostructure);* dan staf pendukung *(supporting staff).* Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota, adalah: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan. Adapun Rincian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.6 Organisasi Perangkat Daerah

No.	Nama OPD
	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Daerah
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
3.	Rumah Sakit Daerah Morowali
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Salabangkapaku
5.	Puskesmas Ulunambo
6.	Puskesmas Kaleroang
7.	Puskesmas Lafeu
8.	Puskesmas Bahodopi
9.	Puskesmas Bahomotefe
10.	Puskesmas Bungku
11.	Puskesmas Wosu
12.	Puskesmas Bahonsuai
13.	Puskesmas Lantula Jaya
14.	Puskesmas Tanjung Harapan
15	Puskesmas Fonuasingko
16.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Daerah
17.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
20.	Dinas Sosial Daerah
	Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar
21.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah
22.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
25.	Dinas Perhubungan
26.	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
27.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
29.	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Daerah
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Urusan Pemerintah Pilihan

No.	Nama OPD
31.	Dinas Perikanan Daerah
32.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
33.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
34.	Bagian Umum
35.	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
36.	Bagian Hukum
37.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
38.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
39.	Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
40.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
41.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
42.	Bagian Administrasi Pembangunan
43.	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
44.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
45.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
46.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
47.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
48.	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan
49.	Kecamatan Bahodopi
50.	Kecamatan Bumi Raya
51.	Kecamatan Bungku Barat
52.	Kecamatan Bungku Pesisir
53.	Kecamatan Bungku Selatan
54.	Kecamatan Bungku Tengah
55.	Kelurahan Bungi
56.	Kelurahan Lamberea
57.	Kelurahan Matano
58.	Kelurahan Marsaoleh
59.	Kelurahan Tofoiso
60.	Kelurahan Mendui
61.	Kecamatan Bungku Timur
62.	Kecamatan Menui Kepulauan
63.	Kelurahan Ulunambo
64.	Kecamatan Wita Ponda

No.	Nama OPD
65.	Kecamatan Sombori Kepulauan
	Unsur Pemerintahan Umum
66.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

6.2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Morowali sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 3.069 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.7 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Golongan / Ruang	Eselon					Tenaga Fungsional	Staf	CPNS	Jumlah
	I	II	III	IV	V				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Golongan IV/c	0	20	1	0	0	18	1	0	40
Golongan IV/b	0	4	37	1	0	204	8	0	254
Golongan IV/a	0	2	92	11	0	150	19	0	274
Jumlah Golongan IV	**0**	**27**	**130**	**12**	**0**	**373**	**28**	**0**	**570**
Golongan III/d	0	0	27	100	0	443	49	0	619
Golongan III/c	0	0	7	55	0	194	65	0	321
Golongan III/b	0	0	0	36	0	444	126	33	639
Golongan III/a	0	0	0	7	0	131	214	120	472
Jumlah Golongan III	**0**	**0**	**34**	**198**	**0**	**1212**	**454**	**153**	**2051**
Golongan II/d	0	0	0	0	0	59	140	0	199
Golongan II/c	0	0	0	0	0	29	94	42	165
Golongan II/b	0	0	0	0	0	2	55	0	57
Golongan II/a	0	0	0	0	0	1	16	6	23
Jumlah Golongan II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**305**	**48**	**444**
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**
TOTAL	**0**	**27**	**164**	**210**	**0**	**1676**	**791**	**201**	**3.069**

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan APBD Tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh Kondisi umum Perekonomian Kabupaten Morowali Tahun 2025. Berdasarkan data Morowali Dalam Angka 2025, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

b. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut.

   1) Pendapatan Asli Daerah direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.

   2) Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi.

   3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

c. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali maka perlu diambil kebijakan terkait Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

   1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2025 terdiri atas dua puluh urusan wajib pelayanan dasar, sepuluh urusan wajib bukan pelayanan dasar, tiga unsur pemerintahan pilihan, sepuluh unsur pendukung, empat unsur penunjang, satu unsur pengawasan dan tujuh belas unsur kewilayahan serta satu unsur pemerintahan umum. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

   2) Banyaknya kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali periode 2024-2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2025.

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah:

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2025 diperuntukkan Penyertaan Modal (*Investasi*) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang.

e. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Morowali menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK.

f. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 target dan realisasinya sebagai berikut:

Target Pendapatan	Rp	2.545.205.962.998,00
Realisasi Pendapatan	Rp	2.762.345.511.758,80
Selisih Lebih/(Kurang) Pendapatan	Rp	(217.139.548.760,80)

Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 target dan realisasinya sebagai berikut:

Target Belanja	Rp	3.402.754.754.100,85
Realisasi Belanja	Rp	2.771.409.267.292,24
Selisih Lebih/(Kurang) Belanja	Rp	631.345.486.808,61

Realisasi Belanja dan Transfer APBD Tahun 2025 target dan realisasi terdiri atas:

1)	Belanja Pegawai	Rp	664.172.521.021,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	859.081.698.144,37
3)	Belanja Bunga	Rp	892.157.393,44
4)	Belanja Hibah	Rp	77.443.769.183,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	15.775.800.000,00
6)	Belanja Modal	Rp	851.270.056.790,43
7)	Belanja Tak Terduga	Rp	468.222.000,00
8)	Transfer	Rp	302.305.042.760,00

Defisit pada laporan realisasi sebesar (Rp9.063.755.533,44) merupakan pengurang realisasi Pendapatan sebesar Rp2.762.345.511.758,80 dengan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.771.409.267.292,24.

g. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2025 terdiri atas:

Penerimaan Pembiayaan	Rp	872.610.425.254,85
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	14.770.966.733,67
Pembiayaan Netto	Rp	857.839.458.521,18

h. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2024 Rp872.616.580.852,85 dan Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun 2025 Rp848.775.702.987,74.

Realisasi Pendapatan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar	Rp	2.623.013.994.302,84
Realisasi Beban Operasional (LO)	Rp	2.020.469.511.559,05
Surplus dari Operasi (LO)	Rp	602.544.482.743,79
Defisit dari Kegiatan Non Operasionl (LO)	Rp	(2.464.808.135,00)
Surplus Sebelum Pos Luar Biasa (LO)	Rp	600.079.674.608,79
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	(468.222.000,00)
Total Surplus (LO)	Rp	599.611.452.608,79

i. Total Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp5.093.470.195.886,15 terdiri dari:

1)	Aset Lancar	Rp	975.169.688.222,73
2)	Investasi Jangka Panjang	Rp	51.398.035.121,95
3)	Aset Tetap	Rp	3.697.745.307.260,44
4)	Dana Cadangan	Rp	0,00
5)	Aset Lainnya	Rp	369.157.165.281,03

j. Total Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp230.386.891.915,85. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2025 sebesar (Rp1.628.894.753.771,03).

k. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Rp36.338.059.792,98 terdiri atas:

1)	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	31.254.192.860,05
2)	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	5.083.866.932,93

l. Saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 Rp4.337.580.183.360,85 dan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 Rp5.057.132.136.093,17.

m. Arus Kas Tahun 2025 terdiri dari:

1)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Rp	2.762.345.511.758,80
2)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Rp	1.920.139.210.501,81
3)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	Rp	0,00
4)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	Rp	864.770.056.790,43
5)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
6)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	Rp	1.270.966.733,67
7)	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Rp	176.090.836.356,56
8)	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Rp	176.687.177.418,56

n. Alokasi Dana-dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Morowali realisasi Tahun 2025 sebagai berikut.

1)	Dana Tugas Pembantuan	Rp	275.470.216,00

BUPATI MOROWALI

IKSAN

Lampiran 1

Daftar Alokasi dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa (DD) (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Menui Kepulauan				
1	Terebino	724.931.000,00	742.869.000,00	1.467.800.000,00	
2	Torukuno	648.621.000,00	710.366.000,00	1.358.987.000,00	
3	Ngapaea	649.062.000,00	717.697.000,00	1.366.759.000,00	
4	Padala'a	689.816.000,00	815.973.000,00	1.505.789.000,00	
5	Morompaitonga	652.629.000,00	764.858.000,00	1.417.487.000,00	
6	Kofalagadi	662.334.000,00	726.117.000,00	1.388.451.000,00	
7	Padei Laut	787.286.000,00	937.859.000,00	1.725.145.000,00	
8	Padei Darat	795.656.000,00	795.823.000,00	1.591.479.000,00	
9	Samarengga	779.498.000,00	895.582.000,00	1.675.080.000,00	
10	Ulunipa	769.775.000,00	862.941.000,00	1.632.716.000,00	
11	Wawangkolono	640.887.000,00	828.049.000,00	1.468.936.000,00	
12	Buranga	680.445.000,00	724.910.000,00	1.405.355.000,00	
13	Tafagapi	631.194.000,00	749.154.000,00	1.380.348.000,00	
	Kecamatan Sambori Kepulauan				
14	Masadian	729.254.000,00	984.300.000,00	1.713.554.000,00	
15	Pulau Tiga	749.018.000,00	932.204.000,00	1.681.222.000,00	
16	Matano	637.815.000,00	873.931.000,00	1.511.746.000,00	
17	Matarape	807.368.000,00	774.975.000,00	1.582.343.000,00	
18	Dongkalan	813.632.000,00	930.927.000,00	1.744.559.000,00	
19	Pulau Tengah	686.382.000,00	779.918.000,00	1.466.300.000,00	
20	Mbokitta	682.731.000,00	766.565.000,00	1.449.296.000,00	
21	Tanjung Tiram	666.840.000,00	753.230.000,00	1.420.070.000,00	
22	Tanona	652.554.000,00	838.306.000,00	1.490.860.000,00	
23	Tanjung Harapan	643.689.000,00	796.243.000,00	1.439.932.000,00	
24	Lalemo	712.161.000,00	959.011.000,00	1.671.172.000,00	
25	Lamontoli	833.492.000,00	879.797.000,00	1.713.289.000,00	
26	Pulau Dua Darat	704.805.000,00	806.338.000,00	1.511.143.000,00	
	Kecamatan Bungku Selatan				
27	Sainoa	786.719.000,00	1.476.000.000,00	2.262.719.000,00	
28	Polewali	648.159.000,00	831.016.000,00	1.479.175.000,00	
29	Umbele	645.870.000,00	758.094.000,00	1.403.964.000,00	
30	Pulau Dua	736.304.000,00	893.774.000,00	1.630.078.000,00	
31	Bakala	767.855.000,00	873.227.000,00	1.641.082.000,00	
32	Paku	670.601.000,00	903.465.000,00	1.574.066.000,00	
33	Koburu	638.490.000,00	852.645.000,00	1.491.135.000,00	
34	Buton	765.782.000,00	910.759.000,00	1.676.541.000,00	
35	Jawi-Jawi	732.071.000,00	924.108.000,00	1.656.179.000,00	
36	Kaleroang	743.858.000,00	1.201.108.000,00	1.944.966.000,00	

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa (DD) (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
37	Bungingkela	731.687.000,00	967.152.000,00	1.698.839.000,00	
38	Lokombulo	669.107.000,00	977.171.000,00	1.646.278.000,00	
39	Buajangka	755.354.000,00	864.600.000,00	1.619.954.000,00	
40	Waru-Waru	736.268.000,00	866.491.000,00	1.602.759.000,00	
41	Padabale	665.292.000,00	898.440.000,00	1.563.732.000,00	
42	Pado-Pado	797.219.000,00	1.092.940.000,00	1.890.159.000,00	
43	Pulau Bapa	714.726.000,00	834.909.000,00	1.549.635.000,00	
44	Bungintende	737.727.000,00	1.059.748.000,00	1.797.475.000,00	
45	Panimbawang	860.783.000,00	876.294.000,00	1.737.077.000,00	
46	Po'O	673.278.000,00	762.905.000,00	1.436.182.999,00	
47	Boelimau	796.667.000,00	1.056.215.000,00	1.852.882.000,00	
48	Poaro	742.715.000,00	917.122.000,00	1.659.837.000,00	
49	Umbele Lama	768.185.000,00	1.023.675.000,00	1.791.860.000,00	
	Kecamatan Bungku Pesisir				
50	Puungkeu	733.545.000,00	829.139.000,00	1.562.684.000,00	
51	Tangofa	704.093.000,00	848.225.000,00	1.552.318.000,00	
52	One Ete	620.703.000,00	767.581.000,00	1.388.284.000,00	
53	Tandaoleo	715.847.000,00	998.671.000,00	1.714.518.000,00	
54	Lafeu	778.737.000,00	853.679.000,00	1.632.416.000,00	
55	Torete	711.875.000,00	872.401.000,00	1.584.276.000,00	
56	Buleleng	807.111.000,00	779.610.000,00	1.586.721.000,00	
57	Laroenai	769.883.000,00	786.738.000,00	1.556.621.000,00	
58	Sambalagi	797.684.000,00	824.709.000,00	1.622.393.000,00	
59	Were'A	687.327.000,00	808.837.000,00	1.496.164.000,00	
	Kecamatan Bahodopi				
60	Bete-Bete	779.924.000,00	885.565.000,00	1.665.489.000,00	
61	Padabahao	769.463.000,00	761.197.000,00	1.530.660.000,00	
62	Labota	1.352.341.000,00	978.860.000,00	2.331.201.000,00	
63	Fatufia	1.189.931.000,00	813.090.000,00	1.723.301.480,00	
64	Keurea	1.139.068.000,00	888.908.000,00	2.027.976.000,00	
65	Bahodopi	1.182.325.000,00	874.194.000,00	2.056.519.000,00	
66	Lalampu	1.386.367.000,00	842.013.000,00	2.176.780.000,00	
67	Siumbatu	1.173.846.000,00	857.245.000,00	2.031.091.000,00	
68	Dampala	1.174.749.000,00	923.114.000,00	2.097.863.000,00	
69	Le-Le	1.083.497.000,00	961.928.000,00	2.045.425.000,00	
70	Baho Makmur	1.255.870.000,00	845.152.000,00	2.101.022.000,00	
71	Makarti Jaya	987.945.000,00	765.373.000,00	1.753.318.000,00	
	Kecamatan Bungku Timur				
72	Oneputeh Jaya	815.676.000,00	793.504.000,00	1.609.180.000,00	
73	Bahomotefe	1.152.396.000,00	859.703.000,00	2.012.099.000,00	
74	Bahomoahi	762.365.000,00	786.033.000,00	1.548.398.000,00	

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa (DD) (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
75	Ululere	1.016.273.000,00	824.269.000,00	1.840.542.000,00	
76	Kolono	973.881.000,00	806.987.000,00	1.780.868.000,00	
77	Geresa	663.863.000,00	808.937.000,00	1.472.799.999,00	
78	Laroue	691.871.000,00	901.123.000,00	1.592.994.000,00	
79	Nambo	685.586.000,00	885.754.000,00	1.571.340.000,00	
80	Unsongi	682.775.000,00	806.530.000,00	1.489.305.000,00	
81	Lahuafu	702.449.000,00	733.329.000,00	1.420.870.290,00	
	Kecamatan Bungku Tengah				
82	Puungkoilu	696.917.000,00	840.905.000,00	1.537.822.000,00	
83	Bahontobungku	700.088.000,00	858.587.000,00	1.558.675.000,00	
84	Tofuti	659.660.000,00	700.968.000,00	1.360.628.000,00	
85	Sakita	838.227.000,00	940.274.000,00	1.778.501.000,00	
86	Matansala	760.815.000,00	742.715.000,00	1.488.397.800,00	
87	Bahoruru	980.400.000,00	944.823.000,00	1.831.863.800,00	
88	Bente	1.098.434.000,00	1.034.923.000,00	2.024.973.000,00	
89	Ipi	745.755.000,00	704.877.000,00	1.450.632.000,00	
90	Bahomohoni	1.150.076.000,00	874.843.000,00	2.024.919.000,00	
91	Bahomoleo	876.435.000,00	841.937.000,00	1.552.416.500,00	
92	Bahomante	755.949.000,00	1.093.491.000,00	1.849.440.000,00	
93	Lanona	820.683.000,00	848.189.000,00	1.668.872.000,00	
94	Tudua	687.824.000,00	801.993.000,00	1.489.817.000,00	
	Kecamatan Bungku Barat				
95	Bahoea Reko- Reko	993.092.000,00	1.046.834.000,00	2.039.926.000,00	
96	Wosu	1.071.773.000,00	1.094.913.000,00	2.002.814.800,00	
97	Larobenu	889.866.000,00	961.520.000,00	1.674.037.980,00	
98	Umpanga	846.780.000,00	793.694.000,00	1.640.474.000,00	
99	Tondo	716.585.000,00	940.784.000,00	1.657.369.000,00	
100	Topogaro	935.387.000,00	957.278.000,00	1.892.665.000,00	
101	Ambunu	809.763.000,00	763.583.000,00	1.573.346.000,00	
102	Wata	687.653.000,00	748.057.000,00	1.435.710.000,00	
103	Uedago	598.986.000,00	763.061.000,00	1.362.047.000,00	
104	Marga Mulya	659.456.000,00	701.033.000,00	1.360.489.000,00	
	Kecamatan Bumi Raya				
105	Parilangke	852.917.000,00	854.089.000,00	1.707.006.000,00	
106	Bahonsuai	985.938.000,00	1.045.141.000,00	2.031.079.000,00	
107	Atananga	682.325.000,00	791.624.000,00	1.473.949.000,00	
108	Pebatae	814.101.000,00	909.476.000,00	1.723.577.000,00	
109	Umbele	710.708.000,00	992.231.000,00	1.702.939.000,00	
110	Lambelu	686.138.000,00	777.036.000,00	1.463.174.000,00	
111	Limbo Makmur	941.517.000,00	823.285.000,00	1.764.802.000,00	
112	Beringin Jaya	755.234.000,00	749.883.000,00	1.505.024.000,00	

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa (DD) (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
113	Samarenda	885.032.000,00	875.097.000,00	1.760.129.000,00	
114	Lasampi	938.078.000,00	729.250.000,00	1.667.328.000,00	
115	Harapan Jaya	834.023.000,00	818.341.000,00	1.652.364.000,00	
116	Pebotoa	719.552.000,00	807.207.000,00	1.526.759.000,00	
117	Karaupa	579.462.000,00	807.274.000,00	1.386.736.000,00	
	Kecamatan Wita Ponda				
118	Sampeantaba	971.262.000,00	944.182.000,00	1.915.444.000,00	
119	Emea	840.657.000,00	836.796.000,00	1.677.453.000,00	
120	Moahino	858.150.000,00	984.856.000,00	1.843.006.000,00	
121	Solonsa	893.169.000,00	836.749.000,00	1.729.918.000,00	
122	Lantula Jaya	1.108.544.000,00	972.329.000,00	2.080.873.000,00	
123	Puntari Makmur	891.555.000,00	790.765.000,00	1.682.320.000,00	
124	Bumi Harapan	980.001.000,00	729.197.000,00	1.709.198.000,00	
125	Solonsa Jaya	1.032.960.000,00	870.659.000,00	1.903.619.000,00	
126	Ungkaya	988.023.000,00	988.149.000,00	1.976.172.000,00	
	Jumlah	**102.095.808.000,00**	**109.075.097.000,00**	**210.100.534.648,00**	

Lampiran 2

Daftar Transaksi Kesalahan Bank

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01/08/2025	SP2D 58/LS/5.03.5.04.0.00.01/2025 - BKD	74.561.020,00	74.561.202,00	72.06/04.0/000058/LS/5.03.5.04.0.00.01.00 00/P1/8/2025	01/08/2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	182,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D
2	12/08/2025	SP2D 0944/LS/1/02/2/14/0/00/01/2025- CATERING TANADOANG / ADRIANI	7.038.360,00	7.182.000,00	72.06/04.0/000944/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/P1/8/2025	12/08/2025	Rsud Salabangka Paku	Catering Tanadoang	143.640,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
3	14/08/2025	SP2D 0960/LS/1.02.2.14.0.00.01/2025- BOK JAMPERSAL LAFEU	24.726.907,00	25.210.000,00	72.06/04.0/000960/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/P1/8/2025	14/08/2025	Puskesmas Lafeu	BOK Jampersal Lafeu	483.093,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
4	14/08/2025	MPNG3_041133802875583	567.000,00	-	-	-	-	-	(567.000,00)	Kesalahan Debet
5	15/08/2025	SP2D 958/LS/ 1.02.2.14.0.00.01/2025 - IRDAWATI SUNTI	3.426.569,00	3.478.750,00	72.06/04.0/000956/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/P1/8/2025	15/08/2025	Puskesmas Kaleroang	Irdawati Sunti	52.181,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
6	02/09/2025	SP2D 191/LS/1.05.0.00.0.00.02/2025 - MUH SYAHRUL AMIN	16.434.142,00	16.434.205,00	72.06/04.0/000191/LS/1.05.0.00.0.00.02.00 00/P1/9/2025	02/09/2025	Satuan Polisi Pamong Praja	Muh Syahrul Amin SE	63,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
7	10/09/2025	SP2D 102/7.01.0.00.0.00.03/2025 - KECAMATAN BUNGKU BARAT	10.857.034,00	11.080.000,00	72.06/04.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.03.00 00/P1/9/2025	10/09/2025	Kecamatan Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	222.966,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
8	10/09/2025	SP2D 1110/LS/1.02.2.14.0.00.01/2025 - PT MEDISINDO BAHANA	408.306.224,00	408.306.225,00	72.06/04.0/001110/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/P1/9/2025	10/09/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	PT. Medisindo Bahana	1,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
9	31/12/2025	MPNG3_041565551005443	17.520.978,00	-	-	-	-	-	(17.520.978,00)	Kesalahan Debet
10	31/12/2025	MPNG3_041550920172645	110.131.859,00	-	-	-	-	-	(110.131.859,00)	Kesalahan Debet
11	31/12/2025	SP2D 0755/LS/2.15.0.00.0.00.01./2025 AMSAR	3.208.000,00	3.208.200,00	72.06/04.0/000755/LS/7.01.0.00.0.00.06.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Kelurahan Mendui	Amsar	200,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D
12	31/12/2025	SP2D 0447/LS/4.02.0.00.0.00.01./2025 CV BINTANG UTAMA	8.855.856,00	9.830.000,00	72.06/04.0/000447/LS/4.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CV Bintang Utama	974.144,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
13	31/12/2025	SP2D 0117/LS/7.01.0.00.0.00.01./2025 MOH IFAN	9.291.356,00	9.440.000,00	72.06/04.0/000117/LS/7.01.0.00.0.00.04.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Pesisir	Moh. Ifan	148.644,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
14	31/12/2025	SP2D 302/LS/2.15.0.00.0.00.01/2025 - GRIYA MEBEL	9.505.250,00	10.711.500,00	72.06/04.0/000302/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Akhyat Hidayat / CV. Griya Meubel	1.206.250,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
15	31/12/2025	SP2D 2342/LS/1.02.2.14.0.00.01/2025 - ADAM DWI PUTRA	9.600.000,00	10.656.000,00	72.06/04.0/002342/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Toko Rantepao Muda	1.056.000,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
16	31/12/2025	SP2D 2446/LS/1.02.2.14.0.00.01./2025 PT HADJI KALLA	10.290.000,00	11.655.000,00	72.06/04.0/002446/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	PT. Hadji Kalla	1.365.000,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
17	31/12/2025	SP2D 2398/LS/1.02.2.14.0.00.01/2025 DINAS KESEHATAN PP DAN KB	10.787.860,00	10.832.500,00	72.06/04.0/002398/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Morowali	44.640,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
18	31/12/2025	SP2D 0154/LS/7.01.00.0.00.01./2025 KECAMATAN BUNGKU BARAT	10.857.034,00	11.080.000,00	72.06/04.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.03.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	222.966,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
19	31/12/2025	SP2D 280/LS/2.15.0.00.0.00.01/2025 NAZMA PRATINA	12.004.000,00	12.024.000,00	72.06/04.0/000280/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Nazma Pratina	20.000,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak dan Netto)
20	31/12/2025	SP2D 93/LS/7.01.0.00.0.00.01/2025 - ALBERT	13.204.704,00	14.990.000,00	72.06/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	Albert	1.785.296,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
21	31/12/2025	SP2D 2280/LS/1.02.2.14.0.00.01./2025 MIRA LESTARI	14.671.090,00	14.970.500,00	72.06/04.0/002157/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Puskesmas Bahodopi	Kedai Khadijah	299.410,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
22	31/12/2025	SP2D/2354/LS/5.02.0.00.0.00.01/2025/ HUSNIATI H SAMUDA	14.822.500,00	15.125.000,00	72.06/04.0/002354/LS/5.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Husniati H Samuda	302.500,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	31/12/2025	SP2D 1613/LS/1.03.0.00.0.00.01/2025 - PT TANGGUH SAMDERA BARAKATI	15.496.994,00	17.508.054,00	72.06/04.0/001613/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT. Tangguh Samudera Barakati	2.011.060,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
24	31/12/2025	SP2D 1290/LS/1.01.2.22.0.00.01./2025 CV INTEL D	21.621.621,00	24.000.000,00	72.06/04.0/001290/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. Intel D	2.378.379,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
25	31/12/2025	SP2D/1216/LS/1.04.2.10.0.00.01/2025/ CV DONGGALA SENTRA SULAWESI	25.580.838,00	25.990.600,00	72.06/04.0/001216/LS/1.04.2.10.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Fehmin	409.762,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
26	31/12/2025	SP2D 0575/LS/2.19.3.26.0.00.01./2025 SYAMSIDIQ	34.819.750,00	35.350.000,00	72.06/04.0/000575/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Syamsidik	530.250,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
27	31/12/2025	SP2D 0267/LS/2.15.0.00.0.00.01./2025 IRDAWATI SUNTI	36.871.751,00	37.433.250,00	72.06/04.0/000267/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Irdawati Sunti / Azka Komputer Dan Furniture	561.499,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
28	31/12/2025	SP2D/2407/LS/1.02.2.14.0.0.00.01/2025/CV SLA RAHAYU	37.855.930,00	42.877.635,00	72.06/04.0/002407/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Sla Rahayu	5.021.705,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
29	31/12/2025	SP2D 0214/LS/2.23.2.24.00.01./2025 BINTANG BUNGKU TIMUR	56.968.776,00	64.306.037,00	72.06/04.0/000214/LS/2.23.2.24.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perpustakaan Daerah	PT. Bintang Bungku Timur	7.337.261,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
30	31/12/2025	SP2D 0010/LS/1.05.00.0.00.01./2025 CV IKA PERKASA	76.607.119,00	86.548.500,00	72.06/04.0/000515/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Ika Perkasa	9.941.381,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
31	31/12/2025	SP2D 457/LS/4.02.0.00.0.00.01/2025 - ABDU NAFIS MUFID UBADILAH	85.854.730,00	96.750.000,00	72.06/04.0/000457/LS/4.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Toko 3N Sport	10.895.270,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
32	31/12/2025	SP2D 0442/LS/2025 RM RAODA	164.953.600,00	168.320.000,00	72.06/04.0/000442/LS/4.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rm. Raoda	3.366.400,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
33	31/12/2025	SP2D 1605/LS/1.03.0.00.0.00.01/2025 - PT TANGGUH SAMUDERA BARAKATI	201.460.915,00	227.604.698,00	72.06/04.0/001605/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT. Tangguh Samudera Barakati	26.143.783,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
34	31/12/2025	SP2D 1251/LS/1.01.2.22.0.00.01./2025 CV MITRA INDONESIA MEMBANGUN	252.410.446,00	285.166.000,00	72.06/04.0/001251/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV Mitra Indonesia Membangun	32.755.554,00	Kurang Debet/Kurang Bayar SP2D (Nilai Pajak)
35				8.797.677,00	72.06/04.0/001399/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	18/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT. Tangguh Samudera Barakati	8.797.677,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
36				25.895.000,00	72.06/04.0/001581/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Puskesmas Ulunambo	Dpuprd	25.895.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
37				10.800.000,00	72.06/04.0/002255/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Husniati H.Samuda	10.800.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
38				134.143.000,00	72.06/04.0/002346/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Salabangkapaku	CV. Digital Engineering Consultant	134.143.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
39				675.215.000,00	72.06/04.0/002347/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	PT. Djuniar & Djuniar	675.215.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
40				6.484.750,00	72.06/04.0/000313/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Nur Alfina / CV. Karya Al Hidayah	6.484.750,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
41				351.400.000,00	72.06/04.0/001303/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV Selita Putri	351.400.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
42				155.193.800,00	72.06/04.0/002475/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Barat	CV. Maleo Art	155.193.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
43				10.260.000,00	72.06/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.03.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Subakir	10.260.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
44				798.933.600,00	72.06/04.0/001845/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT. Geosentris Inti Konsultan	798.933.600,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
45				199.880.000,00	72.06/04.0/001827/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Mitra Indonesia Membangun	199.880.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
46				25.777.778,00	72.06/04.0/001883/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV. Movara Jaya	25.777.778,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
47				6.046.400,00	72.06/04.0/000592/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rahmawati	6.046.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
48				142.931.935,00	72.06/04.0/001832/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Rezki Dzahra Mandiri	142.931.935,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49				67.160.550,00	72.06/04.0/000333/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Arman, S.Ars / CV. Grafika Reka CiPTa Konsultan	67.160.550,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
50				7.000.000,00	72.06/04.0/000331/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Joseph / Oto Metro Variasi	7.000.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
51				5.785.650,00	72.06/04.0/000601/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Sri Mega Mandiri	5.785.650,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
52				393.667.995,00	72.06/04.0/001808/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Mutiara Duta Plan	393.667.995,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
53				338.333.100,00	72.06/04.0/001824/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Wahana Artha Dipa	338.333.100,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
54				9.980.146,00	72.06/04.0/001825/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Movara Jaya	9.980.146,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
55				19.471.308,00	72.06/04.0/001842/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV. Khayfa Assyawal Bersaudara	19.471.308,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
56				1.530.000,00	72.06/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Dewi Susanti	1.530.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
57				2.541.000,00	72.06/04.0/000643/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Disporapar	2.541.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
58				20.300.000,00	72.06/04.0/001829/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Buana Artha Graha	20.300.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
59				34.533.374,00	72.06/04.0/001846/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Mefali Moiko	34.533.374,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
60				74.902.800,00	72.06/04.0/000338/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Damsyah, St / CV. Graha CiPTa Consulindo	74.902.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
61				19.777.750,00	72.06/04.0/000326/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Moh. Syarif / CV. Berkah Morowali	19.777.750,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
62				82.793.250,00	72.06/04.0/002476/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Sri Tanjung Indah	82.793.250,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
63				14.977.986,00	72.06/04.0/001838/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	PT. Tangguh Samudera Barakati	14.977.986,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
64				13.916.205,00	72.06/04.0/000334/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Nasruddin Mashub / CV. Bumi Punggawa Cakrawala Empat Tujuh	13.916.205,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
65				2.700.000,00	72.06/04.0/001861/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Dpuprd	2.700.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
66				4.368.000,00	72.06/04.0/000341/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ansar Saiunudin, S.Sos / CV. Tujuh Delapan Mandiri	4.368.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
67				7.499.426,00	72.06/04.0/001816/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Movara Jaya	7.499.426,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
68				9.885.365,00	72.06/04.0/000639/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Bagian Umum	Nur Alfina	9.885.365,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
69				173.326.500,00	72.06/04.0/001367/LS/4.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Yoos Irawan	173.326.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
70				22.608.364,00	72.06/04.0/001839/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Morokarya General Contractor	22.608.364,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
71				71.500.539,00	72.06/04.0/002485/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	PT. Enseval Putera Megatrading	71.500.539,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
72				389.379.000,00	72.06/04.0/001308/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Qais Maryam Sejahtera	389.379.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
73				99.866.000,00	72.06/04.0/001823/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Multikon Engineering Consultant	99.866.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
74				45.576.600,00	72.06/04.0/000644/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Syamsidik	45.576.600,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
75				74.902.800,00	72.06/04.0/000337/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Damsyah, ST / CV. Graha Cipta Consulindo	74.902.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
76				489.755.000,00	72.06/04.0/001876/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Ardi Karya Mandiri	489.755.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
77				194.994.000,00	72.06/04.0/001867/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Morowali Sukses Berkarya	194.994.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
78				9.944.250,00	72.06/04.0/000595/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Sinar Alam	9.944.250,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
79				48.993.368,00	72.06/04.0/001855/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Khiran Karya Mandiri	48.993.368,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
80				16.650.000,00	72.06/04.0/002487/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	La Ode Rifaldi Agus Saputra	16.650.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81				99.770.000,00	72.06/04.0/001806/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV. Arsitama Konsultan	99.770.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
82				67.872.150,00	72.06/04.0/000597/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Morowali Sukses Berkarya	67.872.150,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
83				238.650.000,00	72.06/04.0/001852/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Beta Metrik Konsultan	238.650.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
84				49.150.000,00	72.06/04.0/000328/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Moh. Syarif / CV. Berkah Morowali	49.150.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
85				14.914.000,00	72.06/04.0/000410/LS/2.11.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	Rukni Tondoha	14.914.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
86				230.436.000,00	72.06/04.0/000382/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Bahtra Selatan	230.436.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
87				9.006.400,00	72.06/04.0/001834/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	CV. Deux Royal Vidhey	9.006.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
88				59.749.618,35	72.06/04.0/002492/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Mitra Madika Utama	59.749.618,35	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
89				14.973.900,00	72.06/04.0/002484/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	La Ode Rifaldi Agus Saputra	14.973.900,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
90				4.998.600,00	72.06/04.0/001862/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Selatan	CV Morowali Sukses Berkarya	4.998.600,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
91				45.000.000,00	72.06/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.05.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalaluddin	45.000.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
92				89.606.250,00	72.06/04.0/000603/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Maleo Misi Pintar Utama	89.606.250,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
93				9.995.931,00	72.06/04.0/001841/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Saidya Konstruksi	9.995.931,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
94				24.841.900,00	72.06/04.0/001811/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	CV. Utama Jaya Perkasa	24.841.900,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
95				1.135.242.748,65	72.06/04.0/002491/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Mitra Madika Utama	1.135.242.748,65	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
96				165.612.000,00	72.06/04.0/000370/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Maritim Fiber Glass	165.612.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
97				50.019.000,00	72.06/04.0/000616/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kamil	50.019.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
98				1.454.392.883,00	72.06/04.0/001837/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Bulan Karya	1.454.392.883,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
99				4.190.000,00	72.06/04.0/000316/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ansar Saiunudin, S.Sos / CV. Tujuh Delapan Mandiri	4.190.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
100				24.681.500,00	72.06/04.0/001856/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV Bimo Mandala Sakti	24.681.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
101				165.767.000,00	72.06/04.0/000374/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Bahtra Selatan	165.767.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
102				4.600.000,00	72.06/04.0/000640/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Syamsidik	4.600.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
103				581.714.780,00	72.06/04.0/000311/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Riskayani / CV. Alesha Manaba Group	581.714.780,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
104				260.847.145,00	72.06/04.0/001307/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV. Fonuasingko Mandiri	260.847.145,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
105				54.018.246,83	72.06/04.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Hasriadi	54.018.246,83	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
106				20.389.200,00	72.06/04.0/000641/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Irdawati Sunti	20.389.200,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
107				89.800.000,00	72.06/04.0/002474/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Vianda Group Architech	89.800.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
108				9.967.010,00	72.06/04.0/000379/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Karya Aisyah	9.967.010,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
109				4.998.400,00	72.06/04.0/001840/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Sla Rahayu	4.998.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
110				343.428.421,00	72.06/04.0/001865/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Rezki Dzahra Mandiri	343.428.421,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
111				11.820.000,00	72.06/04.0/002488/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Morotama Architect And Partner	11.820.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
112				48.111.912,00	72.06/04.0/000372/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV, Sla Rahayu	48.111.912,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113				89.722.800,00	72.06/04.0/001874/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Eka Jaya Utama	89.722.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
114				34.441.477,00	72.06/04.0/001860/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV Anirah Karya Mandiri	34.441.477,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
115				13.282.500,00	72.06/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Abidin	13.282.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
116				242.398.815,00	72.06/04.0/001853/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Bulan Karya	242.398.815,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
117				23.919.530,00	72.06/04.0/000335/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Muhamad Akib / CV. Rizam Perkasa	23.919.530,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
118				2.019.690.288,00	72.06/04.0/000596/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT Gunung Baja Permata	2.019.690.288,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
119				492.408.852,00	72.06/04.0/001863/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Bumi Berkat	492.408.852,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
120				35.591.374,00	72.06/04.0/001819/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Karya Aisyah	35.591.374,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
121				9.947.059,00	72.06/04.0/001864/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Anugerah Inia Morowali	9.947.059,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
122				139.230.000,00	72.06/04.0/001857/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Multikon Engineering Consultant	139.230.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
123				696.923.418,00	72.06/04.0/001854/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT Lumiere Lunar Luxe	696.923.418,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
124				89.268.749,00	72.06/04.0/001680/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Libra Kom	89.268.749,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
125				139.379.813,00	72.06/04.0/001809/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Toha Pratama	139.379.813,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
126				93.160.414,00	72.06/04.0/001844/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV Belya Globalindo	93.160.414,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
127				82.140.000,00	72.06/04.0/000378/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Maritim Fiber Glass	82.140.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
128				46.483.500,00	72.06/04.0/000340/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	Sahdan Laibu / CV. Taminar Jaya	46.483.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
129				5.100.000,00	72.06/04.0/000081/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dewi Susanti	5.100.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
130				85.725.000,00	72.06/04.0/000598/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Putra Maleo	85.725.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
131				149.890.132,00	72.06/04.0/001835/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT Lumiere Lunar Luxe	149.890.132,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
132				293.908.726,00	72.06/04.0/001873/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Morokarya General Contractor	293.908.726,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
133				89.788.500,00	72.06/04.0/001869/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Barat	CV. Eka Jaya Utama	89.788.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
134				615.000,00	72.06/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.03.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Husnul Chawatim, S.E	615.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
135				24.248.445,00	72.06/04.0/000329/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Riskayani / CV. Alesha Manaba Group	24.248.445,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
136				9.973.500,00	72.06/04.0/002483/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV Sakita Labua Sejahtera	9.973.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
137				93.460.000,00	72.06/04.0/001302/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bungku Selatan	CV. Alesha Manaba Group	93.460.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
138				902.777.200,00	72.06/04.0/000191/LS/7.01.0.00.0.00.05.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Asrar Aswad	902.777.200,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
139				51.121.498,00	72.06/04.0/000339/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Moh. Basri Bustam Dm / CV. Project Inti Sulawesi	51.121.498,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
140				9.999.250,00	72.06/04.0/001850/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Mitra Indonesia Membangun	9.999.250,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
141				203.884.800,00	72.06/04.0/001826/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Geometrik Konsultan Teknik	203.884.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
142				59.912.704,00	72.06/04.0/001884/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Wita Ponda	CV. Cahaya Makmur Ululere	59.912.704,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
143				170.894.649,00	72.06/04.0/000126/LS/7.01.0.00.0.00.09.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Arfai Liwang	170.894.649,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
144				429.152.356,00	72.06/04.0/001882/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Lunetta Khatulistiwa	429.152.356,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145				89.523.535,00	72.06/04.0/001870/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Anugerah Inia Morowali	89.523.535,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
146				172.094.400,00	72.06/04.0/000381/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Bahtra Selatan	172.094.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
147				188.402.100,00	72.06/04.0/002482/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Deux Royal Vidheya	188.402.100,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
148				181.925.000,00	72.06/04.0/000550/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	CV Alesha Manaba Group	181.925.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
149				8.485.000,00	72.06/04.0/000329/LS/5.01.5.05.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Bappeda	8.485.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
150				9.992.000,00	72.06/04.0/001878/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Wita Ponda	CV. Bilqis Khumairah	9.992.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
151				8.994.455,00	72.06/04.0/000125/LS/7.01.0.00.0.00.09.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	Arfai Liwang	8.994.455,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
152				510.000,00	72.06/04.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewi Susanti	510.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
153				149.548.302,00	72.06/04.0/001309/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV Sultan Etnik	149.548.302,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
154				7.367.188,00	72.06/04.0/000323/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Jamal Hi. Lahi / CV. Menui Pratama	7.367.188,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
155				4.961.776,00	72.06/04.0/001245/LS/1.04.2.10.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Andi Akrim	4.961.776,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
156				133.200.000,00	72.06/04.0/000322/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Yudhi Sujono / PT. Rapima Nusa Mandiri	133.200.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
157				547.230.000,00	72.06/04.0/002489/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT. Nusantara Medicalindo Al Fazza	547.230.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
158				9.715.000,00	72.06/04.0/000606/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV Fiko Perdana	9.715.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
159				59.718.000,00	72.06/04.0/000336/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Arman, S.Ars / CV. Grafika Reka CiPTa Konsultan	59.718.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
160				90.217.162,00	72.06/04.0/001830/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	CV Tras Group Permata	90.217.162,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
161				1.050.000,00	72.06/04.0/002368/LS/5.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Husnaeni	1.050.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
162				555.877.635,20	72.06/04.0/002490/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	CV. Morowali Global Perkasa	555.877.635,20	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
163				49.950.000,00	72.06/04.0/000411/LS/2.11.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Dimensi Engineer Consultant	49.950.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
164				9.991.572,00	72.06/04.0/001858/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV Project Inti Sulawesi	9.991.572,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
165				20.235.488,00	72.06/04.0/002481/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT. Abadi Medika Indonesia	20.235.488,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
166				348.730.800,00	72.06/04.0/001812/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV Putra Maleo	348.730.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
167				17.710.000,00	72.06/04.0/000104/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Abidin	17.710.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
168				131.215.000,00	72.06/04.0/001304/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Salabangkapaku	CV. Ardi Karya Mandiri	131.215.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
169				15.120.000,00	72.06/04.0/002479/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Salabangkapaku	Irham, A.Md.Kep	15.120.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
170				8.160.000,00	72.06/04.0/002480/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	Abubakar, Skm.,M.Kes	8.160.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
171				9.955.893,00	72.06/04.0/000371/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Syaban	9.955.893,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
172				69.998.000,00	72.06/04.0/002477/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Arsitama Consultan	69.998.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
173				9.977.425,00	72.06/04.0/001848/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Bumantara Konstruksi	9.977.425,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
174				9.993.214,00	72.06/04.0/001877/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Arnida Prima Konstruksi	9.993.214,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
175				4.874.010,00	72.06/04.0/000637/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Irdawati Sunti	4.874.010,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
176				479.520.000,00	72.06/04.0/000325/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Yudhi Sujono / PT. Rapima Nusa Mandiri	479.520.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177				349.650.000,00	72.06/04.0/001807/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Arsitama Konsultan	349.650.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
178				74.433.058,00	72.06/04.0/001880/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	CV Bimo Mandala Sakti	74.433.058,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
179				19.218.015,00	72.06/04.0/000412/LS/2.11.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Swakelola Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali	19.218.015,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
180				14.994.000,00	72.06/04.0/001814/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Morowali Sukses Berkarya	14.994.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
181				9.655.650,00	72.06/04.0/000604/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Sri Mega Mandiri	9.655.650,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
182				22.339.000,00	72.06/04.0/000602/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rahmawati	22.339.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
183				99.560.488,00	72.06/04.0/001820/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	PT Lumiere Lunar Luxe	99.560.488,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
184				79.135.982,00	72.06/04.0/000318/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Abdul Kadir / CV. Putra Talawe	79.135.982,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
185				151.559.100,00	72.06/04.0/000409/LS/2.11.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Swakelola Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali	151.559.100,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
186				24.500.000,00	72.06/04.0/001851/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	PT. Palindo Inti Nusantara	24.500.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
187				530.580.000,00	72.06/04.0/000324/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Yudhi Sujono / PT. Rapima Nusa Mandiri	530.580.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
188				18.333.300,00	72.06/04.0/001859/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Khiran Karya Mandiri	18.333.300,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
189				114.049.080,00	72.06/04.0/000330/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Ali Sidik / CV. Baim Pratama	114.049.080,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
190				37.429.200,00	72.06/04.0/002495/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Morotama Architect And Partner	37.429.200,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
191				9.985.450,00	72.06/04.0/001881/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Cahaya Makmur Ululere	9.985.450,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
192				9.979.460,00	72.06/04.0/001843/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Amanah Bima Raya	9.979.460,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
193				37.230.262,00	72.06/04.0/000327/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rahmat / CV. Cahaya Makmur Ululere	37.230.262,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
194				9.575.000,00	72.06/04.0/000591/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV Alesha Manaba Group	9.575.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
195				89.502.300,00	72.06/04.0/000594/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV Fonuasingko Mandiri	89.502.300,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
196				22.450.000,00	72.06/04.0/000314/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ir. Helmi, ST / CV. Multikon Plan Enginering Consultant	22.450.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
197				9.994.331,00	72.06/04.0/001818/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV Aira Mitra Perdana	9.994.331,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
198				47.970.000,00	72.06/04.0/001311/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Salabangkapaku	Feri Firmansyah	47.970.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
199				2.100.000,00	72.06/04.0/002478/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ruslan Dg Mananring, S.Kep.,Ns	2.100.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
200				175.362.200,00	72.06/04.0/000600/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PT Dwi Tunggal Nusantara Jaya	175.362.200,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
201				49.920.000,00	72.06/04.0/001875/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CV. Sla Rahayu	49.920.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
202				9.385.000,00	72.06/04.0/000455/LS/4.02.0.00.0.00.01.00 00/PR/12/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rm. Raoda	9.385.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
203				37.462.500,00	72.06/04.0/000593/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Mutiara Duta Plan	37.462.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
204				337.881.572,00	72.06/04.0/001866/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV Buana Artha Graha	337.881.572,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
205				81.810.000,00	72.06/04.0/000317/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	Pahlepi, Sh / CV. Anugerah Perdana	81.810.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
206				7.868.000,00	72.06/04.0/000330/LS/5.01.5.05.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	Ulfia	7.868.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
207				4.872.800,00	72.06/04.0/002494/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Sakita Labua Sejahtera	4.872.800,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
208				37.374.317,00	72.06/04.0/001815/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV Nakatama Karya	37.374.317,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209				1.512.000,00	72.06/04.0/001310/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Aneka Warna	1.512.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
210				49.061.203,00	72.06/04.0/001831/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Rezki Dzahra Mandiri	49.061.203,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
211				5.250.000,00	72.06/04.0/000642/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Cornelia, S.Sos	5.250.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
212				164.353.000,00	72.06/04.0/001305/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV. Putra Maleo	164.353.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
213				7.310.000,00	72.06/04.0/000106/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Abidin	7.310.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
214				17.455.000,00	72.06/04.0/000320/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Ansar Saiunudin, S.Sos / CV. Tujuh Delapan Mandiri	17.455.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
215				19.777.750,00	72.06/04.0/000332/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Asrar Aswad / CV. Bumi Fonuasingko	19.777.750,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
216				133.200.000,00	72.06/04.0/000638/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	I Dewa Made Susanto	133.200.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
217				209.300.000,00	72.06/04.0/001805/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. Multikon Engineering Consultant	209.300.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
218				14.929.500,00	72.06/04.0/002486/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kelurahan Matano	La Ode Rifaldi Agus Saputra	14.929.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
219				9.997.282,00	72.06/04.0/000761/LS/7.01.0.00.0.00.06.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	Nur Alfina	9.997.282,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
220				58.362.750,00	72.06/04.0/000312/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Nur Alfina / CV. Karya Al Hidayah	58.362.750,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
221				372.165.290,00	72.06/04.0/001810/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	CV Bimo Mandala Sakti	372.165.290,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
222				683.238.500,00	72.06/04.0/002493/LS/1.02.2.14.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV. Dua Pandawa	683.238.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
223				83.821.500,00	72.06/04.0/000605/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Bumantara Konstruksi	83.821.500,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
224				44.949.150,00	72.06/04.0/001879/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CV. Eka Jaya Utama	44.949.150,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
225				28.499.400,00	72.06/04.0/000599/LS/1.05.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	Joglo Resto	28.499.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
226				192.585.000,00	72.06/04.0/000373/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Bahtra Selatan	192.585.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
227				263.900.000,00	72.06/04.0/001872/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Buana Artha Graha	263.900.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
228				44.987.400,00	72.06/04.0/001847/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV Morowali Sukses Berkarya	44.987.400,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
229				189.373.193,00	72.06/04.0/000375/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Karya Aisyah	189.373.193,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
230				181.596.000,00	72.06/04.0/000377/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Maritim Fiber Glass	181.596.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
231				10.813.346,00	72.06/04.0/001836/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Khiran Karya Mandiri	10.813.346,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
232				189.833.750,00	72.06/04.0/001871/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	PT. Rizkiy Airama Group	189.833.750,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
233				166.500.000,00	72.06/04.0/000321/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Yudhi Sujono / PT. Rapima Nusa Mandiri	166.500.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
234				19.850.000,00	72.06/04.0/001822/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Labua Makmur Sejahtera	19.850.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
235				7.494.000,00	72.06/04.0/001833/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Cahaya Makmur Ululere	7.494.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
236				12.251.608,00	72.06/04.0/000380/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	CV. Morokarya General Contractor	12.251.608,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
237				19.997.016,00	72.06/04.0/000636/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Wahyuddin	19.997.016,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
238				81.057.600,00	72.06/04.0/001868/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Deux Royal Vidhey	81.057.600,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
239				89.815.143,00	72.06/04.0/001817/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perhubungan Daerah	CV. Amanah Bima Raya	89.815.143,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
240				35.950.000,00	72.06/04.0/000319/LS/2.15.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ir. Helmi, St / CV. Multikon Plan Enginering Consultant	35.950.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026

Lampiran 2

No.	Tgl. R/K	Uraian	Mutasi Debet /Kredit (Rp)	Nilai SP2D /STS (Rp)	No. SP2D	Tgl. SP2D	OPD	Penerima	Kurang /(Lebih) (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241				377.150.000,00	72.06/04.0/001821/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV Labua Makmur Sejahtera	377.150.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
242				384.239.282,00	72.06/04.0/001306/LS/1.01.2.22.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV Dua Putriq	384.239.282,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
243				9.993.950,00	72.06/04.0/001813/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV.Izdihar Bumi Morowali	9.993.950,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
244				74.945.066,00	72.06/04.0/001828/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	PT Lumiere Lunar Luxe	74.945.066,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
245				270.091.234,17	72.06/04.0/000100/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Hasriadi	270.091.234,17	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
246				9.977.384,00	72.06/04.0/000635/LS/2.19.3.26.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Muhamad Muslim	9.977.384,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
247				189.883.359,00	72.06/04.0/001849/LS/1.03.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Dinas Perikanan Daerah	CV. Mefali Moiko	189.883.359,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
248				4.959.951,00	72.06/04.0/000376/LS/3.25.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	CV. Morokarya General Contractor	4.959.951,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
249				19.500.000,00	72.06/04.0/000099/LS/7.01.0.00.0.00.01.00 00/PR/1/2025	31/12/2025	Kecamatan Bahodopi	Satriani	19.500.000,00	SP2D bulan Desember 2025 Outstanding dibulan Januari 2026
250			4.773.202,00						(4.773.202,000)	Kesalahan Debet
251			1.478.718,00						(1.478.718,000)	Kesalahan Debet
252			1.478.718,00						(1.478.718,000)	Kesalahan Debet
253				1.000.000,00					1.000.000,00	Kesalahan Kredit
254				4.710.540,00					4.710.540,00	Kesalahan Kredit
255				4.104.000,00					4.104.000,00	Kesalahan Kredit
256				26.757.150,00					26.757.150,00	Kesalahan Kredit
	JUMLAH								**28.228.014.933,20**	

Daftar Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kas Dana BOS dan BOSP

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas Bank (Rp)	Saldo Awal Kas Tunai (Rp)	Penerimaan				Setoran Tunai Pengembalian Atas Penarikan (Rp)	Jasa Giro (Kredit) (Rp)	Penarikan (Rp)	Pengeluaran						Jasa Giro (Debet) (Rp)	Bunga Bank (Jasa Giro 2024) (Rp)	Pengembalian Sisa Dana (Rp)	Saldo		
											Barang dan Jasa			Belanja Modal								
				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan Kinerja (Rp)	Lainnya (Rp)				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)	Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)				Bank (Rp)	Tunai (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kecamatan Wita Ponda																					
1	TK Negeri 1 Witaponda	-	-	21.000.000,00	-				7.739,00	21.000.000,00	15.020.000,00	-	-	5.980.000,00	-	-	7.739,00	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Witaponda	-	-	13.200.000,00	15.000.000,00				10.595,00	28.200.000,00	13.200.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	10.595,00	-	-	-	-	-
3	TK Negeri 3 Witaponda	-	-	43.200.000,00	15.000.000,00				17.455,00	58.200.000,00	43.200.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	17.455,00	-	-	-	-	-
4	TK Negeri 4 Witaponda	-	8.344,00	12.600.000,00	15.000.000,00				8.718,00	27.600.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	-	2.600.000,00	-	-	8.718,00	-	-	-	8.344,00	8.344,00
5	TK Negeri 5 Witaponda	-	-	30.000.000,00	-				5.827,00	30.000.000,00	19.600.000,00	-	-	10.400.000,00	-	-	5.827,00	-	-	-	-	-
6	TK Negeri 6 Witaponda	-	-	46.200.000,00	15.000.000,00				32.102,00	61.200.000,00	36.750.000,00	15.000.000,00	-	9.450.000,00	-	-	32.102,00	-	-	-	-	-
7	TK Negeri 7 Witaponda	-	-	42.600.000,00	-				6.117,00	42.600.000,00	32.900.000,00	-	-	9.700.000,00	-	-	6.117,00	-	-	-	-	-
8	TK Negeri 8 Witaponda	3.326,00	-	28.800.000,00	-				10.644,00	28.800.000,00	23.884.000,00	-	-	4.916.000,00	-	-	10.644,00	-	3.326,00	-	-	-
9	SD Negeri Sampeantaba	-	-	109.980.000,00	-				77.091,00	109.980.000,00	85.662.000,00	-		24.318.000,00	-		77.091,00			-	-	-
10	SD Negeri 1 Puntari Makmur	-	-	209.620.000,00	-				179.551,00	209.620.000,00	130.261.500,00	-		79.358.500,00	-		179.551,00			-	-	-
11	SD Negeri 2 Puntari Makmur	-	-	139.120.000,00	-				112.277,00	139.120.000,00	115.969.200,00	-		23.150.800,00	-		112.277,00			-	-	-
12	SD Negeri 1 Laantula Jaya	-	-	266.020.000,00	-				169.876,00	266.020.000,00	190.830.000,00	-		75.190.000,00	-		169.876,00			-	-	-
13	SD Negeri 2 Laantula Jaya	-	-	203.040.000,00	22.500.000,00				144.164,00	225.540.000,00	164.316.000,00	22.500.000,00		38.724.000,00	-		144.164,00			-	-	-
14	SD Negeri Moahino	-	72.000,00	251.848.000,00	22.500.000,00				200.086,00	274.348.000,00	184.043.900,00	22.500.000,00		67.876.100,00	-		200.086,00			-	-	-
15	SD Negeri Solonsa	-	-	95.880.000,00	-				13.153,00	95.880.000,00	68.489.000,00	-		27.391.000,00	-		13.153,00			-	-	-
16	SD Negeri Unokaya	-	-	163.560.000,00	-				119.491,00	163.560.000,00	138.604.000,00	-		24.956.000,00	-		119.491,00			-	-	-
17	SD Negeri Emea	-	-	165.440.000,00	-				95.130,00	165.440.000,00	127.775.000,00	-		37.665.000,00	-		95.130,00			-	-	-
18	SD Negeri Bukit Harapan	-	-	149.460.000,00	-				96.524,00	149.460.000,00	112.699.200,00	-		36.760.800,00	-		96.524,00			-	-	-
19	SD Negeri Bumi Harapan	-	-	180.480.000,00	22.500.000,00				132.857,00	202.980.000,00	143.612.000,00	22.500.000,00		36.868.000,00	-		132.857,00			-	-	-
20	SMP Negeri 1 Witaponda	577.000,00	-	490.680.000,00	36.250.000,00				438.184,00	527.507.000,00	388.141.000,00	31.425.000,00		102.539.000,00	4.825.000,00		438.184,00			-	577.000,00	577.000,00
21	SMP Negeri 2 Wita Ponda	-	-	216.920.000,00	35.000.000,00				204.738,00	251.920.000,00	187.298.000,00	35.000.000,00		29.622.000,00	-		204.738,00			-	-	-
22	SMP Negeri 3 Wita Ponda Satu Atap	-	-	78.880.000,00	35.000.000,00				114.328,00	113.880.000,00	70.513.000,00	35.000.000,00		8.367.000,00	-		114.328,00			-	-	-
23	SMP Negeri 4 Witaponda	-	-	157.760.000,00	35.000.000,00				137.514,00	192.760.000,00	132.395.500,00	35.000.000,00		25.364.500,00	-		137.514,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**580.326,00**	**80.344,00**	**3.116.288.000,00**	**268.750.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.334.161,00**	**3.385.615.000,00**	**2.435.163.300,00**	**263.925.000,00**	**-**	**681.196.700,00**	**4.825.000,00**	**-**	**2.334.161,00**	**-**	**3.326,00**	**-**	**585.344,00**	**585.344,00**
	Kecamatan Bumi Raya																					
1	TK Negeri 1 Bumi Raya	-	-	35.400.000,00	15.000.000,00				15.302,00	50.400.000,00	33.150.000,00	15.000.000,00	-	2.250.000,00	-	-	15.302,00	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Bumi Raya	-	-	22.200.000,00	-				10.479,00	22.200.000,00	21.600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	10.479,00	-	-	-	-	-
3	TK Negeri 3 Bumi Raya	-	-	30.600.000,00	-				8.252,00	30.600.000,00	17.379.000,00	-	-	13.221.000,00	-	-	8.252,00	-	-	-	-	-
4	TK Negeri 4 Bumi Raya	2.000,00	-	16.800.000,00	-				3.771,00	16.800.000,00	15.120.000,00	-	-	1.680.000,00	-	-	3.771,00	-	2.000,00	-	-	-
5	TK Negeri 5 Bumi Raya	1.491,00	-	9.000.000,00	-				2.217,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	2.217,00	-	-	1.491,00	-	1.491,00
6	TK Negeri 6 Bumi Raya	-	-	15.600.000,00	-				7.446,00	15.600.000,00	14.740.000,00	-	-	860.000,00	-	-	7.446,00	-	-	-	-	-
7	SD Negeri 1 Bahonsuai	-	-	97.760.000,00	22.500.000,00				77.227,00	120.260.000,00	87.984.000,00	22.500.000,00		9.776.000,00	-		77.227,00			-	-	-
8	SD Negeri 2 Bahonsuai	-	-	212.440.000,00	22.500.000,00				172.980,00	234.940.000,00	168.496.000,00	22.500.000,00		43.944.000,00	-		172.980,00			-	-	-
9	SD Negeri 1 Limbo Makmur	-	-	141.000.000,00	22.500.000,00				150.209,00	163.500.000,00	123.433.000,00	22.500.000,00		17.567.000,00	-		150.209,00			-	-	-
10	SD Negeri 2 Limbo Makmur	-	-	136.300.000,00	-				127.566,00	136.300.000,00	109.670.000,00	-		26.630.000,00	-		127.566,00			-	-	-
11	SD Negeri 1 Beringin Jaya	-	-	109.040.000,00	22.500.000,00				98.104,00	131.540.000,00	84.735.500,00	22.500.000,00		24.304.500,00	-		98.104,00			-	-	-
12	SD Negeri 2 Beringin Jaya	-	-	102.460.000,00	36.250.000,00				121.425,00	138.710.000,00	88.590.000,00	-		13.870.000,00	-		121.425,00			-	36.250.000,00	36.250.000,00
13	SD Negeri Atananga	-	455.000,00	45.120.000,00	22.500.000,00				35.938,00	67.620.000,00	30.693.400,00	22.500.000,00		14.426.600,00	-		35.938,00			-	455.000,00	455.000,00
14	SD Negeri Lambelu	-	-	80.840.000,00	22.500.000,00				86.306,00	103.340.000,00	60.712.000,00	22.500.000,00		20.128.000,00	-		86.306,00			-	-	-
15	SD Negeri Pebatae	-	-	72.380.000,00	-				58.234,00	72.380.000,00	55.436.000,00	-		16.944.000,00	-		58.234,00			-	-	-
16	SD Negeri Pebotoa	-	-	94.940.000,00	-				66.365,00	94.940.000,00	79.519.700,00	-		15.420.300,00	-		66.365,00			-	-	-
17	SDN Samarenda	-	-	100.580.000,00	-				48.427,00	100.580.000,00	78.641.500,00	-		21.938.500,00	-		48.427,00			-	-	-
18	SD Negeri Umbele	-	-	124.080.000,00	-				104.787,00	124.080.000,00	77.913.000,00	-		46.167.000,00	-		104.787,00			-	-	-
19	SMP Negeri 1 Bumi Raya	-	-	222.720.000,00	-				106.140,00	222.720.000,00	195.603.000,00	-		27.117.000,00	-		106.140,00			-	-	-
20	SMP Negeri 2 Bumi Raya	-	-	307.400.000,00	35.000.000,00				144.044,00	342.400.000,00	270.909.300,00	35.000.000,00		36.490.700,00	-		144.044,00			-	-	-
21	SMP Negeri 3 Bumi Rava Satu Atap	-	-	59.160.000,00	-				49.248,00	59.160.000,00	51.884.000,00	-		7.276.000,00	-		49.248,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**3.491,00**	**455.000,00**	**2.035.820.000,00**	**221.250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.494.467,00**	**2.257.070.000,00**	**1.675.209.400,00**	**185.000.000,00**	**-**	**360.610.600,00**	**-**	**-**	**1.494.467,00**	**-**	**2.000,00**	**1.491,00**	**36.705.000,00**	**36.706.491,00**
	Kecamatan Bungku Barat																					
1	TK Negeri 1 Bungku Barat	-	-	47.400.000,00	-				17.282,00	47.400.000,00	32.600.000,00	-	-	14.800.000,00	-	-	17.282,00			-	-	-
2	TK Negeri 2 Bungku Barat	5.000,00	-	10.800.000,00	-				4.460,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	4.460,00			5.000,00	-	5.000,00
3	TK Negeri 3 Bungku Barat	-	-	15.600.000,00	-				1.938,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	1.938,00			-	-	-
4	TK Pembina Tondo	-	-	51.000.000,00	-				13.680,00	51.000.000,00	44.230.000,00	-	-	6.770.000,00	-	-	13.680,00			-	-	-
5	SD Negeri Bahoea Reko Reko	-	-	152.280.000,00	-				86.319,00	152.280.000,00	114.252.000,00	-		38.028.000,00	-		86.319,00			-	-	-
6	SD Negeri 2 Bahoea Reko Reko	-	-	85.540.000,00	-				54.363,00	85.540.000,00	66.964.000,00	-		18.576.000,00	-		54.363,00			-	-	-
7	SD Negeri 3 Bahoea Reko Reko	-	-	26.320.000,00	-				19.872,00	26.320.000,00	23.688.000,00	-		2.632.000,00	-		19.872,00			-	-	-
8	SD Negeri 1 Wosu	-	-	94.940.000,00	22.500.000,00				80.876,00	117.440.000,00	82.146.000,00	22.500.000,00		12.794.000,00	-		80.876,00			-	-	-
9	SD Negeri 2 Wosu	-	-	39.480.000,00	-				35.739,00	39.480.000,00	27.882.000,00	-		11.598.000,00	-		35.739,00			-	-	-
10	SD Negeri Ambunu	-	-	109.040.000,00	-				96.009,00	109.040.000,00	90.714.500,00	-		18.325.500,00	-		96.009,00			-	-	-
11	SD Negeri Folili	825.667,00	-	23.500.000,00	-				36.181,00	23.500.000,00	16.959.000,00	-		6.541.000,00	-		36.181,00			825.667,00	-	825.667,00
12	SD Negeri Larobenu	-	-	134.420.000,00	-				89.792,00	134.420.000,00	115.428.000,00	-		18.992.000,00	-		89.792,00			-	-	-
13	SD Negeri Marga Mulya	-	-	124.080.000,00	-				110.574,00	124.080.000,00	86.672.000,00	-		37.408.000,00	-		110.574,00			-	-	-
14	SD Negeri Tondo	-	-	216.200.000,00	-				168.720,00	216.200.000,00	149.527.250,00	-		66.672.750,00	-		168.720,00			-	-	-
15	SD Negeri Topoqaro	-	-	188.940.000,00	-				101.551,00	188.940.000,00	144.893.200,00	-		44.046.800,00	-		101.551,00			-	-	-
16	SD Negeri Umpanga	-	-	149.460.000,00	-				125.663,00	149.460.000,00	106.255.000,00	-		43.204.000,00	-		125.663,00			-	-	-
17	SD Negeri 2 Umpanga	-	-	31.960.000,00	-				25.283,00	31.960.000,00	21.825.800,00	-		10.134.200,00	-		25.283,00			-	-	-
18	SD Negeri Wata	-	-	101.520.000,00	-				68.666,00	101.520.000,00	56.140.000,00	-		45.380.000,00	-		68.666,00			-	-	-
19	SMP Negeri 1 Bungku Barat	-	10.000,00	113.680.000,00	-				82.104,00	113.680.000,00	92.811.500,00	-		20.868.500,00	-		82.104,00			-	10.000,00	10.000,00
20	SMP Negeri 2 Bungku Barat	-	-	213.440.000,00	-				169.422,00	213.440.000,00	150.952.200,00	-		62.487.800,00	-		169.422,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**830.667,00**	**10.000,00**	**1.929.600.000,00**	**22.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.388.494,00**	**1.952.100.000,00**	**1.450.341.450,00**	**22.500.000,00**	**-**	**479.258.550,00**	**-**	**-**	**1.388.494,00**	**-**	**-**	**830.667,00**	**10.000,00**	**840.667,00**
	Kecamatan Bungku Tengah																					
1	TK Negeri 1 Bungku Tengah	196.000,00	208.183,00	39.000.000,00	-				8.704,00	39.000.000,00	34.890.000,00	-	-	4.110.000,00	-	-	8.704,00			196.000,00	208.183,00	404.183,00
2	TK Negeri 2 Bungku Tengah	-	-	36.600.000,00	-				7.459,00	36.600.000,00	34.500.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	7.459,00			-	-	-
3	TK Negeri 3 Bungku Tengah	-	-	8.400.000,00	-				1.180,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-	-	1.180,00			-	-	-
4	TK Negeri 4 Bungku Tengah	6.022,00	-	14.400.000,00	-				10.800,00	14.400.000,00	7.575.000,00	-	-	6.825.000,00	-	-	10.800,00			6.022,00	-	6.022,00
5	TK Negeri 5 Bungku Tengah	13.962,00	-	48.000.000,00	-				7.254,00	48.000.000,00	43.150.000,00	-	-	4.850.000,00	-	-	-			21.216,00	-	21.216,00
6	Sanggar Kegiatan Belajar Morowali	-	30.384,00	12.000.000,00	-	114.600.000,00			22.395,00	126.600.000,00	9.350.000,00	-	95.460.000,00	2.650.000,00	-	19.140.000,00	22.395,00			-	30.384,00	30.384,00
7	SD Negeri 1 Bungku	152.718,00	-	188.000.000,00	-				121.201,00	188.075.366,00	148.616.000,00	-		39.384.000,00	-		121.201,00			77.352,00	75.366,00	152.718,00
8	SD Negeri 2 Bungku	-	-	201.160.000,00	-				140.319,00	201.160.000,00	155.033.200,00	-		46.126.800,00	-		140.319,00			-	-	-
9	SD Negeri 3 Bungku	-	-	94.000.000,00	-				62.785,00	94.000.000,00	77.067.100,00	-		16.932.900,00	-		62.785,00			-	-	-
10	SD Negeri 1 Bahomoleo/ (SDN 4 Bungku)	-	-	226.540.000,00	-				159.401,00	226.540.000,00	186.278.900,00	-		40.261.100,00	-		159.401,00			-	-	-
11	SD Negeri Puunokoilu (SDN 5 Bungku)	-	-	82.720.000,00	-				65.357,00	82.720.000,00	62.660.000,00	-		20.060.000,00	-		65.357,00			-	-	-
12	SD Negeri Bahoruru (SDN 6 Bungku)	-	-	276.360.000,00	22.500.000,00				221.195,00	298.860.000,00	231.774.000,00	22.500.000,00		44.586.000,00	-		221.195,00			-	-	-
13	SD Negeri Sakita (SDN 7 Bungku)	62.694,00	-	72.380.000,00	-				50.304,00	72.380.000,00	49.392.000,00	-		22.988.000,00	-		50.304,00			62.694,00	-	62.694,00
14	SD Negeri Bente (SDN 8 Bungku)	-	-	340.280.000,00	22.500.000,00				220.682,00	362.780.000,00	289.335.200,00	22.500.000,00		50.944.800,00	-		220.682,00			-	-	-
15	SD Negeri Bahomante (SDN 9 Bungku)	-	-	170.140.000,00	22.500.000,00				107.426,00	192.640.000,00	109.404.000,00	22.500.000,00		60.736.000,00	-		107.426,00			-	-	-
16	SD Negeri Matansala (SDN 10 Bungku)	-	-	139.120.000,00	22.500.000,00				151.681,00	161.620.000,00	115.196.000,00	22.500.000,00		23.924.000,00	-		151.681,00			-	-	-
17	SD Negeri 1 Lanona / SDN 11 Bungku	-	-	58.280.000,00	-				42.398,00	58.280.000,00	51.644.300,00	-		6.635.700,00	-		42.398,00			-	-	-
18	SD Negeri Bahontobunuku (SDN 12 Bungku)	147.186,00	-	93.060.000,00	-				67.175,00	93.060.000,00	62.528.000,00	-		30.532.000,00	-		67.175,00			147.186,00	-	147.186,00
19	SD Negeri 2 Bahomoleo / SDN 13 Bungku	314,00	-	52.640.000,00	-				39.600,00	52.640.000,00	46.596.900,00	-		6.043.100,00	-		39.600,00			314,00	-	314,00
20	SD Negeri 14 Lamberea	127.963,00	-	63.920.000,00	-				43.940,00	63.920.000,00	48.454.000,00	-		15.466.000,00	-		43.940,00			127.963,00	-	127.963,00
21	SD Negeri 2 Lanona (SDN 15 Bungku)	-	-	105.280.000,00	-				115.787,00	105.280.000,00	75.913.000,00	-		29.367.000,00	-		115.787,00			-	-	-
22	SD Negeri Ipi (SDN 16 Bungku)	-	-	-	-				-	-	-	-		-	-		-			-	-	-
23	SDN 17 Bungku (Tudua)	-	-	72.380.000,00	-				51.876,00	72.380.000,00	54.742.000,00	-		17.638.000,00	-		51.876,00			-	-	-
24	SD Negeri 18 Bungku (Bungi)	-	-	173.900.000,00	-				149.992,00	173.900.000,00	129.173.800,00	-		44.726.200,00	-		149.992,00			-	-	-
25	SD Negeri 19 Bungku (Bente)	-	87.762,00	121.260.000,00	-				81.255,00	121.260.000,00	102.247.300,00	-		19.012.700,00	-		81.255,00			-	87.762,00	87.762,00
26	SD Negeri 20 Bungku			16.920.000,00	-				5.382,00	16.924.232,00	12.473.000,00	-		4.447.000,00	-		-			1.150,00	4.232,00	5.382,00
27	SMP Negeri 1 Bungku	-	-	519.680.000,00	35.000.000,00				428.365,00	554.680.000,00	430.205.800,00	35.000.000,00		89.474.200,00	-		428.365,00			-	-	-
28	SMP Negeri 2 Bungku	129.222,00	-	452.400.000,00	-				195.127,00	452.400.000,00	350.034.000,00	-		102.366.000,00	-		195.127,00			129.222,00	-	129.222,00
29	SMP Negeri 3 Bungku	-	-	243.600.000,00	-				159.413,00	243.600.000,00	184.573.700,00	-		59.026.300,00	-		159.413,00			-	-	-

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas Bank (Rp)	Saldo Awal Kas Tunai (Rp)	Penerimaan				Setoran Tunai Pengembalian Atas Penarikan (Rp)	Jasa Giro (Kredit) (Rp)	Penarikan (Rp)	Pengeluaran						Jasa Giro (Debet) (Rp)	Bunga Bank (Jasa Giro 2024) (Rp)	Pengembalian Sisa Dana (Rp)	Saldo		
											Barang dan Jasa			Belanja Modal								
				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan Kinerja (Rp)	Lainnya (Rp)				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)	Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)				Bank (Rp)	Tunai (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30	SMP Negeri 4 Bungku	-	-	196.040.000,00	35.000.000,00				172.586,00	231.040.000,00	161.790.800,00	35.000.000,00		34.249.200,00	-		172.586,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**836.081,00**	**326.329,00**	**4.118.460.000,00**	**160.000.000,00**	**114.600.000,00**	**-**	**-**	**2.911.039,00**	**4.393.139.598,00**	**3.272.998.000,00**	**160.000.000,00**	**95.460.000,00**	**845.462.000,00**	**-**	**19.140.000,00**	**2.898.403,00**	**-**	**-**	**769.119,00**	**405.927,00**	**1.175.046,00**
	Kecamatan Bungku Timur																					-
1	TK Negeri Bahomotefe	-	5.588,00	60.000.000,00	-				9.905,00	60.000.000,00	51.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	9.905,00			-	5.588,00	5.588,00
2	SD Negeri Bahomoahi	-	-	125.960.000,00	-				124.095,00	125.960.000,00	98.364.000,00	-		27.596.000,00	-		124.095,00			-	-	-
3	SD Negeri Bahomotefe	-	-	164.500.000,00	22.500.000,00				153.208,00	187.000.000,00	114.953.350,00	22.500.000,00		49.546.650,00	-		153.208,00			-	-	-
4	SD Negeri 2 Bahomotefe	-	-	90.240.000,00	-				73.853,00	90.240.000,00	56.312.400,00	-		33.927.600,00	-		73.853,00			-	-	-
5	SD Negeri Geresa	-	-	85.540.000,00	22.500.000,00				63.378,00	108.040.000,00	49.836.000,00	22.500.000,00		35.704.000,00	-		63.378,00			-	-	-
6	SD Negeri Kolono	-	-	199.280.000,00	22.500.000,00				161.513,00	221.780.000,00	172.953.200,00	22.500.000,00		26.326.800,00	-		161.513,00			-	-	-
7	SD Negeri Lahuafu	-	-	101.520.000,00	22.500.000,00				74.614,00	124.020.000,00	86.108.000,00	22.500.000,00		15.412.000,00	-		74.614,00			-	-	-
8	SD Negeri Laroue	-	-	131.600.000,00	-				83.928,00	131.600.000,00	94.750.000,00	-		36.850.000,00	-		83.928,00			-	-	-
9	SD Negeri Nambo	-	1.947,00	112.800.000,00	-				49.749,00	112.800.000,00	64.530.000,00	-		48.270.000,00	-		49.749,00			-	1.947,00	1.947,00
10	SD Negeri 1 Onepute Jaya	-	-	180.480.000,00	-				171.418,00	180.480.000,00	91.102.900,00	-		89.377.100,00	-		171.418,00			-	-	-
11	SD Negeri 2 Onepute Jaya	-	-	56.400.000,00	-				19.434,00	56.400.000,00	50.044.900,00	-		6.355.100,00	-		19.434,00			-	-	-
12	SD Negeri Ululere	-	-	97.760.000,00	-				93.263,00	97.760.000,00	72.231.400,00	-		25.528.600,00	-		93.263,00			-	-	-
13	SD Negeri Unsongi	-	-	78.020.000,00	22.500.000,00				56.853,00	100.520.000,00	51.615.500,00	22.500.000,00		26.404.500,00	-		56.853,00			-	-	-
14	SMP Negeri 1 Bungku Timur	-	-	284.200.000,00	-				189.100,00	284.200.000,00	246.940.000,00	-		37.260.000,00	-		189.100,00			-	-	-
15	SMP Negeri 2 Bungku Timur	299.648,00	1.924.099,00	77.720.000,00	35.000.000,00				45.684,00	113.058.000,00	69.948.000,00	35.000.000,00		7.772.000,00	-		-			7.332,00	2.262.099,00	2.269.431,00
16	SMP Negeri 3 Bungku Timur	-	-	212.280.000,00	35.000.000,00				221.363,00	247.280.000,00	175.672.450,00	35.000.000,00		36.607.550,00	-		221.363,00			-	-	-
17	SMP Negeri 4 Bungku Timur Satu Atap	-	-	140.360.000,00	-				101.767,00	140.360.000,00	96.075.100,00	-		44.284.900,00	-		101.767,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**299.648,00**	**1.931.634,00**	**2.198.660.000,00**	**182.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.693.125,00**	**2.381.498.000,00**	**1.642.437.200,00**	**182.500.000,00**	**-**	**556.222.800,00**	**-**	**-**	**1.647.441,00**	**-**	**-**	**7.332,00**	**2.269.634,00**	**2.276.966,00**
	Kecamatan Bahodopi																					-
1	TK Negeri 1 Bahodopi	-	-	121.200.000,00	15.000.000,00				44.897,00	136.200.000,00	98.150.000,00	15.000.000,00	-	23.050.000,00	-	-	44.897,00			-	-	-
2	TK Negeri 2 Bahodopi	-	-	61.800.000,00	-				16.747,00	61.800.000,00	50.270.000,00	-	-	11.530.000,00	-	-	16.747,00			-	-	-
3	TK Negeri 3 Bahodopi	-	16.000,00	60.000.000,00	-				28.949,00	60.000.000,00	58.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	28.949,00			-	16.000,00	16.000,00
4	TK Negeri 4 Bahodopi	-	-	88.800.000,00	-				35.611,00	88.800.000,00	57.667.000,00	-	-	31.133.000,00	-	-	35.611,00			-	-	-
5	SD Negeri 1 Bahomakmur	-	-	785.840.000,00	-				583.295,00	785.840.000,00	598.433.600,00	-		187.406.400,00	-		583.295,00	-		-	-	-
6	SD Negeri 2 Bahomakmur	-	-	447.440.000,00	-				339.024,00	447.440.000,00	309.556.800,00	-		137.883.200,00	-		339.024,00	-		-	-	-
7	SD Negeri 3 Bahomakmur	-	63.875,00	366.600.000,00	-				240.317,00	366.600.000,00	275.950.730,00	-		90.649.270,00	-		240.317,00	-		-	63.875,00	63.875,00
8	SD Negeri Padabaho	-	-	247.220.000,00	-				224.764,00	247.220.000,00	187.600.000,00	-		59.620.000,00	-		224.764,00	-		-	-	-
9	SD Negeri 1 Bahodopi	1.100,00	-	714.400.000,00	22.500.000,00				514.618,00	736.901.100,00	584.473.000,00	22.500.000,00		129.927.000,00	-		514.618,00	-		-	1.100,00	1.100,00
10	SD Negeri 2 Bahodopi	-	-	500.080.000,00	-				282.220,00	500.080.000,00	384.674.070,00	-		115.405.930,00	-		282.220,00	-		-	-	-
11	SD Negeri 3 Bahodopi	-	-	147.580.000,00	-				125.812,00	147.580.000,00	96.987.361,00	-		50.592.639,00	-		125.812,00	-		-	-	-
12	SD Negeri 4 Bahodopi	30.543,00	-	288.580.000,00	22.500.000,00				149.748,00	311.080.000,00	197.556.000,00	22.500.000,00		91.024.000,00	-		149.748,00	30.543,00		-	-	-
13	SD Negeri 5 Bahodopi	-	-	138.180.000,00	22.500.000,00				102.762,00	160.680.000,00	86.050.000,00	22.500.000,00		52.130.000,00	-		102.762,00	-		-	-	-
14	SD Negeri Dampala	-	-	311.140.000,00	-				185.250,00	311.140.000,00	193.612.400,00	-		117.527.600,00	-		185.250,00	-		-	-	-
15	SD Negeri Fatufia	-	-	559.300.000,00	-				219.076,00	559.300.000,00	326.220.000,00	-		233.080.000,00	-		219.076,00	-		-	-	-
16	SD Negeri Keurea	-	-	380.700.000,00	22.500.000,00				224.757,00	403.200.000,00	317.689.800,00	22.500.000,00		63.010.200,00	-		224.757,00	-		-	-	-
17	SD Negeri Kurisa	-	-	217.140.000,00	-				146.451,00	217.140.000,00	157.311.130,00	-		59.823.870,00	-		146.451,00	-		-	5.000,00	5.000,00
18	SD Negeri Labota	-	-	366.600.000,00	-			63.732.000,00	269.147,00	430.332.000,00	251.209.000,00	-		115.391.000,00	-		269.147,00	-		-	-	-
19	SD Negeri Lalampu	-	-	569.640.000,00	22.500.000,00				602.905,00	592.140.000,00	421.031.000,00	22.500.000,00		148.609.000,00	-		602.905,00	-		-	-	-
20	SD Negeri Lereea	-	53.186,00	27.260.000,00	-				7.301,00	27.260.000,00	21.002.000,00	-		6.258.000,00	-		7.301,00	601,00		-	52.585,00	52.585,00
21	SD Negeri Siumbatu	-	-	216.200.000,00	-				186.011,00	216.200.000,00	146.262.000,00	-		69.938.000,00	-		186.011,00	-		-	-	-
22	SD Negeri Bete Bete	-	241.452,00	156.980.000,00	-				110.080,00	156.980.000,00	110.715.000,00	-		46.265.000,00	-		110.080,00	-		-	241.452,00	241.452,00
23	SD Negeri Makarti Jaya	5.066,00	-	566.820.000,00	-				408.317,00	566.820.000,00	436.408.000,00	-		130.412.000,00	-		408.317,00	5.066,00		-	-	-
24	SMP Negeri 1 Bahodopi	-	-	592.760.000,00	-				420.632,00	592.760.000,00	483.066.000,00	-		109.694.000,00	-		420.632,00	-		-	-	-
25	SMP Negeri 2 Bahodopi	-	150.000,00	145.000.000,00	-				103.617,00	145.000.000,00	109.777.500,00	-		35.222.500,00	-		103.617,00	-		-	150.000,00	150.000,00
26	SMP Negeri 3 Bahodopi Satu Atap	-	23.603,00	183.280.000,00	-				83.332,00	183.280.000,00	133.952.000,00	-		49.328.000,00	-		83.332,00	-		-	23.603,00	23.603,00
27	SMP Negeri 4 Bahodopi	-	-	498.800.000,00	-				282.864,00	498.800.000,00	381.094.600,00	-		117.705.400,00	-		282.864,00	-		-	-	-
	Sub Jumlah	**36.709,00**	**548.116,00**	**8.759.340.000,00**	**127.500.000,00**	**-**	**-**	**63.732.000,00**	**5.938.504,00**	**8.950.573.100,00**	**6.475.218.991,00**	**127.500.000,00**	**-**	**2.284.116.009,00**	**-**	**-**	**5.938.504,00**	**36.210,00**	**-**	**-**	**553.615,00**	**553.615,00**
	Kecamatan Bungku Pesisir																					-
1	TK Negeri 1 Bungku Pesisir	-	-	24.000.000,00	-				8.035,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	8.035,00			-	-	-
2	TK Negeri 2 Bunoku Pesisir	-	-	26.400.000,00	-				5.346,00	26.400.000,00	21.400.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.346,00			-	-	-
3	SD Negeri 1 Lafeu	-	-	69.560.000,00	-		-		44.643,00	69.560.000,00	35.360.000,00	-		34.200.000,00	-		44.643,00			-	-	-
4	SD Negeri 2 Lafeu	-	-	109.040.000,00	-		-		66.649,00	109.040.000,00	83.457.000,00	-		25.583.000,00	-		66.649,00			-	-	-
5	SD Negeri Trans Buleleng	-	-	29.140.000,00	22.500.000,00		-		33.247,00	51.640.000,00	21.660.000,00	22.500.000,00		7.480.000,00	-		33.247,00			-	-	-
6	SD Negeri Trans 1 Buleleng	-	-	40.420.000,00	-		-		22.511,00	40.420.000,00	35.970.000,00	-		4.450.000,00	-		22.511,00			-	-	-
7	SD Negeri Buleleng	-	-	94.940.000,00	-		6.580.000,00		79.890,00	101.520.000,00	75.381.000,00	-		19.559.000,00	-		79.890,00			-	6.580.000,00	6.580.000,00
8	SD Negeri Puunoleu	-	-	67.740.000,00	-		-		41.752,00	67.740.000,00	47.920.000,00	-		19.820.000,00	-		41.752,00			-	-	-
9	SD Negeri Laroenai	-	-	109.040.000,00	-		-		47.408,00	109.040.000,00	74.971.000,00	-		34.069.000,00	-		47.408,00			-	-	-
10	SD Negeri Sambalagi	-	-	54.520.000,00	-		-		45.445,00	54.520.000,00	30.102.000,00	-		24.418.000,00	-		45.445,00			-	-	-
11	SD Negeri Tangofa	0,08	-	171.080.000,00	-		-		104.983,00	171.080.000,00	138.743.700,00	-		32.336.300,00	-		104.983,00			0,08	-	0,08
12	SD Negeri Torete	-	-	92.120.000,00	-		-		35.028,00	92.120.000,00	76.158.000,00	-		15.962.000,00	-		35.028,00			-	-	-
13	SD Negeri Were'A	-	-	31.960.000,00	-		-		29.224,00	31.960.000,00	18.180.000,00	-		13.780.000,00	-		29.224,00			-	-	-
14	SD Negeri Tandaoleo	-	-	50.760.000,00	-		-		39.476,00	50.760.000,00	38.989.800,00	-		11.770.200,00	-		39.476,00			-	-	-
15	SMP Negeri 1 Bungku Pesisir	-	-	196.040.000,00	35.000.000,00		-		134.213,00	231.040.000,00	134.624.600,00	35.000.000,00		61.415.400,00	-		134.213,00			-	-	-
16	SMP Negeri 2 Bungku Pesisir Satu Atap	-	-	99.760.000,00	35.000.000,00		-		90.747,00	134.760.000,00	79.487.700,00	35.000.000,00		20.272.300,00	-		90.747,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**0,08**	**-**	**1.266.520.000,00**	**92.500.000,00**	**-**	**6.580.000,00**	**-**	**828.597,00**	**1.365.600.000,00**	**936.404.800,00**	**92.500.000,00**	**-**	**330.115.200,00**	**-**	**-**	**828.597,00**	**-**	**-**	**0,08**	**6.580.000,00**	**6.580.000,08**
	Kecamatan Bunoku Selatan																					-
1	TK Negeri 1 Bunoku Selatan (TK Negeri Kaleroang)	331.974,00	-	27.600.000,00	-				14.220,00	27.600.000,00	21.100.000,00	-	-	6.500.000,00	-	-	14.220,00	-	318.000,00	13.974,00	-	13.974,00
2	TK Negeri 2 Bunoku Selatan	5.407.738,00	-	23.343.600,00	-				24.474,00	23.820.000,00	13.142.000,00	-	-	10.200.000,00	-	-	24.474,00	-	-	4.931.338,00	478.000,00	5.409.338,00
3	SD Negeri Bungintende	-	-	77.901.000,00	-				62.196,00	77.901.000,00	58.231.500,00	-		19.669.500,00	-		62.196,00			-	-	-
4	SD Negeri Padabale	-	19.549,00	13.160.000,00	-				6.840,00	13.160.000,00	11.844.000,00	-		1.316.000,00	-		6.840,00			-	19.549,00	19.549,00
5	SD Negeri Pado-Pado	-	-	67.740.000,00	22.500.000,00				54.974,00	90.240.000,00	52.766.000,00	22.500.000,00		14.974.000,00	-		54.974,00			-	-	-
6	SD Negeri Buaianoka	-	-	75.643.000,00	-				63.549,00	75.643.000,00	62.078.700,00	-		13.564.300,00	-		63.549,00			-	-	-
7	SD Negeri Umbele	-	71.707,00	194.188.000,00	22.500.000,00				167.604,00	216.688.000,00	151.555.000,00	22.500.000,00		42.633.000,00	-		167.604,00			-	71.707,00	71.707,00
8	SD Negeri Bakala	-	-	129.835.000,00	-				84.886,00	129.835.000,00	103.825.800,00	-		26.009.200,00	-		84.886,00			-	-	-
9	SD Negeri Boelimau	-	-	104.997.000,00	-				87.157,00	104.997.000,00	55.642.000,00	-		49.355.000,00	-		87.157,00			-	-	-
10	SD Negeri Bunginokela	19.581,00	-	82.417.000,00	-				53.516,00	82.417.000,00	60.964.700,00	-		21.452.300,00	-		53.516,00			19.581,00	-	19.581,00
11	SD Negeri Gusumotaha	-	-	103.868.000,00	-				72.463,00	103.868.000,00	80.535.000,00	-		23.333.000,00	-		72.463,00			-	-	-
12	SD Negeri Jawi - Jawi	-	37.160,00	46.060.000,00	-				33.012,00	46.060.000,00	39.739.500,00	-		6.320.500,00	-		33.012,00			-	37.160,00	37.160,00
13	SD Negeri Kaleroang	-	-	155.100.000,00	22.500.000,00				106.236,00	177.600.000,00	99.050.000,00	22.500.000,00		56.050.000,00	-		106.236,00			-	-	-
14	SD Negeri Lakombulo	39.994,00	-	41.360.000,00	-				38.059,00	41.360.000,00	37.186.900,00	-		4.173.100,00	-		38.059,00			39.994,00	-	39.994,00
15	SD Negeri 1 Lemo	-	-	70.500.000,00	22.500.000,00				64.652,00	93.000.000,00	61.600.000,00	22.500.000,00		8.900.000,00	-		64.652,00			-	-	-
16	SD Negeri Paku	-	-	97.094.000,00	-				84.854,00	97.094.000,00	73.768.450,00	-		23.325.550,00	-		84.854,00			-	-	-
17	SD Negeri Panimbawang	601,00	-	91.449.000,00	-				64.809,00	91.449.000,00	72.226.600,00	-		19.222.400,00	-		64.809,00			601,00	-	601,00
18	SD Negeri Polewali	-	-	67.740.000,00	-				42.212,00	67.740.000,00	44.236.700,00	-		23.503.300,00	-		42.212,00			-	-	-
19	SD Negeri Poo	-	-	36.660.000,00	-				31.400,00	36.660.000,00	32.999.300,00	-		3.660.700,00	-		31.400,00			-	-	-
20	SD Negeri Powaru	31.047,00	-	30.080.000,00	-				13.905,00	30.080.000,00	27.046.700,00	-		3.033.300,00	-		13.905,00			31.047,00	-	31.047,00
21	SD Negeri Pulau Bapa	12.352,00	-	67.740.000,00	22.500.000,00				73.684,00	90.240.000,00	42.666.000,00	22.500.000,00		25.074.000,00	-		73.684,00			12.352,00	-	12.352,00
22	SD Negeri Sainoa	95.155,00	-	144.512.000,00	-				100.380,00	144.607.155,00	110.252.000,00	-		34.260.000,00	-		100.380,00			-	95.155,00	95.155,00
23	SMP Negeri 1 Bungku Selatan	-	-	255.200.000,00	-				180.342,00	255.200.000,00	212.646.000,00	-		42.554.000,00	-		180.342,00			-	-	-
24	SMP Negeri 2 Bungku Selatan	-	-	206.164.000,00	-				134.070,00	206.164.000,00	166.305.150,00	-		39.858.850,00	-		134.070,00			-	-	-
25	SMP Negeri 4 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	86.366.000,00	-				44.223,00	86.366.000,00	64.475.600,00	-		21.890.400,00	-		44.223,00			-	-	-
26	SMP Negeri 5 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	101.689.000,00	35.000.000,00				87.067,00	136.689.000,00	88.211.200,00	35.000.000,00		13.477.800,00	-		87.067,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**5.938.442,00**	**128.416,00**	**2.398.406.600,00**	**147.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.790.784,00**	**2.546.478.155,00**	**1.844.094.800,00**	**147.500.000,00**	**-**	**554.310.200,00**	**-**	**-**	**1.790.784,00**	**-**	**318.000,00**	**5.048.887,00**	**701.571,00**	**5.750.458,00**
	Kecamatan Menui Kepulauan																					-
1	TK Negeri 1 Menui Kepulauan	300.830,00	5.000,00	15.404.000,00	-				2.216,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	2.216,00	-	-	104.830,00	5.000,00	109.830,00
2	TK Negeri 2 Menui Kepulauan	114.820,00	-	41.288.000,00	-				18.136,00	41.288.000,00	25.982.800,00	-	-	15.305.200,00	-	-	18.136,00	114.820,00	-	-	-	-
3	TK Negeri 3 Menui Kepulauan	125.665,00	-	7.683.000,00	-				804,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	804,00	-	-	8.665,00	-	8.665,00
4	SD Negeri 1 Ulunambo	-	-	50.760.000,00	-		-		28.916,00	50.760.000,00	45.375.000,00	-		5.385.000,00	-		28.916,00			-	-	-
5	SD Negeri 2 Ulunambo	-	-	53.580.000,00	-		-		32.020,00	53.580.000,00	39.222.000,00	-		14.358.000,00	-		32.020,00			-	-	-
6	SD Negeri 3 Ulunambo	-	-	51.700.000,00	-		-		24.592,00	51.700.000,00	42.118.300,00	-		9.581.700,00	-		24.592,00			-	-	-

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas Bank (Rp)	Saldo Awal Kas Tunai (Rp)	Penerimaan				Setoran Tunai Pengembalian Atas Penarikan (Rp)	Jasa Giro (Kredit) (Rp)	Penarikan (Rp)	Pengeluaran						Jasa Giro (Debet) (Rp)	Bunga Bank (Jasa Giro 2024) (Rp)	Pengembalian Sisa Dana (Rp)	Saldo		
											Barang dan Jasa			Belanja Modal								
				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan Kinerja (Rp)	Lainnya (Rp)				Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)	Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Kesetaraan (Rp)				Bank (Rp)	Tunai (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	SD Negeri Buranga	-	-	38.540.000,00	-		-		10.761,00	38.540.000,00	26.250.000,00	-		12.290.000,00	-		10.761,00			-	-	-
8	SD Negeri Kofalagadi	-	-	58.280.000,00	22.500.000,00		-		56.604,00	80.780.000,00	39.573.250,00	22.500.000,00		18.706.750,00	-		56.604,00			-	-	-
9	SD Negeri Morompaitonga	55.000,00	-	53.525.000,00	-		2.480.000,00		54.129,00	56.060.000,00	29.235.000,00	-		24.345.000,00	-		54.129,00			-	2.480.000,00	2.480.000,00
10	SD Negeri Noapaea	-	-	23.500.000,00	-		-		7.296,00	23.500.000,00	21.150.000,00	-		2.350.000,00	-		7.296,00			-	-	-
11	SD Negeri Padalaa	16.258,00	-	34.780.000,00	22.500.000,00		-		23.836,00	57.280.000,00	19.677.000,00	22.500.000,00		15.103.000,00	-		23.836,00			16.258,00	-	16.258,00
12	SD Negeri Padei Darat	-	-	84.675.000,00	-		-		18.582,00	84.675.000,00	62.086.500,00	-		22.588.500,00	-		18.582,00			-	-	-
13	SD Negeri Padei Laut	-	-	106.126.000,00	-		-		59.184,00	106.126.000,00	85.837.500,00	-		20.288.500,00	-		59.184,00			-	-	-
14	SD Negeri Samarenggа	-	-	116.287.000,00	-		-		55.708,00	116.287.000,00	95.762.300,00	-		20.524.700,00	-		55.708,00			-	-	-
15	SD Negeri Ulumpa	-	38.501,00	64.860.000,00	-		-		38.270,00	64.860.000,00	54.192.000,00	-		10.668.000,00	-		38.270,00			-	38.501,00	38.501,00
16	SD Negeri Torukuno	-	-	65.800.000,00	-		-		42.660,00	65.800.000,00	50.340.000,00	-		15.460.000,00	-		42.660,00			-	-	-
17	SD Negeri Terebino	-	-	66.740.000,00	-		-		55.626,00	66.740.000,00	55.583.700,00	-		11.156.300,00	-		55.626,00			-	-	-
18	SMP Negeri 1 Menui	840,00	-	185.600.000,00	-		-		118.364,00	185.600.000,00	154.330.000,00	-		31.270.000,00	-		118.364,00			840,00	-	840,00
19	SMP Negeri 2 Menui	-	-	100.920.000,00	-		-		68.724,00	100.920.000,00	82.909.000,00	-		18.011.000,00	-		68.724,00			-	-	-
20	SMP Negeri 4 Menui Satu Atap	-	59.117,00	83.580.000,00	-		-		45.173,00	83.580.000,00	68.549.000,00	-		15.031.000,00	-		45.173,00			-	59.117,00	59.117,00
21	SMP Negeri 5 Menui Satu Atap	-	-	83.580.000,00	-		-		33.545,00	83.580.000,00	64.625.000,00	-		18.955.000,00	-		33.545,00			-	-	-
22	SMP Negeri 6 Menui Satu Atap	-	-	40.600.000,00	-		-		23.643,00	40.600.000,00	32.840.000,00	-		7.760.000,00	-		23.643,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**613.413,00**	**102.618,00**	**1.427.808.000,00**	**45.000.000,00**	**-**	**2.480.000,00**	**-**	**818.789,00**	**1.475.656.000,00**	**1.119.038.350,00**	**45.000.000,00**	**-**	**309.137.650,00**	**-**	**-**	**818.789,00**	**114.820,00**	**-**	**130.593,00**	**2.582.618,00**	**2.713.211,00**
	Kecamatan Sombori Kepulauan																					
1	SD Negeri Donokalan	-	118.787,00	76.772.000,00	-		-		35.910,00	76.772.000,00	68.295.000,00	-		8.477.000,00	-		35.910,00			-	118.787,00	118.787,00
2	SD Negeri Lalemo	-	-	67.740.000,00	22.500.000,00		-		54.457,00	90.240.000,00	52.449.000,00	22.500.000,00		15.291.000,00	-		54.457,00			-	-	-
3	SD Negeri Lamontoli	-	-	67.740.000,00	-		-		19.092,00	67.740.000,00	52.440.000,00	-		15.300.000,00	-		19.092,00			-	-	-
4	SD Negeri Lombokita	-	-	67.740.000,00	-		3.000.000,00		17.466,00	70.740.000,00	53.418.000,00	-		14.322.000,00	-		17.466,00			-	3.000.000,00	3.000.000,00
5	SD Negeri Masadian	-	9.000.000,00	198.704.000,00	22.500.000,00		-		96.332,00	221.204.000,00	146.333.100,00	22.500.000,00		52.370.900,00	-		96.332,00			-	9.000.000,00	9.000.000,00
6	SD Negeri Matano	-	-	67.740.000,00	-		-		11.501,00	67.740.000,00	54.526.000,00	-		13.214.000,00	-		11.501,00			-	-	-
7	SD Negeri Matarape	503.615,00	-	67.740.000,00	-		-		36.690,00	68.243.615,00	60.090.000,00	-		7.650.000,00	-		36.690,00			-	503.615,00	503.615,00
8	SD Negeri Pulau Dua Darat	-	-	67.740.000,00	22.500.000,00		-		55.579,00	90.240.000,00	55.950.000,00	22.500.000,00		11.790.000,00	-		55.579,00			-	-	-
9	SD Negeri Pulau Tengah	-	-	67.740.000,00	-		-		12.985,00	67.740.000,00	60.966.000,00	-		6.774.000,00	-		12.985,00			-	-	-
10	SD Negeri Pulau Tiga	-	40.000,00	116.287.000,00	-		-		52.233,00	116.287.000,00	88.484.800,00	-		27.802.200,00	-		52.233,00			-	40.000,00	40.000,00
11	SD Negeri Tanjung Harapan	-	-	67.740.000,00	22.500.000,00		-		26.595,00	90.240.000,00	58.866.000,00	22.500.000,00		8.874.000,00	-		26.595,00			-	-	-
12	SDN Tanjung Tiram	193.287,00	-	67.740.000,00	-		-		48.629,00	67.740.000,00	44.166.000,00	-		23.574.000,00	-		48.629,00			193.287,00	-	193.287,00
13	SD Negeri Tanona	-	-	67.740.000,00	-		-		17.352,00	67.740.000,00	41.976.360,00	-		25.763.640,00	-		17.352,00			-	-	-
14	SMP Negeri 3 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	90.545.000,00	-		-		26.749,00	90.545.000,00	65.290.000,00	-		25.255.000,00	-		26.749,00			-	-	-
15	SMP Negeri 3 Menui Satu Atap	175.779,00	328.000,00	83.180.000,00	-		-		21.357,00	83.180.000,00	69.708.000,00	-		13.800.000,00	-		21.357,00			175.779,00	-	175.779,00
16	SMP Negeri 7 Menui Satu Atap	-	-	83.580.000,00	35.000.000,00		-		29.146,00	118.580.000,00	57.622.000,00	35.000.000,00		25.958.000,00	-		29.146,00			-	-	-
	Sub Jumlah	**872.681,00**	**9.486.787,00**	**1.326.468.000,00**	**125.000.000,00**	**-**	**3.000.000,00**	**-**	**562.073,00**	**1.454.971.615,00**	**1.030.580.260,00**	**125.000.000,00**	**-**	**296.215.740,00**	**-**	**-**	**562.073,00**	**-**	**-**	**369.066,00**	**12.662.402,00**	**13.031.468,00**
	Jumlah	**10.011.458,08**	**13.069.244,00**	**26.577.370.600,00**	**1.392.500.000,00**	**114.600.000,00**	**12.060.000,00**	**63.732.000,00**	**19.760.033,00**	**30.162.701.468,00**	**21.881.486.551,00**	**1.351.425.000,00**	**95.460.000,00**	**6.696.645.449,00**	**4.825.000,00**	**19.140.000,00**	**19.701.713,00**	**151.030,00**	**323.326,00**	**7.157.155,08**	**63.056.111,00**	**70.213.266,08**

Lampiran 4

Daftar Piutang Pajak Hotel

No.	Nama Usaha	Wajib Pajak	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	600.000,00
2	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	8.132.000,00
3	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	3.610.000,00
4	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	122.174.092,30
5	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	48.840.000,00
6	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	1.138.010.800,04
7	Hotel/Penginapan	Di Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Kecamatan Bungku Pesisir	1.650.000,00
Jumlah					**1.323.016.892,34**

Lampiran 5

Daftar Piutang Pajak Restoran

No.	Nama Usaha	Wajib Pajak	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	6.051.800,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	16.195.560,00
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	20.576.600,00
4	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	614.048.574,00
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	2.515.500,00
6	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	891.369.350,00
7	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Kecamatan Bungku Pesisir	31.547.200,00
8	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Selatan	Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan	16.776.646,00
9	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan	Menui Kepulauan	Kecamatan Menui Kepulauan	3.972.600,00
10	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan	Sombori Kepulau	Kecamatan Sombori Kepulauan	245.418.000,00
Jumlah					**1.848.471.830,00**

Lampiran 6

Daftar Piutang Pajak Hiburan

No.	Nama Usaha	Wajib Pajak	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	300.000,00
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	3.250.000,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	2.930.000,00
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	17.800.000,00
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	2.125.000,00
6	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	109.310.000,00
7	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Kecamatan Bungku Pesisir	300.000,00
Jumlah					**136.015.000,00**

Lampiran 7

Daftar Piutang Pajak Reklame

No.	Nama Usaha	Wajib Pajak	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	26.472.500,00
2	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	28.095.919,80
3	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	33.390.182,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	192.578.137,00
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	13.618.380,00
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	301.776.240,00
7	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Kecamatan Bungku Pesisir	21.931.375,00
8	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Bungku Selatan	Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan	19.093.800,00
9	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan	Menui Kepulauan	Kecamatan Menui Kepulauan	25.902.500,00
10	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Di Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan	Sombori Kepulau	Kecamatan Sombori Kepulauan	495.000,00
Jumlah					**663.354.033,80**

Lampiran 8

Daftar Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Alamat	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	6
1	PT. Wanxiang Nickel Indonesia	Tambang Nickel	Ds. Bahomotefe Kec. Bungku Timur	2.880.927.570,00
2	PT. Shuoshi Indonesia Investment	Tambang Nickel	Ds. Topogaro Kec. Bungku Barat	2.786.451.319,00
3	PT. Sulawesi Mining Invesment (SMI)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	1.400.365.512,00
4	PT. Guang Ching Nickel And Stainless (GCNS)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	4.107.987.520,00
5	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	4.870.206.432,00
6	PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	6.822.160.800,00
7	PT. Lestari Smelter Indonesia (PT. LSI)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	7.674.313.920,00
8	PT. Huayue Nickel Cobalt (PT. HYNC)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	944.414.016,00
9	PT. Dexin Steel Indonesia (DSI 1)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	5.513.313.027,00
10	PT. Dexin Steel Indonesia (DSI 2)	Tambang Nickel	Ds. Fatufia Kec. Bahodopi	3.910.004.411,00
Jumlah				**40.910.144.527,00**

Lampiran 9

Daftar Piutang Pajak Air Bawah Tanah

No.	Nama Usaha	Pemilik	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	246.576,00
2	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	2.195.451,00
3	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	1.791.362,00
4	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	2.901.612,00
5	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	29.924.393,00
6	Pajak Air Tanah	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi	393.414.319,00
Jumlah					**430.473.713,00**

Lampiran 10

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Wita Ponda	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali	266.953.457,36
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bumi Raya	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali	1.817.410.858,00
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Barat	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali	2.585.687.945,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Tengah	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali	5.735.054.052,40
5	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Timur	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali	395.230.327,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bahodopi	Bahodopi	Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali	1.241.916.130,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Pesisir	Bungku Pesisir	Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali	128.391.442,50
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Selatan	Bungku Selatan	Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali	273.856.007,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan	Menui Kepulauan	Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali	145.392.372,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan	Sombori Kepulauan	Kecamatan Sombori Kepulauan Kabupaten Morowali	249.073.981,00
11	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Bungku Utara	Bungku Utara	Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara	1.758.564,00
12	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Lembo	Lembo	Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara	8.096.778,00
13	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Mamosalato	Mamosalato	Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara	3.863.014,00
14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Mori Atas	Mori Atas	Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara	777.798,00
15	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Petasia	Petasia	Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara	5.934.264,00
16	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Di Wilayah Kecamatan Soyo Jaya	Soyo Jaya	Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara	2.360.916,00
17	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Pemasagan Paving Blok Asrama Mahasiswa Morowali di Palu (Tondo)	Palu	Desa Tondo Kota Palu	870.850,00
Jumlah					**12.862.628.756,26**

Lampiran 11

Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No.	Kecamatan	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Piutang (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tahun 2025				
1	Wita Ponda	1.076.187.920,00	1.060.709.176,00	15.882.406,00
2	Bumi Raya	822.215.919,00	794.995.889,00	27.220.030,00
3	Bungku Barat	5.741.419.126,00	5.601.551.372,00	139.899.948,00
4	Bungku Tengah	1.770.271.717,00	1.369.413.330,00	402.043.573,00
5	Bungku Timur	2.159.462.263,00	589.303.760,00	1.570.497.815,00
6	Bahodopi	94.261.529.921,00	92.454.870.757,00	1.808.643.305,00
7	Menui Kepulauan	73.728.722,00	72.999.797,00	728.925,00
Sub Jumlah				**3.964.916.002,00**
Tahun 2024				
8	Wita Ponda	1.067.074.600,00	1.045.788.901,00	18.192.009,00
9	Bumi Raya	799.051.313,00	775.973.354,00	20.934.265,00
10	Bungku Barat	1.223.079.878,00	1.097.296.757,00	99.412.147,00
11	Bungku Tengah	1.729.134.009,00	1.271.087.625,00	342.485.068,00
12	Bungku Timur	2.150.168.155,00	1.575.524.107,00	28.791.641,00
13	Bahodopi	79.977.581.766,00	78.345.796.886,00	1.341.549.321,00
14	Menui Kepulauan	73.005.411,00	71.729.479,00	297.422,00
Sub Jumlah				**1.851.661.873,00**
Tahun 2023				
15	Wita Ponda	993.780.924,00	977.560.861,00	14.262.335,00
16	Bumi Raya	747.908.083,00	735.210.575,00	12.082.212,00
17	Bungku Barat	802.210.499,00	742.715.670,00	34.831.749,00
18	Bungku Tengah	1.420.380.718,00	1.131.526.598,00	224.935.803,00
19	Bungku Timur	1.573.716.782,00	1.534.472.304,00	32.916.130,00
20	Bahodopi	46.903.524.080,00	46.030.740.697,00	685.720.872,00
Sub Jumlah				**1.004.749.101,00**
Tahun 2022				
21	Wita Ponda	905.689.872,00	895.207.804,00	9.832.052,00
22	Bumi Raya	741.288.321,00	734.169.145,00	6.670.661,00
23	Bungku Barat	659.780.507,00	635.496.675,00	22.862.937,00
24	Bungku Tengah	1.246.614.654,00	1.052.810.206,00	150.156.712,00
25	Bungku Timur	1.409.489.254,00	1.391.084.297,00	14.916.927,00
26	Bahodopi	39.188.357.904,00	38.470.072.810,00	502.554.026,00
Sub Jumlah				**706.993.315,00**
Tahun 2021				
27	Wita Ponda	806.801.776,00	800.358.848,00	5.232.730,00
28	Bungku Barat	533.728.923,00	510.309.906,00	1.215.496,00
29	Bungku Tengah	1.057.280.346,00	947.873.297,00	61.281.954,00

No.	Kecamatan	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Piutang (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
30	Bungku Timur	1.270.180.149,00	1.252.224.780,00	9.078.107,00
31	Bahodopi	34.111.158.911,00	33.725.745.149,00	166.758.774,00
32	Bungku Pesisir	1.152.217.869,00	299.914.814,00	883.699,00
Sub Jumlah				**244.450.760,00**
Tahun 2020				
33	Wita Ponda	802.148.349,00	793.661.431,00	2.878.537,00
34	Bumi Raya	592.558.584,00	588.008.477,00	828.131,00
35	Bungku Barat	435.927.298,00	420.472.579,00	8.447.323,00
36	Bungku Tengah	875.841.096,00	802.061.926,00	11.011.806,00
37	Bungku Timur	1.059.526.964,00	1.049.357.104,00	41.813,00
38	Bungku Pesisir	118.054.531,00	116.639.214,00	1.235.811,00
Sub Jumlah				**24.443.421,00**
Tahun 2019				
39	Bahodopi	18.321.955.163,00	18.016.479.586,00	19.484.076,00
Sub Jumlah				**19.484.076,00**
Tahun 2018				
40	Wita Ponda	703.838.651,00	701.704.109,00	1.847.524,00
41	Bungku Tengah	608.013.937,00	511.610.383,00	10.408.628,00
Sub Jumlah				**12.256.152,00**
Tahun 2017				
42	Bumi Raya	554.552.411,00	420.972.773,00	13.184.835,00
43	Bungku Barat	407.480.650,00	361.173.425,00	42.537.593,67
44	Bungku Tengah	762.833.313,00	619.665.754,00	107.570.545,67
45	Bungku Timur	380.219.181,00	376.817.551,00	2.144.064,00
46	Bahodopi	9.003.437.858,00	8.775.861.394,00	139.199.707,00
47	Bungku Pesisir	88.272.728,00	88.154.540,00	118.188,00
48	Bungku Selatan	111.784.787,00	111.767.907,00	16.880,00
49	Menui Kepulauan	92.061.123,00	80.923.240,00	9.115.343,00
Sub Jumlah				**313.887.156,33**
Tahun 2016				
50	Bungku Tengah	586.834.950,00	566.382.561,00	13.853.057,00
51	Bahodopi	2.686.701.975,38	2.656.791.775,38	29.812.200,00
Sub Jumlah				**43.665.257,00**
Tahun 2013				
52	Morowali (PBB-P2)	-	-	845.524.909,00
Sub Jumlah				**845.524.909,00**
Jumlah				**9.032.032.022,33**

Lampiran 12

Daftar Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat	Kecamatan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Wita Ponda	Kecamatan Wita Ponda	4.114.100,00
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bumi Raya	Kecamatan Bumi Raya	2.649.100,00
3	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bungku Barat	Kecamatan Bungku Barat	30.296.276,60
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bungku Tengah	Kecamatan Bungku Tengah	13.683.034,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bungku Timur	Kecamatan Bungku Timur	123.320.976,25
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bahomohoni	Kecamatan Bahodopi	931.418.020,60
Jumlah				**1.105.481.507,45**

Lampiran 13

Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Pemilik	Nomor Blok	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Pasar	Witaponda	8	2.100.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	Bumi Raya	17	3.900.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	Bungku Barat	5	1.300.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Bungku Tengah	277	433.175.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Bahodopi	12	3.500.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	Bungku Pesisir	4	1.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar	Bungku Selatan	4	2.820.000,00
Jumlah				**447.795.000,00**

Daftar Piutang Denda Pajak

No.	Perusahaan/Wajib Pajak	Nilai Piutang (Rp)
1	**2**	**3**
1	CV. Amal Perkasa	380.533,20
2	CV. Bumi Nikel Bungku	523.305,98
3	CV. Trio Grafika	209.222,40
4	CV. Sari Nugraha	1.025.064,00
5	CV. Sari Nugraha	3.320.133,12
6	CV. Eka Jaya	104.302,08
7	CV. Bina Karya	485.457,36
Jumlah		**6.048.018,14**

Lampiran 15

Daftar Piutang BLUD

No.	Uraian	Tahun Pengakuan	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal Piutang Tagihan PT.TAMACHO GRAHA KRIDA RI+RJ Bulan April Tahun 2016.	2016	150.000,00
2	Saldo Awal Piutang Tagihan PT.TAMACHO GRAHA KRIDA RI+RJ Bulan Mei Tahun 2016.	2016	319.510,00
3	Obat Return	2016	23.600.561,00
4	Pasien PERUSAHAAN (PT. Sulawesi Mining Invesment) Rawat Jalan Bulan Oktober Tahun 2017.	2017	620.000,00
5	Pasien PERUSAHAAN (PT. Indonesia Guang CNS Industry) Rawat Jalan Bulan November Tahun 2017.	2018	240.000,00
6	Pasien PERUSAHAAN (PT. Indonesia Guang CNS Industry) Rawat Jalan Bulan Januari Tahun 2019.	2019	275.000,00
7	Pasien PERUSAHAAN (PT. Indonesia Ruipu Nickel dan Crome) Rawat Jalan Bulan September Tahun 2021	2021	350.000,00
8	Pasien PERUSAHAAN (PT. Guang CNS Indonesia dan PT. Indonesia Tsingshan Stailes Steel) Rawat Jalan Bulan April Tahun 2021.	2021	378.750,00
9	Pasien PERUSAHAAN (PT. Bintang Delapan Mineral) Rawat Jalan Bulan Mei Tahun 2021.	2021	1.075.000,00
10	Pasien PERUSAHAAN (PT. Bintang Delapan Mineral) Rawat Inap Bulan Mei Tahun 2021.	2021	10.742.544,00
11	Pasien PERUSAHAAN (PT. Bintang Delapan Mineral) Rawat Jalan Bulan Juni Tahun 2021.	2021	565.000,00
12	Pasein UMUM Rawat Inap (Rawat Asoka An. Tn. Asrul) Bulan Mei 2023.	2023	8.983.716,00
13	Pasien JASA RAHARJA Bulan November 2025	2025	63.273.753,00
14	Pasien JASA RAHARJA Bulan Desember 2025	2025	109.805.890,00
15	Pasien PERUSAHAAN (PT.SINAPATY SINERGI TUJUH-TUJUH) Bulan September 2024.	2024	151.455.500,00
16	Pasien UMUM Rawat Inap (Perawatan Asoka Tn. Umar) Bulan Juni 2024.	2024	3.000.000,00
17	Pasien UMUM Rawat Inap (Perawatan Lavender) Bulan Agustus 2024.	2024	34.876.457,00
18	Pasien BPJS SUSULAN Rawat Inap Bulan Juli 2025.	2025	1.295.282.200,00
19	Pasien BPJS SUSULAN Rawat Jalan Bulan Juli 2025.	2025	148.051.800,00
20	Pasien BPJS SUSULAN Rawat Inap Bulan Juli 2025.	2025	81.186.200,00
21	Pasien BPJS SUSULAN Rawat Inap Bulan Agustus 2025.	2025	754.546.600,00
22	Pasien BPJS SUSULAN Rawat Jalan Bulan Agustus 2025.	2025	42.723.700,00
23	Pasien BPJS Rawat Inap Bulan Oktober 2025	2025	2.254.647.600,00
24	Pasien BPJS Rawat Jalan Bulan Oktober 2025	2025	989.958.400,00
25	Pasien RUJUKAN AMBULANCE Bulan Agustus 2025.	2025	224.625.300,00
26	Pasien RUJUKAN AMBULANCE Bulan September 2025.	2025	352.816.900,00
27	Pasien RUJUKAN AMBULANCE Bulan Oktober 2025.	2025	348.719.200,00
28	Pasien OBAT KRONIS Bulan Juli 2025.	2025	119.159.888,00
29	Pasien BPJS KETENAGAKERJAAN Rawat Jalan Bulan Agustus 2025.	2025	2.020.000,00
30	Pasien BPJS KETENAGAKERJAAN Rawat Inap Bulan Oktober 2025.	2025	129.420.071,00
31	Sewa Kantin Bulan Desember 2025	2025	450.000,00
32	Sewa Parkir Bulan November 2025.	2025	5.573.700,00
33	Sewa Parkir Bulan Desember 2025.	2025	7.506.455,00
Jumlah			**7.166.399.695,00**

Daftar Piutang Hirkop/DUM
Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)

No.	Nama	Merk Kendaraan	No.Polisi	Nilai (Rp)
1	2	3	4	4
SK. Bupati Nomor : 188.4.45/KEP.0220/Perl./2015 Tanggal 25 Agustus 2015				
Kendaraan Roda 4 (Empat)				
1	Eka Dt. Belluano,SP	Toyota Kijang	DN 90 G	8.400.000,00
2	Drs. Ezra Tumimomor	Toyota Kijang Kf P3	DN 159 G	15.200.000,00
3	Drs. H.Hasyim Adam	Toyota Kijang Inova E	DN 69 G	12.308.064,00
4	H. Suleman Sondeng, SE	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 202 G	25.200.000,00
5	Majid Tope, SE	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 197 G	10.395.000,00
6	Hi. Amirullah Halilu, SE	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 175 G	10.395.000,00
7	Anwar Dg. Malureng,S.Sos,M.Si	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 205 G	9.702.000,00
8	Nepa,SE	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 204 G	10.395.000,00
9	Nicoherman Liku, SE	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 194 G	10.395.000,00
10	Jan Foster Tolabada,S.Sos	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 199 G	10.395.000,00
11	Samsu Abdullah	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 201 G	10.395.000,00
12	Mursalim Samuda,S.IP	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 200 G	9.702.000,00
13	S. Abidin Panji,S.Sos	Mitsubishi/Maven/Sdx	DN 190 G	10.395.000,00
14	Meymans Larope, SE	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 22 G	10.432.299,00
15	Abudin Halilu, SH	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 226 G	17.878.240,00
16	Sitti Asmaul Husna Syah	Toyota Avanza 1.300 Cfm.601 Rm-Gmme	DN 97 G	11.005.276,00
17	Ir. Zulsof Yan Lamandasa	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 20 G	15.050.960,00
18	Drs. H.Nafsahu,M.Si	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 13 G	15.507.050,00
19	Hj.Fatmawati,SE,M.Si	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 12 G	11.857.467,00
20	Drs. H.Dg.Pasolong	Toyota Avanza	DN 96 G	6.123.306,00
21	Drs. Amirullah Sia, M.Si	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 14 G	20.833.032,00
22	Haerudin Rompone,S.Sos,MM	Toyota Inova/Tgn40R-Gkmnkd	DN 52 G	10.833.032,00
Kendaraan Roda 2 (Dua)				
23	Moh.Natsir Karim	Honda Nf 125	DN6708G	375.800,00
24	Defridas hi. Sabolla,SH	Honda Nf 126	DN6164G	1.839.600,00
25	Bartholomeus Batu Rante,BBA	Honda	DN6007G	1.268.540,00
26	Mahalif Salabangka	Honda Supra X	DN6140G	1.225.000,00
27	Hasman Ahmad	Honda Supra X	DN6063G	585.480,00
28	Masniati, SH	Honda Supra - Nf 100D	DN6115AB	1.219.750,00
29	H.Museng Latarawe	Honda Win 110 Cc	DN6653G	877.625,00
30	Husnia Beru	Honda Nf 100 L	DN6021G	682.500,00
31	Sofyan Hamid	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6067G	713.125,00
32	Hj. Misbach Ismail, Bsw	Honda Nf 100 Sh	DN6049G	1.295.658,00
33	Julius Mampuk,ST	Honda Mcb	DN6566G	835.471,00
34	Ridwan Djafar,SE	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6099G	392.175,00
35	Sardin Rahman,S.Sos	Honda Win	DN6174G	617.932,00
36	Kusmaryanto	Honda Gl 160 D	DN6667G	948.150,00
37	Nurlaila	Honda Supra Fit	DN6173G	1.711.500,00
38	Sirajuddin	Yamaha /T 105Erd	DN6185G	1.409.310,00

Lampiran 16

No.	Nama	Merk Kendaraan	No.Polisi	Nilai (Rp)
39	Dekius Tampake	Yamaha /3So	DN6186G	865.600,00
40	Yan Meltius Kalaena	Yamaha 2P2	DN6395G	736.000,00
41	Armansya Abd.Pattah,S.Sos	Suzuki Fk 110 Sd. Kg	DN6298G	840.000,00
42	Ismail Paranaka	Suzuki Fk 110 Sd. Kg	DN6288G	840.000,00
43	Rusman Saino,SH	Yamaha /2P2 Z 110 Cc	DN6212G	1.568.000,00
44	Stanley Tampohela	Suzuki En 125	DN6680G	840.000,00
45	Suryawati Tengga,SE	Yamaha Vega	DN6190G	1.680.000,00
46	Ermas K.Lagaronda	Suzuki	DN6294G	560.000,00
47	Wirda Rosanti,SSTP,MPA	Suzuki Fd 125	DN6219G	854.000,00
48	Linmer Juwita Werokila,SE	Yamaha /2P2 Z 110 Cc	DN6371G	1.501.566,00
49	Abd.Rifai Bagenda,SH	Yamaha Vega R	DN6333G	792.000,00
50	Agus Polykarpus Tengkow	Yamaha Jupiter Mx	DN6433G	816.000,00
51	Hamarudin Bihina	Honda Gl 160 D	DN6726G	2.642.570,00
52	Abd. Halim Syahadat,SE	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6307G	768.000,00
53	Albert Santjuw	Yamaha /2P2 Z 110 Cc	DN6381G	1.848.000,00
54	Detji R.Lamboja	Yamaha /2P2 Z 110 Cc	DN6192G	792.000,00
55	Muhamad Djafar Labolong	Yamaha Jupiter	DN6058GA	816.000,00
56	Drs.H.Nurullah Garusu	Honda 160 D	DN6817G	475.672,00
57	Drs. Hamanuddin	Yamaha/T.105Erd	DN6086GA	840.000,00
58	Alpius Tagoe,ST	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6050GA	816.000,00
59	Sam Peuru	Honda Nf 110Sh	DN60832GA	1.518.160,00
60	H.Abd.Rasyid Amja	Yamaha /2P2 Z 110 Cc	DN6052G	1.518.160,00
61	Lisman Mauru	Honda Gl 160 D	DN6732G	20,00
62	Taufik S.Pd	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6053G	840.000,00
63	Rans Tommy Sane	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6039G	792.000,00
64	Ogi Tokalese	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6497G	816.000,00
65	Hernitje Woso	Yamaha /2P2 Jupiter Z110Cc	DN6065GA	816.000,00
66	Jamil Labone,SE	Honda Nf 100Sl	DN6446G	1.518.160,00
67	Rastam Mahi,SH	Honda Nf 100Sl	DN6445G	816.000,00
68	Hj. Chairil Amni,SE	Honda Nf 100Sl	DN6214GA	816.000,00
69	Yabert Ponggede,SE	Yamaha / Vega R	DN6011GA	840.000,00
70	Anwar Hi. Ismail, ST	Yamah / Jupiter Z	DN6472G	840.000,00
71	Sefrina Luni Lawento	Honda / Nf 100Td	DN6111GA	840.000,00
72	Nining Dahlan Umar Ali	Yamaha / 4D7 Vega R	DN6027G	840.000,00
73	Halihasdin Mabukoli	Yamaha / 4D7 Vega R	DN6427G	840.000,00
74	Serly Tiak	Yamaha / 3.So	DN6439G	816.000,00
75	Julientje Charolote	Yamaha / 3.So	DN6409G	840.000,00
76	Kardipan Labunga, SE	Yamaha Jupiter Z	DN6210GA	864.000,00
Jumlah				**325.857.250,00**

Daftar Piutang SKTJM/TPTGR

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
Tahun 2011													
1	Berita Acara Nomor : 341/MP TP-TGR/BA/XII/2011 Periode angsuran Maret 12 s.d Feb 14 (24 Bulan)	Drs. Napsahu, M.Si	8.997.875,00	24 Bulan	7.997.875,00	-	-	7.997.875,00		7.997.875,00			7.997.875,00
		Drs. Asri Siara	8.997.875,00	24 Bulan	8.997.875,00	-	-	8.997.875,00		8.997.875,00			8.997.875,00
		Yosar Kardiat, S.STP.MM	8.997.875,00	24 Bulan	1.589.364,00	-	-	1.589.364,00		1.589.364,00			1.589.364,00
		Haerudin Rompone, S.Sos.MM	8.997.875,00	24 Bulan	7.236.875,00	-	-	7.236.875,00		7.236.875,00			7.236.875,00
		Zabur Lausu	8.997.875,00	24 Bulan	1.597.875,00	-	-	1.597.875,00		1.597.875,00			1.597.875,00
	Sub Jumlah		**44.989.375,00**		**27.419.864,00**	**-**	**-**	**27.419.864,00**	**-**	**27.419.864,00**	**-**	**-**	**27.419.864,00**
2	Berdasarkan Berita Acara Nomor : 342/MP TP-TGR/BA/XII/2011 Periode angsuran Maret 12 s.d Feb 14 (24 Bulan)	Drs. Napsahu, M.Si	16.164.003,13	24 Bulan	16.164.003,13	-	-	16.164.003,13		16.164.003,13			16.164.003,13
		Drs. Asri Siara	16.164.003,13	24 Bulan	16.164.003,13	-	-	16.164.003,13		16.164.003,13			16.164.003,13
		Yosar Kardiat, S.STP.MM	16.164.003,13	24 Bulan	16.164.003,13	-	-	16.164.003,13		16.164.003,13			16.164.003,13
		Haerudin Rompone, S.Sos.MM	16.164.003,13	24 Bulan	16.164.003,13	-	-	16.164.003,13		16.164.003,13			16.164.003,13
		Rudi Palangit, SE	16.164.003,13	24 Bulan	13.409.424,13	-	-	13.409.424,13		13.409.424,13			13.409.424,13
	Sub Jumlah		**80.820.015,63**		**78.065.436,63**	**-**	**-**	**78.065.436,63**	**-**	**78.065.436,63**	**-**	**-**	**78.065.436,63**
3	Berdasarkan Berita Acara Nomor 343/MP TP-TGR/BA/XII/2011 dengan nilai sebesar Rp.709.240.000)	Didi Sumoked Meloh	709.240.000,00	24 Bulan	709.240.000,00	-	-	709.240.000,00		709.240.000,00			709.240.000,00
	Sub Jumlah		**835.049.390,63**		**814.725.300,63**	**-**	**-**	**814.725.300,63**	**-**	**814.725.300,63**	**-**	**-**	**814.725.300,63**
Tahun 2012													
4	361/SKTJM/MP TP-TGR/IX/2012 Periode angsuran Oktober 12 s.d Mei 13 (8 Bulan)	Hasmin Djamaludin, SH	3.703.600,00	8 Bulan	1.962.880,00	-	-	1.962.880,00		1.962.880,00			1.962.880,00
5	258/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2012 Periode angsuran Agustus 12 s.d Oktober 12 (3 Bulan)	Arifandy Lamangkau	10.008.300,00	3 Bulan	10.008.300,00	-	-	10.008.300,00		10.008.300,00			10.008.300,00
6	213/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2012 Periode angsuran Juni 12 (1 Bulan)	H. Rustam, MM	5.100.000,00	1 Bulan	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00		5.100.000,00			5.100.000,00
7	211/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2012 Periode angsuran Juli 12 s.d Juni 14 (24 Bulan)	Darmansyah Ismail, SH	10.500.000,00	24 Bulan	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
8	111/SKTJM/MP TP-TGR/III/2012 Periode angsuran April 12 s.d Maret 14 (24 Bulan)	Alexander Malatundu	2.210.000,00	24 Bulan	2.210.000,00	-	-	2.210.000,00		2.210.000,00			2.210.000,00
9	/SKTJM/MP TP-TGR/II/2012 Periode angsuran Maret 12 s.d Februari 14 (24 Bulan)	Syukur Ibrahim	59.000.000,00	24 Bulan	58.500.000,00	-	-	58.500.000,00		58.500.000,00			58.500.000,00
10	/SKTJM/MP TP-TGR/I/2012 Periode angsuran Februari 12 s.d Januari 14 (24 Bulan)	Abdullah Muhidin,SE	10.591.728,00	24 Bulan	10.591.728,00	-	-	10.591.728,00		10.591.728,00			10.591.728,00
	Sub Jumlah		**101.113.628,00**		**98.372.908,00**	**-**	**-**	**98.372.908,00**		**98.372.908,00**	**-**	**-**	**98.372.908,00**
Tahun 2013													
11	120/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2013 Periode angsuran Juli 13 s.d September 13 (3 Bulan)	Abd. Gafur Dg. Arsyad/CV. Tingkalu Indah	9.883.916,00	3 Bulan	9.883.916,00	-	-	9.883.916,00		9.883.916,00			9.883.916,00
12	123/SKTJM/MP TP-TGR/II/2013 Periode angsuran Agustus 13 s.d Juli 15 (24 Bulan)	Osbert/PT. Mustika Raya Warga	135.674.000,00	24 Bulan	135.674.000,00	-	-	135.674.000,00		135.674.000,00			135.674.000,00
13	124/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2013 Periode angsuran Agustus 13 s.d Juli 15 (24 Bulan)	Nusbah Umar/CV. Sulawesi Rotan	29.399.347,22	24 Bulan	24.399.347,22	-	-	24.399.347,22		24.399.347,22			24.399.347,22
14	125/SKTJM/MP TP-TGR/IX/2013 Periode angsuran Oktober 13 s.d September 15 (24 Bulan)	Dernikton Zakaria/CV. Felix Perdana	431.297.080,00	24 Bulan	426.297.080,00	-	-	426.297.080,00		426.297.080,00			426.297.080,00
15	384/SKTJM/MP TP-TGR/IX/2013 Periode angsuran Oktober 13 s.d September 15 (24 Bulan)	Hj. Sitti Hawa. AR	17.193.150,00	24 Bulan	13.193.150,00	-	-	13.193.150,00		13.193.150,00			13.193.150,00
16	14/SKTJM/MP TP-TGR/II/2013 Periode angsuran Maret 13 s.d Februari 14 (12 Bulan)	Abd. Djalil Lapangi, S.Sos	5.641.000,00	12 Bulan	500.000,00	-	-	500.000,00		500.000,00			500.000,00
17	08/SKTJM/MP TP-TGR/II/2013 Periode angsuran Maret 13 s.d Februari 15 (24 Bulan)	Yulin Sanutu,S.Sos	11.710.000,00	24 Bulan	11.710.000,00	-	-	11.710.000,00		11.710.000,00			11.710.000,00
18	126/SKTJM/MP TP-TGR/X/2013 Periode angsuran November 13 s.d Oktober 15 (24 Bulan)	H.Rustam	12.750.000,00	24 Bulan	8.246.000,00	-	-	8.246.000,00		8.246.000,00			8.246.000,00

Lampiran 17

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
Sub Jumlah			**653.548.493,22**		**629.903.493,22**	**-**	**-**	**629.903.493,22**		**629.903.493,22**	**-**	**-**	**629.903.493,22**
Tahun 2014													
19	02/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari s.d. Oktober 2015 (10 Bulan)	Moh. Yusuf (CV.Karya Utama)	165.638.966,00	10 Bulan	165.638.966,00	-	-	165.638.966,00		165.638.966,00			165.638.966,00
20	03/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari s.d.Oktober 2015 (10 Bulan)	Moh.Yusuf (PT.Delima Utama)	31.971.080,00	10 Bulan	31.971.080,00	-	-	31.971.080,00		31.971.080,00		31.971.080,00	-
21	04/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari s.d Oktober 2015 (10 Bulan)	Moh.Yusuf (CV.Rahmat)	136.390.959,75	10 Bulan	136.390.959,75	-	-	136.390.959,75		136.390.959,75			136.390.959,75
22	10/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari 2015 s.d. Februari 2017 (24 Bulan)	Linmer J.Werokila	137.720.000,00	24 Bulan	137.720.000,00	-	-	137.720.000,00		137.720.000,00			137.720.000,00
23	18/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari s.d.Juni 2015 (6 Bulan)	Nefrius Megawe,SE	9.613.400,00	6 Bulan	7.613.400,00	-	-	7.613.400,00		7.613.400,00			7.613.400,00
24	22/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari 2015 s.d. Februari 2016 (12 Bulan)	Drs.Ezra Tumimomor	9.035.100,00	12 Bulan	9.035.100,00	-	-	9.035.100,00		9.035.100,00			9.035.100,00
25	28/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari s.d April 2015 (3 Bulan)	William S.Tobigo	3.975.000,00	3 Bulan	3.975.000,00	-	-	3.975.000,00		3.975.000,00			3.975.000,00
26	39/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari 2015 s.d Februari 2017 (24 Bulan)	Dody Arman, SP (CV.Aman Jaya)	66.696.503,87	24 Bulan	66.696.503,87	-	-	66.696.503,87		66.696.503,87			66.696.503,87
27	30/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari 2015 s.d. Agustus 2016 (20 Bulan)	PT.Latanindo Graha Persada (Ir.Ichsan Abbas)	149.902.297,11	20 Bulan	134.902.297,11	-	-	134.902.297,11		134.902.297,11			134.902.297,11
28	38/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari s.d. September 2015 (8 Bulan)	Djufri M Taiyeb,SE	3.616.700,00	8 Bulan	979.900,00	-	-	979.900,00		979.900,00			979.900,00
29	42/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari 2015 s.d. Agustus 2016 (18 Bulan)	Marjudin,S.Sos	13.100.000,00	18 Bulan	6.925.000,00	-	2.750.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00	-			-
30	44/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Januari s.d.Desember 2015 (12 Bulan)	Badiuz Zaman,ST	6.830.200,00	12 Bulan	1.730.200,00	-	-	1.730.200,00		1.730.200,00			1.730.200,00
31	48/SKTJM/MP.TP-TGR/XII/2014 Periode angsuran Februari s.d.November 2015 (10 Bulan)	Ismail Laode	2.282.500,00	10 Bulan	2.282.500,00	-	-	2.282.500,00		2.282.500,00			2.282.500,00
Sub Jumlah			**736.772.706,73**		**705.860.906,73**	**-**	**2.750.000,00**	**703.110.906,73**	**4.175.000,00**	**698.935.906,73**	**-**	**31.971.080,00**	**666.964.826,73**
Tahun 2015													
32	002/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2015 Periode angsuran Juli 2015 s.d. Desember 2016 (18 Bulan)	Sabil	29.480.100,00	18 Bulan	18.130.100,00	-	-	18.130.100,00		18.130.100,00			18.130.100,00
33	014/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Siti Aswira, Se	1.000.000,00	5 Bulan	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-			-
34	015/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Drs. H. Napsahu, M.Si	5.580.000,00	5 Bulan	5.580.000,00	-	-	5.580.000,00		5.580.000,00			5.580.000,00
35	015.a/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Drs. H. Napsahu, M.Si	5.100.000,00	5 Bulan	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00		5.100.000,00			5.100.000,00
36	015.b/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Drs. H. Napsahu, M.Si	2.250.000,00	5 Bulan	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00		2.250.000,00			2.250.000,00
37	015.c/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Drs. H. Napsahu, M.Si	3.709.600,00	5 Bulan	3.709.600,00	-	-	3.709.600,00		3.709.600,00			3.709.600,00
38	017/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 s.d. Juli 2017 (24 Bulan)	Haerudin Rompone, S.Sos.MM	38.600.000,00	24 Bulan	38.600.000,00	-	-	38.600.000,00		38.600.000,00			38.600.000,00

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
39	017.a/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 s.d. Juli 2017 (24 Bulan)	Haerudin Rompone, S.Sos.MM	59.184.900,00	24 Bulan	56.684.900,00	-		56.684.900,00		56.684.900,00		12.861.000,00	43.823.900,00
40	017.b/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 s.d. Juli 2017 (24 Bulan)	Haerudin Rompone, S.Sos.MM	25.161.878,13	24 Bulan	25.161.878,13	-	-	25.161.878,13		25.161.878,13			25.161.878,13
41	020/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran September 2015 s.d. Juni 2016 (10 Bulan)	Nuryazillah Ahmad, S.Pd.M.Si	9.307.340,00	10 Bulan	5.307.340,00	-	500.000,00	4.807.340,00	4.807.340,00	-			-
42	021/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 s.d. Juli 2017 (24 Bulan)	Arman	10.724.500,00	24 Bulan	9.824.500,00	-	-	9.824.500,00	1.438.271,00	8.386.229,00			8.386.229,00
43	036/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Sept s.d.Oktober 2015 (2 Bulan)	Amirullah, S.Ag.MM	3.462.600,00	2 Bulan	962.600,00	-	-	962.600,00		962.600,00			962.600,00
44	038/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d.Oktober 2015 (3 Bulan)	Moh. Tahir Tahang	1.630.000,00	3 Bulan	50.000,00	-	-	50.000,00		50.000,00			50.000,00
45	039/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d.Desember 2015 (5 Bulan)	Hariyanti, S.Sos.MM	1.400.000,00	5 Bulan	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00		1.120.000,00			1.120.000,00
46	001.24/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 (1 Bulan)	Muh. Rizal Marzuki	6.290.000,00	1 Bulan	40.000,00	-	-	40.000,00		40.000,00			40.000,00
47	017.c/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus s.d. Desember 2015 (5 Bulan)	Indra Deisy, SE, MM	9.922.900,00	5 Bulan	7.922.900,00	-		7.922.900,00	5.500.000,00	2.422.900,00			2.422.900,00
48	040.5/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2015 Periode angsuran Agustus 2015 s.d. Januari 2017 (18 Bulan)	Sahlan, S.Sos	11.390.000,00	18 Bulan	7.390.000,00	-	5.000.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	-			-
Sub Jumlah			**224.193.818,13**		**188.333.818,13**		**5.500.000,00**	**182.833.818,13**	**14.635.611,00**	**168.198.207,13**	**-**	**12.861.000,00**	**155.337.207,13**
Tahun 2016													
49	25/SKTJM/MP TP-TGR/XI/2016 Periode angsuran Desember 2015 (1 Bulan)	Drs. Sainudin Supu, MM	10.242.200,00	1 Bulan	242.200,00	-	242.200,00	-		-			-
50	17/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April s.d. Agustus 2016 (5 Bulan)	Datlin Tamalagi	6.775.000,00	5 Bulan	4.975.000,00	-	-	4.975.000,00		4.975.000,00		2.500.000,00	2.475.000,00
51	19/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April s.d. Mei 2016 (2 Bulan)	Muhammad Nursyahrani,ST.MM	1.050.000,00	2 Bulan	250.000,00	-	-	250.000,00		250.000,00			250.000,00
52	08/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April s.d. Juni 2016 (3 Bulan)	Kalvin Sulle	7.500.000,00	3 Bulan	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00
53	04/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April 2016 s.d. Maret 2017 (12 Bulan)	Ir.Asman Loliwu	11.014.400,00	12 Bulan	10.914.400,00	-	-	10.914.400,00		10.914.400,00			10.914.400,00
54	05/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April s.d. Mei 2016 (2 Bulan)	Dra.Hj.Aisyah Ismail	2.319.000,00	2 Bulan	1.319.000,00	-	-	1.319.000,00		1.319.000,00			1.319.000,00
55	21/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran April 2016 s.d. Maret 2017 (12 Bulan)	Ir.Meyke Sanggula	12.444.600,00	12 Bulan	12.444.600,00	-	-	12.444.600,00		12.444.600,00			12.444.600,00
56	14/SKTJM/MP TP-TGR/III/2016 Periode angsuran Maret 2016 s.d. Februari 2018	Hase,S.Pd,SHI.M.Si	163.461.400,00	24 Bulan	163.461.400,00	-	-	163.461.400,00		163.461.400,00			163.461.400,00
Sub Jumlah			**214.806.600,00**		**196.106.600,00**		**242.200,00**	**195.864.400,00**	**-**	**195.864.400,00**	**-**	**2.500.000,00**	**193.364.400,00**
Tahun 2017													
57	281/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Abd.Falack	6.600.000,00	7 Bulan	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00		5.500.000,00			5.500.000,00
58	282/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Abd.Jamil Djauhar	3.000.000,00	7 Bulan	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00		1.800.000,00			1.800.000,00

Lampiran 17

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
59	283/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Abd.Madjid	2.750.000,00	7 Bulan	1.230.000,00	-	-	1.230.000,00		1.230.000,00			1.230.000,00
60	284/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Abd.Malik	2.500.000,00	7 Bulan	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00
61	286/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Alwi	6.600.000,00	7 Bulan	5.550.000,00	-	-	5.550.000,00		5.550.000,00			5.550.000,00
62	287/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Arizon Fransisco	7.920.000,00	7 Bulan	6.300.000,00	-	-	6.300.000,00		6.300.000,00			6.300.000,00
63	288/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Hamzah Suleing	7.920.000,00	7 Bulan	7.400.000,00	-	-	7.400.000,00		7.400.000,00			7.400.000,00
64	289/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Haswandi	7.920.000,00	7 Bulan	100.000,00	-	-	100.000,00		100.000,00			100.000,00
65	290/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Ilham	7.920.000,00	7 Bulan	5.300.000,00	-	-	5.300.000,00		5.300.000,00			5.300.000,00
66	292/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Irfan Simon	3.000.000,00	7 Bulan	200.000,00	-	-	200.000,00		200.000,00			200.000,00
67	293/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Irwan	3.000.000,00	7 Bulan	900.000,00	-	-	900.000,00		900.000,00			900.000,00
68	294/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Jufri	6.600.000,00	7 Bulan	5.350.000,00	-	-	5.350.000,00		5.350.000,00			5.350.000,00
69	296/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Moh.Rizal	3.000.000,00	7 Bulan	150.000,00	-	-	150.000,00		150.000,00			150.000,00
70	297/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Mubin Pombili	3.000.000,00	7 Bulan	1.010.000,00	-	-	1.010.000,00		1.010.000,00			1.010.000,00
71	298/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Muhammad Bahril	6.600.000,00	7 Bulan	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
72	299/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Sudarmin Hadadi	2.500.000,00	7 Bulan	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00
73	300/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Sukrin Madjid	3.000.000,00	7 Bulan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00
74	301/SKTJM/MP TP-TGR/V/2017 Periode angsuran Juni s.d. Desember 2017 (7 Bulan)	Syarifudin	7.920.000,00	7 Bulan	3.510.000,00	-	-	3.510.000,00		3.510.000,00			3.510.000,00
Sub Jumlah			**91.750.000,00**		**54.500.000,00**		**-**	**54.500.000,00**		**54.500.000,00**	**-**	**-**	**54.500.000,00**
Tahun 2018													
75	188/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2018 Periode Angsuran Juli s.d. Agustus 2018 (2 Bulan)	Moh. Nasir	701.800,00	2 Bulan	701.800,00	-	-	701.800,00		701.800,00	701.800,00		-
76	186/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2018 Periode Angsuran Juli s.d. Agustus 2018 (2 Bulan)	Jul Ifrat Palurante, SE	2.395.500,00	2 Bulan	1.895.500,00	-	-	1.895.500,00	1.895.500,00	-			-
77	184/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2018 Periode Angsuran Juli s.d. Agustus 2018 (2 Bulan)	Drs. H. Napsahu, M.Si	1.385.802,00	2 Bulan	1.385.802,00	-	-	1.385.802,00		1.385.802,00			1.385.802,00
78	492/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2018 Periode Angsuran Juli 2018 s.d.Juni 2020 (24 Bulan)	La Ane Tahir, ST, SE	1.260.000.000,00	24 Bulan	1.260.000.000,00	-	-	1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		350.000.000,00	910.000.000,00
79	493/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2018 Periode Angsuran Juli 2018 s.d.Juni 2020 (24 Bulan)	Aswin Ilyas	459.039.000,00	24 Bulan	459.039.000,00	-	-	459.039.000,00	459.039.000,00	-			-
Sub Jumlah			**1.723.522.102,00**		**1.723.022.102,00**	**-**	**-**	**1.723.022.102,00**	**460.934.500,00**	**1.262.087.602,00**	**701.800,00**	**350.000.000,00**	**911.385.802,00**

Lampiran 17

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
Tahun 2019													
80	66/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Juli 2020 (12 Bulan)	Indra Deisy, SE, MM	7.220.000,00	12 Bulan	6.720.000,00	-		6.720.000,00		6.720.000,00			6.720.000,00
81	53/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus s.d. November 2019 (4 Bulan)	Husni Lanai, S.Pd	8.969.210,00	4 Bulan	6.969.210,00	-		6.969.210,00		6.969.210,00			6.969.210,00
82	92/SKTJM/MP TP-TGR/IX/2019 Periode Angsuran Oktober 2019 s.d. Maret 2020 (6 Bulan)	Buharman Lambuli, S.Sos	3.526.176,00	6 Bulan	3.026.176,00	-		3.026.176,00	3.026.176,00	-			-
83	46/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Juli 2020 (12 Bulan)	H. Nasarudin, SE	36.925.700,00	12 Bulan	36.250.700,00	-		36.250.700,00		36.250.700,00			36.250.700,00
84	46/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Juli 2020 (12 Bulan)	H. Nasarudin, SE	2.210.468,00	12 Bulan	2.210.468,00	-		2.210.468,00		2.210.468,00			2.210.468,00
85	66/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Juli 2020 (12 Bulan)	Indra Deisy, SE, MM	9.922.900,00	12 Bulan	7.922.900,00	-		7.922.900,00		7.922.900,00			7.922.900,00
86	50/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 22 Periode Angsuran Agustus 2019 (1 Bulan)	Samsudin Dale	912.400,00	1 Bulan	912.400,00	-		912.400,00		912.400,00			912.400,00
87	49/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Mei 2021 (22 Bulan)	Drs. H. Rustam, MM	17.160.200,00	22 Bulan	17.160.200,00	-		17.160.200,00		17.160.200,00			17.160.200,00
88	49/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Agustus 2019 s.d. Mei 2021 (22 Bulan)	Drs. H. Rustam, MM	12.750.000,00	22 Bulan	7.246.000,00	-		7.246.000,00		7.246.000,00			7.246.000,00
89	21/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2019 Periode Angsuran Juli s.d. Agustus 2019 (2 Bulan)	Amir	900.116,00	2 Bulan	200.116,00	-		200.116,00		200.116,00			200.116,00
Sub Jumlah			**100.497.170,00**		**88.981.836,00**	**-**	**-**	**88.618.170,00**	**3.026.176,00**	**85.591.994,00**	**-**	**-**	**85.591.994,00**
Tahun 2020													
90	03/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2020 Periode Angsuran September 2020 s/d Agustus 2021 (12 Bulan)	Hj. Nursiah	10.703.200,00	12 Bulan	3.450.000,00	-	1.400.000,00	2.050.000,00	500.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00
91	49 /SKTJM/MP TP-TGR/XII/2020 Periode Angsuran Desember 2020 s/d Januari 2022 (14 Bulan)	Anhar Hi. Saing	10.895.760,00	14 Bulan	7.295.760,00	-	4.000.000,00	3.295.760,00	2.000.000,00	1.295.760,00			1.295.760,00
92	50/SKTJM/MP TP-TGR/XII/2020Periode Angsuran Desember 2020 s/d November 2021 (12 Bulan)	Nurlaela Topo	3.803.760,00	12 Bulan	3.803.760,00	-	500.000,00	3.303.760,00	624.430,00	2.679.330,00	2.679.330,00		-
93	50/SKTJM/MP TP-TGR/XII/2020Periode Angsuran Desember 2020 s/d November 2021 (12 Bulan)	Nurlaela Topo	3.375.570,00	12 Bulan	2.375.570,00	-	500.000,00	1.875.570,00	1.875.570,00	-			-
Sub Jumlah			**28.778.290,00**		**18.071.178,00**	**-**	**6.400.000,00**	**10.525.090,00**	**5.000.000,00**	**5.525.090,00**	**2.679.330,00**	**-**	**2.845.760,00**
Tahun 2021													
94	57/SKTJM/MP TP-TGR/IX/2021 Periode Angsuran September 2021 s/d Februari 2022 (6 Bulan)	Tauhid Nanga	8.414.200,00	6 Bulan	3.664.200,00	3.664.200,00	-	3.664.200,00		3.664.200,00			3.664.200,00
Sub Jumlah			**8.414.200,00**		**9.496.056,00**	**3.664.200,00**	**-**	**3.664.200,00**	**-**	**3.664.200,00**	**-**	**-**	**3.664.200,00**
Tahun 2022													
95	05/SKTJM/MP TP-TGR/XI/2022 Periode Angsuran Desembar 2022 s.d Mei 2023 (6 Bulan)	MUH. SYAHRUL AMIN	5.401.592,00	6 Bulan	-	-	2.100.000,00	3.301.592,00		3.301.592,00		1.125.000,00	2.176.592,00
96	04/SKTJM/MP TP-TGR/X/2022 Periode Angsuran Oktober 2022 s.d Februari 2023 (5 bulan)	SARCIA	1.948.046,00	1 Bulan	-	-	750.000,00	1.198.046,00	1.198.046,00	-			-
Sub Jumlah			**7.349.638,00**		**-**	**-**	**2.850.000,00**	**4.499.638,00**	**1.198.046,00**	**3.301.592,00**	**-**	**1.125.000,00**	**2.176.592,00**
Tahun 2023													
97	185/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2023 Periode Angsuran Juni 2023 s.d Mareti 2024 (10 Bulan)	Marjudin, S.Sos	12.500.000,00	10 Bulan	-	-		-	2.000.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	-

Lampiran 17

No	SKTJM		Total TPTGR (Rp)	Masa Angsuran	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)	Setoran 2020/2023 (Rp)	Saldo Piutang 2023 (Rp)	Setoran 2024 (Rp)	Setoran 2025 (Rp)	Total Piutang (Rp)
	Nomor/ Tgl	Nama											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
98	190/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2023 Periode Angsuran Juni 2023 s.d Mei 2024 (12 bulan)	Hamarudin Masirete	4.214.496,00	12 Bulan	-	-	-	-	500.000,00	3.714.496,00	3.714.496,00		-
99	218/SKTJM/MP TP-TGR/VIII/2023 Periode Angsuran Juli 2023 s.d Desember 2023 (6 bulan)	Supriadi Y. Djaelani	1.819.800,00	6 Bulan	-	-	-	-	1.200.000,00	619.800,00			619.800,00
100	201/SKTJM/MP TP-TGR/VI/2023 Periode Angsuran Juli 2023 s.d Agustus 2023 (2 bulan)	Restu S. Werokila	1.792.000,00	2 Bulan	-	-	-	-	500.000,00	1.292.000,00			1.292.000,00
Sub Jumlah			**20.326.296,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4.200.000,00**	**16.126.296,00**	**3.714.496,00**	**10.500.000,00**	**1.911.800,00**
Jumlah			**4.746.122.332,71**		**4.527.374.198,70**	**3.664.200,00**	**17.742.200,00**	**4.509.640.026,70**	**493.169.333,00**	**4.036.796.989,70**	**7.095.626,00**	**408.957.080,00**	**3.620.744.283,70**

Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Jenis Pajak	Dasar Hukum		Realisasi DBH Pajak		
				Tanggal Penerimaan	Transfer DBH (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3		4	5	6
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.14.3/46/BAPENDA-G.ST/2026 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 10 Februari 2026		1. 28/05/2025	1. 7.136.261.910,82	1. 23.904.923.281,65
	(PBB-KB)			2. 22/08/2025	2. 6.038.644.188,90	2. 17.866.279.092,75
				3. 31/10/2025	3. 8.633.959.545,75	3. 9.232.319.547,00
			31.041.185.192,47	4. 31/12/2025	4. 1.043.587.725,00	4. 8.188.731.822,00
	Sub Jumlah		**31.041.185.192,47**		**22.852.453.370,47**	**8.188.731.822,00**
2	Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air -	- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.14.3/46/BAPENDA-G.ST/2026 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 10 Februari 2026		1. 28/05/2025	1. 4.384.685.925,00	1. 29.310.396.961,04
	Permukaan (PABT - PAP)			2. 22/08/2025	2. 3.700.099.161,00	2. 25.610.297.800,04
				3. 31/10/2025	3. 5.868.739.897,04	3. 19.741.557.903,00
			33.695.082.886,04	4.		4.
	Sub Jumlah		**33.695.082.886,04**		**13.953.524.983,04**	**19.741.557.903,00**
	Jumlah		**64.736.268.078,51**		**36.805.978.353,51**	**27.930.289.725,00**

Lampiran 19

Daftar Nilai Stock Opname Persediaan TA 2025

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Tratgis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah																-	841/16.15/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN WITA PONDA																			
	1 TK NEGERI 1 WITA PONDA				190.000,00												190.000,00	42.1.1/ /TK.N.L.J/XII/2025	31 Des 2025	
	2 TK NEGERI 2 WITA PONDA				231.000,00												231.000,00	421.1/ /TKN.2-WP/LJ/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	3 TK NEGERI 3 WITA PONDA																-	421.1/ /TKN.3-WP/PM/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	4 TK NEGERI 4 WITA PONDA																-	421.1/ /TKN.4-WP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	5 TK NEGERI 5 WITA PONDA																-	421.1/ /TKN.5-WP/EM/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	6 TK NEGERI 6 WITA PONDA				508.000,00												508.000,00	421.2/ /TKN.6-WP/BHP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	7 TK NEGERI 7 WITA PONDA				816.000,00												816.000,00	421.1/ /TKN 7/WP/MHN/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	8 TK NEGERI 8 WITA PONDA				510.000,00												510.000,00	422.1/106/TKN 8W P/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	9 TK NEGERI SAMPEANTABA																-			
	KECAMATAN BUMI RAYA																			
	10 TK NEGERI 1 BUMI RAYA																-	422.1/132/TKN/BHS/XII/2025	31 Des 2025	
	11 TK NEGERI 2 BUMI RAYA																-	422.1/ /TK.N.2.BR/XII/2025	31 Des 2025	
	12 TK NEGERI 3 BUMI RAYA				150.000,00												150.000,00	421.1/ /TKN.3-BR/HJ/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	13 TK NEGERI 4 BUMI RAYA																-	421.1/114/TK.N.4.BR/XII/2025	31 Des 2025	
	14 TK NEGERI 5 BUMI RAYA																-	422.1/082/TKN-BR/LBL/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	15 TK NEGERI 6 BUMI RAYA				70.000,00	25.000,00											95.000,00	422.1/ /TKN-6-BR/PBO/XII/2025	31 Des 2025	
	16 TK NEGERI LIMBO MAKMUR																-			
	17 TK NEGERI ATANANGA																-			
	KECAMATAN BUNGKU BARAT																			
	18 TK NEGERI 1 BUNGKU BARAT																-	421.1/11/TK.N.1.BB-04/XII/2025	31 Des 2025	
	19 TK NEGERI 2 BUNGKU BARAT																-	422.1/ /TKN.2-BB/BHR-04/XII/2025	31 Des 2025	
	20 TK NEGERI 3 BUNGKU BARAT																-	422.2/006/TK-NEG.3-BB-04/XII/2025	31 Des 2025	
	21 TK NEGERI PEMBINA TONDO				205.000,00	25.000,00											230.000,00	421.12/ /TK-PMB-04/XII/2025	31 Des 2025	
	22 TK NEGERI UEDAGO																-			
	KECAMATAN BUNGKU TENGAH																			
	23 TK NEGERI 1 BUNGKU TENGAH																-	422.2/46/TK-N-1-BT/XII/2025	31 Des 2025	
	24 TK NEGERI 2 BUNGKU TENGAH																-	422.1/240/TK-N-2-BT/XII/2025	31 Des 2025	
	25 TK NEGERI 3 BUNGKU TENGAH																-	422.1/22/TK-N-3-BNGT/XII/2025	31 Des 2025	
	26 TK NEGERI 4 BUNGKU TENGAH				70.000,00												70.000,00	422.1/ /TK-N-4-BNGT/XII/2025	31 Des 2025	
	27 TK NEGERI 5 BUNGKU TENGAH																-	422.11/ /TK-N-5-BT/XII/2025	31 Des 2025	
	28 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MOROWALI				1.105.000,00												1.105.000,00	421.9/ /SANGGAR KEGIATAN MOROWALI/XII/2025	31 Des 2025	
	29 TK NEGERI BAHOMOHONI																-			
	KECAMATAN BUNGKU TIMUR																			
	30 TK NEGERI BAHOMOTEFE				205.000,00												205.000,00	422.1/ /TKN.BH.TEFE/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BAHODOPI																			
	31 TK NEGERI 1 BAHODOPI				380.000,00												380.000,00	422.2/ /TK-N-1-BHDP/XII/2025	31 Des 2025	
	32 TK NEGERI 2 BAHODOPI																-	422.1/ /TK-N-2-BHDP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	33 TK NEGERI 3 BAHODOPI				280.000,00												280.000,00	422.2/ /TK-N-3 BHDP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	34 TK NEGERI 4 BAHODOPI																-	422.1/ /TK-N-4-BHDP/XII/2025	31 Des 2025	
	35 TK NEGERI 1 BAHOMAKMUR																-			
	36 TK NEGERI 2 BAHOMAKMUR																-			
	KECAMATAN BUNGKU PESISIR																			
	37 TK NEGERI 1 BUNGKU PESISIR				158.750,00												158.750,00	422.1/158/TKN.1.BP/DISDIKBUD/XII/20	31 Des 2025	
	38 TK NEGERI 2 BUNGKU PESISIR																-	422.1/ /TKN.2.BP/XII/2025	31 Des 2025	
	39 TK NEGERI BULELENG																-			
	40 TK NEGERI TANGOFA																-			
	KECAMATAN BUNGKU SELATAN																			
	41 TK NEGERI 1 BUNGKU SELATAN (TKN KALEROANG)	45.000,00			1.637.000,00												1.682.000,00	421.1/85/TK-N-1-BUNGSEL/XII/2025	31 Des 2025	
	42 TK NEGERI 2 BUNGKU SELATAN																-	421.1/ /TK-N-1-BUNGSEL/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN																			
	43 TK NEGERI 1 MENUI KEPULAUAN																-	421.1/28/TK Neg 1/MK/XII/2025	31 Des 2025	
	44 TK NEGERI 2 MENUI KEPULAUAN																-	421.1/29/TKN 2 MK/XII/2025	31 Des 2025	
	45 TK NEGERI 3 MENUI KEPULAUAN																-	422.1/ /TKN 3 MEN/XII/2025	31 Des 2025	
	46 TK NEGERI TORUKUNO																-			
	KECAMATAN WITA PONDA																			
	1 SD NEGERI SAMPEANTABA																-	422/20/SDN.STB/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	2 SD NEGERI 1 PUNTARI MAKMUR				924.000,00												924.000,00	422.1/126/SDN 1 PM/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	3 SD NEGERI 2 PUNTARI MAKMUR	30.000,00			232.000,00			20.000,00									282.000,00	422.1/187/SDN2-PM/DISDIKBUD/WP/XII/2025	31 Des 2025	
	4 SD NEGERI 1 LAANTULA JAYA				1.120.000,00	404.000,00				165.000,00		150.000,00					1.839.000,00	422.43/ 67 /SDN.1.LJ/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	5 SD NEGERI 2 LAANTULA JAYA	153000			250.000,00	136.000,00											539.000,00	422.2/155/SDN 2 LJ/XII/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	6 SD NEGERI MOAHINO				120.000,00	112.000,00			100.000,00				135.000,00				467.000,00	400.3.5.5/187/SDN-MHN/XII/2025	31 Des 2025	
	7 SD NEGERI SOLONSA				865.000,00	60.000,00					189.480,00						1.114.480,00	423/68/SDN SLS/XII/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	8 SD NEGERI UNGKAYA	75.000,00			1.712.000,00												1.787.000,00	422/49/SDN-UKY/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	9 SD NEGERI EMEA				1.195.000,00												1.195.000,00	422.1/22/SDN.EM/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	10 SD NEGERI BUKIT HARAPAN	251000			1.270.000,00	545.000,00											2.066.000,00	422/225/SDN BKH/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	11 SD NEGERI BUMI HARAPAN	250.000,00			506.000,00							36.000,00					792.000,00	422/ 63 /SDN-BHR/DISDIKBUD/WP/XII/2025	31 Des 2025	
	12 SMP NEGERI 1 WITAPONDA	125.000,00			3.088.500,00	205.000,00				140.000,00							3.558.500,00	421.35/425/SMPN.1-12/XII/2025	31 Des 2025	
	13 SMP NEGERI 2 WITA PONDA				3.160.000,00	150.000,00											3.310.000,00	424.1/213/SMPN.2 WP-12/XII/2025	31 Des 2025	
	14 SMP NEGERI 3 WITA PONDA SATU ATAP				3.359.000,00	175.000,00			300.000,00							85.000,00	3.919.000,00	424/404/smpn3.witaponda.satap/XII/20	31 Des 2025	
	15 SMP NEGERI 4 WITAPONDA	163.000,00			1.630.000,00							15.000,00					1.808.000,00	421/224/SMPN-4/WP/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUMI RAYA																			
	16 SD NEGERI 1 BAHONSUAI																-	421.2/ 16 /SDN 1 BHS/DISDIKBUD/BR/2025	31 Des 2025	
	17 SD NEGERI 2 BAHONSUAI				746.000,00							50.000,00					796.000,00	421.2/ 132 /BA-SO/BHS.2/XII/2025	31 Des 2025	
	18 SD NEGERI 1 LIMBO MAKMUR	277.000,00			2.425.000,00	480.000,00				860.000,00	1.850.000,00						5.892.000,00	421/63/SDN 1 LM/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	19 SD NEGERI 2 LIMBO MAKMUR	650.000,00			2.208.000,00	1.510.000,00				600.000,00							4.968.000,00	421.2/481/SDN-LM/DISDIKBUD/BR/XII/2025	31 Des 2025	
	20 SD NEGERI 1 BERINGIN JAYA				1.087.000,00												1.087.000,00	421.2/15/SDN-1 BJ/BR/XII/2025	31 Des 2025	
	21 SD NEGERI 2 BERINGIN JAYA				30.000,00												30.000,00	421.2/07/SDN2-BJ/DISDIKBUD/BR/XII/2025	31 Des 2025	
	22 SD NEGERI ATANANGA				1.385.000,00												1.385.000,00	422.1/ 55 /SDN-ATG/BR/MW/XII/2025	31 Des 2025	
	23 SD NEGERI LAMBELU				870.000,00												870.000,00	422.2/05/SD-LMB/BR/2025	31 Des 2025	
	24 SD NEGERI PEBATAE																-	422.1/033/SDN-PBE-BR/DISDIKDA/2025	31 Des 2025	
	25 SD NEGERI PEBOTOA				390.000,00												390.000,00	421.2/ 015 /SDN-PBO/Disdikda/XII/2025	31 Des 2025	
	26 SDN SAMARENDA																-	421.2/25/SDN SMR/XII/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	27 SD NEGERI UMBELE																-	421.2/160/SDN-UBL/DISDIKDA/BR/XII/2025	31 Des 2025	
	28 SMP NEGERI 1 BUMI RAYA																-	6130/SMPN.1.BR/DS/XII/2025	31 Des 2025	
	29 SMP NEGERI 2 BUMI RAYA	80.000,00			990.000,00												1.070.000,00	422/1759/SMPN2-BR/XII/2025	31 Des 2025	
	30 SMP NEGERI 3 BUMI RAYA SATU ATAP				1.150.000,00	415.000,00				60.000,00							1.625.000,00	421/2/034/SMPN3BR-SATAP/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUNGKU BARAT																			
	31 SD NEGERI BAHOEA REKO REKO				2.332.000,00												2.332.000,00	421.2/01/SOABPH SDN BHR-04/XII/2025	31 Des 2025	
	32 SD NEGERI 2 BAHOEA REKO REKO																-	421.2/23/SDN 2 BHR-04/XII/2025	31 Des 2025	
	33 SD NEGERI 3 BAHOEA REKO REKO				899.000,00												899.000,00	421.2/062/SDN-BHR-03/XII/2025	31 Des 2025	
	34 SD NEGERI 1 WOSU																-	421.2/45/SDN-1 WS/BB/DIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	35 SD NEGERI 2 WOSU				220.000,00												220.000,00	421.2/112/SDN 2. WS-04/XII/2025	31 Des 2025	
	36 SD NEGERI AMBUNU																-	421.2/ /SDN-AB/XII/2025	31 Des 2025	
	37 SD NEGERI FOLILI				310.000,00												310.000,00	421.2/84/SDN-FLL/XII/2025	31 Des 2025	
	38 SD NEGERI LAROBENU				1.695.000,00												1.695.000,00	421.2/01/SOABPH SDN LRBN/XII/2025	31 Des 2025	
	39 SD NEGERI MARGA MULYA				3.035.000,00												3.035.000,00	422.1/ /SDN-MM.04/XII/2025	31 Des 2025	
	40 SD NEGERI TONDO				655.000,00												655.000,00	421.2/37/SDN.TD-04/XII/2025	31 Des 2025	
	41 SD NEGERI TOPOGARO				605.000,00												605.000,00	421.2/99/SD,TP/BB/DIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	42 SD NEGERI UMPANGA				827.400,00	95.000,00											922.400,00	421.2/86/SDN-UP/BB/XII/2025	31 Des 2025	
	43 SD NEGERI 2 UMPANGA				610.000,00												610.000,00	421.03/098/SDN2UMP-04/XII/2025	31 Des 2025	
	44 SD NEGERI WATA																-	421/ /SDN-WATA/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	45 SMP NEGERI 1 BUNGKU BARAT				110.000,00												110.000,00	421.1/08 /BA/SMPN.1-BB/XII/2025	31 Des 2025	
	46 SMP NEGERI 2 BUNGKU BARAT				1.055.000,00												1.055.000,00	421/104/SMPN.2.04/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUNGKU TENGAH																			
	47 SD NEGERI 1 BUNGKU				1.385.000,00	210.000,00											1.595.000,00	422.1.1/40/SDN.1-03/XII/2025	31 Des 2025	
	48 SD NEGERI 2 BUNGKU				663.000,00												663.000,00	422.2/157/SDN 2 BT-03/XII/2025	31 Des 2025	
	49 SD NEGERI 3 BUNGKU				235.000,00												235.000,00	421.2/56/SDN 03-BT/I/DIKBUD/2025	31 Des 2025	
	50 SD NEGERI 1 BAHOMOLEO/ (SDN 4 BUNGKU)				328.000,00												328.000,00	422.2/ /SDN.04 BHM-03/XII/2025	31 Des 2025	
	51 SD NEGERI PUUNGKOILU (SDN 5 BUNGKU)	85.000,00			255.000,00	168.000,00											508.000,00	422/ /SD.05-3/XII/2025	31 Des 2025	
	52 SD NEGERI BAHORURU (SDN 6 BUNGKU)				206.000,00												206.000,00	421.2/015/SDN.06/DISDIKBUD/XII/202	31 Des 2025	
	53 SD NEGERI SAKITA (SDN 7 BUNGKU)				280.000,00												280.000,00	421.2/10/SDN.07-BT/XII/2025	31 Des 2025	
	54 SD NEGERI BENTE (SDN 8 BUNGKU)				3.282.000,00												3.282.000,00	422.2.6/ 27 /SD-08-BK/XII/2025	31 Des 2025	
	55 SD NEGERI BAHOMANTE (SDN 9 BUNGKU)				788.000,00	319.000,00						75.000,00					1.182.000,00	421.2/195/SDN.09-BK-03/XII/2025	31 Des 2025	
	56 SD NEGERI MATANSALA (SDN 10 BUNGKU)				800.000,00	60.000,00					3.350.000,00					250.000,00	4.460.000,00	422.1/110/SDN10BGK-03/XII/2025	31 Des 2025	
	57 SD NEGERI 1 LANONA / SDN 11 BUNGKU				1.018.000,00												1.018.000,00	422.2/ /SDN.011/XII/2025	31 Des 2025	
	58 SD NEGERI BAHONTOBUNGKU (SDN 12 BUNGKU)	119.000,00			340.000,00												459.000,00	421.1/ /SDN12BGK/XII/2025	31 Des 2025	
	59 SD NEGERI 2 BAHOMOLEO / SDN 13 BUNGKU				210.000,00												210.000,00	422.1/123/SD.13-BKU.03/XII/2025	31 Des 2025	
	60 SD NEGERI 14 LAMBEREA				140.000,00												140.000,00	421.2/02/SDN.14-BT-03/XII/2025	31 Des 2025	
	61 SD NEGERI 2 LANONA (SDN 15 BUNGKU)				220.000,00	35.000,00											255.000,00	422.1/ /SDN. 15 BK-03/XII/2025	31 Des 2025	
	62 SD NEGERI IPI (SDN 16 BUNGKU)																-	422.2/ / SD. 16-BGK/XII/2025	31 Des 2025	
	63 SDN 17 BUNGKU (TUDUA)				342.000,00												342.000,00	421.2/35/SDN.17-BGK/XII/2025	31 Des 2025	
	64 SD NEGERI 18 BUNGKU (BUNGI)				150.000,00	505.000,00											655.000,00	422.1/25/SDN.18-BT/XII/2025	31 Des 2025	
	65 SD NEGERI 19 BUNGKU (BENTE)				248.000,00												248.000,00	422.1/05/SD.19-BKU.03/XII/2025	31 Des 2025	
	66 SD NEGERI 20 BUNGKU (TOFUTI)																-	422.2/145/SDN.20-BKU/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	67 SMP NEGERI 1 BUNGKU				600.000,00												600.000,00	421.3/103/SMPN.1-03/XII/2025	31 Des 2025	
	68 SMP NEGERI 2 BUNGKU				4.091.000,00			218.000,00									4.309.000,00	421/ 023 /SMPN.2.BKU/XII/2025	31 Des 2025	
	69 SMP NEGERI 3 BUNGKU				830.000,00												830.000,00	422.2/006/SMPN 3.03/XII/2025	31 Des 2025	
	70 SMP NEGERI 4 BUNGKU	87.000,00															87.000,00	421.3/002/SMPN.4-B/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUNGKU TIMUR																			
	71 SD NEGERI BAHOMOAHI				360.000,00												360.000,00	422.1/78/08.15.08/XII/2025	31 Des 2025	
	72 SD NEGERI BAHOMOTEFE																-	421.2/187/18.15.11/XII/2025	31 Des 2025	
	73 SD NEGERI 2 BAHOMOTEFE				365.000,00												365.000,00	422/194 /SDN2-BTF/XII/2025	31 Des 2025	
	74 SD NEGERI GERESA				672.250,00	245.000,00					780.000,00						1.697.250,00	422/048/08.15.08/XII/2025	31 Des 2025	
	75 SD NEGERI KOLONO				700.000,00												700.000,00	422/87/SDN-KLN/BP/DIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	76 SD NEGERI LAHUAFU				344.000,00												344.000,00	422/ /08.15.13/XII/2025	31 Des 2025	
	77 SD NEGERI LAROUE				1.605.000,00							48.000,00					1.653.000,00	421.44/47/18.15.15/XII/2025	31 Des 2025	
	78 SD NEGERI NAMBO																-	422.2/12/08.15.06/XII/2025	31 Des 2025	
	79 SD NEGERI 1 ONEPUTE JAYA				280.000,00												280.000,00	422.1/70/08.15.14/XII/2025	31 Des 2025	
	80 SD NEGERI 2 ONEPUTE JAYA				265.000,00												265.000,00	421.44/ 38 /08.15.15/XII/2025	31 Des 2025	
	81 SD NEGERI ULULERE				438.000,00				135.000,00	300.000,00							873.000,00	422.2/ 147 /08.15.05/ XII /2025	31 Des 2025	
	82 SD NEGERI UNSONGI																-	422.2/01/08.15.05/XII/2025	31 Des 2025	
	83 SMP NEGERI 1 BUNGKU TIMUR	60.000,00			252.000,00	45.000,00											357.000,00	424.31/ /08.15.01/XII/2025	31 Des 2025	
	84 SMP NEGERI 2 BUNGKU TIMUR				320.000,00												320.000,00	026/SMPN 2 BUTIM/XII/2025	31 Des 2025	
	85 SMP NEGERI 3 BUNGKU TIMUR				750.000,00												750.000,00	421.31/ /08.15.03/XII/2025	31 Des 2025	
	86 SMP NEGERI 4 BUNGKU TIMUR SATU ATAP				2.440.000,00												2.440.000,00	421.31/ 132.3/SMPN 4 B.TIM/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BAHODOPI																			
	87 SD NEGERI 1 BAHOMAKMUR				7.555.000,00												7.555.000,00	422.1/369 /SDN1BHMR-08/XII/2025	31 Des 2025	
	88 SD NEGERI 2 BAHOMAKMUR	230.000,00			4.216.000,00	100.000,00											4.546.000,00	422.1/ 173 /SDN.2-BHMR/XII/2025	31 Des 2025	
	89 SD NEGERI 3 BAHOMAKMUR																-	422.1/30/SDN.3-BHMR/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	90 SD NEGERI PADABAHO				2.675.000,00	1.060.000,00											3.735.000,00	422.1/130/SDN-PDBH/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	91 SD NEGERI BAHODOPI				1.154.000,00	830.000,00				390.000,00							2.374.000,00	422/ /SDN1BHPD/XII/2025	31 Des 2025	
	92 SD NEGERI 2 BAHODOPI				1.811.000,00	430.000,00											2.241.000,00	422.1/ /SDN-2/BHD-14/ XII/2025	31 Des 2025	
	93 SD NEGERI 3 BAHODOPI																-	422.1/ /SDN.3-BHDP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	94 SD NEGERI 4 BAHODOPI				1.060.000,00	2.250.000,00					803.000,00						4.113.000,00	422.2/ /SDN.4-BHDP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	95 SD NEGERI 5 BAHODOPI																-	422.2/10/SDN.5-BHDP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	96 SD NEGERI DAMPALA	300.000,00			617.005,00	98.000,00				80.000,00	2.374.100,00	72.000,00					3.541.105,00	422.1/98/SDN-DPL/BHD/XII/2025	31 Des 2025	
	97 SD NEGERI FATUFIA				2.680.000,00												2.680.000,00	422.2 / 580 / SD.FTF-07 / XII / 2025	31 Des 2025	
	98 SD NEGERI KEUREA				1.300.000,00												1.300.000,00	422.2/123/SDN.KUR-05/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	99 SD NEGERI KURISA	224.000,00			2.430.000,00	398.000,00											3.052.000,00	422.1/083/SD.KRS/DISDIKBUD/XII/202	31 Des 2025	
	100 SD NEGERI LABOTA				2.350.000,00												2.350.000,00	422/396/SDN-LBT/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	101 SD NEGERI LALAMPU				445.000,00												445.000,00	422/ /SDN-LLP/DISDIKDA/I/2025	31 Des 2025	
	102 SD NEGERI LEREEA																-	422/071/SDN-LRE/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	103 SD NEGERI SIUMBATU				2.240.000,00	270.000,00											2.510.000,00	422.2/104/SDN-SBT/XII/2025	31 Des 2025	
	104 SD NEGERI BETE BETE				1.085.000,00												1.085.000,00	422.1/ 04 /SDN-BTB/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	105 SD NEGERI MAKARTI JAYA	145.000,00			9.324.000,00	1.275.000,00			75.000,00	270.000,00	130.000,00						11.219.000,00	422.1/431/SDN.MKJ/DISDIKDA/XII/202	31 Des 2025	
	106 SMP NEGERI 1 BAHODOPI				2.976.000,00												2.976.000,00	422/205/SMPN1BHPD/XII/2025	31 Des 2025	
	107 SMP NEGERI 2 BAHODOPI				660.000,00												660.000,00	422.1/13/SMPN.2-09/XII/2025	31 Des 2025	
	108 SMP NEGERI 3 BAHODOPI SATU ATAP				600.000,00												600.000,00	422.1/18/SMPN 3 BH-SATAP/XII/2025	31 Des 2025	
	109 SMP NEGERI 4 BAHODOPI				960.000,00												960.000,00	422/601/SMPN4-BHDP/DISDIKDA/ XII /2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUNGKU PESISIR																			
	110 SD NEGERI 1 LAFEU				315.000,00												315.000,00	422.1/15/SDN 1 LAFEU/XII/2025	31 Des 2025	
	111 SD NEGERI 2 LAFEU				185.500,00												185.500,00	423.6/85/SMPN.1.BP/XII/DISDIKBUD/2	31 Des 2025	
	112 SD NEGERI TRANS BULELENG				490.000,00												490.000,00	422.4/74/SDN TRANS BLL.BP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	113 SD NEGERI TRANS 1 BULELENG				500.000,00												500.000,00	422.1/029/SDN TRANS BLL/BP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	114 SD NEGERI BULELENG				1.100.000,00						100.000,00						1.200.000,00	422/042/SD,BLL/BP/DIKBUD /XII/2025	31 Des 2025	
	115 SD NEGERI PUUNGKEU				600.000,00												600.000,00	422.1/39/SDN/PGK/BP/DISDIKBUD/XII/	31 Des 2025	
	116 SD NEGERI LAROENAI				542.000,00												542.000,00	422/022/SD,LRN/BP/DIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	117 SD NEGERI SAMBALAGI	30.000,00			340.000,00												370.000,00	422/19/SD.SBL/BP/DIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	118 SD NEGERI TANGOFA				417.000,00												417.000,00	422.1/112/SDN-TGF./XII/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	119 SD NEGERI TORETE					175.000,00											175.000,00	422.1/39/SDN.TRT/BP/DISDIKBUD/20	31 Des 2025	
	120 SD NEGERI WERE'A				715.000,00												715.000,00	422.2/100/SDN WRA.BP/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	121 SD NEGERI TANDAOLEO				160.000,00												160.000,00	422.1/48/SDN.TDL/BP/DISDIKBUD/XII/	31 Des 2025	
	122 SMP NEGERI 1 BUNGKU PESISIR				460.000,00												460.000,00	423.6/215/SMPN.1.BP/XII/DISDIKBUD/	31 Des 2025	
	123 SMP NEGERI 2 BUNGKU PESISIR SATU ATAP				307.950,00												307.950,00	422.2/126 /SMPN.2/BP/XII/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN BUNGKU SELATAN																			
	124 SD NEGERI BUNGINTENDE																-	421.2/ /SDN.BTD/DISDIKBUD/BS/2025	31 Des 2025	
	125 SD NEGERI PADABALE				120.000,00												120.000,00	421.2/060/SDN.PNB/DISDIKBUD/XII/202	31 Des 2025	
	126 SD NEGERI PADO-PADO				90.000,00												90.000,00	422/ 132 /SDN.Pdo.BS//DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	127 SD NEGERI BUAJANGKA				375.000,00												375.000,00	421.1/180/SDN.BJK/020/DISDIKBUD/2	31 Des 2025	
	128 SD NEGERI UMBELE										880.000,00						880.000,00	422.2/09/SDN.UBL.031.02/XII/2025	31 Des 2025	
	129 SD NEGERI BAKALA				470.000,00												470.000,00	814/ 45 /SDN.BKL-BS/DIKDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	130 SD NEGERI BOELIMAU				50.000,00												50.000,00	422.1/5/SDN/BLM/XII/2025	31 Des 2025	
	131 SD NEGERI BUNGINGKELA				1.220.000,00	75.000,00											1.295.000,00	421.2/ /015-02/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	132 SD NEGERI GUSUMOTAHA				705.000,00												705.000,00	422.1/118/SDN.GMT/DISDIKBUD/XII/2	31 Des 2025	
	133 SD NEGERI JAWI - JAWI				250.000,00				75.000,00								325.000,00	814/05/SDN.JW.BS/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	134 SD NEGERI KALEROANG				355.000,00				51.000,00								406.000,00	090/102/49-02/DIKDA/2025	31 Des 2025	
	135 SD NEGERI LAKOMBULO																-	421.2/ 95 /SDN-1.LKB/BS/XII/2025	31 Des 2025	
	136 SD NEGERI 1 LEMO				322.000,00												322.000,00	421.2/ /SDN-1 LEMO/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	137 SD NEGERI PAKU				690.000,00												690.000,00	422.1/ /SDN.PAKU/DISDIKBUD/2025	31 Des 2025	
	138 SD NEGERI PANIMBAWANG				150.000,00												150.000,00	421.2/060/SDN.PNB/DISDIKBUD/XII/20	31 Des 2025	
	139 SD NEGERI POLEWALI				290.000,00												290.000,00	421.2/70/SDN.PLW.032.02/DIKBUD/XII	31 Des 2025	
	140 SD NEGERI POO																-	814/ /SDN.PO'O/DISDIKDA/2025	31 Des 2025	
	141 SD NEGERI POWARU				440.000,00					80.000,00							520.000,00	421.2/ /SDN.PWR/XII/2025	31 Des 2025	
	142 SD NEGERI PULAU BAPA				1.185.000,00												1.185.000,00	421.2/35/SDN P.BP/XII/2025	31 Des 2025	
	143 SD NEGERI SAINOA				957.000,00	540.000,00		74.000,00	420.000,00								1.991.000,00	422.2/006/SDN.SNA.BS/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	144 SMP NEGERI 1 BUNGKU SELATAN				425.000,00												425.000,00	421.31/02/SMPN.1-BS/XII/2025	31 Des 2025	
	145 SMP NEGERI 2 BUNGKU SELATAN				195.000,00												195.000,00	421.1/41/SMPN 2.02/XII/DISDIKDA/2025	31 Des 2025	
	146 SMP NEGERI 4 BUNGKU SELATAN SATU ATAP				1.179.500,00												1.179.500,00	421.33/025/SMPN.4.BS.SAT.AP/XII/202	31 Des 2025	
	147 SMP NEGERI 5 BUNGKU SELATAN SATU ATAP				1.005.000,00				1.850.000,00								2.855.000,00	421.33/59/SMPN.5.BS/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN MENUI KEPULAUAN																			
	148 SD NEGERI 1 ULUNAMBO				120.000,00												120.000,00	421.2/ /SDN 1 UL/XII/2025	31 Des 2025	
	149 SD NEGERI 2 ULUNAMBO				400.000,00												400.000,00	421.2/ 35 /SDN ULUNAMBO/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	150 SD NEGERI 3 ULUNAMBO				769.000,00												769.000,00	421.2/86/BA/SDN.3UL/XII/2025	31 Des 2025	
	151 SD NEGERI BURANGA				190.000,00												190.000,00	421.2/ 27 /SDN BRG/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	152 SD NEGERI KOFALAGADI				610.000,00												610.000,00	421.2/78/BA/SDN.KGD/XII/2025	31 Des 2025	
	153 SD NEGERI MOROMPAITONGA				515.000,00	97.500,00											612.500,00	421.1/ 35 /SDN.M.Tonga/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	154 SD NEGERI NGAPAEA				869.700,00												869.700,00	421.2/46/SDN.NGA/XII/2025	31 Des 2025	
	155 SD NEGERI PADALAA				150.000,00												150.000,00	421.2/53/SDN.PDL/XII/2025	31 Des 2025	
	156 SD NEGERI PADEI DARAT				195.000,00												195.000,00	422/ /SDN.PD./2025	31 Des 2025	
	157 SD NEGERI PADEI LAUT				931.000,00				55.000,00								986.000,00	901/ /BA-SO/PDL/XII/2025	31 Des 2025	
	158 SD NEGERI SAMARENGGA				1.544.000,00							40.000,00					1.584.000,00	421.2/087/SDN-SM/XII/2025	31 Des 2025	
	159 SD NEGERI ULUNIPA				1.339.000,00				208.000,00								1.547.000,00	421.2/ 43/ SDN. ULP/XII/2025	31 Des 2025	
	160 SD NEGERI TORUKUNO				502.500,00												502.500,00	421.2/35/SDN.TKN/XII/2025	31 Des 2025	
	161 SD NEGERI TEREBINO				1.540.000,00						200.000,00						1.740.000,00	421.2/139/BA/SDN.TRB/XII/2025	31 Des 2025	
	162 SMP NEGERI 1 MENUI				150.000,00												150.000,00	421.3/50/BA/SMPN.1 MN-KEP/XII/2025	31 Des 2025	
	163 SMP NEGERI 2 MENUI				770.000,00												770.000,00	421.3/83/SMPN.2 MN/XII/2025	31 Des 2025	
	164 SMP NEGERI 4 MENUI SATU ATAP				560.000,00												560.000,00	421.3/95/SMPN.4.MN/XII/2025	31 Des 2025	
	165 SMP NEGERI 5 MENUI SATU ATAP				439.000,00												439.000,00	421.3/ 75 /SMPN.5.SATAP/DPD/XII/2025	31 Des 2025	
	166 SMP NEGERI 6 MENUI SATU ATAP				250.000,00												250.000,00	421.2/ 45 /SMPN 6.MN/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN																			
	167 SD NEGERI DONGKALAN				655.000,00												655.000,00	422.1/01/SDN.DKL/2025	31 Des 2025	
	168 SD NEGERI LALEMO				1.065.000,00												1.065.000,00	422/01/SDN.LLM/2025	31 Des 2025	
	169 SD NEGERI LAMONTOLI				120.000,00												120.000,00	814/12/27.005.02/DISDIKDA/XII/2025	31 Des 2025	
	170 SD NEGERI LOMBOKITA				750.000,00				130.000,00								880.000,00	421.2/169/SDN.LB/XII/2025	31 Des 2025	
	171 SD NEGERI MASADIAN				110.000,00				680.000,00								790.000,00	421.2/115/SD-MS/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	172 SD NEGERI MATANO				66.000,00												66.000,00	421.2 / 122 / SDN.MTN / XII / 2025	31 Des 2025	
	173 SD NEGERI MATARAPE				77.500,00												77.500,00	421.2/121/SDN.MTP/DISDIKBUD/XII/20	31 Des 2025	
	174 SD NEGERI PULAU DUA DARAT				1.417.000,00												1.417.000,00	421.2/089/SDN-PDD/XII/2025	31 Des 2025	
	175 SD NEGERI PULAU TENGAH				1.253.000,00												1.253.000,00	422/ /SDN.PTG/2025	31 Des 2025	
	176 SD NEGERI PULAU TIGA				2.151.000,00												2.151.000,00	421.2/46/SDN.PT/DISDIKBUD/XII/2025	31 Des 2025	
	177 SD NEGERI TANJUNG HARAPAN				75.000,00												75.000,00	422/ /SDN T.H/2025	31 Des 2025	
	178 SDN TANJUNG TIRAM				195.000,00												195.000,00	422.1/60/SDN T.T/2025	31 Des 2025	
	179 SD NEGERI TANONA				635.000,00												635.000,00	421.2/71/SDN.TN/XII/2025	31 Des 2025	
	180 SMP NEGERI 3 BUNGKU SELATAN SATU ATAP				405.000,00												405.000,00	423.11/105/SMPN.3.02/XII/2025	31 Des 2025	
	181 SMP NEGERI 3 MENUI SATU ATAP				305.000,00												305.000,00	421/024/SMPN.3-MK/XII/2025	31 Des 2025	
	182 SMP NEGERI 7 MENUI SATU ATAP				652.000,00				150.000,00								802.000,00	421.2/ /SMPN.7.MN/XII/2025	31 Des 2025	
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.060.044.931,82	8.242.727.735,27		11.418.000,00											23.136.840,00	10.337.327.507,09	000.2.1/244.02/DKPP-KBD/XII/2025	31 Des 2025	
3	Puskesmas Ulunambo	212.854.880,49	204.558.683,56	825.000,00	2.206.065,00	50.600,00											420.495.229,05	440.7/496.16/PKM-ULNB/XII/2025	31 Des 2025	
4	Puskesmas Kaleroang	116.881.644,03	164.412.406,12		18.392.740,00												299.686.790,15	440.7/2771/UPTD.PKM-KLRG/XII/2025	31 Des 2025	
5	Puskesmas Lafeu	204.844.206,22	310.701.493,67														515.545.699,90	440.7.1/176.19/PKM-LFU/XII/2025	31 Des 2025	
6	Puskesmas Bahodopi	240.230.982,91	606.895.784,93												800.000,00		847.926.767,84	400.7.1/288.35/PKM.BHDP/XII/2025	31 Des 2025	
7	Puskesmas Bahomotefe	243.703.262,03	287.242.424,92		4.563.000,00												535.508.686,95	400.7.18.2 /289.19/BA/PKM-BTF/XII/2025	31 Des 2025	
8	Puskesmas Bungku	223.233.129,82	217.077.384,38		11.297.995,00	1.623.000,00		521.500,00				1.590.000,00					455.343.009,20	440/3543.1a/PKM-BK/XII/2025	31 Des 2025	
9	Puskesmas Wosu	282.846.436,10	350.116.012,54					1.417.165,00									634.379.613,64	400.7.30 /367.42/ PKM-WS/ XII / 2025	31 Des 2025	
10	Puskesmas Bahonsuai	244.006.870,99	263.930.397,98														507.937.268,97	440.7.20/6333.1/UPTD.PKM-BHS/2025	31 Des 2025	
11	Puskesmas Laantula Jaya	315.662.022,14	447.452.728,51		19.942.000,00	3.096.000,00											786.152.750,66	440/349.46/XII/BA.STOCK OPNAME/UPT.PKM-LJ/2025	31 Des 2025	
12	Puskesmas Tanjung Harapan	256.001.394,09	291.952.053,45														547.953.447,54	400.7/ 361 /PKM-TH/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Puskesmas Fonuasingko	141.346.544,52	223.490.865,75														364.837.410,27	400.5.2/186.22/PKM-FS/XII/2025	31 Des 2025	
14	Rumah Sakit Pratama Paku	480.116.873,00	771.876.592,00		17.645.030,00												1.269.638.495,00	445/321.15/RSSP/XII/2025	31 Des 2025	
15	RSUD Morowali	2.421.759.862,10	2.268.345.771,22	337.699.291,00	24.230.032,64			25.507.213,00	17.319.491,00							5.802.276,00	5.100.663.936,96	800/365.7/RSUD-MRW/XII/2025	31 Des 2025	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah						2.784.448.214,00										2.784.448.214,00	78/BA.SO/ATK/DPUPRD/XII/2025	31 Des 2025	
17	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan																-	000.2.3.2/12/DPKPP/XII/2025	31 Des 2025	
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																-	027/364/BKBPD/XII/2025	31 Des 2025	
19	Kantor Polisi Pamong Praja																-	900.1.14.1/254/SATPOL-PP/XII/2025	31 Des 2025	
20	Dinas Sosial																-	460/783/BAST/DSD/XII/2025	31 Des 2025	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.221.500,00									916.645.256,00			919.866.756,00	027/978/BPBD/XII/2025	31 Des 2025	
22	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah				6.642.450,00												6.642.450,00	021/1029/NTD/XII/2025	31 Des 2025	
23	Badan Lingkungan Hidup Daerah															5.105.400,00	5.105.400,00	000.2.3.1./478/DLHD/XII/2025	31 Des 2025	
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah			416.878.955,00	495.129.743,00												912.008.698,00	470/02/DKCS/XII/2025	31 Des 2025	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																-	000.2.3.1/1593/DPMDP3A/XII/2025	31 Des 2025	
26	Dinas Perhubungan				599.600,00												599.600,00	550.11/408-BA.SOB/DISHUB/XII/2025	31 Des 2025	
27	Dinas Komunikasi dan Informatika																-	01/Diskominfo/XII/2025	31 Des 2025	
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																-	518/460/kopumkm/XII/2025	31 Des 2025	
29	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				25.704.000,00												25.704.000,00	028/34/DPMPTSP/I/2026	31 Des 2025	
30	Dinas Pemuda, Olah Raga dan pariwisata Daerah																-	900/596.1/Disporapar/XII/2025	31 Des 2025	
31	Dinas Perpustakaan Daerah																-	900/630/DPK/XII/2025	31 Des 2025	
32	Dinas Perikanan Daerah																-	500.5.1/854/DPD/XII/2025	31 Des 2025	
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.577.302,68	30.129.901,52				213.161.102,83	955.942.469,19		137.628.067,16						68.024.363,80	1.428.463.207,18	520/1.120/DPKP/XII/2025	31 Des 2025	
34	Dinas Perdagangan dan Perindustrian						252.901.845,00										252.901.845,00	510.530/23/BA-SOBP/DAGPERIN/XII/2025	31 Des 2025	
35	Bagian Administrasi Pembangunan																-	912/77/ADPEM/XII/2025	31 Des 2025	
36	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam																-	500/159/EKON-SDA/XII/2025	31 Des 2025	
37	Bagian Hukum																-	100.3/371/HKM/XII/2025	31 Des 2025	
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat																-	912/026/Kesra/XII/2025	31 Des 2025	
39	Bagian Organisasi																-	900/93.1/lorganisasi/XII/2025	31 Des 2025	
40	Bagian Tata Pemerintaahan																-	640/113/Tapem/XII/2025	31 Des 2025	
41	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																-	027/92/BPBJ/XII/2025	31 Des 2025	
42	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan																	027/098/BA-STOCK OPNAME/PROKOPIM/XII/2025	31 Des 2025	
43	Bagian Umum																	01/BA.SOBP-BPH/UMUM/XII/2025	31 Des 2025	
44	Sekertariat DPRD							2.100.000,00									2.100.000,00	429/677.1/SET-DPRD/XII/2025	31 Des 2025	
45	Kecamatan Menui Kepulauan																-	700/01/MK/XII/2025	31 Des 2025	
46	Kelurahan Ulunambo																-	700/699/07/XII/2025	31 Des 2025	
47	Kecamatan Bungku Selatan																-	020/0310/BA-BS/XII/2025	31 Des 2025	
48	Kecamatan Bungku Pesisir																	027/01.28/BA/BP/2025	31 Des 2025	
49	Kecamatan Bahodopi				1.190.000,00												1.190.000,00	000.2.3.1/28.1/BHDP/XII/2025	31 Des 2025	
50	Kecamatan Bungku Timur				542.342,00												542.342,00	973/3761/B.TMR/XII/2025	31 Des 2025	
51	Kecamatan Bungku Tengah																-	027/038/BT/XII/2025	31 Des 2025	
52	Kelurahan Marsaoleh																-	442/548/KEL MARS/XII/2025	31 Des 2025	
53	Kelurahan Lamberea																-	021/370/KEL.LAMB/XII/2025	31 Des 2025	
54	Kelurahan Tofoiso																-	900/390/BA-SO/TFS/XII/2025	31 Des 2025	
55	Kelurahan Matano																-	021/696/KEL.MTN/XII/2025	31 Des 2025	
56	Kelurahan Bungi																-	900/270/BAP/BNG/XII/2025	31 Des 2025	
57	Kelurahan Mendui																-	021/207.1/KEL.MEND/XII/2025	31 Des 2025	
58	Kecamatan Bungku Barat				875.070,00												875.070,00	000.2.3.1/045 /BB/XII/2025	31 Des 2025	
59	Kematatan Bumi Raya																-	000.2.3.1/1081/BR/XII/2025	31 Des 2025	
60	Kecamatan Wita Ponda																-	180/149/WP-XII/2025	31 Des 2025	
61	Kecamatan Sombori Kepulauan				1.439.000,00												1.439.000,00	900/109/BA/SOMBKEP/XII/2025	31 Des 2025	
62	Inspektorat Daerah				2.500.000,00												2.500.000,00	700/530/ITDAKAB/XII/2025	31 Des 2025	
63	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				1.905.000,00												1.905.000,00	028/01/BAPPELITBANGDA/BPH/BAPPELITBANGD/2025	31 Des 2025	
64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah				20.073.400,00												20.073.400,00	028/1075/BA/BPKAD/XII/2025	31 Des 2025	

Lampiran 19

No.	OPD	Obat-Obatan	Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Cetak	ATK	Alat Kebersihan	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Bahan Makanan	BBM	Bahan Kimia	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Alat Listrik	Alat/Bahan Kantor Lainnya	Persediaan Untuk Tujuan Trategis/Berjaga Jaga	Persediaan Isi Tabung Gas	Bahan Lainnya	Jumlah	Berita Acara Opname Barang		Ket
																		Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			191.779.350,00													191.779.350,00	970/521/BASTB-BPPD/XII/2025	31 Des 2025	
66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				2.884.000,00												2.884.000,00	800/2600/BKPSDMD/XII/2025	31 Des 2025	
Total		**7.470.489.342,95**	**14.680.910.235,82**	**947.182.596,00**	**831.704.522,64**	**18.292.100,00**	**3.250.511.161,83**	**985.800.347,19**	**21.548.491,00**	**140.573.067,16**	**10.656.580,00**	**2.076.000,00**	**135.000,00**	**916.645.256,00**	**800.000,00**	**102.403.879,80**	**29.379.728.580,38**	-		

Lampiran 20

Daftar Rincian Dana Bergulir

No.	Nama Usaha	Pemilik Usaha	Alamat	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Usaha Kios "Puungkoilu"	Abd. Karim	Puungkoilu, Bungku Tengah	6.500.000,00
2	Warung Makan Padaidi	Nurlaeli	Bente, Bungku Tengah	10.000.000,00
3	Kelompok Usaha Tani (Mina Tani)	Muh. Amin	Kolono, Bungku Timur	15.000.000,00
4	Usaha Bersama Pengelolaan Sagu	Bausar	Kolono, Bungku Timur	5.000.000,00
5	Usaha Doni Salon	Hamadong	Mendui, Bungku Tengah	10.000.000,00
6	Bengkel "Cahaya Baru"	Misrun	Tudua, Bungku Tengah	16.500.000,00
7	Jual Beli Ikan	Fatur	Puungkoilu, Bungku Tengah	3.500.000,00
8	Kios Wahyu	Najamudin Umar	Bahoruru, Bungku Tengah	20.000.000,00
9	Bengkel Las & Service	Abd. Rahman	Tofoiso, Bungku Tengah	10.000.000,00
10	Usaha Menjahit "Matano"	A. Husda Sabur	Matano, Bungku Tengah	10.000.000,00
11	Penjual Ikan Makmur	Samina	Bahoruru, Bungku Tengah	5.000.000,00
12	Jual Beli Ikan "Bahoruru"	Maida	Bahoruru, Bungku Tengah	3.500.000,00
13	Parutan Kelapa Dua Putra	Kisman	Ipi, Bungku Tengah	5.000.000,00
14	Usaha Dagang Kue	Hasmi	Bahomante, Bungku Tengah	5.000.000,00
15	Bengkel Remaja Motor	Abd. Azis	Matano, Bungku Tengah	10.000.000,00
16	Parawisata Raha-Raha Ada Rasa	Abd. Hakim Pribadi	Larobenu, Bungku Barat	5.000.000,00
17	Bengkel Las "Ungkaya"	Sirajudin	Ungkaya, Witaponda	5.000.000,00
18	Tangkap Ikan Reza Putra	Ridwan Hasyim	Bahoruru, Bungku Tengah	5.000.000,00
19	Usaha Kios "Bungi"	Gunawan	Bungi, Bungku Tengah	10.000.000,00
20	Usaha Kios "Tudua"	Benyamin	Tudua, Bungku Tengah	15.000.000,00
21	Usaha Katering Nur	Nurmin Togam	Marsaoleh, Bungku Tengah	20.000.000,00
22	Meubel Dua Putera	Sanawi	Bahoruru, Bungku Tengah	25.000.000,00
23	Usaha Seluler	Fatma. D	Bahoruru, Bungku Tengah	5.000.000,00
24	Usaha warung Pandauke	Lilis Yuniarti	Pandauke, Mamosalato	10.000.000,00
25	K. Nelayan Karamba Madani	Syamsudin	Kolonodale, Petasia	10.000.000,00
26	Usaha Jual Kue Kolonodale	Marmamo	Kolonodale, Petasia	5.000.000,00
27	Toko Puteri Kolonodale	Hj. Nuraena Roe	Kolonodale, Petasia	15.000.000,00
28	Kios Fadjar Baru	Amirudin	Tompira, Petasia	10.000.000,00
29	Usaha Perbengkelan	Abd. Rahman	Tompira, Petasia	5.000.000,00
30	Usaha Batu Bata Topogaro	Runiah Mbawi	Topogaro, B. Barat	10.000.000,00
31	Usaha Menjahit "Prima"	Ahmad Umar	Lafeu, Bungku Pesisir	10.000.000,00
32	Usaha Budidaya Itik Wosu	Taswin	Wosu, Bungku Barat	5.000.000,00
33	Usaha Peternakan Ayam Emea	Ibnu Hajar	Emea, Wita Ponda	5.000.000,00
Jumlah				**310.000.000,00**

Lampiran 21

Daftar Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa yang Menambah Nilai Aset Tetap

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tanah	139.946.600,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		139.946.600,00	
		Peralatan dan Mesin	70.806.900,00		Pemeliharaan Vidio Tron
		Beban Barang dan Jasa		70.806.900,00	
		Gedung dan Bangunan	739.570.280,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		739.570.280,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.660.000,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		169.660.000,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	192.545.720,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		192.545.720,00	
2	Puskesmas Ulunambo	Peralatan dan Mesin	10.938.621,00		Dap, Tandon dan Dudukan Tandon
		Beban Barang dan Jasa		10.938.621,00	
3	Puskesmas Bahomotefe	Tanah	9.486.000,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		9.486.000,00	
4	Puskesmas Bungku	Tanah	7.749.000,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		7.749.000,00	
		Peralatan dan Mesin	859.000,00		Kompor Gas
		Beban Barang dan Jasa		859.000,00	
5	Puskesmas Bahonsuai	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.152.580,00		Meteran Listrik
		Beban Barang dan Jasa		6.152.580,00	
6	Puskesmas Laantula Jaya	Peralatan dan Mesin	1.200.000,00		Hardisk Eksternal
		Beban Barang dan Jasa		1.200.000,00	
7	Puskesmas Tanjung Harapan	Peralatan dan Mesin	18.551.400,00		Perkakas Mesin Genset
		Beban Barang dan Jasa		18.551.400,00	
8	Puskesmas Fonuasingko	Peralatan dan Mesin	8.400.000,00		Kursi Tunggu

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Beban Barang dan Jasa		8.400.000,00	Kabel Fungga
9	RSUD Morowali	Gedung dan Bangunan	304.769.800,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		304.769.800,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	142.367.200,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		142.367.200,00	
10	RSU Salabangkapaku	Gedung dan Bangunan	471.913.000,00		Pemeliharaan Gedung
		Beban Barang dan Jasa		471.913.000,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	239.316.000,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		239.316.000,00	
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Gedung dan Bangunan	1.420.268.743,00		Pembangunan Gedung dan Bangunan
		Beban Barang dan Jasa		1.420.268.743,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.920.506,00		Instalasi Listrik
		Beban Barang dan Jasa		128.920.506,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Tanah	116.633.000,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		116.633.000,00	
		Peralatan dan Mesin	85.900.000,00		Tempat Sampah
		Beban Barang dan Jasa		85.900.000,00	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung dan Bangunan	187.469.200,00		Pemeliharaan Gedung
		Beban Barang dan Jasa		187.469.200,00	
		Peralatan dan Mesin	6.732.300.960,00		Jembatan Bailey
		Beban Barang dan Jasa		6.732.300.960,00	
14	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Gedung dan Bangunan	897.063.150,00		Pemeliharaan Gedung
		Beban Barang dan Jasa		897.063.150,00	
15	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Tanah	193.000.000,00		Perencanaan
		Beban Barang dan Jasa		193.000.000,00	
		Gedung dan Bangunan	690.571.410,00		Perencanaan
		Beban Barang dan Jasa		690.571.410,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	544.337.600,00		Broadwalk Pulau Kayangan
		Beban Barang dan Jasa		544.337.600,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	2.527.518.857,00		Perencanaan

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Beban Barang dan Jasa		2.527.518.857,00	Perencanaan
16	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Peralatan dan Mesin	79.890.000,00		Kamera dan Hardisk Eksternal
		Beban Barang dan Jasa		79.890.000,00	
17	Bagian Umum dan Perlengkapan	Gedung dan Bangunan	513.022.650,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		513.022.650,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	37.400.000,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		37.400.000,00	
18	Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin	292.565.360,00		Alat Rumah Tangga
		Beban Barang dan Jasa		292.565.360,00	
19	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Peralatan dan Mesin	198.000.000,00		Papan Nama Aset
		Beban Barang dan Jasa		198.000.000,00	
20	Inspektorat Daerah	Gedung dan Bangunan	48.990.000,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		48.990.000,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	74.900.000,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		74.900.000,00	
21	Kecamatan Bungku Selatan	Peralatan dan Mesin	950.000,00		Kompor Gas
		Beban Barang dan Jasa		950.000,00	
		Gedung dan Bangunan	164.214.000,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		164.214.000,00	
22	Kecamatan Bungku Barat	Tanah	4.646.250,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		4.646.250,00	
		Gedung dan Bangunan	30.099.450,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		30.099.450,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.646.250,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		4.646.250,00	
23	Kecamatan Bumi Raya	Tanah	189.964.600,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		189.964.600,00	
		Peralatan dan Mesin	38.440.000,00		Gorden

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Beban Barang dan Jasa		38.440.000,00	Gorden
		Gedung dan Bangunan	73.464.660,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		73.464.660,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.948.900,00		Perencanaan
		Beban Barang dan Jasa		9.948.900,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	9.945.600,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		9.945.600,00	
24	Kecamatan Wita Ponda	Gedung dan Bangunan	928.245.515,00		Pemeliharaan, Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		928.245.515,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	49.772.000,00		Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		49.772.000,00	
25	Kecamatan Bungku Pesisir	Gedung dan Bangunan	199.891.300,00		Paving Blok
		Beban Barang dan Jasa		199.891.300,00	
26	Kecamatan Sombori Kepulauan	Tanah	199.119.350,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		199.119.350,00	
27	Kelurahan Ulunambo	Tanah	34.889.000,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		34.889.000,00	
		Peralatan dan Mesin	55.253.700,00		Tenda Besi dan Kursi Plastik
		Beban Barang dan Jasa		55.253.700,00	
28	Kelurahan Matano	Gedung dan Bangunan	13.999.998,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		13.999.998,00	
29	Kelurahan Tofoiso	Peralatan dan Mesin	48.750.000,00		Gorden
		Beban Barang dan Jasa		48.750.000,00	
30	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah	Gedung dan Bangunan	3.364.628.300,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		3.364.628.300,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	496.324.290,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		496.324.290,00	
		Konstruksi dalam Pengerjaan	5.987.427.032,00		Perencanaan dan Pengawasan
		Beban Barang dan Jasa		5.987.427.032,00	

Lampiran 21

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
31	Dinas Pendidikan Daerah	Tanah	1.318.204.000,00		Penimbunan
		Beban Barang dan Jasa		1.318.204.000,00	
		Peralatan dan Mesin	172.775.531,00		Mobiler
		Beban Barang dan Jasa		172.775.531,00	
		Gedung dan Bangunan	227.060.000,00		Taman
		Beban Barang dan Jasa		227.060.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.560,00		Jaringan Listrik
		Beban Barang dan Jasa		52.411.560,00	
		Aset Tetap Lainnya	7.213.800,00		Buku
		Beban Barang dan Jasa		7.213.800,00	
Jumlah			**30.985.268.623,00**	**30.985.268.623,00**	

Lampiran 22

Daftar Koreksi Belanja Modal yang tidak Menambah Nilai Aset Tetap

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Beban Barang dan Jasa	500.101.005,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		500.101.005,00	
2	Puskesmas Ulunambo	Beban Barang dan Jasa	34.692.850,00		ATK dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		34.692.850,00	
3	Puskesmas Kaleroang	Beban Barang dan Jasa	78.954.350,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		78.954.350,00	
4	Puskesmas Lafeu	Beban Barang dan Jasa	13.316.520,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		13.316.520,00	
5	Puskesmas Bahodopi	Beban Barang dan Jasa	24.730.000,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		24.730.000,00	
6	Puskesmas Bahomotefe	Beban Barang dan Jasa	10.356.500,00		Alat Dapur dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		10.356.500,00	
7	Puskesmas Bungku	Beban Barang dan Jasa	43.508.301,00		Alat Dapur dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		43.508.301,00	
8	Puskesmas Wosu	Beban Barang dan Jasa	86.715.972,00		Alat Dapur dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		86.715.972,00	
9	Puskesmas Bahonsuai	Beban Barang dan Jasa	29.250.000,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		29.250.000,00	
10	Puskesmas Laantula Jaya	Beban Barang dan Jasa	31.079.000,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		31.079.000,00	
11	Puskesmas Tanjung Harapan	Beban Barang dan Jasa	18.049.260,00		Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		18.049.260,00	
12	Puskesmas Fonuasingko	Beban Barang dan Jasa	4.710.500,00		Bahan Komputer dan Bahan Medis

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Peralatan dan Mesin		4.710.500,00	Habis Pakai
13	RSUD Morowali	Beban Barang dan Jasa	535.069.171,00		Alat Dapur dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		535.069.171,00	
		Beban Barang dan Jasa	493.361.000,00		Pemeliharaan
		Gedung dan Bangunan		493.361.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	72.000.000,00		Kabel
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		72.000.000,00	
14	RSU Salabangkapaku	Beban Barang dan Jasa	20.356.425,00		ATK, Alat Dapur dan Bahan Medis Habis Pakai
		Peralatan dan Mesin		20.356.425,00	
15	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Beban Barang dan Jasa	35.281.342,00		ATK dan Pakaian
		Peralatan dan Mesin		35.281.342,00	
		Beban Barang dan Jasa	16.690.694.784,00		Pemeliharaan
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.690.694.784,00	
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Beban Barang dan Jasa	2.055.720,00		Kabel
		Peralatan dan Mesin		2.055.720,00	
		Beban Barang dan Jasa	188.350.000,00		Pemeliharaan
		Gedung dan Bangunan		188.350.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	9.600.000,00		Alat Dapur
		Aset Tetap Lainnya		9.600.000,00	
17	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Beban Barang dan Jasa	13.265.000,00		Pemeliharaan
		Peralatan dan Mesin		13.265.000,00	
18	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Beban Barang dan Jasa	249.923.914,00		Pasar Sementara
		Gedung dan Bangunan		249.923.914,00	
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Beban Barang dan Jasa	73.549.190,00		Alat Olahraga dan Pakaian
		Peralatan dan Mesin		73.549.190,00	
20	Bagian Umum dan Perlengkapan	Beban Barang dan Jasa	70.718.900,00		Alat Dapur dan ATK
		Peralatan dan Mesin		70.718.900,00	
		Beban Barang dan Jasa	32.044.000,00		Pemeliharaan
		Gedung dan Bangunan		32.044.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	74.340.000,00		Pakaian

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Aset Tetap Lainnya		74.340.000,00	Pakaian
21	Bagian Protokoler dan Komunikas Pimpinan	Beban Barang dan Jasa	7.550.000,00		Alat Dapur
		Aset Tetap Lainnya		7.550.000,00	
22	Sekretariat DPRD	Beban Barang dan Jasa	6.000.000,00		Alat Dapur
		Peralatan dan Mesin		6.000.000,00	
23	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Beban Barang dan Jasa	77.930.000,00		Pemeliharaan
		Gedung dan Bangunan		77.930.000,00	
24	Inspektorat Daerah	Beban Barang dan Jasa	4.000.000,00		Alat Rumah Tangga
		Peralatan dan Mesin		4.000.000,00	
25	Kecamatan Bungku Selatan	Beban Barang dan Jasa	7.700.000,00		Kain dan Bendera
		Peralatan dan Mesin		7.700.000,00	
26	Kecamatan Bungku Barat	Beban Barang dan Jasa	5.745.600,00		Alat Dapur
		Peralatan dan Mesin		5.745.600,00	
27	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Beban Barang dan Jasa	194.805.000,00		Tabloid
		Aset Tetap Lainnya		194.805.000,00	
28	Dinas Perikanan Daerah	Beban Barang dan Jasa	18.000.000,00		Sewa Videotron
		Peralatan dan Mesin		18.000.000,00	
29	Kelurahan Lamberea	Beban Barang dan Jasa	3.345.000,00		Alat Ukur
		Peralatan dan Mesin		3.345.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	141.281.511,00		Drainase (Diserahkan)
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		141.281.511,00	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Barang dan Jasa	360.309.600,00		ATK
		Peralatan dan Mesin		360.309.600,00	
		Beban Barang dan Jasa	105.248.000,00		Pagar Kawat Duri
		Gedung dan Bangunan		105.248.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	145.670.850,00		ATK
		Aset Tetap Lainnya		145.670.850,00	

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Barang dan Jasa	450.000.000,00		Pemeliharaan
		Peralatan dan Mesin		450.000.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	1.049.920.000,00		Pemeliharaan
		Gedung dan Bangunan		1.049.920.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	621.001.000,00		Pemeliharaan
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		621.001.000,00	
		Beban Barang dan Jasa	30.000.000,00		Pot Bunga
		Aset Tetap Lainnya		30.000.000,00	
Jumlah			**22.664.580.265,00**	**22.664.580.265,00**	

Lampiran 23

Daftar Reklasifikasi antara Aset Tetap

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	Tanah	4.446.988.000,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		4.446.988.000,00	
		Peralatan dan Mesin	42.069.000,00		Pemeliharaan Videotron dan Mesin Tempel
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		42.069.000,00	
		Gedung dan Bangunan	9.400.000,00		Perencanaan Rumah Singga
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		9.400.000,00	
		Gedung dan Bangunan	338.884.000,00		Perencanaan yang fisik bangunannya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		338.884.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.257.900,00		IPAL
		Peralatan dan Mesin		397.257.900,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.475.000,00		Pengawasan Jalan
		Gedung dan Bangunan		7.475.000,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.001.980.000,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		8.001.980.000,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah	1.395.602.222,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		1.395.602.222,00	
		Tanah	9.802.200,00		Penimbunan
		Aset Tetap Lainnya		9.802.200,00	
		Peralatan dan Mesin	159.860.000,00		Mobiler
		Gedung dan Bangunan		159.860.000,00	
		Peralatan dan Mesin	306.755.090,00		Mobiler dan Alat Kesenian
		Aset Tetap Lainnya		306.755.090,00	
		Gedung dan Bangunan	323.632.000,00		Taman
		Peralatan dan Mesin		323.632.000,00	
		Gedung dan Bangunan	227.952.000,00		Paving Blok
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		227.952.000,00	
		Gedung dan Bangunan	17.460.000,00		Taman
		Aset Tetap Lainnya		17.460.000,00	
		Gedung dan Bangunan	10.835.793.965,52		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		10.835.793.965,52	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.475.000,00		Meteran Listrik
		Peralatan dan Mesin		21.475.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	349.723.000,00		Tanggul
		Gedung dan Bangunan		349.723.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000,00		Meteran Listrik

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Aset Tetap Lainnya		8.000.000,00	Meteran Listrik
		Aset Tetap Lainnya	7.499.200,00		Peralatan dan Mesin
		Peralatan dan Mesin		7.499.200,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.310.361.875,63		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		2.310.361.875,63	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Tanah	200.000.000,00		Pematangan Lahan
		Gedung dan Bangunan		200.000.000,00	
		Tanah	3.494.144.722,00		Reklamasi Pantai
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.494.144.722,00	
		Gedung dan Bangunan	101.210.232.602,98		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		101.210.232.602,98	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	224.880.000,00		MCK
		Peralatan dan Mesin		224.880.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	800.000.000,00		Jalan
		Gedung dan Bangunan		800.000.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.543.838.158,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		43.543.838.158,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.335.803.231,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		26.335.803.231,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.006.032.509,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		13.006.032.509,00	
4	RSUD Morowali	Peralatan dan Mesin	110.238.814,00		Mobiler
		Gedung dan Bangunan		110.238.814,00	
		Peralatan dan Mesin	1.642.800.000,00		Genset
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.642.800.000,00	
		Gedung dan Bangunan	4.175.900.000,00		MOT
		Peralatan dan Mesin		4.175.900.000,00	
		Gedung dan Bangunan	10.598.148.972,71		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		205.640.360,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.410.382.135,20		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		2.410.382.135,20	
5	RSU Salabangkapaku	Peralatan dan Mesin	552.000.000,00		Genset
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		552.000.000,00	
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Peralatan dan Mesin	62.433.504,00		Meja Partisi
		Gedung dan Bangunan		62.433.504,00	
		Peralatan dan Mesin	2.876.225.500,00		Genset

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.876.225.500,00	Genset
		Gedung dan Bangunan	806.712.512,00		Gedung
		Tanah		806.712.512,00	
		Gedung dan Bangunan	709.500.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		709.500.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	699.000.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		699.000.000,00	
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tanah	2.987.458.465,00		Land Clearing
		Gedung dan Bangunan		2.987.458.465,00	
8	Dinas Perhubungan Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.594.477.645,16		Tambatan Perahu
		Gedung dan Bangunan		11.594.477.645,16	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	798.745.500,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		798.745.500,00	
9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Tanah	580.538.200,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		580.538.200,00	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.918.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		49.918.000,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.500.000,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		99.500.000,00	
11	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Tanah	998.497.119,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		998.497.119,00	
		Peralatan dan Mesin	31.992.040,00		Tandon, Mesin Pompa Air, Tower
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		31.992.040,00	
		Gedung dan Bangunan	399.676.200,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		399.676.200,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.552.000,00		Meteran Listrik
		Peralatan dan Mesin		6.552.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	296.265.500,00		Deker Plat
		Gedung dan Bangunan		296.265.500,00	
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Tanah	2.953.434.946,00		Penimbunan dan Land Clearing
		Gedung dan Bangunan		2.953.434.946,00	
		Gedung dan Bangunan	8.382.098.500,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		8.382.098.500,00	Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	876.295.400,00		
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		876.295.400,00	Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.808.274.209,00		
		Gedung dan Bangunan		25.808.274.209,00	
13	Bagian Umum	Tanah	90.524.001,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		90.524.001,00	
		Peralatan dan Mesin	27.116.186,00		Tandon dan Mesin Pompa Air
		Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.116.186,00	
		Peralatan dan Mesin	16.161.600,00		Hiasan Dinding
		Aset Tetap Lainnya		16.161.600,00	
		Gedung dan Bangunan	49.800.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		49.800.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.999.272,00		Drainase
		Gedung dan Bangunan		91.999.272,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	171.632.775,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		171.632.775,00	
14	Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Gedung dan Bangunan	705.127.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		705.127.000,00	
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Gedung dan Bangunan	74.750.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		74.750.000,00	
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Gedung dan Bangunan	307.170.000,00		Bangunan yang fisiknya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		307.170.000,00	
17	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tanah	1.454.340.248,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		1.454.340.248,00	
18	Inspektorat Daerah	Peralatan dan Mesin	34.827.520,00		Mobiler
		Gedung dan Bangunan		34.827.520,00	
		Peralatan dan Mesin	9.800.000,00		Mobiler
		Aset Tetap Lainnya		9.800.000,00	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.940.000,00		Tanggul
		Gedung dan Bangunan		198.940.000,00	
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.479.874.000,00		Bangunan yang fisiknya belum 100%
		Gedung dan Bangunan		2.479.874.000,00	

Lampiran 23

No.	OPD	Uraian	Mutasi		Keterangan
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6
19	Kecamatan Bungku Selatan	Gedung dan Bangunan	198.996.000,00		Perencanaan yang fisik bangunannya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		198.996.000,00	
20	Kecamatan Bungku Barat	Tanah	180.395.632,00		Penimbunan
		Gedung dan Bangunan		180.395.632,00	
21	Kecamatan Bahodopi	Gedung dan Bangunan	38.500.000,00		Interior
		Peralatan dan Mesin		38.500.000,00	
22	Kecamatan Bungku Pesisir	Gedung dan Bangunan	20.868.000,00		Perencanaan yang fisik bangunannya sudah 100%
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		20.868.000,00	
Jumlah			**304.690.789.072,20**	**294.298.280.459,49**	

Lampiran 24

Daftar Reklasifikasi Aset tetap
Konstruksi dalam Pengerjaan

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah**								
	1	Perencanaan Bangunan Gedung Diklat pada Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektural	2022	299.000.000,00			299.000.000,00		Dihentikan Permanen
	Sub Jumlah			**299.000.000,00**	**-**	**-**	**299.000.000,00**		
II	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**								
	1	Pekerjaan Perencanaan Tanggul Pemecah Ombak Pantai Moahino	2016	49.918.000,00		49.918.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	2	Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (Break Water) Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah (30 %)	2024	150.000.000,00			150.000.000,00		Dihentikan Permanen
	3	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Torete	2025		99.500.000,00		99.500.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**199.918.000,00**	**99.500.000,00**	**49.918.000,00**	**249.500.000,00**		
III	**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**								
	1	Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop Kantor BPKAD Kab Morowali	2023	74.750.000,00		74.750.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**74.750.000,00**	**-**	**74.750.000,00**	**-**		
IV	**Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan**								
	1	Pembangunan MDA Desa Makarti Jaya Kec. Bahodopi	2023	199.917.000,00			199.917.000,00		Dihentikan Permanen
	2	Pembangunan MDA Desa Larobenu Kec. Bungku Barat	2023	199.827.000,00			199.827.000,00		Dihentikan Permanen
	3	Pembangunan MDA Desa Limbo Makmur Kec. Bumi Raya	2023	199.927.000,00			199.927.000,00		Dihentikan Permanen
	4	Pembangunan MDA Desa Sakita Kec. Bungku Tengah	2023	199.877.000,00			199.877.000,00		Dihentikan Permanen
	5	Pembangunan MDA Desa Tudua Kec. Bungku Tengah	2023	199.912.000,00			199.912.000,00		Dihentikan Permanen
	6	Pembangunan MDA Desa Terebino Kec. Menui Kepulauan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	7	Pembangunan MDA Desa Padei Darat Kec. Menui Kepulauan	2023	199.953.000,00			199.953.000,00		Dihentikan Permanen
	8	Pembangunan MDA Desa Bahomotefe Kec. Bungku Timur	2023	199.965.000,00			199.965.000,00		Dihentikan Permanen
	9	Pembangunan MDA Desa Bahomoahi Kec. Bungku Timur	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	10	Pembangunan MDA Desa Poaro Kec. Bungku Selatan	2023	199.876.500,00			199.876.500,00		Dihentikan Permanen
	11	Pembangunan MDA Desa Umbele Lama Kec. Bungku Selatan	2023	199.876.527,00			199.876.527,00		Dihentikan Permanen
	12	Pembangunan MDA Desa Bete-Bete Kec. Bahodopi	2023	199.862.000,00			199.862.000,00		Dihentikan Permanen
	13	Pembangunan MDA Desa Padabaho Kec. Bahodopi	2023	199.912.000,00			199.912.000,00		Dihentikan Permanen
	14	Pembangunan MDA Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi	2023	199.812.000,00			199.812.000,00		Dihentikan Permanen
	15	Pembangunan MDA Desa Labota Kec. Bahodopi	2023	199.927.000,00			199.927.000,00		Dihentikan Permanen

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	16	Pembangunan MDA Desa Geresa Kec. Bungku Timur	2023	199.902.000,00			199.902.000,00		Dihentikan Permanen
	17	Pembangunan MDA Desa Le-Le Kec. Bahodopi	2023	199.957.000,00			199.957.000,00		Dihentikan Permanen
	18	Pembangunan MDA Desa Atananga Kec. Bumi Raya	2023	199.947.000,00			199.947.000,00		Dihentikan Permanen
	19	Pembangunan MDA Desa Padalaa Kec. Menui Kepulauan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	20	Pembangunan MDA Desa Bumi Harapan Kec. Wita Ponda	2023	199.870.000,00			199.870.000,00		Dihentikan Permanen
	21	Pembangunan MDA Desa Laantula Jaya Kec. Wita Ponda	2023	199.850.000,00			199.850.000,00		Dihentikan Permanen
	22	Pembangunan MDA Desa Puntari Makmur Kec. Wita Ponda	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	23	Pembangunan MDA Desa Buranga Kec. Menui Kepulauan	2023	199.923.000,00			199.923.000,00		Dihentikan Permanen
	24	Pembangunan MDA Desa Morompaitonga Kec. Menui Kepulauan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	25	Pembangunan MDA Kel. Matano Kec. Bungku Tengah	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	26	Pembangunan MDA Desa Lambelu Kec. Bumi Raya	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	27	Pembangunan MDA Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	28	Pembangunan MDA Desa Unsongi Kec. Bungku Timur	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	29	Pembangunan MDA Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya	2023	199.933.000,00			199.933.000,00		Dihentikan Permanen
	30	Pembangunan MDA Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah	2023	199.898.000,00			199.898.000,00		Dihentikan Permanen
	31	Pembangunan MDA Desa Karaupa Kec. Bumi Raya	2023	199.941.000,00			199.941.000,00		Dihentikan Permanen
	32	Pembangunan MDA Desa Ngapaea Kec. Menui Kepulauan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	33	Pembangunan MDA Desa Nambo Kec. Bungku Timur	2023	199.916.000,00			199.916.000,00		Dihentikan Permanen
	34	Pembangunan MDA Desa Kofalagadi Kec. Menui Kepulauan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	35	Pembangunan MDA Desa Laroue Kec. Bungku Timur	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	36	Pembangunan MDA Desa Moahino Kec. Wita Ponda	2023	199.586.000,00			199.586.000,00		Dihentikan Permanen
	37	Pembangunan MDA Desa Torukuno Kec. Menui Kepulauan	2023	199.968.000,00			199.968.000,00		Dihentikan Permanen
	38	Pembangunan MDA Desa Emea Kec. Wita Ponda	2023	199.827.000,00			199.827.000,00		Dihentikan Permanen
	39	Pembangunan MDA Desa Dongkalan Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.850.000,00			199.850.000,00		Dihentikan Permanen
	40	Pembangunan MDA Desa Bungintende Kec. Bungku Selatan	2023	199.850.000,00			199.850.000,00		Dihentikan Permanen

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	41	Pembangunan MDA Desa Ululere Kec. Bungku Timur	2023	199.977.000,00			199.977.000,00		Dihentikan Permanen
	42	Pembangunan MDA Desa Pebatae Kec. Bumi Raya	2023	199.939.000,00			199.939.000,00		Dihentikan Permanen
	43	Pembangunan MDA Desa Sampeantaba Kec. Wita Ponda	2023	199.902.142,00			199.902.142,00		Dihentikan Permanen
	44	Pembangunan MDA Desa Pebotoa Kec. Bumi Raya	2023	199.913.000,00			199.913.000,00		Dihentikan Permanen
	45	Pembangunan MDA Desa Uedago Kec. Bungku Barat	2023	199.890.000,00			199.890.000,00		Dihentikan Permanen
	46	Pembangunan MDA Desa Keurea Kec. Bahodopi	2023	199.935.000,00			199.935.000,00		Dihentikan Permanen
	47	Pembangunan MDA Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	2023	199.827.000,00			199.827.000,00		Dihentikan Permanen
	48	Pembangunan MDA Desa Lalemo Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	49	Pembangunan MDA Desa Puungkoilu Kec. Bungku Tengah	2023	199.877.000,00			199.877.000,00		Dihentikan Permanen
	50	Pembangunan MDA Desa Wawongkolono Kec. Menui Kepulauan	2023	199.943.000,00			199.943.000,00		Dihentikan Permanen
	51	Pembangunan MDA Desa Padei Laut Kec. Menui Kepulauan	2023	199.673.000,00			199.673.000,00		Dihentikan Permanen
	52	Pembangunan MDA Desa Tofuti Kec. Bungku Tengah	2023	199.912.000,00			199.912.000,00		Dihentikan Permanen
	53	Pembangunan MDA Desa Paku Kec. Bungku Selatan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	54	Pembangunan MDA Desa Panimbawang Kec. Bungku Selatan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	55	Pembangunan MDA Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah	2023	199.903.000,00			199.903.000,00		Dihentikan Permanen
	56	Pembangunan MDA Desa Padabale Kec. Bungku Selatan	2023	199.949.000,00			199.949.000,00		Dihentikan Permanen
	57	Pembangunan MDA Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah	2023	199.877.000,00			199.877.000,00		Dihentikan Permanen
	58	Pembangunan MDA Desa Tafagapi Kec. Menui Kepulauan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	59	Pembangunan MDA Desa Sainoa Kec. Bungku Selatan	2023	199.923.000,00			199.923.000,00		Dihentikan Permanen
	60	Pembangunan MDA Desa Lamberea Kec. Bungku Tengah	2023	199.912.000,00			199.912.000,00		Dihentikan Permanen
	61	Pembangunan MDA Desa Laorenai Kec. Bungku Pesisir	2023	199.890.000,00			199.890.000,00		Dihentikan Permanen
	62	Pembangunan MDA Desa Puungkeu Kec. Bungku Pesisir	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	63	Pembangunan MDA Desa Po'o Kec. Bungku Selatan	2023	199.890.000,00			199.890.000,00		Dihentikan Permanen
	64	Pembangunan MDA Desa Torete Kec. Bungku Pesisir	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	65	Pembangunan MDA Desa Ulunipa Kec. Menui Kepulauan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	66	Pembangunan MDA Desa Lakombulo Kec. Bungku Selatan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	67	Pembangunan MDA Desa Waru-Waru Kec. Bungku Selatan	2023	199.873.000,00			199.873.000,00		Dihentikan Permanen
	68	Pembangunan MDA Desa Tanona Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.968.000,00			199.968.000,00		Dihentikan Permanen
	69	Pembangunan MDA Desa Beringin Jaya Kec. Bumi Raya	2023	199.962.000,00			199.962.000,00		Dihentikan Permanen
	70	Pembangunan MDA Desa Pulau Bapa Kec. Bungku Selatan	2023	199.913.000,00			199.913.000,00		Dihentikan Permanen
	71	Pembangunan MDA Desa Samarengga Kec. Menui Kepulauan	2023	199.904.000,00			199.904.000,00		Dihentikan Permanen
	72	Pebanguanan MDA Desa Matarape Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.968.000,00			199.968.000,00		Dihentikan Permanen
	73	Pembangunan MDA Desa Lamontoli Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.375.000,00			199.375.000,00		Dihentikan Permanen
	74	Pembangunan MDA Desa Were'ea Kec. Bungku Pesisir	2023	199.425.000,00			199.425.000,00		Dihentikan Permanen
	75	Pembangunan MDA Desa Lafeu Kec. Bungku Pesisir	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen
	76	Pembangunan MDA Desa Lanona Kec. Bungku Tengah	2023	199.877.000,00			199.877.000,00		Dihentikan Permanen
	77	Pembangunan MDA Desa Boelimau Kec. Bungku Selatan	2023	199.757.000,00			199.757.000,00		Dihentikan Permanen
	78	Pembangunan MDA Desa Tanjung Tiram Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.968.000,00			199.968.000,00		Dihentikan Permanen
	79	Pembangunan MDA Desa Matano Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.988.000,00			199.988.000,00		Dihentikan Permanen
	80	Pembangunan MDA Desa Pulau Tiga Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.954.000,00			199.954.000,00		Dihentikan Permanen
	81	Pembangunan MDA Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan	2023	199.810.000,00			199.810.000,00		Dihentikan Permanen
	82	Pembangunan MDA Desa Tanjung Harapan Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.948.000,00			199.948.000,00		Dihentikan Permanen
	83	Pembangunan MDA Desa Umpanga Kec. Bungku Barat	2023	199.759.000,00			199.759.000,00		Dihentikan Permanen
	84	Pembangunan MDA Desa Ipi Kec. Bungku Tengah	2023	199.870.000,00			199.870.000,00		Dihentikan Permanen
	85	Pembangunan MDA Desa Pado-Pado Kec. Bungku Selatan	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	86	Pembangunan MDA Desa One Ete Kec. Bungku Pesisir	2023	199.947.000,00			199.947.000,00		Dihentikan Permanen
	87	Pembangunan MDA Desa Parilangke Kec. Bumi Raya	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	88	Pembangunan MDA Desa Buajangka Kec. Bungku Selatan	2023	199.973.000,00			199.973.000,00		Dihentikan Permanen
	89	Pembangunan MDA Desa Polewali Kec. Bungku Selatan	2023	199.953.000,00			199.953.000,00		Dihentikan Permanen
	90	Pembangunan MDA Desa Bakala Kec. Bungku Selatan	2023	199.950.000,00			199.950.000,00		Dihentikan Permanen

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	91	Pembangunan MDA Desa Pulau Tengah Kec. Sombori Kepulauan	2023	199.900.000,00			199.900.000,00		Dihentikan Permanen
	92	Pembangunan MDA Desa Koburu Kec. Bungku Selatan	2023	199.970.000,00			199.970.000,00		Dihentikan Permanen
	93	Pembangunan MDA Desa Bahontobungku Kec. Bungku Tengah	2023	199.917.000,00			199.917.000,00		Dihentikan Permanen
	94	Pembangunan MDA Desa Bahoea Reko-Reko Kec. Bungku Barat	2023	199.902.000,00			199.902.000,00		Dihentikan Permanen
	95	Pembangunan MDA Desa Lahuafu Kec. Bungku Timur	2023	199.955.000,00			199.955.000,00		Dihentikan Permanen
	96	Pembangunan MDA Desa Samarenda Kec. Bumi Raya	2023	199.965.000,00			199.965.000,00		Dihentikan Permanen
	97	Pembangunan MDA Desa Umbele Kec. Bumi Raya	2023	199.947.000,00			199.947.000,00		Dihentikan Permanen
		Sub Jumlah		**19.390.407.169,00**	**-**	**-**	**19.390.407.169,00**		
V		**Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**							
	1	Pembangunan Gedung Kantor Camat Bungku Timur (Lanjutan) Tahap II tahun 2015	2015	199.912.000,00		199.912.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	2	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Mendui	2017	199.560.000,00		199.560.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	3	Perencanaan Kantor Kelurahan Mendui	2018	24.975.000,00		24.975.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	4	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Lurah Mendui	2020	199.500.000,00		199.500.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	5	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Ulunambo	2020	31.350.000,00		31.350.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	6	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Bahodopi	2020	49.830.000,00		49.830.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
		Sub Jumlah		**705.127.000,00**	**-**	**705.127.000,00**	**-**		
VI		**Bagian Umum dan Perlengkapan**							
	1	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	2014	49.800.000,00		49.800.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	2	Pekerjaan Gedung Galeri Atm Kantor Bupati	2025		209.032.775,00		209.032.775,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
		Sub Jumlah		**49.800.000,00**	**209.032.775,00**	**49.800.000,00**	**209.032.775,00**		
VII		**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah**							
	1	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Radiologi Rumah Sakit Pepakulia	2024	79.722.000,00			79.722.000,00		Dihentikan Sementara
	2	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pepakulia	2024	79.722.000,00		79.722.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	3	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit Pepakulia	2024	79.722.000,00		79.722.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	4	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Pepakulia	2024	79.722.000,00			79.722.000,00		Dihentikan Sementara
	5	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Dapur dan Gizi Rumah Sakit Pepakulia	2024	79.722.000,00		79.722.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	6	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (IRNA) Rumah Sakit Pepakulia	2024	99.718.000,00		99.718.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	7	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Ruang Tindakan Bedah Operasi Rumah Sakit Pepakulia	2024	99.718.000,00			99.718.000,00		Dihentikan Sementara
	8	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pepakulia + Perencanaan dan Pengawasan	2024	99.988.000,00	4.020.398.860,00		4.120.386.860,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	9	Pembangunan Gedung Instalasi Kebidanan Rumah Sakit Pepakulia + Perencanaan dan Pengawasan	2024	99.988.000,00	4.174.126.860,00		4.274.114.860,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**798.022.000,00**	**8.194.525.720,00**	**338.884.000,00**	**8.653.663.720,00**		
VIII	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah**								
	1	Pekerjaan Perencanaan Gedung Pertemuan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Morowali	2023	15.000.000,00			15.000.000,00		Dihentikan Sementara
	Sub Jumlah			**15.000.000,00**	**-**	**-**	**15.000.000,00**		
IX	**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah**								
	1	Perencanaan Dermaga TPI	2015	280.940.000,00			280.940.000,00		Dihentikan Permanen
	2	Pekerjaan Perencanaan Taman Gerbang Naka yang dibebankan Pada Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	2016	49.912.500,00			49.912.500,00		Dihentikan Permanen
	3	Perencanaan taman median Fonuasingko	2016	49.956.500,00		49.956.500,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	4	Perencanaan Tugu Desa Kolono	2016	49.907.000,00			49.907.000,00		Dihentikan Permanen
	5	Perencanaan Taman Kompleks DPRD	2016	49.940.000,00		49.940.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	6	Perencanaan Taman Stadion Fonuasingko	2016	49.956.500,00		49.956.500,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	7	Perencanaan taman gedung Olahraga	2016	49.995.000,00		49.995.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	8	Perencanaan Taman Ipi	2016	49.967.500,00		49.967.500,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	9	Perencanaan Bundaran Bungku Tengah	2016	49.962.000,00		49.962.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	10	Perencanaan Taman Rujab Wabup	2016	49.885.000,00		49.885.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	11	Perencanaan Taman Gerbang Bahomohoni	2016	49.940.000,00		49.940.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	12	Pekerjaan Perencanaan Tanggul Sakita	2016	49.830.000,00		49.830.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	13	Perencanaan Tanggul SDN 4 Lamberea	2016	49.956.000,00		49.956.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	14	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Ringroad Bawah Fonuasingko - Bahomoleo +Perencanaan	2016	721.440.500,00		721.440.500,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	15	Pekerjaan Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Laroenai Kec. Bungku Pesisir	2016	8.321.000,00		8.321.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	16	Pekerjaan Perencanaan jalan pulau waru-waru	2016	347.710.000,00		347.710.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	17	Perencanaan Tanggul desa bete-bete	2016	49.725.000,00		49.725.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	18	Perencanaan Tanggul pantai laroue	2016	49.918.000,00		49.918.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	19	Perencanaan tanggul pebotoa - bahonsuai	2016	49.940.000,00		49.940.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	20	Perancanaan Pembangunan Jalan Penghubung Waru-waru Padabale	2016	295.250.000,00			295.250.000,00		Akan Dilanjutkan
	21	Pekerjaan Trotoar Kota Bungku	2017	1.219.000.000,00		1.219.000.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	22	Perencanaan pintu gerbang Morowali-Sultra	2017	98.350.000,00			98.350.000,00		Dihentikan Permanen
	23	Pekerjaan Pembangunan Talud Bahonsuai - Pebotoa	2017	1.264.857.000,00		1.264.857.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	24	Pembgn. Talud Desa Moahino	2017	199.788.000,00		199.788.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	25	pekerjaan perencanaan jembatan Bangkampusu Kec. Bungku Tengah	2017	745.000.000,00		745.000.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	26	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pebotoa	2017	248.600.000,00		248.600.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	27	Perencanaan Pembangunan Jalan Matabaho Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	2020	49.870.000,00		49.870.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	28	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Lamberea-Pasar Bungku	2020	311.657.500,00		311.657.500,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	29	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Bahomohoni - Kampus II UNTAD	2020	99.900.000,00		99.900.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	30	Pekerjaan Perencanaan Jembatan Penghubung Desa Bahomoleo Dusun La la	2020	49.885.000,00		49.885.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	31	Perencanaan Drainase Dalam Kota	2020	99.900.000,00		99.900.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	32	Pembangunan Tanggul Pantai (Break Water) Desa Bete-bete Kec. Bahodopi	2020	599.511.408,00		599.511.408,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	33	Pembangunan Pantai Matano + Pengawasan	2021	7.014.115.175,00		7.014.115.175,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	34	Lanscape Rujab Wakil Bupati	2021	313.596.000,00		313.596.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	35	Bangunan Lanscape Kantor DPUPRD (Swakelola)	2022	199.944.000,00		199.944.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	36	Pekerjaan pembangunan anjungan pantai matano (Lanjutan) Perencanaan Anjungan Pantai Matano + Pengawasan	2022	20.497.639.250,00		20.497.639.250,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	37	Perencanaan Sirkuit Kab. Morowali	2022	299.050.650,00			299.050.650,00		Dihentikan Permanen
	38	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bahomoahi Lama - Bahomoahi Baru	2022	399.742.080,00		399.742.080,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	39	Pembangunan taman pantai Matano+perencanaan	2023	3.685.484.064,00		3.685.484.064,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	40	Pekerjaan Pembangunan Anjungan Kelurahan Marsaoleh+ Perencanaan,pengawasan	2023	3.097.165.414,00		3.097.165.414,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	41	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rujab Camat Bungku Tengah	2023	99.900.000,00			99.900.000,00		Dihentikan Permanen
	42	Perencanaan Wisma Atlit yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah	2023	494.699.250,00			494.699.250,00		Dihentikan Permanen
	43	Pekerjaan Perencanaan Stadion Yang Berloksi Di Kecamatan Bungku Tengah	2023	786.844.173,00		786.844.173,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	44	Perencanaan Kantor Lurah Bungi Yang Berloksi Di Kec. Bungku Tengah	2023	99.950.000,00			99.950.000,00		Dihentikan Permanen
	45	Perencanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat Sombori	2023	148.846.227,00		148.846.227,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	46	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Gedung Pemerintah (rehab rumah polres)	2023	49.950.000,00		49.950.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	47	Pekerjaan Rehab Kantor Keuangan Lama+Perencanaan, Pengawasan	2023	1.886.846.816,00		1.886.846.816,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	48	Pekerjaan Rehab Kantor Bupati Morowali yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah+pengawasan	2023	8.067.704.932,00		8.067.704.932,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	49	Pekerjaan Perencanaan bangunan DED IPLT (Instalasi pengolahan limbah)Kabupaten Morowali Yang Berloksi Di Kec. Bungku Tengah	2023	297.258.000,00		297.258.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	50	Rehab Mess Pemda alih fungsi rujab camat bunmgku selatan	2023	199.400.000,00		199.400.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	51	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan I Ruas Ungkaya - Moahino	2023	99.733.500,00		99.733.500,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	52	Perencanaan Jalan Ringroad Atas KTM - Bungku	2023	695.685.562,00		695.685.562,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	53	Perencanaan Break water yang berlokasi tersebar dikabupaten morowali	2023	49.850.000,00		49.850.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	54	Perencanaan pembangunan Breakwater desa bente kec.bungku tengah	2023	99.944.000,00			99.944.000,00		Dihentikan Permanen
	55	Perencanaan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai (lainnya) tersebar dikab. morowali	2023	149.649.000,00		149.649.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	56	Perencanaan pembangunan jembatan yang berlokasi di kab.morowali	2023	248.484.600,00		248.484.600,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	57	Pekerjaan perencanaan pembangunan jalan yang berlokasi dikec.bungku tengah	2023	141.425.100,00		141.425.100,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	58	Perencanaan peningkatan jalan yang berlokasi di kab.morowali	2023	298.090.500,00		298.090.500,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	59	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tanggul Sungai	2023	149.649.000,00		149.649.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	60	pekerjaan Pembangunan Mes Pegawai Kejaksaan +Perencanaan	2024	755.381.479,40		755.381.479,40	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	61	Pembangunan Aula Pemerintahan Morowali+Perencanaan,Pengawasan (Aula Kejaksaan)	2024	885.657.352,27		885.657.352,27	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	62	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Morowali	2024	2.464.524.751,20		2.464.524.751,20	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	63	pekerjaan Pembangunan Rumah Tahanan Kejaksaan + Perencanaan	2024	412.304.280,05		412.304.280,05	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	64	pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Pemda (Rumah Kejari) + Perencanaan, Pengawasan	2024	855.244.000,00		855.244.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	65	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Kasi Kejaksaan + Perencanaan,Pengawasan	2024	567.497.818,06		567.497.818,06	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	66	Pekerjaan Pembangunan Bangunnan Barak SPN Labuan+ Perencanaan, Pengawasan	2024	5.532.332.764,00		5.532.332.764,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	67	Pekerjaan Pembangunan Gedung Satrekim & Satnarkoba	2024	4.570.365.000,00		4.570.365.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	68	pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Modern Bungku	2024	798.517.627,00			798.517.627,00		Dihentikan Sementara
	69	Pekerjaan Pembangunan Gudang Kejaksaan yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah	2024	420.471.673,00		420.471.673,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	70	Pekerjaan Pekerjaan Interior Gedung Aula Wicaksana Laghawa Polres + Perencanaan, Pengawasan	2024	1.557.894.471,00		1.557.894.471,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	71	Pembayaran sebesar 100% Perencanaan Ruang Publik Kelurahan Marsaoleh	2024	99.310.000,00			99.310.000,00		Dihentikan Sementara
	72	Pembayaran sebesar 100% Perencanaan Lapangan Tembak Tepeasa Moroso	2024	99.650.000,00		99.650.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	73	Perencanaan Pintu Gerbang Batas Morowali, Morut	2024	99.765.000,00			99.765.000,00		Dihentikan Sementara
	74	pekerjaan Perencanaan Rumah Dinas Gedung Pemerintah (Wakapolres)	2024	79.970.000,00		79.970.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	75	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum Kegiatan 2025 (mesjid terapung,terminal, RPH Kel.Marsaoleh	2024	1.994.581.605,00			1.994.581.605,00		Dihentikan Sementara
	76	pekarjaan Rekonstruksi Jalan Lingkungan Dusun 2 Desa Margamulya (Ruas Jalan Margamulya 8)	2024	133.686.891,00		133.686.891,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	77	Pekerjaan Pembangunan Jalan Kecamatan Sombori Kepulauan Tahap II (Ruas Lalemo-Matano, SP3 Tanjung Harapan,Tanjung Harapan-Tanona)	2024	2.741.700.000,00		2.741.700.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	78	Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Wosu - Trans Wosu (DBH Sawit) (Ruas Jalan wosu 10, Ruasa Jalan Wosu-Trans Wosu 1, Ruas Wosu-Trans Wosu 4)+ Pengawasan	2024	1.973.984.182,00		1.973.984.182,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	79	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Pebatae - Bandara Maleo+Pengawasan	2024	7.035.302.235,00		7.035.302.235,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	80	pekerjaan Pembungan Talud Penahan Tebing Halaman Kantor Kejaksaan+Pengawasan	2024	5.541.990.000,00		5.541.990.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	81	pekerjaan Pembangunan Jembatan Bahomoahi Lama - Bahomoahi Baru	2024	8.601.334.450,00		8.601.334.450,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	82	pekerjaan Pembangunan Jembatan Bangkampusu (Ruas Dalam Kota Bungku)	2024	8.874.850.000,00		8.874.850.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	83	Pembayaran sebesar 100% Perencanaan Jalan Pebatae-Umbele	2024	99.850.050,00		99.850.050,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	90	Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Koperasi	2025		198.900.000,00		198.900.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Dihentikan Sementara
	91	Mess dan Ruang Arsip DPUPRD Morowali	2025		99.877.000,00		99.877.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Dihentikan Sementara
	93	Perencanaan Rehab Bundaran KTM	2025		259.795.500,00		259.795.500,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	94	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Solonsa Jaya yang berlokasi Di Kecamatan Wita Ponda (Ruas solonsa jaya 9)	2025		490.743.120,00		490.743.120,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	95	Rekonstruksi Jalan Kecamatan Sombori Kepulauan (Ruas SP 3 Jl. Provinsi-Lamontoli, Lamontoli-Lalemo, Lalemo-Matano)	2025		4.926.577.575,00		4.926.577.575,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	96	Pembangunan Jalan Produksi Desa Ipi (Non Status)+ Perencanaan	2025		1.028.385.000,00		1.028.385.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	97	Perencanaan Jembatan Kabera	2025		99.471.000,00		99.471.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	98	Perencanaan Box Culvert Jln. Wisata Tompaika	2025		99.900.000,00		99.900.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dihentikan Sementara
	99	Perencanaan Jembatan Lengkono Bahomotefe (Ruas Bahomotefe 1)	2025		99.900.000,00		99.900.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	100	Perencanaan Jembatan Polo Di Kecamatan Bungku Barat	2025		494.649.300,00		494.649.300,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	101	Pembangunan Jembatan Dalam Desa Lalemo	2025		787.854.163,00		787.854.163,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	102	Pembangunan Drainase Tertutup Kel. Mendui Kompleks Kantor Kejaksaan Lama	2025		284.646.051,00		284.646.051,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**113.155.584.329,98**	**8.870.698.709,00**	**108.295.506.697,98**	**13.730.776.341,00**		
X	**Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah**								
	1	Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi GOR Fonuasingko	2024	99.927.000,00			99.927.000,00		Akan Dilanjutkan
	2	Pekerjaan Pembangunan GOR Bulutangkis + Renwas	2024	8.382.098.500,00		8.382.098.500,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	3	Boardwalk Pulau Kayangan Sombori + Renwas	2024	876.295.400,00		876.295.400,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	4	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Disporapar	2025		523.869.845,00		523.869.845,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	5	Pembangunan Lintasan BMX Outdoor + Perencanaan	2025		1.990.329.525,00		1.990.329.525,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	6	Pembangunan GOR Futsal + Perencanaan	2025		4.292.150.589,00		4.292.150.589,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	7	Pembangunan Gelanggang Renang + Perencanaan	2025		3.786.992.734,00		3.786.992.734,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	8	Pembangunan GOR Bola Basket + Perencanaan	2025		4.214.146.521,00		4.214.146.521,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	9	Pembangunan GOR Pencak Silat, Karate, Taekwondo dan Judo + Perencanaan (Sport Center)	2025		10.313.697.000,00		10.313.697.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	10	Pekerjaan Perencanaan Gedung Morowali Creative and Cultural Hub	2025		199.578.000,00		199.578.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Dihentikan Sementara
	11	Rehab Gor (- Ganti atap dan lantai dan Finishing Dinding)	2025		2.751.552.592,00		2.751.552.592,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	12	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Venue Paralayang	2025		23.976.000,00		23.976.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Dihentikan Sementara
	13	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan GOR Tenis Meja dan Biliar	2025		239.500.260,00		239.500.260,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Dihentikan Sementara
	Sub Jumlah			**9.358.320.900,00**	**28.335.793.066,00**	**9.258.393.900,00**	**28.435.720.066,00**		
XI	**Dinas Pendidikan Daerah**								
	1	Pembangunan Pagar SDN 10 Bungku (Matansala) + Renwas	2020	178.040.000,00		178.040.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	2	Pembangunan Pagar SDN 16 Bungku (Ipi)	2020	110.974.634,92		110.974.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	3	Pembangunan Pagar SDN 2 Bahoea Reko-Reko + Renwas	2020	178.007.000,00		178.007.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	4	Pembangunan Pagar SDN 2 Puntari Makmur	2020	160.349.000,00		160.349.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	5	Pagar SDN Lambelu	2020	160.852.634,92		160.852.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	6	Pembangunan Pagar SDN Makarti Jaya	2020	99.780.000,00		99.780.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	7	Pembangunan Pagar + Renwas	2020	111.064.634,92		111.064.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	8	Pembangunan Pagar SDN Polewali	2020	161.009.634,92		161.009.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	9	Pagar SDN Sainoa	2020	210.954.634,92		210.954.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	10	Pembangunan Pagar SDN Torete + Renwas	2020	114.942.500,00		114.942.500,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	11	Pembangunan Pagar SDN Ululere + Renwas	2020	111.036.634,92		111.036.634,92	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	12	Pekerjaan Pembangunan Kantor SMPN 1 Bungku Tengah	2020	239.791.471,00		239.791.471,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	13	Pembangunan Pagar	2020	199.540.000,00		199.540.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	14	Pembangunan Pagar SMPN 2 Bungku Selatan + renwas	2020	420.760.000,00		420.760.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	15	Pembangunan Pagar USB SDN 5 Bahodopi	2022	98.730.000,00		98.730.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	16	Rehabilitasi Berat Ruang Perpustakaan SDN Buleleng	2024	141.069.690,97		141.069.690,97	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	17	Relokasi Bangunan SDN 02 Bungku + Perencanaan	2024	5.422.187.775,00		5.422.187.775,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	18	Ruang Guru SDN Lamontoli	2024	17.950.275,00		17.950.275,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	19	Jamban/Toilet SDN Powaru	2024	162.392.646,00		162.392.646,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	20	Rumah Dinas Guru SDN Tandaoleo	2024	161.526.726,40		161.526.726,40	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	21	Perencanaan Jamban SMPN 1 Wita Ponda	2024	10.642.857,00		10.642.857,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**8.471.602.750,89**	**-**	**8.471.602.750,89**	**-**		
XII	**Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah**								
	1	pekerjaan pembagunan los pasar rakyat tanjung harapan lokasi Desa Tanjung Harapan	2024	399.676.200,00		399.676.200,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**399.676.200,00**	**-**	**399.676.200,00**	**-**		
XIII	**Dinas Perhubungan Daerah**								
	1	Perencanaan Tambatan Perahu Desa Umbele Kec. Bumi Raya	2016	49.900.000,00			49.900.000,00		Dihentikan Permanen
	2	Perencanaan Pengembangan Dermaga Matarape	2016	49.900.000,00		49.900.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	3	Perencanan Pintu Gerbang Bandara Morowali	2017	49.800.000,00			49.800.000,00		Dihentikan Permanen
	4	Pembangunan Tambatan Perahu (Tahap I)+Perencanaan	2020	650.000.000,00		650.000.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	5	Perencanaan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Nambo Tahun Anggaran 2023	2023	98.845.500,00		98.845.500,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	Sub Jumlah			**898.445.500,00**	**-**	**798.745.500,00**	**99.700.000,00**		
XIV	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah**								
	1	Pembangunan Aula/ruang Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah (tahap I)	2017	307.170.000,00		307.170.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**307.170.000,00**	**-**	**307.170.000,00**	**-**		
XV	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah**								
	1	Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Bungku Pesisir dan Bungku Tengah	2014	14.800.000,00			14.800.000,00		Dihentikan Permanen
	2	Pekerjaan Perencanaan Drainase Kecamatan Bumi Raya	2016	49.900.000,00			49.900.000,00		Dihentikan Permanen
	3	Pekerjaan Perencanaan Drainase Kecamatan Bungku Barat	2016	49.925.000,00			49.925.000,00		Dihentikan Permanen
	4	Pekerjaan Perencanaan Drainase Kecamatan Bahodopi	2016	49.643.000,00			49.643.000,00		Dihentikan Permanen
	5	Pekerjaan Perencanaan Drainase Kecamatan Bungku Timur	2016	49.599.000,00			49.599.000,00		Dihentikan Permanen
	6	Pekerjaan Perencanaan Drainase Kecamatan Witaponda	2016	49.769.000,00			49.769.000,00		Dihentikan Permanen
	7	Pekerjaan Perencanaan Jaringan SUTM Jalur Ringroad Kec. Bungku Tengah	2018	49.500.000,00		49.500.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	8	Pekerjaan Perencanaan Jaringan SUTM	2018	49.500.000,00		49.500.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	9	Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Lampu Air Mancur Kec. Bungku Tengah	2018	49.500.000,00		49.500.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	10	Pengadaan Lampu Air Mancur Kec. Bungku Tengah (30%)	2018	660.000.000,00		660.000.000,00	-	Reklas ke Gedung dan Bangunan	
	11	Pembangunan Jaringan TM dan SUTR Jalur Ring Road	2018	600.000.000,00		600.000.000,00	-	Reklas Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	12	Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Desa Unsongi Kec. Bungku Timur. (50 %)	2024	51.699.360,00			51.699.360,00		Akan Dilanjutkan
	13	Pekerjaan Pemasangan Lampu Jalan Desa Ululere Kec. Bungku Timur (50 %)	2024	60.559.380,00			60.559.380,00		Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**1.784.394.740,00**	**-**	**1.408.500.000,00**	**375.894.740,00**		
XVI	**Kecamatan Bungku Pesisir**								
	1	Perencanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan (RUJAB)	2024	20.868.000,00		20.868.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**20.868.000,00**	**-**	**20.868.000,00**	**-**		
XVII	**Kecamatan Bungku Selatan**								
	1	Perencanaan Rujab Bungku Selatan	2024	39.378.000,00		39.378.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	2	Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Camat Bungku Selatan	2024	159.618.000,00		159.618.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	Sub Jumlah			**198.996.000,00**	**-**	**198.996.000,00**	**-**		
XVIII	**RSUD Morowali**								
	1	Rehab Total Gedung Perawatan Anak + Perencanaan dan Pengawasan	2015	1.413.931.000,00		1.413.931.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	2	Rehab Gedung Perawatan Bedah	2015	1.327.526.000,00		1.327.526.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	

No.		Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Pembangunan Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Anak Tahap II (Lanjutan) + Perencanaan dan Pengawasan	2016	1.087.205.000,00		1.087.205.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	4	Pembangunan Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Bedah Tahap II (Lanjutan) + Perencanaan dan Pengawasan	2016	1.370.980.000,00		1.370.980.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	5	Pengadaan Lift Gedung Poliklinik dan IGD RSUD Morowali	2017	1.016.400.000,00		1.016.400.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	6	Pekerjaan Pembangunan Selasar Rumah Sakit+Perencanaan,Pengawasan	2017	901.820.000,00		901.820.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	7	Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Central RSUD Morowali	2017	660.000.000,00		660.000.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	8	Pembangunan Ram Selasar RSUD Morowali + Perencanaan dan Pengawasan	2018	778.820.000,00		778.820.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	9	Pembangunan Selasar Lantai II RSUD Morowali + Pengawasan	2018	1.158.435.040,00		1.158.435.040,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	10	Perencanaan Pembangunan Selasar Rumah Sakit Berlantai Dua	2019	49.700.000,00		49.700.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	11	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ram Selasar+Perencanaan	2020	149.929.756,71		149.929.756,71	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	12	Lanjutan Pembangunan Selasar 2 Lantai (+beban dibayar dimuka 2022)	2023	477.761.816,00		477.761.816,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	13	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Selasar Penghubung Gedung CSSD, Perawatan Kelas III, dan Ruang HD (IBS) RSUD Morowali	2023	29.708.000,00			29.708.000,00		Akan Dilanjutkan
	14	Pemasangan Kanopi Teras Gedung Ponek/ NICU	2024	119.957.960,00		119.957.960,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	15	Pemasangan Kanopi Teras Lantai 1 dan 2 Gedung IBS	2024	51.782.400,00		51.782.400,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	16	Perencanaan Pembangunan Perawatan Jantung	2024	33.900.000,00		33.900.000,00	-	Reklas Ke Gedung dan Bangunan	
	17	Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop RSUD Morowali + Perencanaan dan Pengawasan	2025		1.976.780.700,00		1.976.780.700,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	18	Pek. Pembangunan Selasar Penghubung CSSD, Perawatan Kelas III, dan Ruang Hemodialisa (IBS) + Pengawasan	2025		575.968.635,20		575.968.635,20	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**10.627.856.972,71**	**2.552.749.335,20**	**10.598.148.972,71**	**2.582.457.335,20**		
XIX	**Rumah Sakit Salabangkapaku**								
	1	Perencanaan Pembangunan Instalasi Gawat Darurat RSUD Salabangkapaku	2025		239.316.000,00		239.316.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**-**	**239.316.000,00**	**-**	**239.316.000,00**		
XX	**Inspektorat Daerah**								
	1	Pembangunan Talud Tahap II + Pengawasan	2025		2.554.774.000,00		2.554.774.000,00	Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**-**	**2.554.774.000,00**	**-**	**2.554.774.000,00**		
XX	**Kecamatan Bumi Raya**								
	1	Perencanaan Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kantor Camat Bumi Raya	2025		9.945.600,00		9.945.600,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**-**	**9.945.600,00**	**-**	**9.945.600,00**		
XX	**Kecamatan Wita Ponda**								
	1	Perencanaan Rumah Jabatan Camat	2025		49.772.000,00		49.772.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan	Akan Dilanjutkan
	Sub Jumlah			**-**	**49.772.000,00**	**-**	**49.772.000,00**		

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	Uraian	Status
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah		166.754.939.562,58	51.116.107.205,20	140.976.087.021,58	76.894.959.746,20		

Daftar Mutasi Hibah Masuk Aset Tetap

No.	OPD	Nama Barang	Mutasi		Uraian
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	Tanah PLKB Bahodopi	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah RS Pratama Bahodopi	1,00		Hibah dari Yayasan IMIP Peduli
		Tanah Puskesmas Umbele Bungku Selatan	214.524.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Gedung RS Pratama	1,00		Hibah dari Yayasan IMIP Peduli
2	Dinas Pendidikan Daerah	Tanah TKN 1 Bahodopi	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TKN 5 Wita Ponda	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah SDN 2 UMPANGA	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 3 Wita Ponda	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah Rumah Dinas Guru Desa Pebatae	1,00		Hibah dari Masyarakat
		Tanah SDN 2 Bahomotefe Kec Bungku Timur	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bungku	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah SDN Trans 1 Buleleng	219.776.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 1 Bahomakmur	568.620.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 1 Bungku Barat	37.904.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bahomakmur	636.889.500,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bumi Raya	73.800.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bungku Barat	477.714.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bungku Pesisir	25.256.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Bungku Selatan	34.704.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 2 Wita Ponda	257.500.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 3 Bahodopi	1.755.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 3 Bumi Raya	328.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 3 Bungku Barat	106.502.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 4 Bumi Raya	35.014.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 4 Wita Ponda	169.023.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 5 Bumi Raya	213.200.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 6 Bumi Raya	52.830.960,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 6 Wita Ponda	160.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri 7 Wita Ponda	82.432.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Atananga	48.790.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Bahomohoni	136.080.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Buleleng	21.760.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Limbo Makmur	102.500.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Sampeantaba	486.085.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Torukuno	12.240.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah TK Negeri Uedago	151.936.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah Rumah Dinas SDN Dongkalan	8.100.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah Rumah Guru SDN Sainoa	3.960.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Pengadaan Alat Musik Tradisional Ndengu-Ndengu MI Negeri 1 Bungku		15.880.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Pagar MI Alkhairaat Kolono		194.100.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pemb. Jamban MI Al-Ikhlas One Ete (2 Lokal)		144.391.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Pagar MTS Labota		198.302.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pemasangan Paving Blok MTS Sakita		199.700.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta

No.	OPD	Nama Barang	Mutasi		Uraian
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
		Pembangunan RKB Paud Desa Boelimau		169.136.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Pagar Paud Kb Kartini		98.676.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Gedung Paud Kolono (2 Lokal)		434.713.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Gedung Paud One Pute Jaya (1 Lokal)		201.937.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Ruang Guru Paud Siumbatu (1 Lokal)		288.390.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Kantor SD Alkhairaat Solonsa (1 Lokal)		250.000.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Rehabilitasi Perpustakaan SD Al-Khairaat Solonsa		145.331.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Al Khairaat Ulunambo (2 Lokal)		121.967.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Paving Blok TK Al-Khairaat Bungi		99.666.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pemb. Paving Blok TK Al-Khairaat Bahomoleo		99.640.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas TK Alkhairaat Sakita (2 Lokal)		189.456.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pekerjaan Paving Blok TK Alkhairaat Tumoko Jaya Bente		195.172.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB TK Arrahman 2 Laantula Jaya (1 Lokal)		197.934.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Bangunan TK Alkhairat Bahoruru (Lanjutan)		75.352.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Paving Blok TK Alkhairat Bahoruru (Lanjutan)		125.894.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan Jamban TK Indradanu		161.499.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB TK Laroue (Lanjutan)		75.336.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB TK Padala (1 Lokal)		199.713.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB TK Padei Darat (1 Lokal)		198.980.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB TK Rinjani Solonsa Jaya (2 Lokal)		399.557.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Pembangunan RKB Tpa Al-Khairaat Fatufia (1 Lokal)		197.994.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 SD Graha Krida Ungkaya		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 SD Graha Krida Ungkaya		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 SD Graha Krida Ungkaya		1.477.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MI Al-Ikhlas One Ete		442.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MI Al-Ikhlas One Ete		442.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MI Al-Ikhlas One Ete		492.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MI Alkhairaat Marsaoleh		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MI Alkhairaat Marsaoleh		1.770.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MI Alkhairaat Marsaoleh		1.970.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MI Alkhairaat Sakita		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MI Alkhairaat Sakita		1.770.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MI Alkhairaat Sakita		1.970.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MI Alkhairaat Wosu		1.477.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MI Alkhairaat Wosu		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MI Alkhairaat Wosu		1.770.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MIN Bahomohoni		1.327.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MIN Bahomohoni		1.770.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MIN Bahomohoni		1.970.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 MI Ddi Bungku		442.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 MI Ddi Bungku		442.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 MI Ddi Bungku		492.500,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 SDA Alkhiraat Solonsa		1.416.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 SDA Alkhiraat Solonsa		1.416.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 SDA Alkhiraat Solonsa		1.970.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 SD Alkhairaat Ulunambo		394.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 SD Alkhairaat Ulunambo		354.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 SD Alkhairaat Ulunambo		354.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta

No.	OPD	Nama Barang	Mutasi		Uraian
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 2 SDA Alkhiraat Kolono		531.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 3 SDA Alkhiraat Kolono		531.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
		Buku Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Bungku Kelas 1 SDA Alkhiraat Kolono		985.000,00	Diserahkan Ke Sekolah Swasta
3	RSUD Morowali	Meja Resepsionis ICU	20.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Lemari Pasien	40.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Meja Meeting	13.800.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Meja Resepsionis	7.020.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Lemari Charger Handphone	25.200.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Mesin Cuci LG P-1600RTB	8.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Mesin Cuci LG P-9050R	6.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		Mesin Cuci LG P-9050RTB	6.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		AC Split Polytron 1 PK	7.000.000,00		Hibah dari Bank BTN
		AC Split Polytron 1/2 PK	6.600.000,00		Hibah dari Bank BTN
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Tanah Pasar Desa Kolono	1,00		Sertifikat
		Tanah Pasar Desa Tangofa	77.632.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah Pasar Pebatae	820.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah BPP Bungku Pesisir	262.400.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
		Tanah Gedung UPJA Pertanian	65.600.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
6	Bagian Umum	Tanah Gedung Serbaguna	1,00		Sertifikat
		Tanah Mess Pemda di Palu	1,00		Sertifikat
7	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Tanah Kantor Urusan Agama (KUA)	1,00		Hibah dari Pemerintah Desa
8	Kelurahan Bungi	Tanah Kantor Kelurahan Bungi	208.336.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
9	Puskesmas Bahomotefe	Tanah Puskesmas Bahomotefe	1.358.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
10	Puskesmas Lantula Jaya	Tanah Pustu Ungkaya	50.058.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
11	Puskesmas Tanjung Harapan	Tanah Pustu Lamontoli	64.000.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
12	Puskesmas Wosu	Tanah Pustu Kabera	113.300.000,00		Hibah dari Pemerintah Desa
Jumlah			**9.579.086.474,00**	**4.713.332.000,00**	

Daftar Mutasi Aset Tetap antara OPD

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Mobil Ambulance	2024	698.200.000,00		698.200.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Ulunambo
2	Rabat Jalan Puskesmas Tanjung Harapan + Perencanaan dan Pengawasan	2025	200.860.000,00		200.860.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Ulunambo
3	Genset	2025	244.500.000,00		244.500.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Bahodopi
4	Pembangunan Gedung Baru Poli Administrasi Puskesmas Bahodopi + Pengawasan	2025	10.650.353.000,00		10.650.353.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Bahodopi
5	Genset	2025	244.500.000,00		244.500.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Bahomotefe
6	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Bahomotefe + Perencanaan dan Pengawasan	2025	213.340.000,00		213.340.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Bahomotefe
7	Pengadaan IPAL Puskesmas Bahomotefe	2025	397.257.900,00		397.257.900,00	Mutasi Ke Puskesmas Bahomotefe
8	Penyelesaian Pembangunan Pagar Puskesmas Bungku	2025	68.264.000,00		68.264.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Bungku
9	Pengadaan Genset Puskesmas Fonuasingko	2025	110.249.000,00		110.249.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Fonuasingko
10	Rabat Halaman Puskesmas Fonuasingko + Perencanaan dan Pengawasan	2025	213.352.000,00		213.352.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Fonuasingko
11	Pembangunan Pagar Samping Puskesmas Fonuasingko + Pengawasan	2025	204.228.000,00		204.228.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Fonuasingko
12	Genset	2025	244.500.000,00		244.500.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Lafeu
13	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Laantula Jaya + Perencanaan dan Pengawasan	2025	212.135.000,00		212.135.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Lantula Jaya
14	Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan (Poli) Puskesmas Laantula Jaya	2025	293.255.000,00		293.255.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Lantula Jaya
15	Mesin Tempel Puskesmas Tanjung Harapan	2025	134.300.000,00		134.300.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
16	Mesin Tempel Pustu Pulau Tiga	2025	134.300.000,00		134.300.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
17	Hidrolik Mo 100 Seafirs	2025	19.200.000,00		19.200.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
18	Setir Hidrolik Mo 100 Seafirs	2025	26.000.000,00		26.000.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
19	ACCU/AKI	2025	1.800.000,00		1.800.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
20	Mesin Tempel	2025	159.951.000,00		159.951.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
21	Ambulance Transport	2025	357.153.600,00		357.153.600,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
22	Pembangunan Rumah Singgah Pasien Puskesmas Tanjung Harapan + Perencanaan dan Pengawasan	2025	197.238.000,00		197.238.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
23	Panel Surya	2025	5.000.000,00		5.000.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
24	Rehab/Pemeliharaan Mesin Genset Laut Puskesmas (Rehap Gedung Bangunan Mesin Genset) Puskemas Ulunambo	2025	79.778.000,00		79.778.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Tanjung Harapan
25	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Wosu + Perencanaan dan Pengawasan	2025	212.690.000,00		212.690.000,00	Mutasi Ke Puskesmas Wosu
26	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
27	Gedung Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2012	68.710.838,28	68.710.838,28		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
28	Gedung LABKESDA	2012	31.072.269,17	31.072.269,17		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
29	Gudang Farmasi	2012	34.601.935,52	34.601.935,52		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
30	Gedung PSC 911	2012	38.602.224,05	38.602.224,05		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
31	Penimbunan Halaman Gedung PSC 119 + Renwas (Dinas Kesehatan)	2020	174.670.000,39	174.670.000,39		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Perikanan
2	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Sosial
5	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Perpustakaan
9	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup
14	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
15	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum
16	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Koperasi, UMKM
17	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Perhubungan
18	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
19	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
20	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Badan Penanggulangan Bencana
21	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
22	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik
23	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Pendapatan
24	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Satuan Polisi pamong Praja
25	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Satuan Polisi pamong Praja
26	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Inspektorat
27	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Sekertariat DPRD
28	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke RSUD Morowali
29	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke RSUD Morowali
30	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke RSUD Morowali
31	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Protokol
32	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Umum
33	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Organisasi
34	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Perekonomian dan SDA
35	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Kesra
36	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Pengadaan Barang Jasa
37	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Administrasi Pembangunan
38	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Hukum
39	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Bagian Tata Pemerintahan Umum
40	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Puskesmas Bungku
41	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Puskesmas Fonuasingko
42	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kecamatan Bungku Tengah
43	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Tofoiso
44	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
45	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Bungi
46	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Marsaoleh
47	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Lamberea
48	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00		2.846.250,00	Mutasi Ke Kelurahan Matano
49	Tanah Kantor Badan Kepegawaian Daerah	2009	45.372.534,00	45.372.534,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Puskesmas Ulunambo						
1	Mobil Ambulance	2024	698.200.000,00	698.200.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Rabat Jalan Puskesmas Tanjung Harapan + Perencanaan dan Pengawasan	2025	200.860.000,00	200.860.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Ulunambo	2020	31.350.000,00	31.350.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Puskesmas Bahodopi						
1	Genset	2025	244.500.000,00	244.500.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pembangunan Gedung Baru Poli Administrasi Puskesmas Bahodopi + Pengawasan	2025	10.650.353.000,00	10.650.353.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Puskesmas Bahomotefe						
1	Genset	2025	244.500.000,00	244.500.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Bahomotefe + Perencanaan dan Pengawasan	2025	213.340.000,00	213.340.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pengadaan IPAL Puskesmas Bahomotefe	2025	397.257.900,00	397.257.900,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Puskesmas Bungku						

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelesaian Pembangunan Pagar Puskesmas Bungku	2025	68.264.000,00	68.264.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Puskesmas Fonuasingko						
1	Pengadaan Genset Puskesmas Fonuasingko	2025	110.249.000,00	110.249.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Rabat Halaman Puskesmas Fonuasingko + Perencanaan dan Pengawasan	2025	213.352.000,00	213.352.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pembangunan Pagar Samping Puskesmas Fonuasingko + Pengawasan	2025	204.228.000,00	204.228.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	Tanah Lokasi Puskesmas Fonuasingko	2012	50.905.632,47	50.905.632,47		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Puskesmas Lafeu						
1	Genset	2025	244.500.000,00	244.500.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Puskesmas Lantula Jaya						
1	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Laantula Jaya + Perencanaan dan Pengawasan	2025	212.135.000,00	212.135.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan (Poli) Puskesmas Laantula Jaya	2025	293.255.000,00	293.255.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pembayaran ganti rugi tanah lokasi puskesmas plus desa Moahino Kec. wita Ponda	2015	2.545.158.400,00	2.545.158.400,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Puskesmas Tanjung Harapan						
1	Mesin Tempel Puskesmas Tanjung Harapan	2025	134.300.000,00	134.300.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Mesin Tempel Pustu Pulau Tiga	2025	134.300.000,00	134.300.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Hidrolik Mo 100 Seafirs	2025	19.200.000,00	19.200.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Setir Hidrolik Mo 100 Seafirs	2025	26.000.000,00	26.000.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	ACCU/AKI	2025	1.800.000,00	1.800.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Mesin Tempel	2025	159.951.000,00	159.951.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Ambulance Transport	2025	357.153.600,00	357.153.600,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Pembangunan Rumah Singgah Pasien Puskesmas Tanjung Harapan + Perencanaan dan Pengawasan	2025	197.238.000,00	197.238.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Panel Surya	2025	5.000.000,00	5.000.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Rehab/Pemeliharaan Mesin Genset Laut Puskesmas (Rehap Gedung Bangunan Mesin Genset) Puskemas Ulunambo	2025	79.778.000,00	79.778.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Puskesmas Wosu						
1	Pembangunan Parkiran Ambulance Puskesmas Wosu + Perencanaan dan Pengawasan	2025	212.690.000,00	212.690.000,00		Mutasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1	Penimbunan Halaman TK Dharmawanita Morowali	2023	30.665.000,00		30.665.000,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Penimbunan Halaman Kantor Pengawas + Renwas	2020	316.410.000,00		316.410.000,00	Mutasi Ke Bagian Tata Pemerintahan
3	Penimbunan Halaman Kantor PGRI	2023	244.806.000,00		244.806.000,00	Mutasi Ke Bagian Tata Pemerintahan
4	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
5	Perencanaan Tanggul SDN 4 Lamberea	2016	49.956.000,00	49.956.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
6	Tanah Lokasi SKB	2012	87.255.593,23	87.255.593,23		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
7	Tanah Lokasi Gedung Kebudayaan	2012	285.869.358,48	285.869.358,48		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
8	Penimbunan Halaman Kantor SKB (Dinas Pendidikan)	2017	99.830.000,00	99.830.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
9	Penyiapan lokasi pembangunan museum daerah (1 paket) pengadaan tahun 2007 (Digunakan untuk pembangunan SDN 19 Bungku)	2007	149.700.000,00	149.700.000,00		Mutasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Tanah TK Mendui	2017	151.587.616,00	151.587.616,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
11	Ganti Rugi Lahan Lokasi SMPN 1 Bungku Tengah	2018	3.705.606.000,00	3.705.606.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
12	Ganti Kerugian Santunan Lahan Pembangunan SDN 20 Tofuti Kec. Bungku Tengah an. SAEFUDIN L.	2023	827.100.000,00	827.100.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
13	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. ZAINAL	2023	184.452.000,00	184.452.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
14	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. SRI WAHYUNI RAMADHAN	2023	105.750.000,00	105.750.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
15	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. MUHZEN AL IDRUS	2023	501.580.000,00	501.580.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
16	Pembayaran Ganti Rugi/Santunan Pembebasan Lahan, Lokasi Pembangunan SDN 17 Di Desa Tudus Kec. Bungku Tengah. TA 2024 (An. HAFIAH)	2024	29.512.000,00	29.512.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum						
1	Pembebasan lahan dan pematangan lahan gor di bungku	2007	977.882.040,00		977.882.040,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Pekerjaan Rehab Kantor Keuangan Lama+Perencanaan, Pengawasan	2023	1.886.846.816,00		1.886.846.816,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Pekerjaan Pembangunan Gedung Work shop Kantor BKAD + Perencanaan	2024	3.982.467.706,00		3.982.467.706,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Perencanaan Taman Rujab Wabup	2016	49.885.000,00		49.885.000,00	Mutasi Ke Bagian Umum
5	Gazebo Rujab Wakil Bupati	2021	34.899.400,00		34.899.400,00	Mutasi Ke Bagian Umum
6	Lanscape Rujab Wakil Bupati	2021	313.596.000,00		313.596.000,00	Mutasi Ke Bagian Umum
7	Pekerjaan Rehab Kantor Bupati Morowali yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah+pengawasan	2023	8.067.704.932,00		8.067.704.932,00	Mutasi Ke Bagian Umum
8	Rehab Mess Pemda alih fungsi rujab camat bunmgku selatan	2023	199.400.000,00		199.400.000,00	Mutasi Ke Bagian Umum
9	pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Sekda+ Perencanaan,pengawasan berlokasi di kec. bungku tengah+perencanaan	2024	5.134.526.594,00		5.134.526.594,00	Mutasi Ke Bagian Umum
10	pekerjaan Pembangunan Pagar Masji Rujab Bupati + Pengawasan berlokasi di kec. bungku tengah	2024	213.775.000,00		213.775.000,00	Mutasi Ke Bagian Umum
11	Pendestrian Halaman Kantor Bupati Morowali (Pengadaan Bola-Bola Taman Kantor Bupati)	2025	99.692.000,00		99.692.000,00	Mutasi Ke Bagian Umum
12	Pekerjaan Perencanaan Stadion Yang Berloksi Di Kecamatan Bungku Tengah	2023	786.844.173,00		786.844.173,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
13	pekerjaan Pematangan Lahan Gedung Pemerintahan berlokasi di kec. bungku tengah(Lokasi Gedung Koni)	2024	199.850.000,00		199.850.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
14	Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat Koni Kab. Morowali	2024	2.499.749.808,00		2.499.749.808,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
15	Perencanaan Tanggul SDN 4 Lamberea	2016	49.956.000,00		49.956.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan
16	Perencanaan taman median Fonuasingko	2016	49.956.500,00		49.956.500,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
17	Perencanaan Taman Stadion Fonuasingko	2016	49.956.500,00		49.956.500,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
18	Perencanaan taman gedung Olahraga	2016	49.995.000,00		49.995.000,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
19	Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan	2024	8.321.460.312,00		8.321.460.312,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
20	Perencanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat Sombori	2023	148.846.227,00		148.846.227,00	Mutasi Ke Kecamatan Sombori Kepulauan
21	Pekerjaan Pembuatan Taman Kelurahan Bungi	2016	99.850.000,00		99.850.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Bungi
22	Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Marsaoleh	2024	199.850.000,00		199.850.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Marsaoleh
23	Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Mendui Kec. Bungku Tengah	2025	641.810.988,00		641.810.988,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
24	Pemb. Pagar Kantor Lurah Mendui yang berlokasi di Kelurahan Mendui	2025	199.765.000,00		199.765.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
25	Gedung Kantor Kelurahan Tofoiso yang berlokasi Di Kec. Kecamatan Bungku Tengah	2024	2.420.325.217,00		2.420.325.217,00	Mutasi Ke Kelurahan Tofoiso
26	Pekerjaan Pembangunan Mes Polisi Pamong praja+Perencanaan, Pengawasan	2024	11.754.239.714,00		11.754.239.714,00	Mutasi Ke Satuan Polisi Pamongpraja
27	Perencanaan Taman Kompleks DPRD	2016	49.940.000,00		49.940.000,00	Mutasi Ke Sekretariat DPRD
28	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
29	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MUHAMAD NASIR ZEN	2022	197.720.000,00	197.720.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
30	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. HARYONO	2022	60.046.000,00	60.046.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
31	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALKAF	2022	87.227.000,00	87.227.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
32	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MURTADA	2022	223.902.000,00	223.902.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
33	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. BAHARUDIN. M/OKSTRIA	2022	292.573.000,00	292.573.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
34	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. IMRAN/HASNAWATI	2022	266.171.000,00	266.171.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
35	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALIMUDIN. M	2022	495.251.000,00	495.251.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
36	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. Hj. FARIDA MUSA/SITI FATMA	2022	98.860.000,00	98.860.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
37	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALWI HARUN/RATNO HARUN	2022	108.553.000,00	108.553.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
38	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. AIDA HAMID	2022	78.229.000,00	78.229.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
39	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. SARWIN. S	2022	228.299.000,00	228.299.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
40	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. IKRAMUDIN N. ZEN	2022	98.860.000,00	98.860.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
41	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. RIDWAN ZEN	2022	696.281.000,00	696.281.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
42	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ADAWIAH USMAN	2022	66.442.000,00	66.442.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
43	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. NANANG. K/HENDRA ANDIKA	2022	198.927.000,00	198.927.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
44	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. CHARLES JAUHANES	2022	531.395.000,00	531.395.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
45	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. UMAR/ERNAWATI. U	2022	295.248.000,00	295.248.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
46	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. JHONY H. PAMEKKA	2022	360.062.000,00	360.062.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
47	Pembayaran Ganti kerugian/Santunan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Geresa Kec. Bungku Timur. TA. 2024 (An. ASNAN AS'AD)	2024	486.909.600,00	486.909.600,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Dinas Perikanan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Dinas Pertanian	2009	96.713.628,00	96.713.628,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Pengelola KTM (Disnakertrans)	2012	65.965.542,23	65.965.542,23		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Sosial						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Dinas Pemdes	2009	28.832.736,00	28.832.736,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Tanah Kantor PKK	2009	13.727.688,00	13.727.688,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah SIKIM II	2012	80.218.671,11	80.218.671,11		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Tanah SIKIM	2012	224.105.800,00	224.105.800,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	Tanah SIKIM	2012	374.929.003,40	374.929.003,40		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga						

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Clearing dan Pematangan Lahan Lokasi Sekretariat Kwarcab Morowali (Tanah KTM)	2025	398.690.914,00		398.690.914,00	Mutasi Ke Bagian Tata Pemerintahan
2	Penyiapan lokasi pembangunan museum daerah (1 paket) pengadaan tahun 2007 (Digunakan untuk pembangunan SDN 19 Bungku)	2007	149.700.000,00		149.700.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
3	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4	Tanah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	2009	63.725.856,00	63.725.856,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5	Dispora (Fasilitas Sarana Olahraga)	2012	263.145.030,36	263.145.030,36		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
6	Dispora (Fasilitas Sarana Olahraga II)	2012	97.138.659,01	97.138.659,01		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
7	Hutan Kota II (Lokasi Sport Center)	2012	78.437.030,00	78.437.030,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
8	BKPPD/ Gedung Diklat (Lokasi Sport Center)	2012	132.614.607,15	132.614.607,15		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
9	Sirkuit Gras Track (Lokasi Sport Center)	2012	197.863.010,82	197.863.010,82		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
10	Penimbunan Halaman Kantor Disporapar + Renwas	2017	273.262.500,00	273.262.500,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
11	Pekerjaan Perencanaan Stadion Yang Berloksi Di Kecamatan Bungku Tengah	2023	786.844.173,00	786.844.173,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
12	pekerjaan Pematangan Lahan Gedung Pemerintahan berlokasi di kec. bungku tengah(Lokasi Gedung Koni)	2024	199.850.000,00	199.850.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
13	Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat Koni Kab. Morowali	2024	2.499.749.808,00	2.499.749.808,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
14	Ganti Kerugian/Santunan Tanah Bangunan dan Tanaman Pembangunan Lokasi Pariwisata Desa Tanjung Harapan Kec. Sambori Kepulauan (An. LEHANG)	2024	1.297.558.000,00	1.297.558.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
15	Ganti Rugian/Santunan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Gelanggang Renang dan Lapangan Bulu Tangkis Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. (An. ISMAN HIDAYAT ISHAK)	2024	4.073.300.000,00	4.073.300.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
16	Pembayaran Ganti Rugian/Santunan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Morowali Pembangunan Kantor Koni Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. (An. ASRAR)	2024	666.960.000,00	666.960.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Dinas Perpustakaan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Dinas Lingkungan Hidup						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Lingkungan Hidup	2012	280.759.746,24	280.759.746,24		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Hutan Kota	2012	2.011.685.713,70	2.011.685.713,70		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2017	957.070.000,00	957.070.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
5	Ganti Rugi Lahan Lokasi TPA	2018	720.075.000,00	720.075.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Dinas Koperasi, UMKM						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Dinas Koperasi dan UMKM	2012	82.459.729,11	82.459.729,11		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Kawasan Konveksi	2012	151.809.268,92	151.809.268,92		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Perhubungan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Dinas Perhubungan	2009	30.106.794,00	30.106.794,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman						
1	Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2017	957.070.000,00		957.070.000,00	Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah
2	Ganti Rugi Lahan Lokasi TPA	2018	720.075.000,00		720.075.000,00	Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah
3	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MUHAMAD NASIR ZEN	2022	197.720.000,00		197.720.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. HARYONO	2022	60.046.000,00		60.046.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
5	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALKAF	2022	87.227.000,00		87.227.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
6	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MURTADA	2022	223.902.000,00		223.902.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
7	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. BAHARUDIN. M/OKSTRIA	2022	292.573.000,00		292.573.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
8	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. IMRAN/HASNAWATI	2022	266.171.000,00		266.171.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
9	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALIMUDIN. M	2022	495.251.000,00		495.251.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
10	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. Hj. FARIDA MUSA/SITI FATMA	2022	98.860.000,00		98.860.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
11	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALWI HARUN/RATNO HARUN	2022	108.553.000,00		108.553.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
12	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. AIDA HAMID	2022	78.229.000,00		78.229.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
13	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. SARWIN. S	2022	228.299.000,00		228.299.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
14	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. IKRAMUDIN N. ZEN	2022	98.860.000,00		98.860.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
15	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. RIDWAN ZEN	2022	696.281.000,00		696.281.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
16	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ADAWIAH USMAN	2022	66.442.000,00		66.442.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
17	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. NANANG. K/HENDRA ANDIKA	2022	198.927.000,00		198.927.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
18	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. CHARLES JAUHANES	2022	531.395.000,00		531.395.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
19	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. UMAR/ERNAWATI. U	2022	295.248.000,00		295.248.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
20	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. JHONY H. PAMEKKA	2022	360.062.000,00		360.062.000,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
21	Pembayaran Ganti kerugian/Santunan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Geresa Kec. Bungku Timur. TA. 2024 (An. ASNAN AS'AD)	2024	486.909.600,00		486.909.600,00	Mutasi Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
22	Ganti Kerugian/Santunan Tanah Bangunan dan Tanaman Pembangunan Lokasi Pariwisata Desa Tanjung Harapan Kec. Sambori Kepulauan (An. LEHANG)	2024	1.297.558.000,00		1.297.558.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
23	Ganti Rugian/Santunan Pembebasan Lahan Lokasi Pembangunan Gelanggang Renang dan Lapangan Bulu Tangkis Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. (An. ISMAN HIDAYAT ISHAK)	2024	4.073.300.000,00		4.073.300.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
24	Pembayaran Ganti Rugian/Santunan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Morowali Pembangunan Kantor Koni Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. (An. ASRAR)	2024	666.960.000,00		666.960.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
25	Tanah TK Mendui	2017	151.587.616,00		151.587.616,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
26	Ganti Rugi Lahan Lokasi SMPN 1 Bungku Tengah	2018	3.705.606.000,00		3.705.606.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
27	Ganti Kerugian Santunan Lahan Pembangunan SDN 20 Tofuti Kec. Bungku Tengah an. SAEFUDIN L.	2023	827.100.000,00		827.100.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
28	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. ZAINAL	2023	184.452.000,00		184.452.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
29	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. SRI WAHYUNI RAMADHAN	2023	105.750.000,00		105.750.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
30	Ganti Rugi/Santunan LahanPembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali di Kecamatan Bungku Tengah. an. MUHZEN AL IDRUS	2023	501.580.000,00		501.580.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
31	Pembayaran Ganti Rugi/Santunan Pembebasan Lahan, Lokasi Pembangunan SDN 17 Di Desa Tudus Kec. Bungku Tengah. TA 2024 (An. HAFIAH)	2024	29.512.000,00		29.512.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
32	Tanah Kantor Kelurahan Mendui	2017	179.130.496,00		179.130.496,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
33	Ganti Rugi Tanah Lahan Pemakaman Kelurahan Mendui ; An. Muhsin Sihamu	2021	50.000.000,00		50.000.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
34	Pembebasan Lahan Lokasi RSUD Morowali	2017	4.512.409.000,00		4.512.409.000,00	Mutasi Ke Rsud Morowali

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
35	Ganti Rugi Lokasi Pengembangan Rumah Sakit	2018	909.986.500,00		909.986.500,00	Mutasi Ke Rsud Morowali
36	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
37	Tanah Kantor Dinas Perumahan	2009	33.366.546,00	33.366.546,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
38	Perencanaan taman median Fonuasingko	2016	49.956.500,00	49.956.500,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
39	Perencanaan Taman Stadion Fonuasingko	2016	49.956.500,00	49.956.500,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
40	Perencanaan taman gedung Olahraga	2016	49.995.000,00	49.995.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
41	Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan	2024	8.321.460.312,00	8.321.460.312,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD)	2009	89.849.784,00	89.849.784,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Tanah Kantor Eks BPKAD	2009	76.615.650,00	76.615.650,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	Penimbunan Lokasi Gudang BPKAD (Kantor Ex BPKAD)	2015	349.563.000,00	349.563.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5	Penimbunan Tanah Lokasi Kantor BPKAD (Kantor Ex BPKAD)	2015	895.810.000,00	895.810.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
6	Pembebasan lahan dan pematangan lahan gor di bungku	2007	977.882.040,00	977.882.040,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
7	Pekerjaan Rehab Kantor Keuangan Lama+Perencanaan, Pengawasan	2023	1.886.846.816,00	1.886.846.816,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
8	Pekerjaan Pembangunan Gedung Work shop Kantor BKAD + Perencanaan	2024	3.982.467.706,00	3.982.467.706,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
9	Penimbunan Halaman TK Dharmawanita Morowali	2023	30.665.000,00	30.665.000,00		Mutasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	BNPBD	2012	57.438.316,54	57.438.316,54		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Penimbunan Halaman Kantor BPBD	2017	99.946.000,00	99.946.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan						
1	Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Kantor BAPPELITBANGDA Kab. Morowali	2025	2.987.458.465,00		2.987.458.465,00	Mutasi Ke Bagian Tata Pemerintahan
2	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Badan Kesbangpol	2009	27.099.558,00	27.099.558,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Tanah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan	2009	38.554.602,00	38.554.602,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Satuan Polisi pamong Praja						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
3	Tanah Lokasi Barak Pol PP	2012	485.323.520,48	485.323.520,48		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	Pekerjaan Pembangunan Mes Polisi Pamong praja+Perencanaan, Pengawasan	2024	11.754.239.714,00	11.754.239.714,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Inspektorat						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Kantor Inspektorat	2012	224.105.800,00	224.105.800,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Sekertariat DPRD						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Perencanaan Taman Kompleks DPRD	2016	49.940.000,00	49.940.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
RSUD Morowali						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
3	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali	2007	250.000.000,00	250.000.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5	Pembebasan Lahan Lokasi RSUD Morowali	2017	4.512.409.000,00	4.512.409.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
6	Ganti Rugi Lokasi Pengembangan Rumah Sakit	2018	909.986.500,00	909.986.500,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Bagian Protokol						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Umum						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Perencanaan Taman Rujab Wabup	2016	49.885.000,00	49.885.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
3	Gazebo Rujab Wakil Bupati	2021	34.899.400,00	34.899.400,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
4	Lanscape Rujab Wakil Bupati	2021	313.596.000,00	313.596.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
5	Pekerjaan Rehab Kantor Bupati Morowali yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah+pengawasan	2023	8.067.704.932,00	8.067.704.932,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
6	Rehab Mess Pemda alih fungsi rujab camat bunmgku selatan	2023	199.400.000,00	199.400.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
7	pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Sekda+ Perencanaan,pengawasan berlokasi di kec. bungku tengah+perencanaan	2024	5.134.526.594,00	5.134.526.594,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
8	pekerjaan Pembangunan Pagar Masji Rujab Bupati + Pengawasan berlokasi di kec. bungku tengah	2024	213.775.000,00	213.775.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
9	Pendestrian Halaman Kantor Bupati Morowali (Pengadaan Bola-Bola Taman Kantor Bupati)	2025	99.692.000,00	99.692.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Bagian Organisasi						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Perekonomian dan SDA						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Kesra						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Pengadaan Barang Jasa						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Hukum						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Bagian Tata Pemerintahan Umum						
1	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali	2007	250.000.000,00		250.000.000,00	Mutasi Ke RSUD Morowali
2	Tanah Kantor Badan Kepegawaian Daerah	2009	45.372.534,00		45.372.534,00	Mutasi Ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Tanah Kantor Badan Kesbangpol	2009	27.099.558,00		27.099.558,00	Mutasi Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Tanah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD)	2009	89.849.784,00		89.849.784,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Tanah Kantor Eks BPKAD	2009	76.615.650,00		76.615.650,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Tanah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan	2009	38.554.602,00		38.554.602,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7	Tanah Kantor Dinas Pemdes	2009	28.832.736,00		28.832.736,00	Mutasi Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Tanah Kantor PKK	2009	13.727.688,00		13.727.688,00	Mutasi Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Tanah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga	2009	63.725.856,00		63.725.856,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
10	Tanah Kantor Dinas Perhubungan	2009	30.106.794,00		30.106.794,00	Mutasi Ke Dinas Perhubungan Daerah
11	Tanah Kantor Dinas Pertanian	2009	96.713.628,00		96.713.628,00	Mutasi Ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12	Tanah Kantor Dinas Perumahan	2009	33.366.546,00		33.366.546,00	Mutasi Ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
13	BNPBD	2012	57.438.316,54		57.438.316,54	Mutasi Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Gedung Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2012	68.710.838,28		68.710.838,28	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
15	Gedung LABKESDA	2012	31.072.269,17		31.072.269,17	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
16	Gudang Farmasi	2012	34.601.935,52		34.601.935,52	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
17	Gedung PSC 911	2012	38.602.224,05		38.602.224,05	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
18	Tanah Kantor Dinas Koperasi dan UMKM	2012	82.459.729,11		82.459.729,11	Mutasi Ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	Kawasan Konveksi	2012	151.809.268,92		151.809.268,92	Mutasi Ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Lingkungan Hidup	2012	280.759.746,24		280.759.746,24	Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah
21	Hutan Kota	2012	2.011.685.713,70		2.011.685.713,70	Mutasi Ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah
22	Dispora (Fasilitas Sarana Olahraga)	2012	263.145.030,36		263.145.030,36	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
23	Dispora (Fasilitas Sarana Olahraga II)	2012	97.138.659,01		97.138.659,01	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
24	Hutan Kota II (Lokasi Sport Center)	2012	78.437.030,00		78.437.030,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
25	BKPPD/ Gedung Diklat (Lokasi Sport Center)	2012	132.614.607,15		132.614.607,15	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
26	Sirkuit Gras Track (Lokasi Sport Center)	2012	197.863.010,82		197.863.010,82	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
27	Tanah Lokasi SKB	2012	87.255.593,23		87.255.593,23	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
28	Tanah Lokasi Gedung Kebudayaan	2012	285.869.358,48		285.869.358,48	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
29	Tanah SIKIM II	2012	80.218.671,11		80.218.671,11	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
30	Tanah SIKIM	2012	224.105.800,00		224.105.800,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
31	Tanah SIKIM	2012	374.929.003,40		374.929.003,40	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
32	Tanah Kantor Pengelola KTM (Disnakertrans)	2012	65.965.542,23		65.965.542,23	Mutasi Ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah
33	Kantor Inspektorat	2012	224.105.800,00		224.105.800,00	Mutasi Ke Inspektorat Daerah
34	Tanah Lokasi Puskesmas Fonuasingko	2012	50.905.632,47		50.905.632,47	Mutasi Ke Puskesmas Fonuasingko
35	Tanah Lokasi Barak Pol PP	2012	485.323.520,48		485.323.520,48	Mutasi Ke Satuan Polisi Pamongpraja
36	Penimbunan Lokasi Gudang BPKAD (Kantor Ex BPKAD)	2015	349.563.000,00		349.563.000,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37	Penimbunan Tanah Lokasi Kantor BPKAD (Kantor Ex BPKAD)	2015	895.810.000,00		895.810.000,00	Mutasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
38	Pembangunan Gedung Kantor Camat Bungku Timur (Lanjutan) Tahap II tahun 2015	2015	199.912.000,00		199.912.000,00	Mutasi Ke Kecamatan Bungku Timur
39	Pembayaran ganti rugi tanah lokasi puskesmas plus desa Moahino Kec. wita Ponda	2015	2.545.158.400,00		2.545.158.400,00	Mutasi Ke Puskesmas Laantula Jaya
40	Penimbunan Halaman Kantor BPBD	2017	99.946.000,00		99.946.000,00	Mutasi Ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah
41	Penimbunan Halaman Kantor Disporapar + Renwas	2017	273.262.500,00		273.262.500,00	Mutasi Ke Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Daerah Kab. Morowali
42	Penimbunan Halaman Kantor SKB (Dinas Pendidikan)	2017	99.830.000,00		99.830.000,00	Mutasi Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
43	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Mendui	2017	199.560.000,00		199.560.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
44	Perencanaan Kantor Kelurahan Mendui	2018	24.975.000,00		24.975.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
45	Penimbunan Halaman Gedung PSC 119 + Renwas (Dinas Kesehatan)	2020	174.670.000,39		174.670.000,39	Mutasi Ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
46	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Bahodopi	2020	49.830.000,00		49.830.000,00	Mutasi Ke Kecamatan Bahodopi
47	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Lurah Mendui	2020	199.500.000,00		199.500.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Mendui
48	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Lurah Ulunambo	2020	31.350.000,00		31.350.000,00	Mutasi Ke Kelurahan Ulunambo
49	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
50	Pekerjaan Land Clearing dan Pematangan Lahan Kantor BAPPELITBANGDA Kab. Morowali	2025	2.987.458.465,00	2.987.458.465,00		Mutasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
51	Land Clearing dan Pematangan Lahan Lokasi Sekretariat Kwarcab Morowali (Tanah KTM)	2025	398.690.914,00	398.690.914,00		Mutasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga
52	Penimbunan Halaman Kantor Pengawas + Renwas	2020	316.410.000,00	316.410.000,00		Mutasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah
53	Penimbunan Halaman Kantor PGRI	2023	244.806.000,00	244.806.000,00		Mutasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah
Kecamatan Bungku Tengah						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kecamatan Bahodopi						
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Bahodopi	2020	49.830.000,00	49.830.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Kecamatan Bungku Timur						
1	Pembangunan Gedung Kantor Camat Bungku Timur (Lanjutan) Tahap II tahun 2015	2015	199.912.000,00	199.912.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Kecamatan Sombori Kepulauan						
1	Perencanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat Sombori	2023	148.846.227,00	148.846.227,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Kelurahan Tofoiso						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Gedung Kantor Kelurahan Tofoiso yang berlokasi Di Kec. Kecamatan Bungku Tengah	2024	2.420.325.217,00	2.420.325.217,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Kelurahan Mendui						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Mendui	2017	199.560.000,00	199.560.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3	Perencanaan Kantor Kelurahan Mendui	2018	24.975.000,00	24.975.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Lurah Mendui	2020	199.500.000,00	199.500.000,00		Mutasi dari Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
5	Pembangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Mendui Kec. Bungku Tengah	2025	641.810.988,00	641.810.988,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Mutasi		Keterangan
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
6	Pemb. Pagar Kantor Lurah Mendui yang berlokasi di Kelurahan Mendui	2025	199.765.000,00	199.765.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
7	Tanah Kantor Kelurahan Mendui	2017	179.130.496,00	179.130.496,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
8	Ganti Rugi Tanah Lahan Pemakaman Kelurahan Mendui ; An. Muhsin Sihamu	2021	50.000.000,00	50.000.000,00		Mutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah
Kelurahan Bungi						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Pekerjaan Pembuatan Taman Kelurahan Bungi	2016	99.850.000,00	99.850.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Kelurahan Marsaoleh						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
2	Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Marsaoleh	2024	199.850.000,00	199.850.000,00		Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
Kelurahan Lamberea						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kelurahan Matano						
1	Mesin Absensi	2024	2.846.250,00	2.846.250,00		Mutasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Jumlah				**103.155.207.594,66**	**103.155.207.594,66**	

Daftar Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	OPD	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Tgl Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	Amortisasi Pertahun (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)	Amortisasi Perbulan (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Nilai Sisa Per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan Daerah	Aplikasi X E content (mata pelajaran)	1	619.008.000,00	31-Des-15	5	619.008.000,00	123.801.600,00	-	10.316.800,00	619.008.000,00	-
		Software Windows Multipoint Server 2012	1	12.500.000,00	31-Des-15	5	12.500.000,00	2.500.000,00	-	208.333,33	12.500.000,00	-
		Software Client Access License WMS 2012	1	55.500.000,00	31-Des-15	5	55.500.000,00	11.100.000,00	-	925.000,00	55.500.000,00	-
		Software Office Standart OLP	1	84.000.000,00	31-Des-15	5	84.000.000,00	16.800.000,00	-	1.400.000,00	84.000.000,00	-
		Software Simpaku Dana BOS	1	950.000,00	31-Des-12	5	950.000,00	190.000,00	-	15.833,33	950.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Software E-Content	1	15.936.000,00	31-Nov-16	5	15.936.000,00	3.187.200,00	-	265.600,00	15.936.000,00	-
		Windows Server 2012 R2 Standar Lisence dan SA	1	12.990.000,00	31-Des-16	5	12.990.000,00	2.598.000,00	-	216.500,00	12.990.000,00	-
		Windows server device Cal 2012	1	2.494.914,00	31-Des-16	5	2.494.914,00	498.982,80	-	41.581,90	2.494.914,00	-
		Office Standar 2016 Academic	1	6.300.000,00	31-Des-16	5	6.300.000,00	1.260.000,00	-	105.000,00	6.300.000,00	-
		CD Interaktive Kls 4,5,6 SDN Kolono (Dana Bos)	1	200.000,00	31-Des-17	5	200.000,00	40.000,00	-	3.333,33	200.000,00	-
		CD Interaktive Kls 4,5,6 SDN Kolono (Dana Bos)	1	200.000,00	31-Des-17	5	200.000,00	40.000,00	-	3.333,33	200.000,00	-
		CD Interaktive Kls 4,5,6 SDN Kolono (Dana Bos)	1	200.000,00	31-Des-17	5	200.000,00	40.000,00	-	3.333,33	200.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN Laroue	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD media pembelajaran K 13 (Dana Bos) SDN Laroue	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD media pembelajaran K 13 (Dana Bos) SDN Laroue	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD media pembelajaran K 13 (Dana Bos) SDN Laroue	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD media pembelajaran K 13 (Dana Bos) SDN Laroue	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD File Buku Guru (Dana Bos) SDN Bahomotefe	1	350.000,00	31-Des-17	5	350.000,00	70.000,00	-	5.833,33	350.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Media Pembelajaran K13 (Dana Bos) SDN 1 Lanona	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Bahan Pembelajaran K 13 (kaset CD) Kelas 1,2,4, dn 5 (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		Bahan Pembelajaran K 13 (kaset CD) Kelas 1,2,4, dn 5 (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		Bahan Pembelajaran K 13 (kaset CD) Kelas 1,2,4, dn 5 (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		Bahan Pembelajaran K 13 (kaset CD) Kelas 1,2,4, dn 5 (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		Pend. Agama Islam (kaset CD) (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		PJOK (Kaset CD) (Dana Bos) SDN 2 Bungku	1	400.000,00	31-Des-17	5	400.000,00	80.000,00	-	6.666,67	400.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Media Pembelajaran K.13 (Dana Bos) SDN Sakita	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD Pembelajaran SDN 1 Wosu (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD MEDIA PEMBELAJARAN SDN 2 Bahoea Reko-reko (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD MEDIA PEMBELAJARAN SDN 2 Bahoea Reko-reko (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-

No.	OPD	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Tgl Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	Amortisasi Pertahun (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)	Amortisasi Perbulan (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Nilai Sisa Per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan Daerah	Aplikasi X E content (mata pelajaran)	1	619.008.000,00	31-Des-15	5	619.008.000,00	123.801.600,00	-	10.316.800,00	619.008.000,00	-
		CD MEDIA PEMBELAJARAN SDN 2 Bahoea Reko-reko (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD MEDIA PEMBELAJARAN SDN 2 Bahoea Reko-reko (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		CD MEDIA PEMBELAJARAN SDN 2 Bahoea Reko-reko (Dana Bos)	1	300.000,00	31-Des-17	5	300.000,00	60.000,00	-	5.000,00	300.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		Kaset Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Dana Bos) SMPN 1 Bumi Raya	1	150.000,00	31-Des-17	5	150.000,00	30.000,00	-	2.500,00	150.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN 2 One Pute Jaya (Dana BOS)	1	1.600.000,00	31-Des-18	5	1.600.000,00	320.000,00	-	26.666,67	1.600.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN Bahomoahi (Dana BOS)	1	500.000,00	31-Des-18	5	500.000,00	100.000,00	-	8.333,33	500.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN Larobenu (Dana BOS)	1	2.100.000,00	31-Des-18	5	2.100.000,00	420.000,00	-	35.000,00	2.100.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN 2 Beringin Jaya (Dana BOS)	1	2.100.000,00	31-Des-18	5	2.100.000,00	420.000,00	-	35.000,00	2.100.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN 2 Limbo Makmur (Dana BOS)	1	2.100.000,00	31-Des-18	5	2.100.000,00	420.000,00	-	35.000,00	2.100.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN Polewali (Dana BOS)	1	2.400.000,00	31-Des-18	5	2.400.000,00	480.000,00	-	40.000,00	2.400.000,00	-
		CD Pembelajaran K13 SDN Nambo (Dana BOS)	1	600.000,00	31-Des-18	5	600.000,00	120.000,00	-	10.000,00	600.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Software Avnos endpoint Security	4	740.000,00	07-Nov-19	5	740.000,00	148.000,00	-	12.333,33	740.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Windows STD core	4	514.000,00	07-Nov-19	5	514.000,00	102.800,00	-	8.566,67	514.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-

Lampiran 27

No.	OPD	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Tgl Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	Amortisasi Pertahun (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)	Amortisasi Perbulan (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Nilai Sisa Per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan Daerah	Aplikasi X E content (mata pelajaran)	1	619.008.000,00	31-Des-15	5	619.008.000,00	123.801.600,00	-	10.316.800,00	619.008.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Office Standard 2019	4	3.600.000,00	07-Nov-19	5	3.600.000,00	720.000,00	-	60.000,00	3.600.000,00	-
		Microsoft Windows Server CAL	4	15.000.000,00	07-Nov-19	5	15.000.000,00	3.000.000,00	-	250.000,00	15.000.000,00	-
		Microsoft WinSvrSTDCore 2019	1	4.832.300,00	15-Sep-20	5	4.187.993,33	966.460,00	644.306,67	80.538,33	4.832.300,00	-
		Windows Server CAL 2019	1	173.800,00	15-Sep-20	5	150.626,67	34.760,00	23.173,33	2.896,67	173.800,00	-
		WPS Office 2016	1	750.000,00	15-Sep-20	5	650.000,00	150.000,00	100.000,00	12.500,00	750.000,00	-
		Bitdefender Antivirus Plus	1	125.950,00	15-Sep-20	5	109.156,67	25.190,00	16.793,33	2.099,17	125.950,00	-
		Microsoft WinSvrSTDCore 2019	1	4.832.300,00	15-Sep-20	5	4.187.993,33	966.460,00	644.306,67	80.538,33	4.832.300,00	-
		Windows Server CAL 2019	1	173.800,00	15-Sep-20	5	150.626,67	34.760,00	23.173,33	2.896,67	173.800,00	-
		WPS Office 2016	1	750.000,00	15-Sep-20	5	650.000,00	150.000,00	100.000,00	12.500,00	750.000,00	-
		Bitdefender Antivirus Plus	1	125.950,00	15-Sep-20	5	109.156,67	25.190,00	16.793,33	2.099,17	125.950,00	-
		Microsoft WinSvrSTDCore 2019	1	4.832.300,00	15-Sep-20	5	4.187.993,33	966.460,00	644.306,67	80.538,33	4.832.300,00	-
		Windows Server CAL 2019	1	173.800,00	15-Sep-20	5	150.626,67	34.760,00	23.173,33	2.896,67	173.800,00	-
		WPS Office 2016	1	750.000,00	15-Sep-20	5	650.000,00	150.000,00	100.000,00	12.500,00	750.000,00	-
		Bitdefender Antivirus Plus	1	125.950,00	15-Sep-20	5	109.156,67	25.190,00	16.793,33	2.099,17	125.950,00	-
		Microsoft WinSvrSTDCore 2019	1	4.832.300,00	15-Sep-20	5	4.187.993,33	966.460,00	644.306,67	80.538,33	4.832.300,00	-
		Windows Server CAL 2019	1	173.800,00	15-Sep-20	5	150.626,67	34.760,00	23.173,33	2.896,67	173.800,00	-
		WPS Office 2016	1	750.000,00	15-Sep-20	5	650.000,00	150.000,00	100.000,00	12.500,00	750.000,00	-
		Bitdefender Antivirus Plus	1	125.950,00	15-Sep-20	5	109.156,68	25.190,00	16.793,33	2.099,17	125.950,00	-
		Aplikasi Perpustakaan Digital (E-Library)	53	1.059.470.000,00	25-Mar-24	5	176.578.333,33	211.894.000,00	176.578.333,33	17.657.833,33	353.156.666,67	706.313.333,33
		Sub Jumlah		**2.354.127.114,00**			**1.468.098.354,01**	**470.825.422,80**	**179.715.426,67**	**39.235.451,90**	**1.647.813.780,67**	**706.313.333,33**
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Vidio Counten	1	28.100.000,00	28-Des-15	5	28.100.000,00	5.620.000,00	-	468.333,33	28.100.000,00	-
		Video Animasi Edukasi KB	1	6.600.000,00	15-Agu-15	5	6.600.000,00	1.320.000,00	-	110.000,00	6.600.000,00	-
		VCD Mars BKB	1	1.501.500,00	17-Jun-16	5	1.501.500,00	300.300,00	-	25.025,00	1.501.500,00	-
		CD Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Mengasuh	1	1.120.000,00	17-Jun-16	5	1.120.000,00	224.000,00	-	18.666,67	1.120.000,00	-
		Aplikasi Sistem display digital signage informasion	1	3.000.000,00	15-Des-17	5	3.000.000,00	600.000,00	-	50.000,00	3.000.000,00	-
		Aplikasi Sistem display digital signage informasion	1	3.000.000,00	15-Des-17	5	3.000.000,00	600.000,00	-	50.000,00	3.000.000,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Pembuatan Video Animasi 3D	1	47.500,00	07-Agu-17	5	47.500,00	9.500,00	-	791,67	47.500,00	-
		Sub Jumlah		**43.796.500,00**			**43.796.500,00**	**8.759.300,00**	**-**	**729.941,67**	**43.796.500,00**	**-**
3	RSUD Morowali	Os Server	1	16.500.000,00	29-Okt-18	5	16.500.000,00	3.300.000,00	-	275.000,00	16.500.000,00	-
		Security Gateway	1	2.750.000,00	29-Okt-18	5	2.750.000,00	550.000,00	-	45.833,33	2.750.000,00	-
		Sub Jumlah		**19.250.000,00**			**19.250.000,00**	**3.850.000,00**	**-**	**320.833,33**	**19.250.000,00**	**-**
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Sistem Informasi Data Base Dinas PU	1	57.200.000,00	20-Jun-16	5	57.200.000,00	11.440.000,00	-	953.333,33	57.200.000,00	-
		Sub Jumlah		**57.200.000,00**			**57.200.000,00**	**11.440.000,00**	**-**	**953.333,33**	**57.200.000,00**	**-**
5	Dinas Perumahan	Pengadaan Software/Aplikasi Data Base Pertanahan	1	37.300.000,00	8 Desember 2023	5	8.081.666,67	7.460.000,00	7.460.000,00	621.666,67	15.541.666,67	21.758.333,33
		Sub Jumlah		**37.300.000,00**			**8.081.666,67**	**7.460.000,00**	**7.460.000,00**	**621.666,67**	**15.541.666,67**	**21.758.333,33**
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah	Software dan jaringan Server Alat Perekam KTP Elektronik	1	37.675.000,00	01-Jun-16	5	37.675.000,00	7.535.000,00	-	627.916,67	37.675.000,00	-
		Software Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	37.400.000,00	20 Des 2024	5	623.333,33	7.480.000,00	7.480.000,00	623.333,33	8.103.333,33	29.296.666,67
		Sub Jumlah		**75.075.000,00**			**38.298.333,33**	**15.015.000,00**	**7.480.000,00**	**1.251.250,00**	**45.778.333,33**	**29.296.666,67**
7	Dinas Perhubungan Daerah	Database Pelengkap Jalan	1	24.900.000,00	20-Agu-15	5	24.900.000,00	4.980.000,00	-	415.000,00	24.900.000,00	-
		Desain Halaman Website		32.670.000,00	07-Agu-16	5	32.670.000,00	6.534.000,00	-	544.500,00	32.670.000,00	-
		Sub Jumlah		**57.570.000,00**			**57.570.000,00**	**11.514.000,00**	**-**	**959.500,00**	**57.570.000,00**	**-**
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Licency	1	23.100.000,00	06-Agu-18	5	23.100.000,00	4.620.000,00	-	385.000,00	23.100.000,00	-
		Firewall & Bandwidth Management	1	139.700.000,00	06-Agu-18	5	139.700.000,00	27.940.000,00	-	2.328.333,33	139.700.000,00	-
		Sub Jumlah		**162.800.000,00**			**162.800.000,00**	**32.560.000,00**	**-**	**2.713.333,33**	**162.800.000,00**	**-**
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Sistem Informasi Perizinan	1	92.000.000,00	25-Jun-15	5	92.000.000,00	18.400.000,00	-	1.533.333,33	92.000.000,00	-
		Sistem Surat Elektronik	1	49.865.000,00	27-Des-18	5	49.865.000,00	9.973.000,00	-	831.083,33	49.865.000,00	-
		Sub Jumlah		**141.865.000,00**			**141.865.000,00**	**28.373.000,00**	**-**	**2.364.416,67**	**141.865.000,00**	**-**
10	Sekretariat DPRD	Software Server Digital Setting dan training + Desain Layout "layanan Informasi Digital"	1	40.150.000,00	07-Agu-15	5	40.150.000,00	8.030.000,00	-	669.166,67	40.150.000,00	-
		Sub Jumlah		**40.150.000,00**			**40.150.000,00**	**8.030.000,00**	**-**	**669.166,67**	**40.150.000,00**	**-**
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	1	49.900.000,00	10-Apr-15	5	49.900.000,00	9.980.000,00	-	831.666,67	49.900.000,00	-
		Pembuatan Website Bappeda	1	41.500.000,00	10-Nov-15	5	41.500.000,00	8.300.000,00	-	691.666,67	41.500.000,00	-
		Aplikasi Sistem Elektronik Pengendalian dan Evaluasi Daerah	1	150.800.000,00	19 Des 2022	5	62.833.333,33	30.160.000,00	30.160.000,00	2.513.333,33	92.993.333,33	57.806.666,67
		Sub Jumlah		**242.200.000,00**			**154.233.333,33**	**48.440.000,00**	**30.160.000,00**	**4.036.666,67**	**184.393.333,33**	57.806.666,67
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Windows Server Penerbitan SP2D	1	7.500.000,00	20-Jan-17	5	7.500.000,00	1.500.000,00	-	125.000,00	7.500.000,00	-
		Sub Jumlah		**7.500.000,00**	**42.755,00**		**7.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**125.000,00**	**7.500.000,00**	**-**
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Aplikasi PBB Berbasis SISMIOP	1	199.100.000,00	03-Agu-15	5	199.100.000,00	39.820.000,00	-	3.318.333,33	199.100.000,00	-
		Windows Client	1	15.400.000,00	01-Sep-15	5	15.400.000,00	3.080.000,00	-	256.666,67	15.400.000,00	-
		Windows Client	1	3.300.000,00	01-Sep-15	5	3.300.000,00	660.000,00	-	55.000,00	3.300.000,00	-
		Windows Client	1	3.300.000,00	01-Sep-15	5	3.300.000,00	660.000,00	-	55.000,00	3.300.000,00	-
		Windows Client	1	3.300.000,00	01-Sep-15	5	3.300.000,00	660.000,00	-	55.000,00	3.300.000,00	-
		Oracle Database Standar Edition	1	64.570.000,00	01-Sep-15	5	64.570.000,00	12.914.000,00	-	1.076.166,67	64.570.000,00	-
		Smartgov UU No 1 Tahun 2022	1	249.750.000,00	3 Juni 2024	5	29.137.500,00	49.950.000,00	49.950.000,00	4.162.500,00	79.087.500,00	170.662.500,00

Lampiran 27

No.	OPD	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Tgl Perolehan	Masa Manfaat (Tahun)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024 (Rp)	Amortisasi Pertahun (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)	Amortisasi Perbulan (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2025 (Rp)	Nilai Sisa Per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan Daerah	Aplikasi X E content (mata pelajaran)	1	619.008.000,00	31-Des-15	5	619.008.000,00	123.801.600,00	-	10.316.800,00	619.008.000,00	-
	Sub Jumlah			**538.720.000,00**			**318.107.500,00**	**107.744.000,00**	**49.950.000,00**	**8.978.666,67**	**368.057.500,00**	**170.662.500,00**
14	Kecamatan Bungku Tengah	Soft Ware	1	129.920.000,00	31-Des-21	5	80.117.333,33	25.984.000,00	25.984.000,00	2.165.333,33	106.101.333,33	23.818.666,67
	Sub Jumlah			**129.920.000,00**			**80.117.333,33**	**25.984.000,00**	**25.984.000,00**	**2.165.333,33**	**106.101.333,33**	**23.818.666,67**
15	Bagian Administrasi Perekonomian	Soft Ware	1	21.589.500,00	2 Juli 2022	5	10.794.750,00	4.317.900,00	4.317.900,00	359.825,00	15.112.650,00	6.476.850,00
	Sub Jumlah			**21.589.500,00**			**10.794.750,00**	**4.317.900,00**	**4.317.900,00**	**359.825,00**	**15.112.650,00**	**6.476.850,00**
16	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah	Soft Ware Job Information Manajer System	1	75.000.000,00	6 Agustus 2024	5	6.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.250.000,00	21.250.000,00	53.750.000,00
	Sub Jumlah			**75.000.000,00**			**6.250.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**1.250.000,00**	**21.250.000,00**	**53.750.000,00**
17	Bagian Administrasi Pembangunan	Soft Ware e- TEPRA	1	40.000.000,00	2 Februari 2024	5	7.333.333,33	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	15.333.333,33	24.666.666,67
	Sub Jumlah			**40.000.000,00**			**7.333.333,33**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**666.666,67**	**15.333.333,33**	**24.666.666,67**
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Website Pariwisata Morowali	1	39.960.000,00	15 Desember 2025	5	-	7.992.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	39.294.000,00
	Sub Jumlah			**39.960.000,00**			**-**	**7.992.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**39.294.000,00**
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sistem Informasi TP-PKK Kabupaten Morowali	1	87.550.000,00	26 Februari 2025	5	-	17.510.000,00	16.050.833,33	1.459.166,67	16.050.833,33	71.499.166,67
	Sub Jumlah			**87.550.000,00**			**-**	**17.510.000,00**	**16.050.833,33**	**1.459.166,67**	**16.050.833,33**	**71.499.166,67**
	Jumlah			**4.171.573.114,00**			**2.621.446.104,00**	**834.314.622,80**	**344.784.160,00**	**69.526.218,57**	**2.966.230.263,99**	**1.205.342.850,01**

Lampiran 28

Daftar Rekapitulasi Register Aset Tetap Tanah
Tidak Dilengkapi Bukti Penguasaan

No	OPD	Uraian Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas	Nomor Sertifikat	Tanggal Serfitikat	Keterangan	Identifikasi Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Non Persil lainnya lainnya (dst)	1	2017	1.544.840.000,00	Desa Moahino, Kec. Witaponda	35.400,00	235/BA-PT/DM-WP/V/2016	2017-05-22 00:00:00.000	Tanah Pengembangan Perikanan	*Cold Storage* (penyimpanan es)
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1	2017	4.512.409.000,00	Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah	8.862,00	593.1/165/BT/2017	2017-05-22 00:00:00.000	Pembebasan Lahan Lokasi RSUD Morowali	Konfirmasi TAPEM
3	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2017	957.070.000,00	Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah	40.405,00	593.1/228/BT/2017	2017-05-22 00:00:00.000	Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Terdapat 2 Sertifikat SHM yang belum dipecah dan dibalik nama
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1	2017	544.620.000,00	Desa Keurea Kec. Bahodopi	21.340,00	593.83/037/BHDP/III/2017	2017-07-06 00:00:00.000	Tanah Balai Pemotongan Hewan (BPH)	Konfirmasi Dinas Perumahan, Pembayaran ganti rugi tidak 100%, sudah ada kesepakatan untuk membagi Luasan Tanah
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Gudang	1	2017	2.232.000.000,00	Desa Matansala Kec. Bungku Tengah	4.960,00	027/573/BT/03/2007	2017-07-07 00:00:00.000	Tanah Bank Sulteng	Dokumen AJB terbakar, belum ada proses balik nama dari pemilik awal ke pembeli yang diganti
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	2017	179.130.496,00	Kel. Mendui Kec. Bungku Tengah	1.993,00	593.1/203/BT/2017	2017-07-03 00:00:00.000	Tanah Kantor Kelurahan Mendui	Sudah Bersertifikat
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	2017	2.971.640.000,00	Desa Ipi, Kec. Bungku Tengah	14.291,00	593.1/199/BT/2017	2017-10-18 00:00:00.000	Tanah Madrasah Aliyah Negeri	Konfirmasi Dinas Perumahan
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2017	67.704.000,00	Dusun Kurisa Desa Fatufia Kec. Bahodopi	752,50	SPT.593.83/037/BHDP/III/2017	2017-11-01 00:00:00.000	Tanah Cold Storage	Konfirmasi Dinas Perumahan
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2	2018	909.986.500,00	Desa Bente	7.711,75	593.1/153/BT/2018	2018-12-10 00:00:00.000	Ganti Rugi Lokasi Pengembangan Rumah Sakit	Konfirmasi Dinas Perumahan
10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	5	2019	50.000.000,00	Desa Bahoea Reko-reko Kec. Bungku Barat	6,50	592.2/57/SPT/BB/X/2019	2019-10-09 00:00:00.000	Tanah SD Bahoea Reko-reko	Telah ada Sertifikat SHP 19.06.09.01.4.00003 dengan Luasan 5.454
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	6	2020	25.000.000,00	Kec. Bungku Barat	350,00	593.83/73/SPT/BB/XI/2020	2020-01-27 00:00:00.000	Ganti Rugi Lahan SDN 2 Bahoea Reko-Reko Kec. Bungku Barat	Telah ada Sertifikat SHP 19.06.09.01.4.00002 dengan Luasan 1.644
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	2022	180.560.000,00	Desa Umbele Kecamatan Bumi Raya	6.250,00	593/425/UBL-BR/IX/2010	2010-09-12 00:00:00.000	Ganti Rugi Lahan Santunan Pembebasan Lahan Pembangunan Lapangan Olah Raga an. WAGINTEN	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
13	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	2022	119.440.000,00	Desa Umbele Kecamatan Bumi Raya	3.760,00	593/426/UBL-BR/IX/2010	2010-09-12 00:00:00.000	Ganti Rugi Lahan Santunan Pembebasan Lahan Pembangunan Lapangan Olah Raga. an. WAGINTEN	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	8	2022	87.227.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	307,00	590/453.b/Kel. MTN/X/2017	2017-10-23 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALKAF	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah

No	OPD	Uraian Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas	Nomor Sertifikat	Tanggal Serfitikat	Keterangan	Identifikasi Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	9	2022	223.902.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	466,00	593.1/353.a/Kel. MTN/VIII/2017	2017-08-03 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MURTADA	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	10	2022	197.720.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	702,00	593.21/355.a/Kel.MTN/IX/2017	2017-09-11 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. MUHAMAD NASIR	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
17	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	12	2022	60.046.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	206,00	590/427.b/Kel.MTN/X/2017	2017-10-16 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. HARYONO	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
18	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	14	2022	108.553.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	219,00	590/352.b/Kel.MTN/IX/2017	2017-09-11 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ALWI	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
19	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	15	2022	78.229.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	278,00	590/352/Kel.MTN/VIII/2017	2017-08-21 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. AIDA HAMID	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	16	2022	98.860.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	351,00	593.1/353/Kel.MTN/VIII/2017	2017-08-03 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. IKRAMUDIN N. ZEN	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	17	2022	98.860.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	351,00	593.1/265.a/Kel.MTN/VIII/2017	2017-08-03 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. Hj. FARIDA	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
22	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Daerah	Tanah Persil Lainnya	21	2022	66.442.000,00	Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah	235,00	593.21/352.c/Kel.MTN/IX/2017	2017-09-11 00:00:00.000	Ganti Rugi Santunan Tanah, Bangunan dan Tanaman Dampak Pembangunan Alun-Alun Pantai Matano Kec. Bungku Tengah an. ADAWIAH USMAN	Konfirmasi Dinas Perumahan\, Titik Lokasi ganti rugi, dan ditindaklanjuti dengan Surat Penguasan Tanah
23	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Tanah Bangunan Gudang	9	2020	6.864.000,00	Desa Sakita Kec. Bungku Tengah	143,00	NULL	NULL	Tanah Poskesdes Sakita	Koordinasi dengan Dinkes dan Kades Sakita
24	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Tanah Bangunan Gudang	11	2020	28.800.000,00	Desa Siumbatu Kec. Bahodopi	600,00	NULL	NULL	Tanah Poskesdes Siumbatu	Koordinasi dengan Dinkes dan Kades Siumbatu
25	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Tanah Bangunan Gudang	14	2020	784.000,00	Desa Terebino Kec. Menui Kepulauan	56,00	NULL	1994-09-01 00:00:00.000	Tanah Pustu Terebino	Teridentifikasi Surat Penyerahan Nomor : 593.83/074/MK/V/2021 terhadap Tanah Pustu Terebino Seluas 265 M2
26	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1	2024	6.781.011.201,00	Desa Beringin Jaya	43.369,00	592.21/016/SPT/BR/VI/2024	2024-06-26 00:00:00.000	Tanah Rumah Sakit Pepakulia	Tanah masih dalam sengketa
27	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	1975	1.524.600,00	Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	462,00	NULL	NULL	Tanah RTT Dokter I Puskesmas Ulunambo	Konfirmasi dengan Dinkes
28	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2	1975	1.379.400,00	Kel.Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	418,00	NULL	NULL	Tanah RTT Paramedis I Puskesmas Ulunambo	Konfirmasi dengan Dinkes
29	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	3	1975	1.161.600,00	Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	352,00	NULL	NULL	Tanah RTT Paramedis II Puskesmas Ulunambo	Konfirmasi dengan Dinkes

No	OPD	Uraian Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas	Nomor Sertifikat	Tanggal Serfitikat	Keterangan	Identifikasi Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	4	1992	600.600,00	Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	288,00	NULL	NULL	Tanah RTT Paramedis III Puskesmas Ulunambo	Konfirmasi dengan Dinkes
31	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Poliklinik	8	2019	3.150.000,00	Desa Pulau Dua Kec. Bungku Selatan	225,00	445/017/PLD/I/2016	2016-01-01 00:00:00.000	Tanah Poskesdes	Konfirmasi dengan Dinkes
32	UPTD. Puskesmas Bungku	Tanah Bangunan Poliklinik	6	2019	16.840.000,00	Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	500,00	12/DS-BHML/XI/2014	2014-01-01 00:00:00.000	Tanah Pustu Bahomoleo	Konfirmasi dengan Dinkes
33	RSUD Morowali	Tanah Bangunan Rumah Sakit	5	2007	1.786.543.000,00	Jl. Trans Sulawesi Ds. Fonuasingko Kec. Bungku Tengah	35.000,00	NULL	NULL	Tanah RSUD	Konfirmasi dengan RSUD/Tapem
34	SDN Tanona	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2015	11.200.000,00	Desa Tanona Kec. menui Kepulauan	4.800,00	151/022/TN/XII/2013	NULL	Tanah SDN Tanona	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
35	SDN Polewali	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2015	2.002.000,00	Desa Polewali Kec. Bungku Selatan	572,00	NULL	NULL	Tanah SDN Polewali	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
36	SDN 1 Lafeu	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2015	169.345.000,00	Desa Lafeu Kec. Bungku Pesisir	14.000,00	NULL	NULL	Tanah SDN 1 Lafeu	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
37	SDN Folili	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2015	50.000.000,00	Dusun Folili Desa Topogaro	10.000,00	592.2/70-TP/BB/V/2014	2014-05-22 00:00:00.000	Tanah SDN Folili	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
38	SDN 2 Lantula Jaya	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	2015	90.000.000,00	Desa Lantula Jaya	2.500,00	NULL	NULL	Tanah Rumah Guru SDN 2 Lantula Jaya	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
39	SMP Negeri 3 Wita Ponda Satu Atap	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2015	219.243.000,00	Desa Moahino Kec. Wita Ponda Kab. Morowali	3.965,00	048/050/DM-WP/IV/2011	NULL	Tanah SMPN 3 Wita Ponda Satap	SATAP dengan SDN Moahino (1 Lokasi dan 1 SHP Dengan SDN Moahino)
40	SDN Tanjung Tiram	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2020	44.800.000,00	Desa Tanjug Tiram Kec. Menui Kepulauan	3.200,00	470/10/22.T.T/2013	2013-01-08 00:00:00.000	Tanah SDN Tanjug Tiram	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
41	SMP Negeri 4 Bahodopi	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2019	3.189.248.000,00	Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi	7.000,00	049/05/BHMR/XI/2019	2019-11-18 00:00:00.000	Tanah SMPN 4 Bahodopi	Konfirmasi dengan Dinas Pendidikan
42	TK Negeri 1 Witaponda	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	2005	778.822.000,00	Desa Laantula Jaya Kec. Wita Ponda	2.500,00	05/SP/WitaPonda/2005	2005-09-10 00:00:00.000	Tanah TK Negeri Laantula Jaya	Tanah Hibah Masuk
43	TK Negeri 3 Witaponda	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2025	99.458.001,00	Desa Puntari Makmur Kec.Wita Ponda	3.500,00	019/SPT-WP/IV/2015	2015-04-01 00:00:00.000	Tanah TK Negeri 3 Wita Ponda	Tanah Hibah Masuk
44	SMPN 1 Sombori	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	2024	76.145.001,00	Desa Tanjung Harapan	15.000,00	500.17.3/078/TH/IX/2024	2024-09-03 00:00:00.000	Tanah SMPN 1 Sombori Kepulauan	Dokumen masih dipegang Camat Sombori Kepulauan
45	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah Bangunan Kandang Hewan	8	2009	15.000.000,00	Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	300,00	023/593.1/BT/II/2009	NULL	Tanah Klinik Keswan Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	Konfirmasi dengan Dinas Pertanian
46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah Bangunan Kandang Hewan	9	2012	60.000.000,00	Desa Ipi Kec. Bungku Tengah	2.990,00	048/067/IPI/V/2012	2012-05-09 00:00:00.000	Pengadaan Pembelian Tanah untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Desa IPI Kec. Bungku Tengah	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
47	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1	2013	60.000.000,00	Desa Ipi Kec. Bungku Tengah	5.376,00	096/593.1/BT	2013-05-16 00:00:00.000	Pembelian Tanah Untuk Rumah Potong Hewan	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
48	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah Bangunan Kandang Hewan	10	2003	30.000.000,00	Desa Wosu	300,00	NULL	NULL	Tanah Gedung Tempat Potong Hewan (TPH)	Konfirmasi Dinas Pertanian
49	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Tanah Bangunan Gudang	1	2014	203.819.000,00	Desa Bumi Harapan Kec. Wita	2.500,00	308/BHL-WP/VIII/2015	2015-08-31 00:00:00.000	Tanah BPK Wita Ponda	Konfirmasi Dinas Pertanian
50	BP3K Bungku Selatan	Tanah Bangunan Gudang	1	2019	72.000.000,00	Desa Paku Kec. Bungku Selatan	3.600,00	590/0160/PK.BS/X/2012	2012-01-01 00:00:00.000	Tanah Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Konfirmasi Dinas Pertanian
51	BP3K Bungku Timur	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	2016	14.400.000,00	Desa Ululere Kec. Bungku Timur	400,00	NULL	NULL	Tanah Pos Penyuluhan Kehutanan Desa Ululere	Konfirmasi Dinas Pertanian

No	OPD	Uraian Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas	Nomor Sertifikat	Tanggal Serfitikat	Keterangan	Identifikasi Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	BP3K Bumi Raya	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	2016	41.200.000,00	Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya	400,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pos Penyuluhan Kehutanan Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya	Konfirmasi Dinas Pertanian
53	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Tanah Bangunan Pasar	17	2011	53.507.770,00	Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah	10.000,00	593.3/489.1/BMT/XI/2018	2018-11-28 00:00:00.000	Tanah Pasar	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
54	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Tanah Bangunan Pasar	23	2014	99.820.000,00	Desa Ungkaya Kec. Wita Ponda	7.799,00	590/247/DU-WP/IX/2014	2014-09-22 00:00:00.000	Tanah Pasar	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
55	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Tanah Bangunan Pasar	30	2024	299.646.912,00	Desa Umpanga, Kec.Bungku Barat	24.000,00	141/01/DU-BB/IV/2024	2024-04-05 00:00:00.000	Tanah Pasar Rakyat Umpanga, Kec.Bungku Barat	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
56	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah	Tanah Bangunan Pasar	33	2002	199.500.001,00	Desa Keurea, Kec.Bahodopi	10.000,00	NULL	NULL	Tanah Pasar Rakyat Keurea, Kec.Bahodopi	Terdapat Surat Penyerahan Tanah
57	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Pasar	4	1982	975.000,40	Kel Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	260,00	NULL	NULL	Tanah Pasar	Belum berdokumen
58	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2005	479.925.000,00	Kec Bungku Tengah	-	NULL	NULL	Tanah bangunan rumah dinas	tidak diketahui, Konfirmasi Ulis
59	SMP Negeri 2 Bungku Barat	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	1998	43.276.500,00	Desa Umpanga Kec. Bumi Raya	9.617,00	NULL	NULL	Tanah SMPN 2 BUNGKU BARAT	Konfirmasi Dinas Pendidikan
60	SMP Negeri 1 Bumi Raya	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	2	1986	591.530.222,00	Desa Bahonsuai Kec.Bumi Raya	23.500,00	NULL	NULL	Tanah SMPN 1 Bumi Raya	Konfirmasi Dinas Pendidikan
61	SDN Tandaoleo	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	1992	4.218.750,00	Desa Tandaoleo Kec. Bungku Pesisir	9.102,00	598/0102/SKT-TDR/III/2016	NULL	Tanah SDN Tandaoleo	Konfirmasi Dinas Pendidikan
62	SDN Pulau Dua Darat	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	1987	36.377.950,00	Desa Pulau Dua Kec. Menui Kepulauan	4.230,00	NULL	NULL	Tanah SDN Pulau Dua	Konfirmasi Dinas Pendidikan
63	SDN Topogaro	Tanah Bangunan Pendidikan Dan	1	1962	45.800.000,00	Desa Topogaro Kec. Bungku Barat	4.230,00	592.3/55/TPG/BB/VIII/2015	NULL	Tanah SDN TOPOGARO	Konfirmasi Dinas Pendidikan
64	Kecamatan Bumi Raya	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	3	2004	14.910.000,00	Desa Bahonsuai Kec Bumi Raya	1.988,00	NULL	NULL	Tanah Gedung Serba Guna	Konfirmasi Dinas Pendidikan
65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	tanah non persil lainnya lainnya (dst)	11	2003	51.100.000,00	Desa Bahomente Kec Bungku	3.500,00	NULL	NULL	Tanah Pabrik Minyak Kelapa	tidak diketahui, Konfirmasi Ulis
66	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1	2007	5.280.000,00	Desa Kaleroang Kec Bungku	4.350,00	533/0135/KLR/IV/2016	2016-01-01 00:00:00.000	Tanah Puskesmas Kaleroang	Konfirmasi Dinas Kesehatan
67	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	2007	2.277.000,00	Desa Kaleroang Kec Bungku	690,00	NULL	NULL	Tanah Perumahan Dokter Puskesmas Kaleroang	Konfirmasi Dinas Kesehatan
68	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2	2007	1.056.000,00	Desa Kaleroang Kec Bungku Selatan	320,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Rumah Paramedis I Puskesmas Kaleroang	Konfirmasi Dinas Kesehatan
69	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	3	2007	1.056.000,00	Desa Kaleroang Kec Bungku Selatan	320,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Rumah Paramedis II Puskesmas Kaleroang	Konfirmasi Dinas Kesehatan
70	UPTD. Puskesmas Kaleroang	Tanah Bangunan Poliklinik	4	2007	392.700,00	Desa Bakala Desa Paku Kec. Bungku Selatan	144,00	591.1/01.43/BKL/III/2016	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Bakala	Tanah diatas laut / diambil warga
71	UPTD. Puskesmas La'Feu	Tanah Bangunan Poliklinik	5	2007	115.500,00	Desa Lafeu Kec. Bungku Pesisir	35,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Polindes Lafeu	Konfirmasi Dinas Kesehatan
72	UPTD. Puskesmas La'Feu	Tanah Bangunan Poliklinik	2	2004	831.600,00	Desa Sambalagi Kec. Bungku selatan	345,00	552/0180/SBG/XI/2015	NULL	Tanah Bangunan Pustu Sambalangi	Konfirmasi Dinas Kesehatan
73	UPTD. Puskesmas La'Feu	Tanah Bangunan Poliklinik	3	2006	5.280.000,00	Desa Werea Kec. Bungku Pesisir	1.600,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Werea	Konfirmasi Dinas Kesehatan
74	UPTD. Puskesmas La'Feu	Tanah Bangunan Poliklinik	7	2008	207.900,00	Desa Tandaoleo Kec. Bungku Pesisir	216,00	598/0104/TDL/III/2016	NULL	Tanah Bangunan Polindes Tandaoleo	Konfirmasi Dinas Kesehatan
75	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Poliklinik	2	1995	1.320.000,00	Desa Samarengga Kec. Menui Kepulauan	400,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pustu Samarengga	Konfirmasi Dinas Kesehatan
76	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Poliklinik	1	1980	1.320.000,00	Desa Matano Kec. Menui Kepulauan	400,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pustu Matano	Konfirmasi Dinas Kesehatan

Lampiran 28

No	OPD	Uraian Aset	Nomor Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Alamat	Luas	Nomor Sertifikat	Tanggal Serfitikat	Keterangan	Identifikasi Awal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	UPTD. Puskesmas Ulunambo	Tanah Bangunan Poliklinik	3	1996	5.497.800,00	Desa Matarape Kec. Menui Kepulauan	1.666,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pustu Matarape	Konfirmasi Dinas Kesehatan
78	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	1	2007	4.200.000,00	Desa Bahonsuai Kec.Bumi Raya	700,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pustu Bahonsuai	Konfirmasi Dinas Kesehatan
79	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	2	2007	1.170.000,00	Desa Karaupa Kec. Bumi Raya	260,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Karaupa	Konfirmasi Dinas Kesehatan
80	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	3	2007	2.362.500,00	Desa Pebotoa Kec. Bumi Raya	525,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Pebotoa	Konfirmasi Dinas Kesehatan
81	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	4	2007	1.350.000,00	Desa Lasampi Kec.Bahodopi	300,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Lasampi	Konfirmasi Dinas Kesehatan
82	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	5	2007	11.250.000,00	Desa Lambelu Kec. Bumi Raya	2.500,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Pustu Lambelu	Tanah Hibah
83	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	7	2007	1.800.000,00	Desa Limbo Makmur Kec. Bumi Raya	400,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Limbo Makmur	Konfirmasi Dinas Kesehatan
84	UPTD. Puskesmas Bahonsuai	Tanah Bangunan Poliklinik	9	2007	2.025.000,00	Desa Harapan Jaya Kec. Bumi Raya	450,00	NULL	NULL	Tanah Bangunan Poskesdes Harapan Jaya	Konfirmasi Dinas Kesehatan
85	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Tanah Persil Lainnya	3	2024	149.279.000,00	NULL	6.400,00	NULL	NULL	Penataan Lahan TPST Kecamatan Bumi Raya	Konfirmasi Dinas Lingkungan Hidup
86	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1	2007	149.700.000,00	Desa Bente Kec. Bungku Tengah	10.000,00	NULL	NULL	Penyiapan lokasi pembangunan museum daerah (1 paket) pengadaan tahun 2007	Tanah SDN 19 SHP : 19.06.06.22.4.00034 Luas 7.457 Tanggal 6 April 2022
87	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Tanah Hutan Wisata	1	2024	129.491.000,00	Desa Sambori	-	NULL	NULL	Pembukaan Lahan Kegiatan Festival Pariwisata Kab. Morowali di Desa Tanjumh Harapan Sombori	Konfirmasi Dispora
88	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2015	706.665.000,00	Kantor Satpol PP Kompleks KTM	40.937,00	590/079/ADPUM/2016	2016-05-12 00:00:00.000	Penggusuran Tanah Untuk Gedung Kantor	Kapitalisasi ke Induk
89	Kelurahan Ulunambo	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2023	34.889.000,00	Jl. Lantai 4 Kel. Ulunambo Kec. Menui Kepulauan	2.500,00	NULL	2020-10-12 00:00:00.000	Tanah Kantor Lurah Ulunambo	Konfirmasi dengan Kec Menui Kepulauan
90	Kecamatan Bungku Selatan	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	1979	3.090.000,00	Desa Kaleroang Kec. Bungku Selatan	412,00	NULL	NULL	Tanah Rujab Camat Bungku Selatan	Konfirmasi Kec Bungku Selatan
91	Kecamatan Bahodopi	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2004	264.512.500,00	Desa Bahodopi Kec. Bahodpi	3.730,00	238/A6-000/XII/98	1998-12-10 00:00:00.000	Tanah Kantor Camat Bahodopi	19.06.000010105.0
Jumlah					**32.576.586.004,40**						

Daftar Rekapitulasi Saldo Utang PFK Dana BOS

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan Wita Ponda					
1	TK Negeri 1 Witaponda	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Witaponda	-	-	27.800,00	-	27.800,00
3	TK Negeri 3 Witaponda	-	-	23.400,00	-	23.400,00
4	TK Negeri 4 Witaponda	-	-	-	-	-
5	TK Negeri 5 Witaponda	-	-	45.240,00	447.500,00	492.740,00
6	TK Negeri 6 Witaponda	-	-	519.800,00	297.297,00	817.097,00
7	TK Negeri 7 Witaponda	-	-	-	-	-
8	TK Negeri 8 Witaponda	-	-	-	-	-
9	SD Negeri Sampeantaba	-	-	-	-	-
10	SD Negeri 1 Puntari Makmur	-	-	-	-	-
11	SD Negeri 2 Puntari Makmur	-	-	-	-	-
12	SD Negeri 1 Laantula Jaya	-	-	-	-	-
13	SD Negeri 2 Laantula Jaya	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Moahino	-	-	-	-	-
15	SD Negeri Solonsa	-	-	-	-	-
16	SD Negeri Ungkaya	-	-	-	-	-
17	SD Negeri Emea	-	-	-	-	-
18	SD Negeri Bukit Harapan	-	-	-	-	-
19	SD Negeri Bumi Harapan	-	-	-	-	-
20	SMP Negeri 1 Witaponda	-	-	-	-	-
21	SMP Negeri 2 Wita Ponda	-	-	-	-	-
22	SMP Negeri 3 Wita Ponda Satu Atap	165.000,00	-	306.820,00	-	471.820,00
23	SMP Negeri 4 Witaponda	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
	Sub Jumlah	**165.000,00**	**-**	**923.060,00**	**744.797,00**	**1.832.857,00**
	Kecamatan Bumi Raya					
1	TK Negeri 1 Bumi Raya	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Bumi Raya	-	-	-	-	-
3	TK Negeri 3 Bumi Raya	-	-	-	-	-
4	TK Negeri 4 Bumi Raya	-	-	-	-	-
5	TK Negeri 5 Bumi Raya	-	-	-	-	-
6	TK Negeri 6 Bumi Raya	15.000,00	-	2.000,00	-	17.000,00
7	SD Negeri 1 Bahonsuai	-	-	-	-	-
8	SD Negeri 2 Bahonsuai	-	-	-	-	-
9	SD Negeri 1 Limbo Makmur	-	-	-	-	-
10	SD Negeri 2 Limbo Makmur	-	-	-	-	-
11	SD Negeri 1 Beringin Jaya	-	-	-	-	-
12	SD Negeri 2 Beringin Jaya	-	-	-	-	-
13	SD Negeri Atananga	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Lambelu	-	-	-	-	-
15	SD Negeri Pebatae	-	-	54.000,00	267.567,00	321.567,00
16	SD Negeri Pebotoa	-	-	-	-	-
17	SD Negeri Samarenda	-	-	-	-	-
18	SD Negeri Umbele	-	-	-	-	-
19	SMP Negeri 1 Bumi Raya	-	-	-	-	-
20	SMP Negeri 2 Bumi Raya	517.500,00	-	272.000,00	-	789.500,00
21	SMP Negeri 3 Bumi Raya Satu Atap	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**532.500,00**	**-**	**328.000,00**	**267.567,00**	**1.128.067,00**
	Kecamatan Bungku Barat					
1	TK Negeri 1 Bungku Barat	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Bungku Barat	-	-	8.200,00	-	8.200,00

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
3	TK Negeri 3 Bungku Barat	-	-	-	-	-
4	TK Pembina Tondo	-	-	-	-	-
5	SD Negeri Bahoea Reko Reko	-	-	638.689,00	-	638.689,00
6	SD Negeri 2 Bahoea Reko Reko	-	-	-	-	-
7	SD Negeri 3 Bahoea Reko Reko	30.000,00	-	20.200,00	-	50.200,00
8	SD Negeri 1 Wosu	90.000,00	-	-	190.000,00	280.000,00
9	SD Negeri 2 Wosu	120.000,00	-	330.000,00	-	450.000,00
10	SD Negeri Ambunu	460.000,00	-	87.600,00	-	547.600,00
11	SD Negeri Folili	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Larobenu	-	-	-	309.580,00	309.580,00
13	SD Negeri Marga Mulya	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Tondo	-	-	-	-	-
15	SD Negeri Topogaro	40.000,00	-	234.880,00	867.900,00	1.142.780,00
16	SD Negeri Umpanga	385.000,00	-	187.030,00	-	572.030,00
17	SD Negeri 2 Umpanga	50.000,00	-	-	-	50.000,00
18	SD Negeri Wata	-	-	-	2.195.495,00	2.195.495,00
19	SMP Negeri 1 Bungku Barat	-	-	-	-	-
20	SMP Negeri 2 Bungku Barat	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**1.175.000,00**	**-**	**1.506.599,00**	**3.562.975,00**	**6.244.574,00**
	Kecamatan Bungku Tengah					
1	TK Negeri 1 Bungku Tengah	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Bungku Tengah	-	-	8.000,00	-	8.000,00
3	TK Negeri 3 Bungku Tengah	-	-	-	-	-
4	TK Negeri 4 Bungku Tengah	5.600,00	-	-	329.950,00	335.550,00
5	TK Negeri 5 Bungku Tengah	-	-	-	-	-
6	Sanggar Kegiatan Belajar Morowali	-	-	148.901,00	2.028.061,00	2.176.962,00
7	SD Negeri 1 Bungku	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
8	SD Negeri 2 Bungku	-	-	-	-	-
9	SD Negeri 3 Bungku	-	-	-	-	-
10	SD Negeri 1 Bahomoleo/ (SDN 4 Bungku)	-	-	-	-	-
11	SD Negeri Puungkoilu (SDN 5 Bungku)	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Bahoruru (SDN 6 Bungku)	-	-	-	-	-
13	SD Negeri Sakita (SDN 7 Bungku)	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Bente (SDN 8 Bungku)	-	-	-	-	-
15	SD Negeri Bahomante (SDN 9 Bungku)	100.000,00	-	290.300,00	2.487.554,00	2.877.854,00
16	SD Negeri Matansala (SDN 10 Bungku)	-	-	-	-	-
17	SD Negeri 1 Lanona / SDN 11 Bungku	-	-	-	-	-
18	SD Negeri Bahontobungku (SDN 12 Bungku)	-	-	84.000,00	-	84.000,00
19	SD Negeri 2 Bahomoleo / SDN 13 Bungku	-	-	-	-	-
20	SD Negeri 14 Lamberea	-	-	-	-	-
21	SD Negeri 2 Lanona (SDN 15 Bungku)	-	-	56.700,00	-	56.700,00
22	SD Negeri Ipi (SDN 16 Bungku)	-	-	-	-	-
23	SDN 17 Bungku (Tudua)	-	-	20.000,00	486.400,00	506.400,00
24	SD Negeri 18 Bungku (Bungi)	-	-	-	-	-
25	SD Negeri 19 Bungku (Bente)	120.000,00	-	24.800,00	-	144.800,00
26	SD Negeri 20 Bungku	-	-	-	-	
27	SMP Negeri 1 Bungku	-	-	-	-	-
28	SMP Negeri 2 Bungku	-	-	-	-	-
29	SMP Negeri 3 Bungku	-	-	-	-	-
30	SMP Negeri 4 Bungku	561.000,00	-	655.800,00	-	1.216.800,00
	Sub Jumlah	**786.600,00**	**-**	**1.288.501,00**	**5.331.965,00**	**7.407.066,00**
	Kecamatan Bungku Timur					
1	TK Negeri Bahomotefe	-	-	120.000,00	550.000,00	670.000,00
2	SD Negeri Bahomoahi	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
3	SD Negeri Bahomotefe	-	-	-	-	-
4	SD Negeri 2 Bahomotefe	-	-	-	-	-
5	SD Negeri Geresa	-	114.200,00	-	-	114.200,00
6	SD Negeri Kolono	-	-	-	-	-
7	SD Negeri Lahuafu	-	-	-	-	-
8	SD Negeri Laroue	-	-	-	-	-
9	SD Negeri Nambo	-	-	-	-	-
10	SD Negeri 1 Onepute Jaya	-	-	-	-	-
11	SD Negeri 2 Onepute Jaya	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Ululere	-	-	-	-	-
13	SD Negeri Unsongi	-	-	-	-	-
14	SMP Negeri 1 Bungku Timur	-	-	-	-	-
15	SMP Negeri 2 Bungku Timur	-	-	-	-	-
16	SMP Negeri 3 Bungku Timur	-	-	-	-	-
17	SMP Negeri 4 Bungku Timur Satu Atap	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**-**	**114.200,00**	**120.000,00**	**550.000,00**	**784.200,00**
	Kecamatan Bahodopi					
1	TK Negeri 1 Bahodopi	-	-	223.800,00	-	223.800,00
2	TK Negeri 2 Bahodopi	-	-	-	-	-
3	TK Negeri 3 Bahodopi	-	-	-	-	-
4	TK Negeri 4 Bahodopi	-	-	-	-	-
5	SD Negeri 1 Bahomakmur	-	-	-	-	-
6	SD Negeri 2 Bahomakmur	-	-	-	-	-
7	SD Negeri 3 Bahomakmur	-	-	-	-	-
8	SD Negeri Padabaho	-	-	-	1.540.000,00	1.540.000,00
9	SD Negeri 1 Bahodopi	1.284.000,00	-	663.000,00	7.367.900,00	9.314.900,00
10	SD Negeri 2 Bahodopi	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
11	SD Negeri 3 Bahodopi	-	-	-	-	-
12	SD Negeri 4 Bahodopi	-	-	-	-	-
13	SD Negeri 5 Bahodopi	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Dampala	-	-	-	-	-
15	SD Negeri Fatufia	90.000,00	-	913.154,00	8.309.433,00	9.312.587,00
16	SD Negeri Keurea	-	-	-	-	-
17	SD Negeri Kurisa	-	-	-	3.961.461,00	3.961.461,00
18	SD Negeri Labota	-	-	67.600,00	2.035.713,00	2.103.313,00
19	SD Negeri Lalampu	-	-	1.297.400,00	16.713.144,00	18.010.544,00
20	SD Negeri Lereea	-	-	-	-	-
21	SD Negeri Siumbatu	-	-	-	-	-
22	SD Negeri Bete Bete	-	-	-	-	-
23	SD Negeri Makarti Jaya	150.000,00	-	574.480,00	-	724.480,00
24	SMP Negeri 1 Bahodopi	-	-	-	-	-
25	SMP Negeri 2 Bahodopi	-	-	-	750.000,00	750.000,00
26	SMP Negeri 3 Bahodopi Satu Atap	-	-	-	-	-
27	SMP Negeri 4 Bahodopi	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**1.524.000,00**	**-**	**3.739.434,00**	**40.677.651,00**	**45.941.085,00**
	Kecamatan Bungku Pesisir					
1	TK Negeri 1 Bungku Pesisir	-	-	-	241.306,00	241.306,00
2	TK Negeri 2 Bungku Pesisir	-	-	-	-	-
3	SD Negeri 1 Lafeu	-	-	-	-	-
4	SD Negeri 2 Lafeu	-	-	-	-	-
5	SD Negeri Trans Buleleng	-	-	-	-	-
6	SD Negeri Trans 1 Buleleng	-	-	-	-	-
7	SD Negeri Buleleng	-	-	-	-	-
8	SD Negeri Puungkeu	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
9	SD Negeri Laroenai	300.000,00	-	-	1.494.000,00	1.794.000,00
10	SD Negeri Sambalagi	-	-	-	-	-
11	SD Negeri Tangofa	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Torete	-	-	-	-	-
13	SD Negeri Were'A	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Tandaoleo	-	-	-	-	-
15	SMP Negeri 1 Bungku Pesisir	-	-	-	-	-
16	SMP Negeri 2 Bungku Pesisir Satu Atap	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**300.000,00**	**-**	**-**	**1.735.306,00**	**2.035.306,00**
	Kecamatan Bungku Selatan					
1	TK Negeri 1 Bungku Selatan (TK Negeri Kaleroang)	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Bungku Selatan	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3	SD Negeri Bungintende	75.000,00	-	-	-	75.000,00
4	SD Negeri Padabale	-	-	-	-	-
5	SD Negeri Pado-Pado	-	-	-	-	-
6	SD Negeri Buajangka	-	-	-	-	-
7	SD Negeri Umbele	-	-	-	-	-
8	SD Negeri Bakala	-	-	-	-	-
9	SD Negeri Boelimau	-	-	-	-	-
10	SD Negeri Bungingkela	170.000,00	-	-	485.584,00	655.584,00
11	SD Negeri Gusumotaha	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Jawi - Jawi	81.000,00	-	34.290,00	205.740,00	321.030,00
13	SD Negeri Kaleroang	695.000,00	-	352.700,00	1.988.525,00	3.036.225,00
14	SD Negeri Lakombulo	-	-	-	-	-
15	SD Negeri 1 Lemo	-	-	-	-	-
16	SD Negeri Paku	-	-	-	-	-
17	SD Negeri Panimbawang	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
18	SD Negeri Polewali	-	-	-	-	-
19	SD Negeri Poo	-	-	-	-	-
20	SD Negeri Powaru	37.500,00	-	-	-	37.500,00
21	SD Negeri Pulau Bapa	-	-	-	-	-
22	SD Negeri Sainoa	225.000,00	-	12.000,00	-	237.000,00
23	SMP Negeri 1 Bungku Selatan	-	-	-	-	-
24	SMP Negeri 2 Bungku Selatan	-	-	-	-	-
25	SMP Negeri 4 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	-	-	-
26	SMP Negeri 5 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**1.283.500,00**	**-**	**498.990,00**	**2.679.849,00**	**4.462.339,00**
	Kecamatan Menui Kepulauan					
1	TK Negeri 1 Menui Kepulauan	-	-	-	-	-
2	TK Negeri 2 Menui Kepulauan	-	-	-	456.624,00	456.624,00
3	TK Negeri 3 Menui Kepulauan	-	-	-	-	-
4	SD Negeri 1 Ulunambo	-	-	-	-	-
5	SD Negeri 2 Ulunambo	-	-	-	589.380,00	589.380,00
6	SD Negeri 3 Ulunambo	275.000,00	-	118.160,00	-	393.160,00
7	SD Negeri Buranga	-	-	-	1.248.500,00	1.248.500,00
8	SD Negeri Kofalagadi	-	-	-	-	-
9	SD Negeri Morompaitonga	-	-	-	1.324.380,00	1.324.380,00
10	SD Negeri Ngapaea	90.000,00	-	-	-	90.000,00
11	SD Negeri Padalaa	-	-	-	-	-
12	SD Negeri Padei Darat	105.000,00	-	-	-	105.000,00
13	SD Negeri Padei Laut	-	-	-	-	-
14	SD Negeri Samarengga	-	-	339.000,00	-	339.000,00
15	SD Negeri Ulunipa	187.500,00	-	-	-	187.500,00
16	SD Negeri Torukuno	-	-	-	-	-

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	
17	SD Negeri Terebino	180.000,00	-	120.320,00	-	300.320,00
18	SMP Negeri 1 Menui	212.500,00	-	67.500,00	-	280.000,00
19	SMP Negeri 2 Menui	-	-	-	350.000,00	350.000,00
20	SMP Negeri 4 Menui Satu Atap	394.800,00	-	21.000,00	515.000,00	930.800,00
21	SMP Negeri 5 Menui Satu Atap	-	-	-	-	-
22	SMP Negeri 6 Menui Satu Atap	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	**1.444.800,00**	**-**	**665.980,00**	**4.483.884,00**	**6.594.664,00**
	Kecamatan Sombori Kepulauan					
1	SD Negeri Dongkalan	227.000,00	-	-	-	227.000,00
2	SD Negeri Lalemo	145.000,00	-	-	936.870,00	1.081.870,00
3	SD Negeri Lamontoli	-	-	-	396.396,00	396.396,00
4	SD Negeri Lombokita	-	-	-	-	-
5	SD Negeri Masadian	1.057.500,00	-	37.500,00	-	1.095.000,00
6	SD Negeri Matano	24.500,00	-	117.000,00	1.480.835,00	1.622.335,00
7	SD Negeri Matarape	-	-	-	-	-
8	SD Negeri Pulau Dua Darat	60.000,00	-	149.600,00	222.576,00	432.176,00
9	SD Negeri Pulau Tengah	300.000,00	-	-	-	300.000,00
10	SD Negeri Pulau Tiga	-	-	-	-	-
11	SD Negeri Tanjung Harapan	170.000,00	-	-	231.000,00	401.000,00
12	SDN Tanjung Tiram	-	-	-	-	-
13	SD Negeri Tanona	-	-	-	-	-
14	SMP Negeri 3 Bungku Selatan Satu Atap	-	-	-	1.265.000,00	1.265.000,00
15	SMP Negeri 3 Menui Satu Atap	-	-	-	1.329.216,00	1.329.216,00
16	SMP Negeri 7 Menui Satu Atap	-	-	-	825.000,00	825.000,00
	Sub Jumlah	**1.984.000,00**	**-**	**304.100,00**	**6.686.893,00**	**8.974.993,00**
	Jumlah	**9.195.400,00**	**114.200,00**	**9.374.664,00**	**66.720.887,00**	**85.405.151,00**

Lampiran 29

No.	Nama Sekolah	Jenis Utang PFK				Total
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	

Lampiran 30

Daftar Rekapitulasi Utang Belanja

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Rehabilitasi Berat Jamban SMPN 1 Bumi Raya	53.829.000,00			53.829.000,00	53.829.000,00	
		Pembangunan Rehabilitasi Berat ruang Kelas SDN 2 Umpanga	89.801.500,00			89.801.500,00	89.801.500,00	
		Pembayaran Biaya Sewa Hotel Amanah Syariah (5 Kamar VVIP, 12 kamar Superior dan 15 kamar Standart) untuk Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru TA 2025	12.460.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Fasilitator Sasaran Pendampingan Verval Data ATS Bagi Satuan Pendidikan dan Desa Di Kabupaten Morowali TA 2025	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
		Pembayaran Biaya Uang Harian dan Transportasi Sasaran Pendampingan Verval Data ATS Operator Desa/Kelurahan TA 2025	27.360.000,00		27.360.000,00		27.360.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Fasilitator Sasaran Pendampingan Verval Data ATS Bagi Operator Desa se Kabupaten Morowali TA 2025	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
		Pembayaran Biaya Uang Harian dan Transportasi Sasaran Pendampingan Verval Data ATS Operator Desa/Kelurahan TA 2025	10.660.000,00		10.660.000,00		10.660.000,00	
		Pembayaran Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Lomba Matematika Metode Gasing Tingkat SD/MI se-Kabupaten Morowali TA 2025	1.568.900,00		1.568.900,00		1.568.900,00	
		Pembayaran Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak untuk Kegiatan Lomba Matematika Metode Gasing Tingkat SD/MI se-Kabupaten Morowali TA 2025	5.019.000,00		5.019.000,00		5.019.000,00	
		Pembayaran Biaya Penerimaan Hadiah Lomba Matematika Metode Gasing Bakalkubagi, Menembus Batas dan Bakalkubagi Individu Tingkat SD?MI se-Kabupaten Morowali TA 2025	29.400.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Juri Lomba Matematika Metode Gasing Tingkat SD/MI se-Kabupaten Morowali TA 2025 TA 2025	23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	
		Pembayaran Biaya Transportasi Juri Lomba Matematika Metode Gasing Tingkat SD/MI se-Kabupaten Morowali TA 2025 TA 2025	2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Pembaca Acara dan Pembaca Doa Lomba Matematika Metode Gasing Tingkat SD/MI se-Kabupaten Morowali TA 2025 TA 2025	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
		Pembayaran Perjalanan dinas luar daerah Bidang Dikdas pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.099.600,00		16.099.600,00		16.099.600,00	
		Pembayaran Biaya Sewa Dekorasi pada pelaksanaan Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
		Pembayaran Biaya Sewa Sound System pada Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	
		Pembayaran Biaya Belanja Balok Kebutuhan pameran pada pelaksanaan Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	3.795.000,00		3.795.000,00		3.795.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran Biaya Belanja Cetak Spanduk pada pelaksanaan Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	7.511.700,00		7.511.700,00		7.511.700,00	
		Pembayaran Biaya Belanja Makanan dan Minuman pada pelaksanaan Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	27.840.000,00		27.840.000,00		27.840.000,00	
		Pembayaran Biaya Tenda biasa Kursi dan Meja Kecil pada pelaksanaan Pameran Kebudayaan Dalam Daerah Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapastitas Sumber Daya Manusia Permuseuman TA 2025	2.350.000,00		2.350.000,00		2.350.000,00	
		Pembayaran Sewa Aula Hotel " AMANAH SYARIAH " untuk kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam in 2 batch 2 bagi guru SD Se-Kabupaten Morowali	7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	
		Pembayaran Biaya Insentif Kepala Sekolah dan Guru TK/KB Bulan November s.d Desember Tahun 2025	307.323.000,00		307.323.000,00		307.323.000,00	
		Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Bmbingan Teknis Pemanfaatan Dan Juru Pelihara Cagar Budaya TA. 2025	13.680.000,00		13.680.000,00		13.680.000,00	
		Pembayaran Honorarium Pembawa acara (MC) kegiatan Bimtek Peningkatan Kesenian Daerah TA 2025.	380.000,00		380.000,00		380.000,00	
		Pembayaran Honor Fasilitator Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Akreditasi Bagi Satuan Pendidikan Ta 2025	24.480.000,00		24.480.000,00		24.480.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Luar Kota Bidang PAUD An Irayanti TA 2025	2.680.000,00		2.680.000,00		2.680.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Luar Kota Bidang PAUD TA 2025	18.922.200,00		18.922.200,00		18.922.200,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Pendataan Sanggar seni yang ada di Kecamatan Bumi Raya Tahun 2025	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Pendataan Sanggar seni yang ada di Kecamatan Witaponda Tahun 2025	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
		Pembayaran Uang saku pada Kegiatan In 2 Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah Batch 2 Se-Kabupaten Morowali Tahun 2025	30.319.000,00		30.319.000,00		30.319.000,00	
		Pembayaran Honorarium Tim Pengajar pada Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	85.050.000,00		85.050.000,00		85.050.000,00	
		Pembayaran Uang Harian dan Transportasi Peserta pada Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	66.104.500,00		66.104.500,00		66.104.500,00	
		Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Pengajar pada Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	7.140.000,00		7.140.000,00		7.140.000,00	
		Pembayaran Honorarium Admin pada Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	475.000,00		475.000,00		475.000,00	
		Pembayaran Uang saku pada Kegiatan In 2 Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi guru Batch 2 Se-Kabupaten Morowali Tahun 2025	22.135.000,00		22.135.000,00		22.135.000,00	
		Pembayaran Uang Harian dan Transportasi Peserta untuk Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru TA 2025	23.253.750,00		23.253.750,00		23.253.750,00	
		Pembayaran Uang saku pada Kegiatan In 2 Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi guru SMP, SMA, DAN SMK Batch 1 Se-Kabupaten Morowali Tahun 2025	25.119.500,00		25.119.500,00		25.119.500,00	
		Pembayaran Uang Harian dan Transportasi Peserta untuk Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru TA 2025	36.485.000,00		36.485.000,00		36.485.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran Uang Harian Transportasi Panitia Lokal dan Tim Pengajar Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	14.075.000,00		14.075.000,00		14.075.000,00	
		Pembayaran Uang Harian dan Transportasi Peserta untuk Kegiatan Pengelolaan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru TA 2025	44.198.000,00		44.198.000,00		44.198.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Narasumber Pengelolaan Kinerja Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru TA 2025	18.180.000,00		18.180.000,00		18.180.000,00	
		Pembayaran Honorarium Kepala Sekolah Mentor Pada Kegiatan Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah TA 2025	10.200.000,00		10.200.000,00		10.200.000,00	
		Pembayaran Honorarium Penyusun Soal Tes kemampuan akademik (TKA) Jenjang SD dan SMP Tahun 2025	13.320.000,00		13.320.000,00		13.320.000,00	
		Pembayaran Biaya Transportasi Fasilitator Pendamping Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam Bagi Guru SD dan SMP TA 2025	9.112.000,00		9.112.000,00		9.112.000,00	
		Pembayaran Honorarium Fasilitator Pendamping Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam Bagi Guru SD dan SMP TA 2025	62.100.000,00		62.100.000,00		62.100.000,00	
		Pembayaran uang saku dan transport peserta kegiatan Pelatihan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra bungku jenjang SD tahun 2025	25.735.500,00		25.735.500,00		25.735.500,00	
		Pembayaran honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia kegiatan Pelatihan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra bungku jenjang SD tahun 2025	2.105.000,00		2.105.000,00		2.105.000,00	
		Pembayaran honorarium fasilitator kegiatan Pelatihan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra bungku jenjang SD tahun 2025	7.980.000,00		7.980.000,00		7.980.000,00	
		Pembayaran biaya transport peserta untuk kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana program kegiatan kepala sekolah tahun 2026 jenjang SD dan SMP Sekabupaten morowali Tahap II tahun 2025	55.457.000,00		55.457.000,00		55.457.000,00	
		Pembayaran uang saku dan transport peserta untuk kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana program kegiatan kepala sekolah tahun 2026 jenjang SD dan SMP Se-kabupaten morowali Tahap I tahun 2025	40.545.500,00		40.545.500,00		40.545.500,00	
		Pembayaran Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Doa, dan Moderator untuk kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana program kegiatan kepala sekolah tahun 2026 jenjang SD dan SMP Se-kabupaten morowali Tahap II tahun 2025	4.210.000,00		4.210.000,00		4.210.000,00	
		Pembayaran Honorarium Fasilitator pada kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana program kegiatan kepala sekolah tahun 2026 jenjang SD dan SMP Sekabupaten morowali Tahap I dan II tahun 2025	26.520.000,00		26.520.000,00		26.520.000,00	
		Pembayaran uang harian dan transport pendamping kegiatan refleksi pelaksanaan pembelajaran mendalam dan penyusunan rencana program kegiatan kepala sekolah tahun 2026 jenjang SD dan SMP Se-kabupaten morowali Tahap I dan II tahun 2025	5.559.000,00		5.559.000,00		5.559.000,00	
		Pembayaran Uang Saku Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam layanan Bimbingan dan Konseling Tahap I TA 2025	64.926.500,00		64.926.500,00		64.926.500,00	
		Pembayaran Uang Saku Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam layanan Bimbingan dan Konseling Tahap II TA 2025	39.486.500,00		39.486.500,00		39.486.500,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, Doa dan Moderator Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam layanan Bimbingan dan Konseling Tahap II TA 2025	3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00	
		Pembayaran Biaya Honorarium Fasilitator Kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam layanan Bimbingan dan Konseling Tahap II TA 2025	13.980.000,00		13.980.000,00		13.980.000,00	
		Pembayaran uang saku pelatihan koding dan kecerdasan artifisial (KKA) Tahap 2 jenjang SD tahun 2025	42.417.000,00		42.417.000,00		42.417.000,00	
		Pembayaran Uang Saku Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Tahap II Jenjang SMP 2025 TA	23.446.000,00		23.446.000,00		23.446.000,00	
		Pembayaran Transportasi Fasilitator Kegiatan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Tahap II 2025 TA	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	
		Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Tahap II 2025 TA	2.940.000,00		2.940.000,00		2.940.000,00	
		Pembayaran Honorarium Fasilitator Kegiatan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Tahap II 2025 TA	17.340.000,00		17.340.000,00		17.340.000,00	
		Pembayaran transportasi Fasilitator kegiatan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifial (KKA) Tahap 1 TA 2025	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	
		Pembayaran uang transportasi dan uang saku peserta pada kegiatan workshop pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisal bagi guru pendidikan agama islan jenjang SD Tahap 1 tahun 2025	37.864.000,00		37.864.000,00		37.864.000,00	
		Pembayaran uang saku peserta pada kegiatan workshop pembelajaran mendalam dan koding dan kecerdasan artifisal bagi guru pendidikan agama islan jenjang SD Tahap 1 tahun 2025	65.824.000,00		65.824.000,00		65.824.000,00	
		Pembayaran Honorarium narasumber, pembawa acara, Do'a dan moderator workshop pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisal bagi guru pendidikan agama islan jenjang SD Tahap 1 tahun 2025	4.860.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00	
		Pembayaran Honorarium fasilitator kegiatan workshop pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisal bagi guru pendidikan agama islan jenjang SD Tahap 1 tahun 2025	28.680.000,00		28.680.000,00		28.680.000,00	
		Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota Pengawas dinas pendidikan dan kebudayaan Morowali Tahun 2025	46.440.000,00		46.440.000,00		46.440.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Biadang Dikdas Monitoring Penggunaan Dana BOS dan PIP Tahun 2025	39.620.000,00		39.620.000,00		39.620.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Bidang Dikdas	3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2025	12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dalam Kota dalam Rangka Penertipan Kendaraan Dinas Di Kec. Bungku Pesisir TA 2025	3.840.000,00		3.840.000,00		3.840.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Luar Daerah Pada Sub Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD TA 2025	11.399.120,00		11.399.120,00		11.399.120,00	
		Pembayaran Selisih tunjangan Fungsional ASN PPPK Daerah Kabupaten Morowali TA 2025	2.982.000,00	2.982.000,00			2.982.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran Uang saku pada Kegiatan In 2 Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi guru SLB, TK, dan SD Batch 1 Se-Kabupaten Morowali Tahun 2025	28.022.000,00		28.022.000,00		28.022.000,00	
		Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Bmbingan Teknis Pemanfaatan Dan Juru Pelihara Cagar Budaya TA. 2025	1.235.000,00		1.235.000,00		1.235.000,00	
		Pembayaran Biaya Penginapan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sidang Penetapan Cagar Budaya TA 2025	4.425.000,00		4.425.000,00		4.425.000,00	
	Sub Jumlah		**1.860.365.770,00**	**2.982.000,00**	**1.713.753.270,00**	**143.630.500,00**	**1.860.365.770,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp351.944.700,00 dan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp1.508.421.070,00**
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Konsultasi Pelayanan Kesehatan Gratis di Palu	5.654.000,00		5.654.000,00		5.654.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi program kesehatan lingkungan di Provinsi	11.790.000,00		11.790.000,00		11.790.000,00	
		Biaya perjalanan dinas luar kota dalam rangka Menghadiri Undangan Pengadilan Poso terkait Gugatan Lokasi Pembangunan RS Pepakulia di Poso	3.140.875,00		3.140.875,00		3.140.875,00	
		Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Rapat Koordinasi Daerah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Tahun 2025 di Palu	7.544.000,00		7.544.000,00		7.544.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Evaluasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)	11.640.000,00		11.640.000,00		11.640.000,00	
		Permintaan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mutual Cek Up & Monitoring Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan dan Pendampingan Tim Rencana Pembangunan Sarana Kesehatan	52.710.000,00		52.710.000,00		52.710.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan/ Pendampingan Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (DAU)	10.140.000,00		10.140.000,00		10.140.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita Dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita sesuai Standar Pelayanan di Posyandu (DAU)	10.440.000,00		10.440.000,00		10.440.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Teknis dan Penguatan Puskesmas santun Lansia dan PJP (DAK Non Fisik)	15.200.000,00		15.200.000,00		15.200.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Lansia (DAU)	4.310.000,00		4.310.000,00		4.310.000,00	
		Permintaan pembayaran perjalanan dinas dalam kota kegiatan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Gratis Tahun 2025 di Puskesmas	14.050.000,00		14.050.000,00		14.050.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Supervisi dan Program KIA Dan Gizi (DAK Non Fisik)	10.440.000,00		10.440.000,00		10.440.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Surveilans Gizi (DAU)	7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00	
		Permintaan pembayaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Wilayah Kerja Puskesmas Umbele	74.025.600,00		74.025.600,00		74.025.600,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAU)	10.060.000,00		10.060.000,00		10.060.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka penguatan program PSC di Palu	24.180.000,00		24.180.000,00		24.180.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring pelaksanaan POPM kecacingan di puskesmas	3.680.000,00		3.680.000,00		3.680.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan pelaksanaan khemoprovilaksis kusta	8.700.000,00		8.700.000,00		8.700.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek tatalaksanaan pemeriksaan dan pengobatan penyakit kusta di Puskesmas	2.620.000,00		2.620.000,00		2.620.000,00	
		Permintaan pembayaran perjalanan dinas dalam kota kegiatan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2025	6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka monev program DBD pencatatan dan pelaporan dalam sistem arbovorosis serta silantor	6.250.000,00		6.250.000,00		6.250.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan SDMK di Fasyankes Klinik Apotek dan Praktek Mandiri (DAU)	14.910.000,00		14.910.000,00		14.910.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Evaluasi Capaian Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan	29.005.000,00		29.005.000,00		29.005.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Tim Pengendali DAK BOKB Tahun 2025 di Kecamatan (DAK Non Fisik BOKB)	3.550.000,00		3.550.000,00		3.550.000,00	
		Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Kunsultasi Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Analisis Beban kerja (ABK) dan Pengusulan PPPK di Palu	4.856.000,00		4.856.000,00		4.856.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) di Puskesmas	6.880.000,00		6.880.000,00		6.880.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan pendampingan penanganan dan kejadian ikutan pasca imunisasi	6.590.000,00		6.590.000,00		6.590.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan monitoring evaluasi asistensi supervisi pengelolaan imunisasi dan surveilans PD3i	7.840.000,00		7.840.000,00		7.840.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program surveilans dan respon penyakit potensi KLB/wabah termasuk kegiatan terkait surveilans	950.000,00		950.000,00		950.000,00	
		Permintaan bembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Distribusi Obat dan BMHP di Puskesmas	13.686.000,00		13.686.000,00		13.686.000,00	
		Permintaan bembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pembinaan dan Pelaporan RKO dan Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	12.686.000,00		12.686.000,00		12.686.000,00	
		Permintaan bembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pemeriksaan Penjual Obat dan Kosmetik Tanpa Ijin Edar	8.920.000,00		8.920.000,00		8.920.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan teknis penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di tujuh tatanan	14.380.000,00		14.380.000,00		14.380.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan konseling UBM di FKTP	13.900.000,00		13.900.000,00		13.900.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan monitoring dan evaluasi program PTM	5.060.000,00		5.060.000,00		5.060.000,00	
		Biaya pemeriksaan dan pengiriman sampel HPV DNA	23.515.000,00		23.515.000,00		23.515.000,00	
		Biaya jasa petugas kesehatan deteksi dini PTM Care Free Day (CFD) Bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember	29.380.000,00		29.380.000,00		29.380.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan Pengukuran Status Gizi di Puskesmas (DAU)	7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00	
		Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi dan Tindak Lanjut Hasil Koordinasi SPM di Jakarta tentang penyusunan Rancangan Tahapan SPM Kabupaten Morowali di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah	11.478.500,00		11.478.500,00		11.478.500,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka survelans AFP dan PD3i serta penyakit menular lainnya	10.140.000,00		10.140.000,00		10.140.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelidikan epidemiologi kasus penyakit malaria dan pemetaan daerah reseptif malaria	27.830.000,00		27.830.000,00		27.830.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan dan penemuan kasus, pencegahan, pengendalian penyakit menular (TB, HIV, Malaria, Pneumonia/ISPA, Diare dan Hepatitis	24.890.000,00		24.890.000,00		24.890.000,00	
		Permintaan bembayaran biaya perjalanan dinas dalam kola dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Aset di Puskesmas	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis manajemen program P2 hepatitis di Palu	8.860.000,00		8.860.000,00		8.860.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Pencabutan Implant Triwulan IV Tahun 2025	4.935.000,00		4.935.000,00		4.935.000,00	
		Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan Implant Triwulan IV (Oktober-NovemberDesember) Tahun 2025	79.735.000,00		79.735.000,00		79.735.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan untuk mengurangi resiko kesehatan di wilayah kerja puskesmas	4.690.000,00		4.690.000,00		4.690.000,00	
		Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pertemuaan Koordinasi Pedayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Ragional Timur di Makassar (DAU)	4.583.576,00		4.583.576,00		4.583.576,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaporan SIHA di Puskesmas	25.150.000,00		25.150.000,00		25.150.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pelaksanaan investigasi kontak (IK) di Puskesmas	11.060.000,00		11.060.000,00		11.060.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi eradikasi frambusia di Puskesmas	12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	
		Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Rapat Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya (PS-KS) Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025	8.684.955,00		8.684.955,00		8.684.955,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan kepada Fasyankes di Puskesmas	7.200.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi sinyal rumor penyelidikan epidemiologi pelacakan kontak penyakit berpotensi klb/wabah	23.400.000,00		23.400.000,00		23.400.000,00	
		Permintaan Pembayaran Honorarium Tim Pengendali DAK Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Bulan Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2025	4.095.000,00		4.095.000,00		4.095.000,00	
		Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan IUD Triwulan IV Tahun 2025	11.685.000,00		11.685.000,00		11.685.000,00	
		Permintaan Pembayaran Kegiatan Publikasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045 Dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025	37.999.255,00		37.999.255,00		37.999.255,00	
		Permintaan bembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pendampingan Pemenuhan CAPA sarana Apotek dan Toko Obat	12.450.000,00		12.450.000,00		12.450.000,00	
		Biaya operasional gedung PSC 119 Makanca	41.321.218,00		41.321.218,00		41.321.218,00	
		Permintaan pembayaran biaya kegiatan Pendampingan Tim Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Morowali	130.572.000,00		130.572.000,00		130.572.000,00	
		Biaya kegiatan pertemuan dan koordinasi lintas sektor kesiapan dokumen penilaian kabupaten sehat	13.912.940,00		13.912.940,00		13.912.940,00	
		Biaya jasa penyemprotan sarang nyamuk di wilayah kerja Puskesmas	12.300.000,00		12.300.000,00		12.300.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Biaya cetak spanduk kegiatan hari pneumonia sedunia dan kegiatan pertemuan eradikasi frambusia	1.301.685,00		1.301.685,00		1.301.685,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka jasa narasumber dan cetak spanduk kegiatan hari AIDS sedunia	5.055.880,00		5.055.880,00		5.055.880,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan study Ehra di Desa	9.580.000,00		9.580.000,00		9.580.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pasca ODF Kelurahan/Desa	7.200.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat	7.150.000,00		7.150.000,00		7.150.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan Tim Identifikasi Lokus Penerapan Tatanan Kabupaten/Kota Sehat	10.080.000,00		10.080.000,00		10.080.000,00	
		Permintaan Pembayaran Honorarium Ketua Tim Teknis Tata Bangunan dan Perumahan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Januari s.d Desember 2025	34.314.000,00		34.314.000,00		34.314.000,00	
		Permintaan Pembayaran Tambahan Insentif Bagi Dokter Intership Bulan Agustus s.d Desember Tahun 2025	199.500.000,00		199.500.000,00		199.500.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan kepada puskesmas untuk penilaian Kualitas Sarana Air Minum (SAM komunal berbasis masyarakat atau penyedia air minum perpipaan)	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan kepada Tempat Fasilitas Umum (TFU)	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan kepada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), serta sertifikat laik sehat (SLS)	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan teknis dan kunjungan on site saat pelaksanaan Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)	14.420.000,00		14.420.000,00		14.420.000,00	
		Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Orientasi Kader Pengelola Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	15.457.306,00		15.457.306,00		15.457.306,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil (DAU)	11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	
		Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025 (DAK NON FISIK BOKB)	8.498.400,00		8.498.400,00		8.498.400,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pecegahan dan Percepatan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025 (DAK NON FISIK BOKB)	61.639.450,00		61.639.450,00		61.639.450,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka verifikasi sinyal/rumor penyelidikan epidemologi pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/wabah investigasi kasus KIPI serta penyakit menular lainnya	67.300.000,00		67.300.000,00		67.300.000,00	
		Permintaan pembayaraan biaya belanja Kegiatan Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan Tingkat Kabupaten	13.452.940,00		13.452.940,00		13.452.940,00	
		Permintaan pembayaraan biaya belanja Kegiatan Rapat Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Tingkat Kabupaten Morowali	32.938.640,00		32.938.640,00		32.938.640,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita Dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Balita Sesuai Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 (DAU)	11.320.000,00		11.320.000,00		11.320.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)	11.640.000,00		11.640.000,00		11.640.000,00	
		Belanja Olahan Makanan dan Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Orientasi Kader Pengelola DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali Tahun 2025	3.731.324,00		3.731.324,00		3.731.324,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi TFU di Puskesmas	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sinkronisasi Data Basis di Kecamatan	9.485.000,00		9.485.000,00		9.485.000,00	
		Permintaan Pembayaraan Biaya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.105.000,00		1.105.000,00		1.105.000,00	
		Belanja Sewa Gedung Kegiatan Rapat Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya (PS-KS) Tingkat Kabupaten Tahun 2025	980.000,00		980.000,00		980.000,00	
		Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Audisi Duta Genre Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025	22.280.400,00		22.280.400,00		22.280.400,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Koordinasi Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Tahun 2025 (DAK Non Fisik BOKB)	8.525.000,00		8.525.000,00		8.525.000,00	
		Permintaan pembayaraan biaya Kegiatan Gerakan Jambore Kader Kesehatan Tingkat Puskesmas Ulunambo	16.161.940,00		16.161.940,00		16.161.940,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Evaluasi Program KESPRO (DAU)	3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pelaksanaan kebugaran jasmani di sekolah wilayah kerja puskesmas	6.640.000,00		6.640.000,00		6.640.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permintaan Pembayaran 45% (95%) kepada CV. AIRA MITRA PERDANA atas pekerjaan Pembangunan Rumah Singgah Pasien Puskesmas Tanjung Harapan	71.840.533,00			71.840.533,00	71.840.533,00	
		Belanja pembayaran kegiatan sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TP-KJM) tingkat kab. Morowali	20.698.940,00		20.698.940,00		20.698.940,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan/ Pendampingan Skrining Anak Usia Pendidikan Dasar (DAU)	10.020.000,00		10.020.000,00		10.020.000,00	
		Permintaan pembayaraan biaya Kegiatan Penguatan Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil (GEMA SEBUMI) dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2025	41.575.440,00		41.575.440,00		41.575.440,00	
		Permintaan pembayaraan biaya Kegiatan Pengkajian Kasus Maternal dan Neonatal Tingkat Kabupaten Morowali	10.405.360,00		10.405.360,00		10.405.360,00	
		Permintaan pembayaran biaya kegiatan pengantaran sampel Skrining Hi[otiroid Konginetal (SHK) Bayi baru Lahir	23.100.000,00		23.100.000,00		23.100.000,00	
		Permintaan Pembayaran Biaya Transport Antar Jemput Rujukan Persalinan dari Rumah ke RTK, Puskesmas dan Rumah Sakit dan Biaya Makan Pasien/Suami Pasien di Rumah Tunggu	77.364.000,00		77.364.000,00		77.364.000,00	
		Permintaan Pembayaran Susulan Tambahan Insentif Bagi Dokter Intership Bulan Agustus s.d Desember Tahun 2025 (4 Orang)	66.500.000,00		66.500.000,00		66.500.000,00	
		Permintaan Pembayaran Kegiatan Tindak lanjut Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten Morowali Tahun 2025	39.435.000,00		39.435.000,00		39.435.000,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kegiatan Dukungan SIGA (Paket data komunikasi diBalai Penyuluhan) (DAK Non Fisik BOKB) TRW III TA. 2025	8.280.000,00		8.280.000,00		8.280.000,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kegiatan Operasional Pengolahan Data (DAK Non Fisik BOKB) TRW III TA. 2025	13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00	
		Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja Triwulan III Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	10.826.400,00		10.826.400,00		10.826.400,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kegiatan Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader (DAK Non Fisik BOKB) TRW III TA. 2025	234.265.045,00		234.265.045,00		234.265.045,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kegiatan Mini lokakarya Kecamatan (DAK Non Fisik BOKB) TRW III TA. 2025	29.252.190,00		29.252.190,00		29.252.190,00	
		Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Triwulan III Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	99.629.635,00		99.629.635,00		99.629.635,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kegiatan Operasional Kegiatan Konseling Satyagatra di Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik BOKB) TRW III TA. 2025	11.407.230,00		11.407.230,00		11.407.230,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operaslonal Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga linl lapangan Triwulan III Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	48.706.800,00		48.706.800,00		48.706.800,00	
		Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional penggerakan di kampung KB Triwulan III Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	41.285.819,00		41.285.819,00		41.285.819,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Triwulan III Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	93.597.812,00		93.597.812,00		93.597.812,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai Penyuluhan) Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	7.245.000,00		7.245.000,00		7.245.000,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Pengolahan Data Triwulan IV Tahun 2025. (Dak Non Fisik KB/BOKB).	13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	151.864.860,00		151.864.860,00		151.864.860,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operaslonal Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	68.141.433,00		68.141.433,00		68.141.433,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Mini lokakarya Kecamatan Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	29.552.190,00		29.552.190,00		29.552.190,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional penggerakan di kampung KB Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	33.593.058,00		33.593.058,00		33.593.058,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	81.299.483,00		81.299.483,00		81.299.483,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Kegiatan Konseling Satyagatra di Balai Penyuluhan Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	12.607.230,00		12.607.230,00		12.607.230,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operaslonal Pelaksanaan Pemutakhlran Data Willayah kerja Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	6.577.100,00		6.577.100,00		6.577.100,00	
		Permintaan Pembayaran Bantuan Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Menu Kegiatan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan Triwulan IV Tahun 2025 (Dak Non Fisik KB/BOKB).	45.032.400,00		45.032.400,00		45.032.400,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendali DAK BOKB di Kecamatan Tahun 2025 (DAK Non Fisik BOKB)	21.500.000,00		21.500.000,00		21.500.000,00	
		Permintaan pembayaran biaya kegiatan operasional kegiatan audit kasus maternal perinatal morowali	26.746.800,00		26.746.800,00		26.746.800,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sosialisasi pengendalian penyakit ISPA di Perusahaan	7.440.000,00		7.440.000,00		7.440.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar kota dalam rangka Menghadiri Undangan Pengadilan Poso terkait Gugatan Lokasi Pembangunan RS Pepakulia di Poso	4.138.000,00		4.138.000,00		4.138.000,00	
		Biaya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes militus	26.570.000,00		26.570.000,00		26.570.000,00	
	Sub Jumlah		**3.178.819.642,00**		**3.106.979.109,00**	**71.840.533,00**	**3.178.819.642,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp3.178.819.642,00**
3	RSUD Morowali	Pembayaran Angsurang Retensi 5% (100%) kepada CV. Gedra Jasa Pratama atas Pekerjaan Pembangunan Renovasi Area Front Office Rumah Sakit	31.782.151,45			31.782.151,45	31.782.151,45	
		Pembayaran Angs.95% kepada CV.SAKITA LABUA SEJAHTERA atas pekerjaan penanganan /perbaikanPlumbing gedung Pliklinik	92.583.200,00		92.583.200,00		92.583.200,00	
		Pembayaran 100% kepada PT.VISI TRADING DISTRIBUSI atas Pekerjaan jasa Pengawasan Pekerjaan Interior Ruangan IGD	1.516.800.000,00			1.516.800.000,00	1.516.800.000,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Bulan Juni 2019 (Pending 02)	1.782.120,00		1.782.120,00		1.782.120,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Bulan Juli 2019 (Pending 02)	1.273.520,00		1.273.520,00		1.273.520,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Bulan Agustus 2019 (Pending 02)	2.053.680,00		2.053.680,00		2.053.680,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Bulan Agustus 2019 (Pending 03)	136.080,00		136.080,00		136.080,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Bulan September 2019 (Pending 02)	5.993.800,00		5.993.800,00		5.993.800,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis UMUM Susulan Bulan Mei 2023	3.593.486,00		3.593.486,00		3.593.486,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Susulan Jasa Raharja Bulan September 2023	8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Susulan Bulan Januari 2023	38.216.527,00		38.216.527,00		38.216.527,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Susulan Bulan Maret 2023	11.394.900,00		11.394.900,00		11.394.900,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2022	384.442,40		384.442,40		384.442,40	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2022	3.658.301,00		3.658.301,00		3.658.301,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2022	88.000,00		88.000,00		88.000,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2022	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Maret 2021	480.784,00		480.784,00		480.784,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2021	919.984,00		919.984,00		919.984,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2021	5.436.716,00		5.436.716,00		5.436.716,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2021	4.933.894,00		4.933.894,00		4.933.894,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2021	9.351.912,00		9.351.912,00		9.351.912,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2021	37.752.670,00		37.752.670,00		37.752.670,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan September 2021	44.510.436,00		44.510.436,00		44.510.436,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Oktober 2021	66.644.868,00		66.644.868,00		66.644.868,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan November 2021	78.158.171,00		78.158.171,00		78.158.171,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2021	57.520.085,00		57.520.085,00		57.520.085,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari 2017	52.998,00		52.998,00		52.998,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Februari 2017	188.963,00		188.963,00		188.963,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Maret 2017	4.475.481,00		4.475.481,00		4.475.481,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2017	6.957.925,00		6.957.925,00		6.957.925,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2017	4.546.904,00		4.546.904,00		4.546.904,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2017	1.078.437,00		1.078.437,00		1.078.437,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2017	6.700.962,00		6.700.962,00		6.700.962,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2017	4.527.385,00		4.527.385,00		4.527.385,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan September 2017	11.239.261,00		11.239.261,00		11.239.261,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan November 2017	3.392.736,00		3.392.736,00		3.392.736,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Desember 2017	971.879,00		971.879,00		971.879,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan september 2016	3.834.793,00		3.834.793,00		3.834.793,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan oktober 2016	6.886.471,00		6.886.471,00		6.886.471,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan november 2016	3.733.388,00		3.733.388,00		3.733.388,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan April 2021	151.500,00		151.500,00		151.500,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Mei 2021	4.727.017,60		4.727.017,60		4.727.017,60	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Juni 2021	226.000,00		226.000,00		226.000,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan September 2021	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Maret 2020	665.800,00		665.800,00		665.800,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan April 2020	3.905.087,00		3.905.087,00		3.905.087,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Februari 2019	241.583,20		241.583,20		241.583,20	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Agustus 2019	2.619.473,60		2.619.473,60		2.619.473,60	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan September 2019	348.000,00		348.000,00		348.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Nopember 2019	234.400,00		234.400,00		234.400,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Desember 2019	4.344.228,40		4.344.228,40		4.344.228,40	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Oktober 2017	2.960.092,00		2.960.092,00		2.960.092,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Nopember 2017	11.920.486,00		11.920.486,00		11.920.486,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Perusahaan Bulan Desember 2017	5.960.593,00		5.960.593,00		5.960.593,00	
		Kewajiban atas Pt Ana Bulan April 2020	1.669.437,00		1.669.437,00		1.669.437,00	
		Kewajiban atas Pt Ana Bulan Mei 2020	11.819.057,00		11.819.057,00		11.819.057,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Jampersal Bulan Desember 2019	2.065.280,00		2.065.280,00		2.065.280,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Jampersal Pending Bulan Mei 2018	5.452.281,00		5.452.281,00		5.452.281,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis Jampersal Bulan Desember Susulan 2018	6.635.028,00		6.635.028,00		6.635.028,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Pending Bulan Desember 2017	2.346.320,00		2.346.320,00		2.346.320,00	
		Hutang atas Jasa Medis PT.Sulawesi Minning Invesement Bulan Maret Tahun 2016	5.379.243,00		5.379.243,00		5.379.243,00	
		Kewajiban Atas Jasa UMUM Susulan Bulan Maret 2024	2.093.469,00		2.093.469,00		2.093.469,00	
		Kewajiban Atas Jasa UMUM Susulan Bulan Juni 2024	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
		Kewajiban Atas Jasa UMUM Susulan Bulan Agustus 2024	13.950.583,00		13.950.583,00		13.950.583,00	
		Kewajiban Atas Jasa Umum(PT Sinapaty) Susulan Bulan September 2024	60.582.200,00		60.582.200,00		60.582.200,00	
		Kewajiban Atas Jasa Umum(PT Persero) Susulan Bulan November 2024	4.722.400,00		4.722.400,00		4.722.400,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan September 2024	3.672.144,00		3.672.144,00		3.672.144,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Pending Bulan Juni 2025	336.566.491,00		336.566.491,00		336.566.491,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Regular Bulan September 2025	1.324.251.040,00		1.324.251.040,00		1.324.251.040,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Regular Bulan Oktober 2025	1.297.842.400,00		1.297.842.400,00		1.297.842.400,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Pending Bulan Juli 2025	609.808.080,00		609.808.080,00		609.808.080,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Pending Bulan Agustus 2025	318.908.120,00		318.908.120,00		318.908.120,00	
		Kewajiban Jasa Medis Rujukan BPJS Pelayanan Bulan Agustus 2025	31.447.542,00		31.447.542,00		31.447.542,00	
		Kewajiban Jasa Medis Rujukan BPJS Pelayanan Bulan September 2025	49.394.366,00		49.394.366,00		49.394.366,00	
		Kewajiban Jasa Medis Rujukan BPJS Pelayanan Bulan Oktober 2025	48.820.688,00		48.820.688,00		48.820.688,00	
		Kewajiban Jasa Medis Rujukan Umum Bulan Agustus 2025	1.493.471,00		1.493.471,00		1.493.471,00	
		Kewajiban Jasa Medis Rujukan Umum Bulan November 2025	655.284,00		655.284,00		655.284,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Umum Bulan Agustus 2025	230.773.424,00		230.773.424,00		230.773.424,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Umum Bulan September 2025	237.096.326,00		237.096.326,00		237.096.326,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Umum Bulan Oktober 2025	215.517.066,00		215.517.066,00		215.517.066,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Umum Bulan November 2025	256.866.700,00		256.866.700,00		256.866.700,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Umum Bulan Desember 2025	266.623.611,00		266.623.611,00		266.623.611,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kewajiban Jasa Medis Pasien MCU Bulan Agustus 2025	1.584.000,00		1.584.000,00		1.584.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien MCU Bulan September 2025	13.260.000,00		13.260.000,00		13.260.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien MCU Bulan Oktober 2025	594.000,00		594.000,00		594.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien MCU Bulan November 2025	478.000,00		478.000,00		478.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien MCU Bulan Desember 2025	964.000,00		964.000,00		964.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Januari 2025	1.163.350,00		1.163.350,00		1.163.350,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Februari 2025	552.000,00		552.000,00		552.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Maret 2025	852.000,00		852.000,00		852.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan April 2025	524.000,00		524.000,00		524.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Mei 2025	292.000,00		292.000,00		292.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Juni 2025	376.000,00		376.000,00		376.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Juli 2025	272.000,00		272.000,00		272.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Agustus 2025	252.000,00		252.000,00		252.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan September 2025	168.000,00		168.000,00		168.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Oktober 2025	356.000,00		356.000,00		356.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan November 2025	460.000,00		460.000,00		460.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien VISUM Bulan Desember 2025	1.132.000,00		1.132.000,00		1.132.000,00	
		Kewajiban Jasa Medis Obat Kronis Bulan Mei 2025	18.826.128,00		18.826.128,00		18.826.128,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Obat Kronis Bulan Juni 2025	17.372.641,00		17.372.641,00		17.372.641,00	
		Kewajiban Jasa Medis Pasien Obat Kronis Bulan Juli 2025	24.582.685,00		24.582.685,00		24.582.685,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025	162.317.334,00		162.317.334,00		162.317.334,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan September 2025	175.808.960,00		175.808.960,00		175.808.960,00	
		Kewajiban atas Jasa Medis BPJS Ketenagakerjaan Bulan Oktober 2025	309.749.180,00		309.749.180,00		309.749.180,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan Juni 2025	27.815.766,00		27.815.766,00		27.815.766,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan Juli 2025	24.844.103,00		24.844.103,00		24.844.103,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan Agusutus 2025	55.978.502,00		55.978.502,00		55.978.502,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan September 2025	28.038.409,00		28.038.409,00		28.038.409,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan Oktober 2025	63.457.733,00		63.457.733,00		63.457.733,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan November 2025	25.309.501,00		25.309.501,00		25.309.501,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Jasa Raharja Bulan Desember 2025	43.922.356,00		43.922.356,00		43.922.356,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Taspen Bulan Mei 2025	6.393.373,00		6.393.373,00		6.393.373,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Taspen Bulan Juli 2025	7.363.417,00		7.363.417,00		7.363.417,00	
		Kewajiban Atas Jasa Medis Taspen Bulan Agustus 2025	12.641.629,00		12.641.629,00		12.641.629,00	
		Hutang Kepada PT Mardin Mas Jaya Atas Pekerjaan Pengadaan BHP Tahun 2018	3.706.500,00		3.706.500,00		3.706.500,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hutang Belanja Bahan Habis Pakai Medik Reguler Tahun 2023	25.414.560,00		25.414.560,00		25.414.560,00	
		Hutang Analisis TLD Bulan Januari 2024 sd Desember 2025	15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00	
		Hutang Tagihan Listrik RSUD Morowali Bulan Desember 2025	119.242.551,00		119.242.551,00		119.242.551,00	
		Hutang Gas LPJ Bulan Desember 2025	8.160.000,00		8.160.000,00		8.160.000,00	
		Hutang Belanja Makan Minum Pasien (Bahan Basah) Bulan Desember 2025	196.510.700,00		196.510.700,00		196.510.700,00	
		Hutang Belanja Makan Minum Pasien (Bahan Kering) Bulan Desember 2025	56.814.150,00		56.814.150,00		56.814.150,00	
		Hutang Belanja Cetak Bulan Desember 2025	76.197.060,00		76.197.060,00		76.197.060,00	
		Hutang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Out Shourching kebersihan kebutuhan bulan Desember 2025	158.441.331,00		158.441.331,00		158.441.331,00	
		Hutang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Out Shourching kebersihan bulan Desember 2025	163.815.350,00		163.815.350,00		163.815.350,00	
		Hutang Belanja Air Bulan Desember 2025	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
		Hutang Belanja Tabung Gas Bulan Desember 2025	167.105.527,00		167.105.527,00		167.105.527,00	
		Hutang Jasa Sarana PT SKM Bulan Juli 2025	6.982.328,00		6.982.328,00		6.982.328,00	
		HutangJasa Sarana PT SKM Bulan Agustus 2025	2.142.658,00		2.142.658,00		2.142.658,00	
		Hutang Jasa Sarana PT SKM Bulan September 2025	1.486.689,00		1.486.689,00		1.486.689,00	
		Hutang Jasa Sarana PT SKM Bulan Oktober 2025	2.484.952,00		2.484.952,00		2.484.952,00	
		Hutang Jasa Sarana PT SKM Bulan November 2025	2.558.018,00		2.558.018,00		2.558.018,00	
		Hutang Jasa Sarana PT SKM Bulan Desember 2025	8.563.695,00		8.563.695,00		8.563.695,00	
		Hutang Jasa Sarana CV. AMS Bulan Juli 2025	12.835.006,00		12.835.006,00		12.835.006,00	
		Hutang Jasa Sarana CV. AMS Bulan Agustus 2025	20.208.030,00		20.208.030,00		20.208.030,00	
		Hutang Jasa Sarana CV. AMS Bulan September 2025	27.509.132,00		27.509.132,00		27.509.132,00	
		Huatang Jasa Sarana CV. AMS Bulan Oktober 2025	23.786.787,00		23.786.787,00		23.786.787,00	
		Huatang Jasa Sarana CV. AMS Bulan November 2025	27.589.486,00		27.589.486,00		27.589.486,00	
		Huatang Jasa Sarana CV. AMS Bulan Desember 2025	26.687.925,00		26.687.925,00		26.687.925,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	8.419.338,00		8.419.338,00		8.419.338,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	5.484.510,00		5.484.510,00		5.484.510,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	7.373.850,00		7.373.850,00		7.373.850,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	2.299.999,00		2.299.999,00		2.299.999,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	43.206.750,00		43.206.750,00		43.206.750,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan Reguler	1.787.100,00		1.787.100,00		1.787.100,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	4.887.408,00		4.887.408,00		4.887.408,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	94.241.620,00		94.241.620,00		94.241.620,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	66.691.048,00		66.691.048,00		66.691.048,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	1.598.400,00		1.598.400,00		1.598.400,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	36.201.231,00		36.201.231,00		36.201.231,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	4.151.400,00		4.151.400,00		4.151.400,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	8.238.975,00		8.238.975,00		8.238.975,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	6.660.000,00		6.660.000,00		6.660.000,00	
		Hutang Belanja Obat-Obatan E-Katalog	61.567.482,00		61.567.482,00		61.567.482,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	95.569.287,00		95.569.287,00		95.569.287,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	48.215.070,00		48.215.070,00		48.215.070,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	29.877.038,00		29.877.038,00		29.877.038,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	85.094.310,00		85.094.310,00		85.094.310,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	3.709.620,00		3.709.620,00		3.709.620,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	69.589.230,00		69.589.230,00		69.589.230,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai Reguler	49.615.685,00		49.615.685,00		49.615.685,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	39.893.400,00		39.893.400,00		39.893.400,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	86.659.920,00		86.659.920,00		86.659.920,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	185.327.430,00		185.327.430,00		185.327.430,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	21.602.208,00		21.602.208,00		21.602.208,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	22.409.734,00		22.409.734,00		22.409.734,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	9.768.000,00		9.768.000,00		9.768.000,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	96.613.118,00		96.613.118,00		96.613.118,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	31.039.263,00		31.039.263,00		31.039.263,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	118.803.300,00		118.803.300,00		118.803.300,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	7.545.003,00		7.545.003,00		7.545.003,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	34.259.040,00		34.259.040,00		34.259.040,00	
		Belanja Bahan Habis Pakai E-Katalog	400,00		400,00		400,00	
		BBM ambulabnce transfer Pasien DN 9305 dan 9306 Kebutuhan Desember 2025	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
	Sub Jumlah		**11.040.017.291,65**		**9.491.435.140,20**	**1.548.582.151,45**	**11.040.017.291,65**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada RSUD Morowali sebesar Rp1.641.165.351,45 dan Utang Bendahara Pengeluaran BLUD kepada yang berhak menerima sebesar Rp9.398.851.940,20**
4	Puskesmas Ulunambo	Pembayaran Biaya Transport Antar Jemput Rujukan Persalinan dari Rumah ke RTK, Puskesmas dan RS dan Sewa Tempat Tunggu Kelahiran (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)	2.502.000,00		2.502.000,00		2.502.000,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	20.866.080,00	20.866.080,00			20.866.080,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	13.738.441,00	13.738.441,00			13.738.441,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	5.517.000,00	5.517.000,00			5.517.000,00	
	Sub Jumlah		**42.623.521,00**	**40.121.521,00**	**2.502.000,00**		**42.623.521,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp42.623.521,00**
5	Puskesmas Lafeu	Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	97.118.438,00	97.118.438,00			97.118.438,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	58.593.084,00	58.593.084,00			58.593.084,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	104.369.165,00	104.369.165,00			104.369.165,00	
	Sub Jumlah		**260.080.687,00**	**260.080.687,00**			**260.080.687,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp260.080.687,00**
6	Puskesamas Bahodopi	Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	787.805.645,00	787.805.645,00			787.805.645,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	473.953.768,00	473.953.768,00			473.953.768,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	123.255.000,00	123.255.000,00			123.255.000,00	
	Sub Jumlah		**1.385.014.413,00**	**1.385.014.413,00**			**1.385.014.413,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp1.385.014.413,00**
7	Puskesmas Bahomotefe	Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	114.674.436,00	114.674.436,00			114.674.436,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	13.776.000,00	13.776.000,00			13.776.000,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	352.035.211,00	352.035.211,00			352.035.211,00	
	Sub Jumlah		**480.485.647,00**	**480.485.647,00**			**480.485.647,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp480.485.647,00**

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Puskesmas Wosu	Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	126.749.059,00	126.749.059,00			126.749.059,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	18.846.120,00	18.846.120,00			18.846.120,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	197.688.951,00	197.688.951,00			197.688.951,00	
	Sub Jumlah		**343.284.130,00**	**343.284.130,00**			**343.284.130,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp343.284.130,00**
9	Puskesmas Bahonsuai	Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Kewajiban Tahun 2024/Surat Tanda Setoran Tahun 2024)	138.453.961,00	138.453.961,00			138.453.961,00	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	26.830.320,00	26.830.320,00			26.830.320,00	
		Pembayaran Jasa Medis Non Kapitasi 60% (Surat Tanda Setoran Tahun 2025)	345.599.639,00	345.599.639,00			345.599.639,00	
		Pembayaran Belanja Tagihan Listrik UPTD Puskesmas Bahonsuai Bulan Desember 2025	6.075.000,00		6.075.000,00		6.075.000,00	
	Sub Jumlah		**516.958.920,00**	**510.883.920,00**	**6.075.000,00**		**516.958.920,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp516.958.920,00**
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daer	Pembayaran retensi 5% bagi CV.CAHAYA MAKMUR ULULERE atas pekerjaan Drainase depan TPA Bahomotefe	9.960.824,00			9.960.824,00	9.960.824,00	
		Pembayaran retensi 5% bagi CV.FITA BUNGKU PERSADA atas pek. Pembangunan rumah genset kantor Kejaksaan	8.867.950,00			8.867.950,00	8.867.950,00	
		Pembayaran retensi 5% bagi CV.PERMATA KHATULISTIWA atas pembangunan Drainase Depan TPA IPI Kec. Bungku Tengah	10.144.279,00			10.144.279,00	10.144.279,00	
		Pembayaran Tahap II sebesar 60% bagi Swakelola Sumber Daya Air atas Pekerjaan Perencanaan Data sungai Tersebar 7 Kecamatan (Swakelola) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
	Sub Jumlah		**238.973.053,00**		**210.000.000,00**	**28.973.053,00**	**238.973.053,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Daerah sebesar Rp238.973.053,00**
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembayaran 5% (100%) kpd CV Amanah Bima Raya atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda	9.877.350,00			9.877.350,00	9.877.350,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Ika Perkasa atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang RT 1 Dusun 1 Desa Bumi Harapan Kec. Witaponda	9.616.500,00			9.616.500,00	9.616.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Fita Bungku Persada atas Pekerjaan Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tanah/Tanggul Desa Lambelu Kec. Bumi Raya	13.355.076,00			13.355.076,00	13.355.076,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Sakita Labua Sejahtera atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Rawan Banjir Desa Lasampi Kecamatan Bumiraya	7.549.900,00		7.549.900,00		7.549.900,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Nurindo Mandiri atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Bahonsuai Kec. Bumiraya	9.815.400,00			9.815.400,00	9.815.400,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Ardi Karya Mandiri atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Pebatae Kecamatan Bumiraya	9.852.350,00			9.852.350,00	9.852.350,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Qianzi atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Pebotoa Kecamatan Bumiraya	9.676.850,00			9.676.850,00	9.676.850,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Sinar Alam atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Abrasi Sungai Desa Atananga	7.386.250,00			7.386.250,00	7.386.250,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Trini Karya Perdana atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Rawan Banjir Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat	9.859.000,00		9.859.000,00		9.859.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Krini Karya Perdana atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Larobenu Kec Bungku Barat	9.567.500,00			9.567.500,00	9.567.500,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Fita Bungku Persada atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Umpanga Kec Bungku Barat	9.570.000,00			9.570.000,00	9.570.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd PT Morowali 57 Construction atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Dusun 3 Desa Bahoea Reko-reko Kec. Bungku Barat	9.579.050,00			9.579.050,00	9.579.050,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Sinar Alam atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Savano Desa Topogaro Kec Bungku Barat	9.830.000,00			9.830.000,00	9.830.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Karya Al Hidayah atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Larobenu Kec. Bungku Barat	7.288.500,00			7.288.500,00	7.288.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV FR Perkasa Raya atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Wosu Kec. Bungku Barat	7.572.500,00			7.572.500,00	7.572.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Karya Al Hidayah atas Pekerjaan Pembangunan Talud Saluran Pembuang Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah	9.960.055,00			9.960.055,00	9.960.055,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Amanah Bima Raya atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah	9.936.200,00			9.936.200,00	9.936.200,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Marmid atas Pekerjaan Rehab Gudang Logistik BPBD	9.866.800,00		9.866.800,00		9.866.800,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Barokah Tri Putra atas Pekerjaan Pembangunan Break Water Desa Bente Kec. Bungku Tengah	131.014.193,00			131.014.193,00	131.014.193,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd PT Rizkiy Airama Group atas Pekerjaan Pagar Kantor BPBD	9.900.000,00			9.900.000,00	9.900.000,00	
		Pembayaran 95% kpd CV Atika Bintang Mulia atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Sakita Kec Bungku Tengah	444.139.106,00			444.139.106,00	444.139.106,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Atika Bintang Mulia atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Sakita Kec Bungku Tengah	23.375.742,00			23.375.742,00	23.375.742,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Kumapa Sakti atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Dusun 3 Desa Bahoruru Kec Bungku Tengah	9.744.987,00			9.744.987,00	9.744.987,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Karya Al Hidayah atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Penahan Banjir RT 4 Desa Bahomoleo Kec Bungku Tengah	9.690.841,00			9.690.841,00	9.690.841,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Morowali Sukses Berkarya atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Rawan Banjir Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah	7.541.350,00		7.541.350,00		7.541.350,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Fonuasingko Mandiri atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul/Talud Penahan Tanah Kantor BPBD	9.944.700,00			9.944.700,00	9.944.700,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Khayfa Assyawal Bersaudara atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah	8.976.450,00			8.976.450,00	8.976.450,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd PT Morowali 57 Construction atas Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman RT 1 Lrg. Ketapang Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah	9.579.200,00			9.579.200,00	9.579.200,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Bilqis Khumaira atas Pekerjaan Pembangunan Talud penahan sungai sangimite kelurahan Lamberea Kec. Bungku Tengah	9.936.500,00			9.936.500,00	9.936.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Bumi Mars atas Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Bahongkurui kelurahan Lamberea Kec. Bungku Tengah	8.548.950,00			8.548.950,00	8.548.950,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Donggala Sentra Sulawesi atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Bahomohoni Kec Bungku Tengah	9.905.450,00			9.905.450,00	9.905.450,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Rezky Anugrah Bersama atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Dusun 3 Desa Matansala Kec. Bungku Tengah	9.890.000,00			9.890.000,00	9.890.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Putra Maleo atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Air Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah	9.525.000,00			9.525.000,00	9.525.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Bumi Mars atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Air RT 2 Desa Bahomoleo Kec. Bungku Tengah	9.729.950,00			9.729.950,00	9.729.950,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Karya Aisyah atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun 1 Sosial Desa Bahomante Kec. Bungku Tengah	9.200.000,00			9.200.000,00	9.200.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Qianzi atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun 5 Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah	9.665.000,00			9.665.000,00	9.665.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Maleo Misi Pintar Utama atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Kelurahan Matano Kec. Bungku Tengah	9.956.250,00			9.956.250,00	9.956.250,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Cahaya Abadi Bersatu atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Samping TPI Kelurahan Matano Kec. Bungku Tengah	9.666.350,00			9.666.350,00	9.666.350,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Maleo Misi Pintar Utama atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Bahoruru Kec. Bungku Tengah	2.424.000,00			2.424.000,00	2.424.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Sinar Alam atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Bahomoahi Kec Bungku Timur	9.655.500,00			9.655.500,00	9.655.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Rezky Anugrah Bersama atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur	9.963.857,00			9.963.857,00	9.963.857,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Movara Jaya atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Rawan Banjir Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi	9.825.000,00		9.825.000,00		9.825.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Bumantara Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Desa Labota Kec Bahodopi	9.313.500,00			9.313.500,00	9.313.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Nevana Gemilang atas Pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Desa Padabaho Kec Bahodopi	9.750.000,00			9.750.000,00	9.750.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Khayfa Assyawal Bersaudara atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Kurisa Desa Fatufia Kec. Bahodopi	9.612.000,00			9.612.000,00	9.612.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Putra Maleo atas Pekerjaan Pembangunan Plat Duicker Desa Labota Kecamatan Bahodopi	9.525.000,00			9.525.000,00	9.525.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Rezky Anugrah Bersama atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir	9.959.500,00			9.959.500,00	9.959.500,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Dwi Tanto Daksa atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Dusun I Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir	9.669.000,00			9.669.000,00	9.669.000,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Nakatama Karya atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Trans II Dusun V Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir	9.652.500,00			9.652.500,00	9.652.500,00	
		Pembayaran 95% kpd CV Bumi Mars atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Desa Bungintende Kec. Bungku Selatan	213.055.050,00			213.055.050,00	213.055.050,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Bumi Mars atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Desa Bungintende Kec. Bungku Selatan	16.388.850,00			16.388.850,00	16.388.850,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Arnida Prima Konstruksi atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai Desa Buton Kec Bungku Selatan	9.600.000,00			9.600.000,00	9.600.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Movara Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Tambahan Tanggul Desa Pulau Tiga Kec. Sombori Kepulauan	19.132.350,00			19.132.350,00	19.132.350,00	
		Pembayaran 5% (100%) kpd CV Amanah Bima Raya atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Pulau Tengah Kec. Sombori Kepulauan	7.896.154,00			7.896.154,00	7.896.154,00	
		Pembayaran 100% kpd CV Mutiara Duta Plan atas Pekerjaan Jasa Pengawasan Jembatan, Plat Duicker, Tanggul, Bronjong, Saluran Pembuang dan Penimbunan Jalan Rawan Banjir Zona 3	82.362.000,00		82.362.000,00		82.362.000,00	
		Pembayaran kpd Toko Atifa Snack atas Belanja Bahan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025 pada BPBD Kab. Morowali	29.950.950,00		29.950.950,00		29.950.950,00	
		Pembayaran kpd Toko Atifa Snack atas Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Respon Cepat Tahun 2025 pada BPBD Kab. Morowali	19.950.000,00		19.950.000,00		19.950.000,00	
		Pembayaran kpd Toko Atifa Snack atas Belanja Bahan Bangunan Konstruksi Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota Tahun 2025 pada BPBD Kab. Morowali	58.190.050,00		58.190.050,00		58.190.050,00	
		Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Tahun 2025 pada BPBD Kab. Morowali	4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	
	Sub Jumlah		**1.490.164.561,00**		**239.295.050,00**	**1.250.869.511,00**	**1.490.164.561,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.490.164.561,00**
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Daerah) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	41.420.000,00		41.420.000,00		41.420.000,00	
		Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.447.000,00		38.447.000,00		38.447.000,00	
	Sub Jumlah		**79.867.000,00**		**79.867.000,00**		**79.867.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp79.867.000,00**
13	Dinas Perhubungan Daerah	Pembayaran 100% Pekerjaan bagi CV.LAKARA BULO untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangnunan Tambatan Perahu Wilayah I Kecamatan Menui Kepulauan	88.737.870,00		88.737.870,00		88.737.870,00	
		Pembayaran Angs.95% bagi CV.PROJECT INTI SULAWESI atas Pembangunan Tambatan Perahu Desa Matano Kec. Sambori	664.579.471,00			664.579.471,00	664.579.471,00	
		Pembayaran Angs.100% bagi jasa Konsultasi Pengawasan Tambatan perahu desa Matano Kec.Sambori	29.725.800,00			29.725.800,00	29.725.800,00	
	Sub Jumlah		**783.043.141,00**		**88.737.870,00**	**694.305.271,00**	**783.043.141,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Dinas Perhubungan Daerah sebesar Rp783.043.141,00**
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Daerah	Pembuatan Master Plan Pulau Koi-Koila	691.590.000,00		691.590.000,00		691.590.000,00	
		Pembayaran LS 100% atas Belanja Bantuan Usaha Percetakan Morowali Print Desa Bahomohoni	149.405.299,00		149.405.299,00		149.405.299,00	
		Belanja spanduk/baliho Kegiatan Tina Tama Kabupaten Morowali Tahun 2025	1.897.500,00		1.897.500,00		1.897.500,00	
		Pembayaran Langsung (LS) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang Pariwisata An. An. ARMIN MOHAMAD ALI, S.Pd. M.Pd. dkk dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Promosi Pemilihan Tina Tama Kab. Morowali Tahun 2025 di Palu	21.127.000,00		21.127.000,00		21.127.000,00	
	Sub Jumlah		**864.019.799,00**		**864.019.799,00**		**864.019.799,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Daerah sebesar Rp842.892.799,00 dan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp21.127.000,00**
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembayaran Jasa Perencanaan Pasar Rakyat Zona A kepada CV.GRAHA CIPTA CONSULINDO	498.400.000,00		498.400.000,00		498.400.000,00	

No.	OPD	Uraian	Nilai (Rp)	Utang Belanja Pegawai (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub Jumlah		**498.400.000,00**		**498.400.000,00**		**498.400.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp498.400.000,00**
16	Bagian Hukum	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025	3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00	
	Sub Jumlah		**3.880.000,00**		**3.880.000,00**		**3.880.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp3.880.000,00**
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pembayaran Sisa Honorarium Pengurus Rumah Ibadan dan Guru Keagamaan	18.565.000,00		18.565.000,00		18.565.000,00	
	Sub Jumlah		**18.565.000,00**		**18.565.000,00**		**18.565.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp18.565.000,00**
18	Bagian Umum	Pembayaran Bahan-bahan Lainya kebutuhan Rujab Bupati	111.678.000,00		111.678.000,00		111.678.000,00	
	Sub Jumlah		**111.678.000,00**		**111.678.000,00**		**111.678.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Bagian Umum sebesar Rp111.678.000,00**
19	Sekretariat DPRD	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) DPRD Kab. Morowali	18.154.900,00		18.154.900,00		18.154.900,00	
	Sub Jumlah		**18.154.900,00**		**18.154.900,00**		**18.154.900,00**	**Nilai Utang merupakan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp18.154.900,00**
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanga	Pembayaran belanja Lembur	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
	Sub Jumlah		**4.000.000,00**		**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp4.000.000,00**
21	Kecamatan Bahodopi	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota Kegiatan TP-PKK	22.890.000,00		22.890.000,00		22.890.000,00	
		Belanja Perjalan Dinas Biasa	8.756.480,00		8.756.480,00		8.756.480,00	
		Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kebutuhan Kantor Camat Bahodopi Tahun 2025	26.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota kebutuhan kantor camat Bahodopi Tahun 2025	4.620.000,00		4.620.000,00		4.620.000,00	
		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Kebutuhan Kantor Camat Bahodopi Tahun 2025	17.880.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00	
		Pembayaran Honor BMD Bulan Juli sampai Desember Tahun 2025	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	
	Sub Jumlah		**84.896.480,00**		**84.896.480,00**		**84.896.480,00**	**Nilai Utang merupakan Utang kepada Kecamatan Bahodopi sebesar Rp34.046.480,00 dan Utang Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima sebesar Rp50.850.000,00**
	Jumlah		**23.303.291.955,65**	**3.022.852.318,00**	**16.542.238.618,20**	**3.738.201.019,45**	**23.303.291.955,65**	